

■ Urgensi



*Menjadi* **Guru**  
**Nahdliyin**  
**Marhaenis**  
*di* **VUCA dan Society 5.0**

Ideologi, Kebangsaan, Transformasi,  
dan Inovasi Pendidikan



Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

■ Urgensi

*Menjadi* **Guru**  
**Nahdliyin**  
**Marhaenis**  
 **VUCA dan Society 5.0**

---

Ideologi, Kebangsaan, Transformasi,  
dan Inovasi Pendidikan



---

**URGENSI MENJADI GURU NAHDLIYIN MARHAENIS  
DI VUCA DAN SOCIETY 5.0**

Ideologi, Kebangsaan, Transformasi, dan Inovasi Pendidikan

---

Penulis:

Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Insight Pustaka Nusa Utama**

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: [insightpustaka@gmail.com](mailto:insightpustaka@gmail.com)

Web: [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Agustus 2025

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

**ISBN: 978-634-96264-3-9**

xii + 316 hlm ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025

# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga buku ini dapat disusun dengan penuh perenungan, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab keilmuan. Buku ini lahir dari pergulatan pemikiran yang panjang tentang posisi dan peran strategis guru dalam konteks kekinian—sebuah zaman yang ditandai dengan disrupsi, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA), sekaligus peluang besar dalam konstruksi peradaban baru melalui Society 5.0.

“**Menjadi Guru Nahdliyin-Marhaenis**” bukan sekadar istilah ganda yang romantis atau simbolik. Ia adalah identitas ganda yang saling menguatkan. Seorang *guru Nahdliyin* adalah penjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara, penanam nilai Aswaja yang penuh rahmah, tawassuth, tawazun, dan tasamuh. Sedangkan *guru Marhaenis* adalah pendidik yang berpihak pada kaum kecil, pembela keadilan sosial, dan pelaku pendidikan pembebasan sebagaimana diamanatkan oleh Bung Karno. Keduanya, jika berpadu dalam satu jiwa pendidik, akan membentuk sosok transformasional yang tidak hanya mengajar, tetapi juga **mencerahkan, membebaskan, dan membangun bangsa dari akar rumput**.

Buku ini disusun sebagai respons terhadap tiga krisis mendasar dalam pendidikan kita hari ini: krisis ideologis, krisis kebangsaan, dan krisis transformasi guru dalam menghadapi era digital yang sarat artificial intelligence namun kerap kehilangan arah moral. Guru—yang seharusnya menjadi *benteng peradaban*—justru sering kali terjebak dalam rutinitas administratif, tuntutan kurikulum, dan tekanan performa, hingga kehilangan kedalaman makna dan arah perjuangannya.

Di tengah arus globalisasi yang kerap menyingkirkan nilai lokal dan spiritual, di tengah



gelombang teknologi yang menggantikan interaksi manusia dengan mesin, buku ini mengajak kita untuk **kembali ke akar**, menyatu dengan tanah ideologi bangsa, namun **melompat ke masa depan** dengan teknologi yang bermakna dan nilai-nilai yang membebaskan.

Melalui lima bagian besar dan lima belas bab yang tersusun dalam buku ini, pembaca akan diajak menyusuri:

1. Jejak ideologis dan historis guru Nahdliyin-Marhaenis,
2. Praktik kebangsaan dan karakter Pancasila dalam dunia pendidikan,
3. Transformasi guru di tengah VUCA dan Society 5.0,
4. Strategi implementatif dan praktik baik dari sekolah hingga komunitas,
5. Serta refleksi mendalam dan roadmap menuju pendidikan 2045 yang inklusif, spiritual, dan transformatif.

Buku ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk **direnungkan**, **diperbincangkan**, dan **dijalankan** dalam tindakan nyata. Ia ditujukan bagi guru, kepala sekolah, pengambil kebijakan, aktivis pendidikan, LPTK, dan siapa pun yang percaya bahwa masa depan bangsa terletak di ruang kelas, dan masa depan ruang kelas terletak di tangan guru yang tercerahkan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi inspirasi, sumber rujukan, dan mitra diskusi selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi lentera kecil bagi perubahan besar dalam dunia pendidikan kita.

**Bogor, Juni 2025**

Hormat saya,

**Dr. Andi Hermawan, SE., Ak., S.Si., M.Pd**

(Penulis)

# Prolog

## “Mengapa Guru Harus Nahdliyin dan Marhaenis Sekaligus?”

Menjadi guru di zaman yang sarat dengan gejolak ideologi, penetrasi teknologi, dan fragmentasi sosial membutuhkan lebih dari sekadar profesionalisme pedagogik. Di tengah kecenderungan pendidikan yang semakin mekanistik dan berbasis capaian administratif, dibutuhkan figur guru yang mampu menjadi *penjaga nilai, penggerak perubahan, sekaligus penyambung lidah rakyat*. Dalam konteks Indonesia, dua arus besar pemikiran—Nahdliyin dan Marhaenis—menawarkan fondasi ideologis dan praksis yang saling melengkapi. Seorang guru Nahdliyin-Marhaenis adalah sosok yang membawa kearifan tradisi Islam Nusantara, sekaligus jiwa kerakyatan yang berpihak pada kaum tertindas. Dalam satu tubuh, ia mewakili spirit pesantren dan semangat pembebasan ala rakyat kecil.

Nahdliyin, dalam hal ini, bukan sekadar afiliasi ormas keagamaan, melainkan cara pandang terhadap kehidupan: moderat, inklusif, dan bertumpu pada tradisi. Sementara Marhaenisme, sebagaimana digagas oleh Bung Karno, adalah bentuk ideologi kerakyatan yang berlandaskan pada kesadaran historis bahwa pendidikan tidak boleh memisahkan diri dari realitas sosial. Maka, guru yang hanya pandai mengajar namun buta terhadap ketidakadilan sosial akan kehilangan relevansi sosialnya. Begitu juga guru yang aktif dalam gerakan sosial, namun tercerabut dari akar kebudayaan dan spiritualitas, rentan terjebak dalam radikalisme atau politik praktis yang sempit. Keduanya harus menyatu dalam narasi pendidikan yang memerdekakan dan mencerahkan.

Urgensi untuk melahirkan dan memperkuat guru-guru Nahdliyin-Marhaenis tidak bisa ditunda. Di tengah ancaman krisis identitas kebangsaan, penetrasi ideologi transnasional, serta disrupsi global



yang menyingkirkan nilai lokal, guru yang berpijak pada nilai-nilai Islam Nusantara dan Pancasila adalah benteng terakhir bangsa. Mereka tidak hanya mengajarkan matematika, sains, atau bahasa, tetapi juga nilai, etika, dan kebangsaan. Lebih dari itu, mereka mewujudkan nilai-nilai Aswaja dan Marhaenisme dalam tindakan harian: memanusiakan murid, menyuarkan ketidakadilan, dan membela keberagaman.

Buku ini disusun sebagai respons terhadap kegelisahan itu. Ia bukan sekadar rangkaian teori atau nostalgia ideologi, melainkan refleksi panjang atas kebutuhan masa depan pendidikan Indonesia. Dengan mengangkat posisi guru sebagai aktor ideologis dan transformatif, buku ini ingin menegaskan bahwa tantangan VUCA dan Society 5.0 tidak bisa dihadapi dengan kekosongan nilai. Justru sebaliknya, masa depan harus dibangun dengan meneguhkan guru sebagai subjek ideologis yang berdaya, berkarakter, dan berpihak.

### **Makna Guru sebagai “Benteng Peradaban” di Era Disrupsi**

Di tengah arus besar modernitas dan teknologi, guru mengalami pergeseran peran yang tidak selalu menguntungkan. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan hanya satu dari sekian banyak referensi dalam ekosistem informasi yang didominasi kecerdasan buatan, media sosial, dan algoritma digital. Dalam kondisi ini, jika guru hanya mengandalkan konten dan metodologi tanpa kejelasan posisi nilai, maka pendidikan menjadi kosong secara moral. Di sinilah pentingnya guru sebagai “benteng peradaban”, yang bukan hanya mengajarkan sains dan teknologi, tetapi menjaga integritas, kemanusiaan, dan arah moral generasi bangsa.

Dalam istilah “benteng peradaban”, tersirat makna bahwa guru adalah pertahanan terakhir terhadap runtuhnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Ketika keluarga mulai kehilangan arah, media menjadi ruang kecauan, dan negara sibuk dengan perdebatan politik, maka ruang kelaslah yang masih memiliki peluang untuk memulihkan akal sehat, nurani, dan karakter anak bangsa. Seorang guru Nahdliyin-Marhaenis berada di posisi strategis ini. Ia bukan hanya pendidik dalam pengertian formal, tetapi juga

penjaga nilai-nilai universal yang bersumber dari agama, budaya, dan sejarah perjuangan rakyat.

Namun, menjadi benteng bukan berarti stagnan atau kaku. Guru justru harus lentur secara metodologis dan kuat secara nilai. Ia harus paham teknologi, tetapi tidak tunduk padanya. Ia harus menguasai kurikulum, tetapi tidak larut dalam birokrasi. Ia harus mengenal dunia digital, tetapi tetap berdiri kokoh pada prinsip dan idealisme. Di sinilah letak tantangan terbesar guru hari ini—memadukan kompetensi profesional dengan keteguhan ideologis. Dan hanya mereka yang memiliki akar kuat dalam nilai Aswaja dan Marhaenisme yang mampu menjawab tantangan ini secara utuh.

Dalam semangat itu, guru harus dilihat bukan sekadar pelaksana kurikulum atau mitra program pemerintah, tetapi sebagai penjaga moral kolektif masyarakat. Ia memegang posisi yang sangat strategis dalam menjaga arah bangsa, terutama saat ruang-ruang publik dipenuhi oleh kegaduhan, intoleransi, dan kontestasi narasi. Ketika generasi muda dihantui alienasi akibat teknologi yang dehumanistik, maka guru-lah yang diharapkan menanamkan kembali makna kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan. Dengan menjadi benteng peradaban, guru Nahdliyin-Marhaenis bukan hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga merintis masa depan.

### **Persentuhan Aswaja dan Marhaenisme**

Jika ditilik dari akar pemikirannya, Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah) dan Marhaenisme memiliki orientasi filosofis yang saling melengkapi. Aswaja mengajarkan jalan tengah dalam berpikir, beragama, dan bertindak; ia menolak ekstremisme, membenci fanatisme buta, dan senantiasa mendorong umat untuk bersikap adil, toleran, serta menjaga harmoni sosial. Aswaja juga meletakkan pentingnya ilmu, adab, dan hikmah dalam membentuk pribadi muslim yang seimbang antara dunia dan akhirat. Di sisi lain, Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno merupakan bentuk filsafat praksis—ia berpijak pada pembelaan terhadap rakyat kecil, kesadaran kelas,

dan pentingnya emansipasi melalui pendidikan, kerja, serta keberanian ideologis.

Aswaja dan Marhaenisme memang lahir dari latar belakang yang berbeda—satu dari tradisi keilmuan Islam klasik yang kontekstual, satunya lagi dari pengalaman kolonialisme dan eksploitasi kapitalisme. Namun keduanya memiliki muara nilai yang sama: pembebasan manusia dari keterpurukan—baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. Guru yang berpijak pada nilai Aswaja akan mengajar dengan penuh kasih dan rahmat, menghindari kekerasan simbolik maupun fisik, serta menanamkan nilai kebaikan secara holistik. Sementara guru yang berjiwa Marhaenis akan menjadikan kelas sebagai ruang dialektika kritis, membangun kesadaran sosial, serta menyuarakan keadilan dan solidaritas antarmanusia.

Dalam praktik pendidikan, kedua kutub ini bisa bertemu dalam satu tubuh seorang guru yang sadar sejarah, kuat spiritualitasnya, dan teguh komitmen sosialnya. Ia mampu menyampaikan ilmu dengan kasih, tetapi juga menyisipkan keberanian moral dan semangat perjuangan dalam setiap pelajaran. Ia membaca Al-Ghazali, namun juga mengutip Soekarno. Ia mengenang KH. Hasyim Asy'ari, tapi juga menyuarakan semangat Revolusi Mental. Ia tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga melatih keberanian bertanya. Ia tidak sekadar menyalurkan kompetensi, tapi juga membangun kesadaran kolektif untuk hidup dalam keadilan.

Persentuhan antara Aswaja dan Marhaenisme di dalam diri seorang guru bukanlah bentuk sinkretisme nilai yang artifisial, tetapi wujud integrasi dua kekuatan dasar pendidikan Indonesia: spiritualitas yang mencerahkan dan ideologi yang membebaskan. Ketika keduanya hadir secara simultan, maka lahirlah sosok guru yang tidak hanya patuh pada kurikulum, tapi juga merancang masa depan; tidak hanya melaksanakan administrasi, tapi juga membangun akal sehat publik; tidak hanya bertugas sebagai pelaksana, tapi juga sebagai *penafsir realitas sosial*. Inilah guru Nahdliyin-Marhaenis—manusia pembelajar, penjaga nilai, dan perintis peradaban.

## Reflektif-Filosofis-Strategis

Buku ini disusun dengan metodologi yang menggabungkan pendekatan reflektif, filosofis, dan strategis. Pendekatan **reflektif** digunakan untuk menggali ulang peran guru dari sudut pandang pengalaman sosial, keagamaan, dan praksis sejarah bangsa. Penulis tidak memosisikan guru sebagai objek kebijakan semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki agensi—yang mampu menentukan arah, membentuk nilai, dan menghidupkan kembali semangat kebangsaan dari ruang kelas yang kecil. Pendekatan reflektif ini juga menjadi ruang kontemplasi terhadap tantangan nyata guru: mulai dari tekanan administratif, birokrasi sekolah, krisis moral, hingga distorsi peran akibat derasnya arus digitalisasi.

Secara **filosofis**, buku ini mencoba membangun jembatan pemikiran antara berbagai aliran yang sering kali dianggap tidak kompatibel. Aswaja yang lahir dari kesalehan tradisional, dan Marhaenisme yang terbit dari kesadaran struktural, dipertemukan dalam narasi pendidikan. Kedua aliran ini ditafsirkan ulang melalui lensa kontemporer, agar nilai-nilainya tetap relevan di tengah tantangan VUCA dan Society 5.0. Penulis menggunakan kerangka pemikiran dari KH. Hasyim Asy'ari, Bung Karno, Gus Dur, hingga Paulo Freire, untuk membangun argumentasi bahwa guru bukan hanya fasilitator pembelajaran, tapi juga aktor ideologis dan etis dalam sistem sosial.

Sementara itu, pendekatan **strategis** digunakan untuk menyusun bab demi bab yang bukan hanya teoritis, tetapi juga dapat ditransformasikan ke dalam praktik pendidikan di lapangan. Setiap bagian buku diakhiri dengan implikasi nyata—bagaimana nilai-nilai Nahdliyyin-Marhaenis dapat ditanamkan dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, pelatihan guru, kurikulum merdeka, hingga advokasi kebijakan. Buku ini tidak hanya menguraikan gagasan besar, tapi juga memetakan jalan: dari nilai menuju aksi. Inilah sebabnya, buku ini dapat digunakan oleh guru di ruang kelas, kepala sekolah di ruang kebijakan, hingga akademisi di ruang pengkajian.

Dengan perpaduan refleksi, filsafat, dan strategi inilah, buku ini hadir bukan hanya sebagai wacana, tapi juga sebagai gerakan. Ia mengajak

pembaca untuk tidak berhenti di ranah ide, melainkan turun ke ruang praktik. Guru Nahdliyin-Marhaenis yang dibayangkan dalam buku ini bukan sosok ideal abstrak, tetapi manusia nyata yang bekerja dalam keterbatasan, namun memiliki idealisme kuat dan keberanian untuk terus menjadi cahaya. Di tengah gelapnya zaman, semoga buku ini menjadi lentera kecil yang menuntun langkah-langkah perubahan pendidikan ke arah yang lebih adil, beradab, dan mencerahkan.

# Daftar Isi

Kata Pengantar ..... iii  
Prolog ..... v

## Bagian 1

LANDASAN IDEOLOGIS DAN HISTORIS GURU  
NAHDLIYIN-MARHAENIS ..... 1  
    Membedah Identitas Guru Nahdliyin-Marhaenis..... 3  
    Filsafat Pendidikan Nahdliyin dan Marhaen ..... 21  
    Sejarah Kebangkitan Kaum Marhaen dan Nahdliyin ..... 35

## Bagian 2

GURU, KEBANGSAAN, DAN KARAKTER PANCASILA..... 49  
    Guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai Penjaga Bangsa ..... 51  
    Moderasi, Multikulturalisme, dan Peran Guru..... 71

## Bagian 3

TRANSFORMASI GURU DI ERA VUCA  
DAN SOCIETY 5.0 ..... 95  
    Menyikapi Dunia yang VUCA.....97  
    Society 5.0 dan Lompatan  
    Inovasi Pendidikan ..... 115  
    Literasi, Digitalisasi, dan Pembebasan ..... 133



## Bagian 4

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| STRATEGI IMPLEMENTATIF DAN PRAKTIK BAIK ..... | 167 |
| Model Pedagogi Nahdliyin-Marhaenis .....      | 169 |
| Kepemimpinan Guru dalam Komunitas .....       | 187 |
| Studi Kasus dan Praktik Baik .....            | 199 |

## Bagian 5

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| REFLEKSI, REKOMENDASI, DAN VISI MASA DEPAN .....       | 219     |
| Jalan Sunyi Guru di Tengah Kekacauan Zaman .....       | 221     |
| Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah dan LPTK .....   | 230     |
| Roadmap Guru Nahdliyin-Marhaenis 2045 .....            | 257     |
| Penutup: Kembali ke Akar, Melompat ke Masa Depan ..... | 283     |
| <br>Glosarium .....                                    | <br>307 |
| Daftar Pustaka .....                                   | 313     |
| Biografi Penulis .....                                 | 315     |

# Bagian 1

LANDASAN IDEOLOGIS  
DAN HISTORIS GURU  
NAHDLIYIN-MARHAENIS





– Dr. Andi Hermawan, M.Pd

## Membedah Identitas Guru Nahdliyin–Marhaenis

Identitas seorang guru sejatinya bukan hanya melekat pada status sosial atau jabatan fungsional dalam sistem pendidikan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan cerminan dari pandangan hidup, nilai-nilai spiritual, ideologis, serta komitmen kebangsaan yang dihayati dan dijalani dalam keseharian. Guru bukan hanya “orang yang mengajar,” tetapi adalah pribadi yang hadir dengan misi, membawa warisan nilai, dan mewakili suara zaman. Dalam konteks Indonesia yang sarat dengan keragaman sosial, dinamika sejarah, dan kompleksitas ideologis, guru ideal adalah mereka yang mampu merawat akar tradisi sekaligus menjadi penggerak transformasi. Di sinilah pentingnya membedah secara jernih identitas seorang guru yang berpijak pada nilai Nahdliyin dan Marhaenis.

Identitas Nahdliyin bukan sekadar atribut keormasan atau pilihan afiliasi keagamaan, melainkan representasi dari laku spiritual yang moderat, toleran, serta berakar kuat dalam kultur Islam Nusantara. Di dalamnya terkandung penghormatan terhadap ulama, penghargaan pada ilmu, serta penerimaan terhadap kearifan lokal yang membentuk jati diri bangsa. Sementara identitas Marhaenis adalah representasi dari gagasan progresif tentang keadilan sosial, kesetaraan hak, pembelaan terhadap kaum kecil, serta keberpihakan ideologis pada rakyat sebagai subjek pembangunan. Jika Nahdliyin berakar pada nilai-nilai langit yang membumi, maka Marhaenis hadir dari pengalaman bumi yang mengakar.

Ketika kedua identitas itu bertemu dalam sosok seorang guru, maka lahirlah figur pendidik yang utuh: religius dalam spiritualitasnya, humanis dalam praksisnya, serta revolusioner dalam keberpihakannya. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak hanya berperan sebagai instruktur pembelajaran, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan pembentuk arah kebudayaan bangsa. Ia hadir sebagai pewaris ilmu dan nilai dari para ulama, sekaligus penerus semangat pembebasan dari para pendiri bangsa. Dalam tubuhnya, melekat tradisi pesantren dan percikan Revolusi Nasional.

Era VUCA dan Society 5.0 menuntut hadirnya sosok guru yang lebih dari sekadar kompeten secara teknis. Guru dituntut mampu membimbing

murid-muridnya menyikapi dunia yang serba cepat, kompleks, dan tak pasti—sebuah dunia yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan teori, tetapi membutuhkan keteguhan nilai. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki pondasi yang memungkinkan dirinya untuk tetap kokoh di tengah pusaran perubahan. Ia memiliki kemampuan reflektif dan spiritualitas yang membimbingnya dalam bertindak; ia juga memiliki kesadaran sosial yang membuatnya tidak buta terhadap ketimpangan dan ketidakadilan.

Bab ini disusun untuk menghadirkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik, orientasi nilai, dan posisi strategis seorang guru yang beridentitas Nahdliyin-Marhaenis. Membedah identitas ini tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang inklusivitas pendidikan, tetapi justru untuk mempertegas posisi ideologis dan spiritual yang mampu memperkaya praktik pendidikan nasional. Dalam bab ini, kita akan menelusuri akar nilai yang menjadi dasar orientasi guru NU melalui pemahaman terhadap Tradisi Aswaja. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi Marhaenisme sebagai gagasan pembebasan yang membumi.

Selain itu, pembahasan juga akan mengungkap integrasi antara nilai religius, kultural, dan sosialisme Pancasila—sebagai manifestasi praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi ini menjadi penting karena identitas seorang guru tidak hanya diukur dari pengetahuan yang ia miliki, melainkan dari nilai-nilai yang ia hayati dan refleksikan dalam praktik keseharian. Dalam konteks pendidikan yang masih rentan terhadap penetrasi ideologi ekstrem dan komersialisasi ilmu pengetahuan, identitas guru Nahdliyin-Marhaenis menawarkan jalan tengah yang membebaskan dan membumikan.

Lebih dari itu, bab ini juga akan menutup dengan refleksi tentang pendidikan sebagai jalan iman, amal, dan pembebasan. Pendidikan tidak boleh semata-mata menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai sarana pembentukan manusia utuh: yang sadar Tuhan, sadar sejarah, dan sadar tanggung jawab sosial. Guru yang menyadari peran tersebut tidak akan mudah goyah oleh perubahan kurikulum, tekanan performa, atau jebakan teknologi, karena

ia memahami bahwa mendidik adalah bentuk tertinggi dari jihad dan pengabdian.

Dengan membedah identitas ini, diharapkan pembaca—baik guru, akademisi, maupun pemangku kebijakan—dapat memahami bahwa menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan ideologis dan kultural yang sarat makna. Guru adalah penjaga masa depan. Dan masa depan yang kita cita-citakan membutuhkan guru yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sadar nilai, sadar sejarah, dan siap menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang.

### **Tradisi Aswaja dalam Kehidupan Guru NU**

Tradisi Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah) dalam konteks Nahdlatul Ulama bukan sekadar doktrin teologis, tetapi merupakan cara berpikir, bersikap, dan berkehidupan yang menyeimbangkan antara teks dan realitas, antara akidah dan adab, antara syariat dan budaya lokal. Dalam konteks pendidikan, tradisi ini menjadi pondasi penting bagi guru-guru NU dalam menjalankan tugas keilmuannya, membentuk relasi kemanusiaan yang moderat, serta memelihara harmoni sosial dalam keberagaman. Aswaja bukan hanya menciptakan kehati-hatian dalam berfatwa, tetapi juga menciptakan kebijaksanaan dalam mendidik.

Guru yang hidup dalam tradisi Aswaja biasanya memiliki relasi spiritual yang kuat dengan pesantren, ulama, dan kitab kuning yang menekankan akhlak dan adab sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu. Nilai-nilai seperti *ta'dzim* (penghormatan), *khidmat* (pengabdian), dan *tawadhu'* (rendah hati) menjadi napas utama dalam praktik pedagogik mereka. Hubungan antara guru dan murid tidak semata transaksional sebagaimana relasi institusional modern, tetapi bersifat *tarbawi* (mendidik) dan *sulukiyah* (membimbing secara rohani). Dalam sistem nilai ini, seorang guru adalah sekaligus mursyid, pembimbing jalan hidup.

Aswaja juga menanamkan pentingnya *wasathiyyah*—sikap moderat yang menjauhi ekstremitas berpikir dan bertindak. Dalam kehidupan seorang guru NU, sikap ini sangat relevan terutama dalam menghadapi

kecenderungan polarisasi pandangan keagamaan dan sosial yang mengancam kohesi bangsa. Guru dengan pemahaman Aswaja tidak mudah terprovokasi oleh narasi intoleransi atau permusuhan berbasis ideologi sempit. Sebaliknya, ia menjadi juru damai dan penyeimbang dalam konflik, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ia tidak mengajar dengan amarah, tetapi dengan hikmah.

Sikap tawassuth (pertengahan), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan) menjadi prinsip pedagogis dalam mendidik murid-murid yang beragam latar belakangnya. Guru NU tidak memaksakan pandangan tunggal, melainkan mengarahkan agar murid mampu menimbang dan berpikir kritis dalam koridor nilai. Ia tidak kaku dalam menyampaikan materi agama, namun tetap menjaga substansi dan maqashid-nya. Ia tidak alergi terhadap modernitas, tetapi memiliki saringan nilai untuk menyerapnya dengan bijaksana. Ini adalah keunggulan Aswaja sebagai paradigma pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam konteks era VUCA dan Society 5.0, di mana perubahan berlangsung begitu cepat dan nilai-nilai globalisasi sering kali mengaburkan jati diri, Aswaja hadir sebagai kekuatan kultural dan spiritual yang menjaga guru tetap berpijak. Ia tidak mudah terseret arus teknologi yang mengabaikan nilai, atau standar performa yang mengerdilkan hakikat pendidikan. Guru yang hidup dalam nilai Aswaja akan tetap menjadikan pendidikan sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar profesi. Ia meyakini bahwa mendidik adalah bagian dari *ibadah*, dan setiap kata yang diucapkan akan bermuara pada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Lebih jauh lagi, guru NU yang menginternalisasi nilai Aswaja akan menjadikan sekolah sebagai ruang dakwah, bukan dalam pengertian verbal dan simbolik semata, tetapi dakwah dalam bentuk laku keseharian yang mencerahkan. Ia menunjukkan nilai keislaman bukan melalui poster-poster syariat semata, tetapi lewat perilaku yang penuh kesantunan, kesabaran, dan keteladanan. Murid-murid tidak hanya diajarkan “apa itu akhlak,” tetapi menyaksikan bagaimana akhlak itu hidup dalam keseharian sang guru. Inilah bentuk dakwah kultural yang khas dalam tradisi Aswaja.

Salah satu ciri khas guru NU yang ber-Aswaja adalah kesanggupan menjaga harmoni dalam perbedaan. Ia sadar bahwa Indonesia bukan negara homogen, dan bahwa sekolah bukan tempat untuk penyeragaman keyakinan. Aswaja mendorongnya untuk menjadi figur yang dapat memfasilitasi perbedaan dengan cara yang konstruktif dan menyejukkan. Ia tidak membawa identitas keagamaannya untuk mendominasi, tetapi untuk menghadirkan rasa aman dan sejuk di ruang kelas. Dengan begitu, pendidikan menjadi jalan menuju peradaban, bukan alat untuk memecah-belah umat.

Keberpihakan Aswaja terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga terlihat dari sejarahnya yang panjang dalam merespons isu sosial. Sejak masa KH. Hasyim Asy'ari hingga Gus Dur, Aswaja tidak pernah memisahkan antara keimanan dan kemanusiaan. Maka tak heran jika guru NU yang menghayati nilai ini cenderung peka terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kekerasan simbolik, atau diskriminasi dalam kelas. Ia memandang profesi guru bukan hanya sebagai jalan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk berjuang bersama rakyat.

Dalam praktiknya, tradisi Aswaja juga mengajarkan *ittiba'* (mengikuti), bukan *taqlid* (ikut membabi buta). Artinya, guru harus kritis, namun tetap dalam bingkai keilmuan dan etika. Ia tidak alergi terhadap perkembangan pemikiran atau metodologi baru, tetapi menyaringnya dengan akal sehat dan nilai luhur. Ia tidak anti-globalisasi, tetapi memiliki kecakapan untuk menempatkan Islam sebagai rahmat dalam ruang global. Guru NU yang berpijak pada Aswaja tidak ketinggalan zaman, tetapi justru mampu menyerap zaman tanpa kehilangan jati diri.

Tradisi ini juga mengakar kuat dalam pola hidup sederhana, semangat *khidmah* (pelayanan), dan keikhlasan dalam mendidik. Guru NU tidak mengejar jabatan, tetapi menghayati profesinya sebagai amanah. Ia tidak mengukur keberhasilan dari jumlah sertifikasi atau akreditasi, tetapi dari seberapa banyak ia menanamkan nilai yang membekas dalam hati murid. Aswaja menjadikan profesi guru sebagai jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar mencari pengakuan duniawi. Dalam

dunia yang semakin pragmatis dan kompetitif, tradisi ini menjadi pelindung dari kekeringan makna.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi guru NU hari ini sangat kompleks. Di satu sisi, mereka harus memenuhi tuntutan kurikulum yang kaku dan berbasis standar, di sisi lain mereka ditantang untuk menjaga nilai-nilai tradisi dalam masyarakat yang semakin liberal dan individualistik. Namun, justru di tengah kondisi ini, nilai-nilai Aswaja menunjukkan relevansinya. Aswaja bukan nostalgia masa lalu, tetapi aset ideologis dan pedagogis yang menawarkan model pendidikan berbasis hikmah, nilai, dan kasih sayang.

Guru NU yang konsisten menjalani tradisi Aswaja juga akan mampu membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan, bukan menekan. Ia tidak mendidik dengan ancaman dan hukuman, melainkan dengan motivasi dan pembimbingan. Ia tidak menciptakan ketakutan, tetapi membangun harapan. Dalam lingkungan seperti itu, anak-anak akan tumbuh sebagai manusia yang merdeka, sadar nilai, dan siap menghadapi perubahan dengan karakter yang kuat. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari semangat *rahmatan lil 'alamin* dalam pendidikan.

Lebih lanjut, guru yang berakar dalam tradisi Aswaja akan memahami bahwa setiap anak adalah titipan, bukan objek kontrol. Ia memosisikan murid sebagai subjek belajar yang unik, dengan karakter, potensi, dan ritme yang berbeda. Ia tidak menciptakan keseragaman, tetapi mengembangkan keberagaman. Ia tidak mengejar hasil, tetapi menumbuhkan proses. Dengan pendekatan ini, guru menjadi fasilitator pertumbuhan, bukan semata pengendali. Dan inilah sejatinya pendidikan berbasis nilai Aswaja: menumbuhkan manusia secara utuh.

Tradisi Aswaja dalam kehidupan guru NU juga memberikan keseimbangan antara orientasi akhirat dan kepentingan dunia. Guru tidak didorong menjadi mesin pencetak nilai, tetapi sebagai penunjuk jalan kebaikan dan keselamatan hidup. Ia menanamkan pentingnya ilmu yang bermanfaat (*'ilmun nafi*), bukan sekadar lulus ujian. Ia menanamkan adab sebelum ilmu, dan akhlak sebelum teknologi. Ia menyadari bahwa

kecerdasan tanpa nilai adalah bencana, dan bahwa keberhasilan tanpa integritas adalah kegagalan.

Oleh karena itu, menghidupkan kembali nilai-nilai Aswaja dalam praktik guru NU adalah kebutuhan mendesak dalam arus pendidikan modern. Tidak cukup hanya dengan label atau slogan, tetapi harus melalui internalisasi nilai dan implementasi nyata. Guru harus menjadi pelaku nilai, bukan hanya pengajar teori. Ia harus menjadi teladan spiritual dan sosial di tengah masyarakat yang penuh kebingungan arah. Dan itu hanya mungkin jika Aswaja menjadi ruh dalam setiap laku dan langkah seorang guru.

Dengan mengakar pada Aswaja, guru NU akan menjadi figur yang tenang dalam menghadapi badai, bijaksana dalam menyikapi perbedaan, dan kokoh dalam membela keadilan. Ia akan tetap berdiri meski sistem berubah, tetap mengajar meski dihipit keterbatasan, dan tetap mendidik meski dihina oleh zaman. Sebab dalam dirinya telah menyatu ilmu dan hikmah, nilai dan perjuangan, doa dan laku. Ia adalah guru sejati yang lahir dari tradisi panjang Aswaja.

### **Marhaenisme: Gagasan Revolusioner yang Membumi**

Marhaenisme bukan sekadar bagian dari lembar sejarah politik bangsa, melainkan suatu gagasan revolusioner yang terus relevan dalam menjawab persoalan pendidikan dan keadilan sosial di Indonesia. Konsep ini berakar dari perjumpaan Bung Karno dengan sosok petani kecil bernama Marhaen di Bandung, yang menggambarkan watak rakyat Indonesia: memiliki alat produksi sendiri, bekerja keras, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan struktural. Dari situlah lahir pemahaman bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal politik, tetapi juga pembebasan dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam konteks pendidikan, Marhaenisme menawarkan pandangan bahwa sekolah harus menjadi alat pembebas rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan atau kepentingan pasar.

Marhaenisme membumikan ideologi dengan berpijak pada kenyataan rakyat kecil. Ia menolak feodalisme dan kapitalisme yang memperlak rakyat, serta menolak kolonialisme yang menggerogoti jiwa bangsa. Bung

Karno dengan jernih menempatkan pendidikan sebagai arena perjuangan untuk menciptakan manusia-manusia merdeka, bukan sekadar tenaga kerja patuh. Dalam ruang kelas, Marhaenisme menuntut agar guru menjadi agen pembebasan, bukan agen penjinakan. Guru harus sadar bahwa tugasnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangkitkan kesadaran kritis dan keberanian moral murid-muridnya.

Dalam jiwa Marhaenisme, pendidikan bukan jalan menuju elitisme, tetapi sarana menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter. Guru yang menginternalisasi nilai ini akan berpihak pada siswa yang termarginalkan, memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Ia tidak silau oleh nilai-nilai akademik semata, tetapi memandang manusia secara utuh. Ia tidak menghakimi murid dari seragam atau nilai rapor, tetapi memahami latar belakang sosial dan perjuangan hidup mereka. Inilah revolusi diam-diam yang dilakukan guru Marhaenis setiap hari di kelas-kelas sederhana.

Marhaenisme juga memandang bahwa pendidikan harus membentuk daya juang, bukan hanya daya hafal. Murid tidak boleh dibesarkan dalam budaya ketundukan, tetapi dilatih untuk menjadi manusia yang sadar, berpikir kritis, dan berani menyuarakan keadilan. Guru berjiwa Marhaenis akan memfasilitasi diskusi tentang ketimpangan sosial, memberi ruang bagi ekspresi murid tentang ketidakadilan yang mereka rasakan, dan tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun itu berisiko. Ia tidak menjadi netral ketika ketidakadilan terjadi. Dalam kamus Marhaenis, netralitas dalam ketimpangan adalah bentuk keterlibatan terhadap penindasan.

Dalam praktiknya, guru Marhaenis menolak pendidikan yang dikomersialisasi. Ia tidak menjadikan murid sebagai pelanggan, tetapi sebagai pejuang. Ia tidak menjadikan kelas sebagai pasar, tetapi sebagai medan pembentukan karakter dan kesadaran. Ia juga menolak sistem pendidikan yang hanya melayani kepentingan ekonomi global dan mengabaikan kepentingan rakyat. Ia akan menuntut agar pendidikan nasional tetap menjunjung tinggi nilai kebangsaan, keberpihakan pada kaum kecil,

dan kemandirian budaya. Pendidikan yang tercerabut dari rakyat, bagi Marhaenis, adalah bentuk kolonialisme baru.

Marhaenisme juga mengajarkan bahwa guru harus memiliki kesadaran politik. Bukan berarti menjadi partisan, tetapi sadar akan struktur kekuasaan, relasi ekonomi, dan dinamika sosial yang membentuk dunia pendidikan. Guru Marhaenis tidak akan diam melihat anggaran pendidikan dikorupsi, atau kebijakan yang menyingkirkan sekolah-sekolah miskin demi proyek citra. Ia akan mengorganisir komunitas, bergabung dalam gerakan sosial, dan menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Ia percaya bahwa perubahan tidak hanya lahir dari sistem, tetapi juga dari kesadaran kolektif yang diperjuangkan bersama.

Guru Marhaenis juga adalah seorang *pendidik rakyat* yang mampu menerjemahkan konsep-konsep besar ke dalam bahasa dan tindakan yang membumi. Ia mengajar dengan metode yang partisipatif, menyemangati murid untuk bertanya dan berpikir mandiri, serta menciptakan ruang kelas yang setara antara guru dan siswa. Ia menolak dominasi dan otoritarianisme dalam pembelajaran. Ia lebih memilih menjadi fasilitator dan teman belajar daripada penguasa ruang kelas. Dalam ruang yang ia kelola, anak-anak belajar tentang nilai, bukan sekadar materi.

Kehadiran Marhaenisme dalam kehidupan guru juga mengubah cara pandangnya terhadap profesi. Ia tidak hanya melihat gaji sebagai imbalan, tetapi memaknai pekerjaannya sebagai perjuangan. Ia menolak menjadi bagian dari sistem yang memperalat guru untuk mengejar angka atau peringkat semata. Ia menuntut agar sistem pendidikan menghormati martabat guru dan menjadikan mereka pengambil keputusan, bukan hanya pelaksana kebijakan. Ia sadar bahwa pendidikan tidak akan pernah netral, dan oleh karena itu ia memilih berpihak: pada keadilan, pada rakyat, pada masa depan yang lebih adil.

Dalam sejarah bangsa ini, banyak tokoh guru yang mempraktikkan semangat Marhaenisme dalam diam. Mereka mengajar di sekolah pelosok tanpa fasilitas, namun tetap menanamkan nasionalisme dan keberanian berpikir. Mereka hidup sederhana, namun menjadi sumber cahaya di

tengah gelapnya ketidakpedulian negara. Mereka adalah guru yang tidak pernah viral, tetapi kehadirannya menjadi penopang moral masyarakat. Mereka adalah warisan tak ternilai yang membuktikan bahwa Marhaenisme bukan utopia, tapi praksis nyata yang telah hidup dalam tubuh guru-guru di berbagai penjuru negeri.

Di era VUCA dan Society 5.0, Marhaenisme menemukan relevansi baru. Ketimpangan digital, ketidakadilan akses pendidikan, dan komersialisasi pembelajaran adalah bentuk baru dari ketertindasan. Guru Marhaenis hadir untuk menjawab tantangan ini, bukan dengan keluhan, tetapi dengan kerja ideologis yang konsisten dan menyentuh akar persoalan. Ia membangun literasi digital yang kritis, bukan sekadar adaptif. Ia memperjuangkan internet untuk semua, bukan hanya untuk sekolah elit. Ia membela murid yang tertinggal, bukan sekadar mengejar murid yang unggul.

Dalam dunia yang kian kompetitif dan individualistik, Marhaenisme mengajarkan kembali pentingnya kolektivitas. Guru Marhaenis bukan aktor tunggal, melainkan bagian dari komunitas pendidik yang saling menguatkan. Ia mendorong kolaborasi, membentuk forum guru kritis, dan menciptakan ruang refleksi untuk terus mengevaluasi peran dirinya. Ia tidak merasa cukup hanya menjadi baik secara personal, tetapi ingin mengubah sistem menjadi lebih adil dan manusiawi. Ia sadar bahwa perubahan sejati tidak datang dari atas, tetapi dari kerja bawah yang konsisten dan bermakna.

Marhaenisme juga mengajarkan tentang kesederhanaan dan keberanian. Guru Marhaenis tidak mengukur sukses dari atribut atau pangkat, tetapi dari seberapa ia mampu menyuarakan nurani. Ia tetap hidup sederhana, namun tegas dalam prinsip. Ia tidak takut berbeda, karena ia tahu keberpihakan pada kebenaran sering kali menuntut kesepian. Ia tidak mencari kenyamanan, tetapi memilih jalan perjuangan. Di sinilah letak kemuliaan guru Marhaenis—pada keberaniannya berdiri di sisi yang benar, meski kadang harus sendiri.

Marhaenisme bukan hanya tentang ideologi Bung Karno, tetapi juga tentang semangat spiritual yang membela yang lemah. Dalam hal ini, guru

Nahdliyin-Marhaenis menjembatani dua kekuatan besar: spiritualitas Islam Nusantara dan ideologi kebangsaan. Ia menjadikan nilai Aswaja sebagai landasan moral, dan Marhaenisme sebagai kerangka aksi sosial. Ia menggabungkan *rahmah* dengan *perlawanan*, *hikmah* dengan *pembebasan*. Kombinasi inilah yang menjadikannya sosok pendidik transformatif.

Jika Aswaja menawarkan kebijaksanaan dan stabilitas, maka Marhaenisme menghadirkan keberanian dan dinamika. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena saling menguatkan. Dalam realitas pendidikan Indonesia, guru tidak hanya membutuhkan ketenangan batin, tetapi juga keberanian ideologis. Guru tidak cukup menjadi teladan moral, tetapi juga harus menjadi agen perubahan. Marhaenisme hadir untuk melengkapi spiritualitas Aswaja agar guru mampu menjalankan peran gandanya dengan utuh dan bermakna.

Dengan menumbuhkan semangat Marhaenisme dalam kehidupan guru, kita sedang menanamkan harapan baru bagi dunia pendidikan. Kita membangun pendidikan yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial. Kita menciptakan guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan membebaskan. Dan yang paling penting, kita melahirkan generasi yang sadar sejarah, sadar nilai, dan siap membangun Indonesia yang bermartabat.

### **Integrasi Nilai Religius, Kultural, dan Sosialisme Pancasila**

Pendidikan yang ideal dalam konteks Indonesia tidak dapat dibangun di atas satu fondasi nilai tunggal, tetapi harus tumbuh dari integrasi nilai-nilai religius yang transenden, kearifan budaya lokal yang membumi, serta orientasi kebangsaan yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Guru Nahdliyin-Marhaenis memosisikan diri di simpul integrasi tersebut—sebagai figur yang merawat dimensi spiritual, melestarikan tradisi kultural, dan memperjuangkan nilai-nilai sosialisme Pancasila dalam praksis pendidikan sehari-hari. Tiga pilar ini bukan entitas yang saling bertentangan, tetapi jejaring nilai yang jika disinergikan mampu membentuk karakter bangsa yang utuh dan visioner.

Nilai religius dalam hal ini merujuk pada nilai-nilai Islam yang inklusif, moderat, dan penuh rahmah, sebagaimana dianut oleh Aswaja An-Nahdliyah. Islam dipahami bukan sebagai alat ideologisasi, melainkan sebagai sumber hikmah, akhlak, dan spiritualitas yang memuliakan manusia dan alam. Guru yang menghayati nilai ini akan menempatkan agama sebagai inspirasi, bukan intimidasi; sebagai penerang akal, bukan pemadam logika. Pendidikan bernilai religius tidak mengajarkan ketakutan, tetapi menumbuhkan cinta—cinta pada ilmu, sesama, dan Tuhan. Ia membentuk manusia yang sadar batas, bukan terkungkung dogma.

Sementara itu, nilai kultural adalah dimensi penting yang seringkali dilupakan dalam pendidikan modern. Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat—dalam bentuk bahasa, adat, kesenian, dan laku sosial—adalah ruang belajar yang kaya makna. Dalam tradisi pesantren NU, nilai-nilai budaya tidak dihapuskan, melainkan dimaknai ulang sebagai medium dakwah dan pendidikan. Guru Nahdliyin-Marhaenis akan menjadikan wayang, tembang, permainan rakyat, hingga tradisi selamatan sebagai sumber pembelajaran kontekstual yang memperkuat identitas kebangsaan. Ia menolak pendidikan yang tercerabut dari akar budayanya, karena percaya bahwa manusia yang tercerabut dari budaya adalah manusia yang rapuh jiwanya.

Sosialisme Pancasila, di sisi lain, memberikan kerangka ideologis kebangsaan yang menjamin bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat diskriminasi atau komodifikasi. Dalam sila kelima Pancasila—“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”—terkandung semangat besar bahwa setiap anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, atau letak geografis. Guru yang menghayati sosialisme Pancasila tidak akan membiarkan ada murid yang tertinggal hanya karena miskin, tidak memiliki perangkat, atau tidak berbahasa Indonesia dengan fasih. Ia akan memperjuangkan pemerataan, mendobrak ketimpangan, dan melawan segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan.

Integrasi ketiga nilai tersebut—religius, kultural, dan sosialisme Pancasila—melahirkan karakter guru yang tidak hanya cakap dalam mengajar, tetapi juga arif dalam mendidik dan berani dalam memperjuangkan. Guru tidak hanya menjadi instruktur, tetapi juga pemelihara nilai, pelestari budaya, dan pelopor keadilan sosial. Ia hadir sebagai figur yang tidak tergoda oleh nilai-nilai instan, tetapi teguh pada komitmen ideologisnya. Dalam setiap langkahnya, ia menghidupkan nilai-nilai Islam yang santun, budaya yang hidup, dan Pancasila yang membumi.

Di tengah krisis identitas kebangsaan yang melanda generasi muda akibat globalisasi nilai, guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi penopang terakhir yang menjaga agar anak-anak tetap mengenal siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan untuk apa ia belajar. Ia tidak mengajarkan murid menjadi robot berpikir cepat, tetapi manusia reflektif yang peka terhadap penderitaan sosial. Ia tidak membangun kecerdasan yang kompetitif semata, tetapi kecerdasan kolektif yang membangun solidaritas. Ia tidak mengejar ranking, tetapi menghidupkan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa.

Dalam kerangka ini, pelajaran matematika, IPA, IPS, bahkan TIK pun bisa dijadikan wahana penanaman nilai. Guru tidak harus mengkhotbahkan Pancasila, tapi bisa menanamkannya dalam cara menyikapi perbedaan pendapat di kelas, dalam cara mengelola konflik antar siswa, atau dalam cara menilai tugas yang adil. Nilai religius tidak selalu dalam bentuk ceramah agama, tetapi dalam cara guru bersikap jujur, ikhlas, dan mendengarkan murid dengan empati. Nilai kultural pun tidak harus diajarkan di luar jam pelajaran, melainkan bisa hidup dalam cara guru menyapa murid dengan bahasa daerah, mengenalkan kesenian lokal, atau merayakan tradisi sekolah dengan kearifan lokal.

Penting disadari bahwa integrasi nilai ini tidak otomatis terjadi. Ia harus dirancang secara sadar, dikuatkan dalam kurikulum, dan ditopang oleh kesadaran ideologis guru. Guru yang tidak memiliki kerangka nilai akan mudah terombang-ambing oleh tren dan tekanan sistem. Ia bisa menjadi alat penguasa, atau sekadar operator sistem. Tapi guru yang sadar

nilai akan menjadi penggerak sistem, pelurus arah, bahkan pelopor perbaikan. Oleh karena itu, pendidikan nilai harus dimulai dari guru. Ia adalah pusat dari proses transformasi.

Integrasi ini juga menghidupkan kembali makna *pendidikan karakter* yang selama ini sering dikerdilkan menjadi daftar moral yang diajarkan melalui hafalan. Pendidikan karakter yang sejati adalah pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai hidup, yang menghidupkan. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak mengajarkan karakter melalui poster di dinding kelas, tetapi melalui tutur kata, laku hidup, dan keberpihakannya dalam situasi-situasi kritis. Dalam dirinya, nilai-nilai religius, kultural, dan kebangsaan melekat menjadi satu, bukan sebagai tempelan, tetapi sebagai ruh hidup yang terpancar dalam keseharian.

Dalam praktiknya, integrasi ini membutuhkan keberanian. Sebab di tengah sistem pendidikan yang seragam, guru sering tidak diberi ruang untuk menafsirkan kurikulum dengan nilai lokal atau ideologi. Maka guru yang menanamkan nilai religius dalam bentuk Aswaja, atau nilai kultural dalam bentuk seni tradisional, atau nilai keadilan sosial dalam bentuk kritik terhadap ketimpangan pendidikan, sering dianggap menyimpang. Tetapi justru di sinilah keberanian dibutuhkan. Keberanian untuk tetap membumikan nilai meskipun sistem menjauhkan.

Maka dari itu, penting bagi lembaga pendidikan guru (LPTK), pesantren, dan organisasi profesi untuk memperkuat posisi nilai-nilai ini sebagai bagian dari kompetensi inti guru. Pendidikan guru tidak hanya soal pedagogik dan profesionalisme, tetapi juga spiritualitas dan ideologi. Karena bangsa ini tidak hanya butuh guru yang mampu mengajar, tetapi guru yang mampu memimpin nilai. Guru yang tidak hanya lulus seleksi ASN, tetapi lulus dalam ujian zaman. Guru yang tidak hanya mengajar rumus, tetapi juga menanamkan kesadaran.

Dengan menumbuhkan integrasi nilai religius, kultural, dan sosialisme Pancasila, kita sedang membentuk generasi baru guru Indonesia—yang berjiwa Nahdliyin-Marhaenis, yang cinta Tuhan, cinta tradisi, dan cinta keadilan. Guru-guru seperti inilah yang akan menghidupkan kembali ruh

pendidikan nasional yang selama ini tercerabut oleh sistem yang teknokratis dan neoliberal. Mereka akan mengembalikan pendidikan ke pangkuan rakyat, ke pelukan kebudayaan, dan ke dalam pelita spiritualitas bangsa.

Jika generasi muda diajar oleh guru yang berkarakter seperti ini, maka Indonesia tidak akan hanya menjadi negara yang maju secara ekonomi, tetapi juga berdaulat secara ideologi, berbudaya secara lokal, dan beradab secara spiritual. Guru adalah fondasi. Dan fondasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas nilai-nilai yang teruji. Inilah jalan integrasi yang kita tempuh bersama: menghidupkan nilai langit, menyelami akar budaya, dan menyemai keadilan sosial sebagai wajah sejati Pancasila.

### **Pendidikan sebagai Jalan Iman, Amal, dan Pembebasan**

Pendidikan sejati tidak pernah sekadar transmisi pengetahuan. Ia adalah proses memanusiakan manusia melalui jalan iman, amal, dan pembebasan. Dalam pandangan guru Nahdliyin-Marhaenis, pendidikan adalah ibadah sekaligus perjuangan. Iman menjadi dasar keyakinan akan makna hidup, amal menjadi bentuk pengabdian yang nyata, dan pembebasan menjadi tujuan akhir agar manusia terbebas dari kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, dan keterasingan dari jati dirinya. Guru tidak cukup menjadi pengajar mata pelajaran, tetapi harus menjadi penghubung antara spiritualitas, etika sosial, dan misi peradaban.

Jalan iman dalam pendidikan dimulai dari keyakinan bahwa segala ilmu bersumber dari Tuhan, dan bahwa tugas guru adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Pendidikan bukan ruang netral, tetapi ruang sakral, tempat berlangsungnya perjumpaan antara akal, hati, dan ruhani. Guru yang menyadari hal ini tidak akan menyampaikan ilmu dengan angkuh atau otoriter, melainkan dengan rendah hati dan niat ikhlas. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi ilahiah yang harus disapa dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan.

Dalam konteks ini, guru bukan hanya penyampai kurikulum, tetapi pelaku *amal shaleh*. Ia tidak bekerja untuk mendapatkan upah semata, tetapi menjadikan pekerjaannya sebagai jalan pengabdian kepada Allah

dan masyarakat. Mengajar adalah bentuk *jihad fi sabilillah*—perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan melalui ilmu. Ia tidak hitung-hitungan soal jam pelajaran, honorarium, atau fasilitas. Ia menanam ilmu seperti petani menanam padi: dengan sabar, penuh harap, dan dengan keyakinan bahwa setiap tetes keringatnya akan kembali dalam bentuk keberkahan.

Namun pendidikan tidak hanya berhenti pada dimensi vertikal dan amal ritual. Ia harus berlanjut pada dimensi sosial: *pembebasan*. Inilah yang menjadi jembatan antara Nahdliyin dan Marhaenis—antara spiritualitas dan revolusi sosial. Pendidikan yang benar adalah yang membebaskan manusia dari segala bentuk ketergantungan, kebodohan struktural, serta subordinasi budaya. Guru yang sadar akan hal ini tidak akan puas hanya dengan mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi akan terus bertanya: apakah muridku semakin bijaksana? Apakah mereka makin sadar realitas bangsanya? Apakah mereka siap menjadi pelaku perubahan?

Bagi guru Nahdliyin-Marhaenis, pembebasan bukan berarti mengajak murid untuk memberontak tanpa arah. Pembebasan dimaknai sebagai proses menumbuhkan kesadaran kritis, keberanian bertanya, kemampuan membaca realitas, serta keteguhan membela yang benar. Ia membebaskan bukan dengan menghasut, tetapi dengan menyadarkan. Ia tidak mengarahkan murid pada ideologi sempit, tetapi membimbing mereka pada jalan berpikir merdeka dalam koridor nilai dan akhlak. Pembebasan bukan destruksi, tetapi konstruksi peradaban.

Pendidikan yang membebaskan juga mencakup pembebasan dari sistem yang menindas: sistem yang memaksa homogenitas, memuja kompetisi buta, dan melupakan keberagaman. Guru Marhaenis-Nahdliyin sadar bahwa banyak muridnya datang dari keluarga yang terpinggirkan oleh sistem. Mereka membawa luka-luka sosial yang tak tertulis dalam rapor. Maka tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi menyembuhkan. Ia menyapa mereka bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai manusia yang punya cerita, luka, dan harapan. Di sinilah pendidikan menjadi jalan kasih, bukan hanya jalan logika.

Dalam kerangka iman, amal, dan pembebasan, guru menjadi agen transformasi bukan karena gelarnya, tetapi karena pengaruh nilainya. Ia tidak butuh panggung atau sorotan, cukup ruang kelas dan satu murid yang berubah menjadi lebih baik. Ia tidak mengejar pamrih duniawi, karena yakin bahwa setiap ilmu yang ditanam dengan ikhlas akan menjadi sedekah jariyah yang tak terputus. Ia tidak mencari pujian, karena tahu bahwa ridha Allah lebih utama dari segala pengakuan manusia. Dalam kesunyian kelas-kelas sederhana, ia menorehkan sejarah kemanusiaan.

Menggabungkan tiga jalan ini bukan perkara mudah. Banyak guru yang terjebak dalam formalitas sistem, kehilangan ruh spiritualitas, dan mati rasa terhadap ketimpangan sosial. Tapi guru Nahdliyin-Marhaenis menolak untuk dikerdilkan oleh sistem. Ia tetap menjaga nyala imannya dalam setiap pembelajaran, menjadikan pengajaran sebagai amal, dan menjadikan kesadaran sebagai jalan pembebasan. Ia menjadikan setiap mata pelajaran sebagai medium dakwah kebaikan dan keadilan. Bahkan pelajaran matematika pun bisa ditanamkan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati.

Pendidikan sebagai jalan iman, amal, dan pembebasan mengembalikan makna guru ke tempat yang paling mulia. Ia bukan lagi sekadar pelaksana program, tapi penentu arah. Ia bukan hanya administrator kelas, tapi penjaga peradaban. Ia adalah penerus jejak para ulama, para guru bangsa, para pencerah zaman. Dalam dirinya menyatu nilai-nilai langit dan semangat perjuangan bumi. Ia mendidik dengan hati, berpikir dengan nurani, dan bertindak dengan keberpihakan pada mereka yang dilemahkan sistem.

Dalam ajaran Islam, iman dan amal adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula dalam pendidikan, iman yang tidak diwujudkan dalam amal hanya akan menjadi slogan. Sebaliknya, amal yang tanpa iman akan kehilangan arah dan makna. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah penyatu dua hal ini. Ia mengamalkan ilmunya sebagai bentuk ketaatan pada Tuhan, dan menjadikan amalnya sebagai jalan melawan ketidakadilan sosial. Ia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dengan keyakinan bahwa setiap anak adalah titipan Tuhan dan calon pembaharu bangsa.

Guru yang berjalan di jalan iman, amal, dan pembebasan tidak mempersiapkan murid untuk hidup nyaman, tetapi hidup bermakna. Ia menanamkan bahwa hidup bukan sekadar mencari kerja, tetapi memberi manfaat. Ia membangun mental tangguh, jiwa yang siap menanggung beban sejarah, dan hati yang tidak gentar menghadapi tantangan. Ia tidak menjanjikan kesuksesan material, tetapi memberikan pondasi moral dan kesadaran sosial. Di situlah letak keunggulan pendidikan yang sejati.

Dengan jalan ini pula, guru menjadi bagian dari gerakan peradaban. Ia tidak menunggu perubahan, tetapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Ia menolak menjadi korban sistem, dan memilih menjadi pengubah sistem. Ia tidak menanti datangnya kebijakan yang ideal, tapi menciptakan ruang kecil di kelas untuk menanam nilai-nilai besar. Di antara papan tulis, lembar kerja siswa, dan diskusi sederhana, ia mengubah wajah masa depan bangsa sedikit demi sedikit.

Dalam kesimpulan, pendidikan yang dijalankan sebagai jalan iman, amal, dan pembebasan adalah jalan panjang. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menjanjikan perubahan mendalam. Ia bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang penuh keberkahan. Guru yang menapaki jalan ini akan menjumpai tantangan, kesepian, bahkan ketidakpahaman. Namun ia akan terus melangkah, karena tahu bahwa tugasnya adalah menanam, bukan memanen. Dan tugas menanam itu adalah panggilan spiritual, bukan sekadar profesi.

Bagi Indonesia yang sedang mencari arah di tengah krisis nilai, pendidikan berbasis iman, amal, dan pembebasan adalah jalan keluar yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual dan kultural. Guru Nahdliyin-Marhaenis yang menjalani jalan ini akan menjadi cahaya di tengah kegelapan zaman, suara hati di tengah kebisingan ideologi, dan pelita yang memandu anak-anak bangsa menapaki jalan masa depan dengan akal sehat dan hati yang jernih. Inilah jalan guru yang sejati: jalan pengabdian, perjuangan, dan keabadian.

## Filsafat Pendidikan Nahdliyin dan Marhaen

Filsafat pendidikan bukanlah sekadar cabang teori yang lahir di ruang kuliah atau seminar akademik. Ia adalah hasil pergulatan panjang manusia dalam mencari makna mendidik: untuk apa pendidikan dilakukan, bagaimana relasi antara pendidik dan peserta didik dibangun, serta nilai-nilai apa yang dijadikan pondasi dalam proses transformasi manusia. Dalam konteks Indonesia, filsafat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari akar religius dan sosial bangsa. Di sinilah kita menemukan dua arus besar pemikiran yang membentuk wajah pendidikan Indonesia secara historis dan normatif: pemikiran pendidikan Islam tradisional (yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan KH. Hasyim Asy'ari) serta pemikiran pendidikan progresif-emansipatoris yang lahir dari semangat kebangsaan (yang diwakili oleh Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara).

Pendidikan yang berjiwa Nahdliyin dan Marhaenis tidak tumbuh dari ruang kosong. Ia berakar pada nilai-nilai yang telah lama hidup dalam tradisi keilmuan Islam, pesantren, dan pergerakan sosial-politik Indonesia. Guru yang berpijak pada filsafat ini tidak hanya mengajar untuk menyampaikan isi kurikulum, melainkan untuk menanamkan nilai, menumbuhkan karakter, dan membentuk manusia utuh yang bertakwa, merdeka, dan berakal sehat. Di dalam dirinya, terdapat perpaduan antara kesalehan spiritual, kearifan lokal, serta semangat pembebasan sosial. Maka memahami filsafat pendidikan Nahdliyin dan Marhaen adalah upaya untuk merumuskan kembali dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kerja pendidikan yang selama ini seringkali terjebak dalam teknokrasi dan birokrasi.

Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak cukup hanya memahami metode mengajar. Ia perlu menggali dan menghayati nilai-nilai mendasar yang membentuk etos dan praksis pendidikannya. Filsafat menjadi alat reflektif untuk menyadari bahwa setiap pilihan pedagogis yang ia ambil mengandung implikasi ideologis. Ketika ia memilih pendekatan yang membebaskan, ia sedang mengikuti jejak Freire dan Ki Hajar. Ketika ia menekankan adab sebelum ilmu, ia sedang menghidupkan kembali warisan Al-Ghazali.

Ketika ia menolak diskriminasi dalam ruang kelas, ia sedang mengamalkan sila kelima Pancasila. Dan ketika ia menumbuhkan cinta murid kepada ilmu, guru, dan sesama manusia, ia sedang menjalankan prinsip-prinsip Aswaja dalam praksis pendidikan.

Bab ini akan menggali fondasi pemikiran pendidikan dari dua poros utama: dari sisi tradisi Islam klasik yang direpresentasikan oleh tiga tokoh utama—Imam Al-Ghazali sebagai filsuf etika pendidikan Islam, Imam Syafi'i sebagai tokoh mazhab keilmuan dan intelektualisme adab, serta KH. Hasyim Asy'ari sebagai ulama Nusantara yang memadukan pendidikan agama, nasionalisme, dan karakter; dan dari sisi pemikiran pembebasan modern Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara—dua tokoh bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai medan perjuangan kesadaran rakyat dan kemerdekaan sejati manusia. Dari titik pertemuan inilah akan muncul wajah pendidikan yang tidak hanya membentuk kecerdasan kognitif, tetapi juga menanamkan spiritualitas, keberanian, kebangsaan, dan keadilan.

### **Pendidikan Menurut Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan Hasyim Asy'ari**

Pendidikan dalam tradisi Islam klasik bukanlah semata proses transfer pengetahuan, tetapi merupakan perjalanan spiritual menuju penyempurnaan diri manusia sebagai khalifah di bumi. Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan KH. Hasyim Asy'ari telah mewariskan fondasi keilmuan yang tidak hanya menjelaskan hakikat ilmu dan adab, tetapi juga membentuk kerangka etik dan spiritual bagi seorang pendidik dan peserta didik. Dalam pandangan mereka, pendidikan adalah jalan pembersihan jiwa (*tazkiyah al-nafs*), pembentukan akhlak (*akhlaq al-karimah*), dan pencerahan akal (*tafaqquh*). Pendidikan bukan untuk kesombongan intelektual atau akumulasi ijazah, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat.

Imam Al-Ghazali, dalam magnum opus-nya *Ihya' Ulumuddin*, menjelaskan bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang mengantarkan manusia

pada kesadaran akan hakikat hidup. Ia membagi ilmu menjadi dua: fardhu 'ain, yang wajib dipelajari setiap muslim karena berhubungan dengan keselamatan akhirat, dan fardhu kifayah, yang harus ada di tengah masyarakat demi kemaslahatan sosial. Guru, menurut Al-Ghazali, adalah pewaris tugas para nabi (waratsat al-anbiya) yang memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing bukan hanya akal tetapi juga hati murid-muridnya. Oleh sebab itu, dalam paradigma Al-Ghazali, guru tidak cukup menguasai materi, tetapi harus menjadi teladan dalam adab, zuhud, dan keikhlasan.

Imam Syafi'i, ulama besar pendiri mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, juga menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Dalam banyak riwayat, diceritakan bagaimana beliau memuliakan gurunya, Imam Malik, dengan penuh takzim dan kesabaran. Syafi'i meyakini bahwa ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang sombong atau tidak beradab. Ia juga mengajarkan pentingnya konsistensi belajar (*mudzakah*) dan menjaga sanad keilmuan yang otentik. Dari Imam Syafi'i kita belajar bahwa relasi antara guru dan murid bukanlah relasi transaksional, melainkan hubungan suci yang dibingkai oleh saling menghormati dan cinta terhadap ilmu. Pesan beliau menjadi relevan ketika dunia pendidikan modern kini terlalu terfokus pada penilaian kognitif dan nilai ujian, melupakan ruh adab dan kasih sayang.

KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan tokoh besar pendidikan pesantren Nusantara, merupakan jembatan antara pemikiran klasik Islam dan perjuangan kebangsaan. Dalam karyanya *Adabul 'Alim wal Muta'allim*, beliau menekankan pentingnya etika bagi guru dan murid. Bagi Hasyim Asy'ari, guru harus menjadi figur yang ikhlas, sabar, tidak serakah terhadap dunia, dan tulus mencintai ilmu serta muridnya. Murid, sebaliknya, harus memuliakan gurunya, menjaga akhlak, dan menjauhi perilaku yang mencemari keikhlasan belajar. Hasyim Asy'ari juga menyuarakan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari perjuangan nasional—sebuah warisan pemikiran yang membingkai guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pejuang dan penjaga moralitas bangsa.

Pemikiran ketiga tokoh ini sangat relevan di tengah disrupsi nilai akibat globalisasi dan digitalisasi. Di era VUCA dan Society 5.0, ketika manusia mudah kehilangan arah karena informasi yang melimpah namun tanpa hikmah, guru Nahdliyin-Marhaenis perlu kembali ke sumber otentik peradaban Islam. Pendidikan tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai ruhaniah. Guru perlu menjadi pribadi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami tanggung jawab etik dan spiritual yang diwariskan oleh para ulama. Guru adalah lentera zaman, sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, “Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.”

Kembali ke keteladanan Imam Syafi’i, penting bagi guru hari ini untuk menjaga otoritas moral dan intelektual dengan cara membangun konsistensi belajar, membaca, dan mengajar dengan hati. Di tengah masyarakat yang serba instan, figur guru yang sabar, tekun, dan rendah hati akan menjadi oase. Ketika murid melihat guru yang terus belajar, berakhlak santun, dan tidak hanya berteori, tetapi juga mempraktikkan nilai, maka proses pendidikan akan menjadi ladang penanaman nilai yang berkelanjutan.

KH. Hasyim Asy’ari menunjukkan bahwa guru harus menjadi penjaga akhlak dan pemersatu umat. Dalam konteks keindonesiaan hari ini, guru ditantang untuk merawat kebinekaan dan membendung intoleransi. Pesan beliau agar murid dan guru senantiasa menjaga niat dalam belajar dan mengajar menjadi benteng terhadap sekularisasi pendidikan. Pendidikan bukan hanya alat industrialisasi, tetapi bagian dari ibadah kolektif dalam membangun manusia seutuhnya. Dengan demikian, menghidupkan pemikiran para ulama klasik bukanlah romantisme masa lalu, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan.

### **Gagasan Pendidikan Emansipatoris Soekarno dan Ki Hajar**

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Soekarno dan Ki Hajar Dewantara menempati posisi yang sangat strategis sebagai penggagas dan penggerak pendidikan yang berpihak pada rakyat. Keduanya mengusung paradigma

pendidikan yang emansipatoris—pendidikan sebagai jalan pembebasan dari kebodohan, penindasan, dan ketergantungan. Di tengah hegemoni kolonialisme dan dominasi elitisme pendidikan Barat pada awal abad ke-20, pemikiran mereka hadir sebagai kritik sekaligus alternatif yang berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, kemandirian, dan keberpihakan terhadap kaum tertindas. Gagasan mereka tidak lahir di ruang kosong, tetapi dari pengalaman konkret menyaksikan ketidakadilan sosial dan keterpinggiran rakyat kecil.

Bagi Soekarno, pendidikan adalah alat revolusioner untuk membentuk manusia yang merdeka lahir batin. Dalam banyak pidatonya, ia menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menjadi besar hanya dengan teknologi atau kekayaan, tetapi melalui karakter dan kesadaran bangsanya. Pendidikan harus menumbuhkan semangat nasionalisme, keberanian berpikir, dan kemauan berjuang. Dalam *Sarining Islam*, Soekarno menegaskan bahwa ilmu harus berpijak pada tauhid, membebaskan manusia dari keterjajahan sistem, dan berorientasi pada keadilan sosial. Bagi Soekarno, guru bukan sekadar pengajar, tetapi kader ideologis yang menanamkan spirit perjuangan.

Soekarno memandang bahwa pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa kesadaran sosial akan melahirkan manusia yang terasing dari realitas bangsanya. Ia tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi sekadar “bangsa tukang” yang menguasai keterampilan teknis namun kehilangan daya kritis dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, konsep *nation and character building* menjadi fokus utama dalam politik pendidikan Soekarno. Pendidikan seharusnya melahirkan generasi pemimpin rakyat, bukan elit penguasa yang tercerabut dari akar sosialnya. Inilah esensi Marhaenisme dalam pendidikan: berpihak pada rakyat, membela keadilan, dan menciptakan manusia merdeka.

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menawarkan pandangan pendidikan yang lebih kontekstual dan bernuansa kebudayaan. Melalui sembojannya yang terkenal—*Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*—Ki Hajar meletakkan dasar relasional dan

kultural dalam proses mendidik. Pendidikan menurutnya adalah proses memanusiakan manusia secara utuh—dari aspek jasmani, akal, dan batin. Ia menolak pendidikan yang otoriter dan menjauh dari kehidupan rakyat. Maka, Taman Siswa didirikannya sebagai lembaga alternatif yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir, pembentukan karakter, dan penghormatan terhadap kebudayaan lokal.

Ki Hajar juga menolak pendidikan sebagai alat penjajahan. Ia mengkritik sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak pegawai untuk melayani kepentingan Belanda. Dalam konteks ini, ia menempatkan pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pembentukan kepribadian bangsa. “Kita tidak akan menjadi bangsa besar dengan meniru Barat,” tegasnya. Pendidikan harus berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas Nusantara. Itulah sebabnya kurikulum Taman Siswa menyatukan ilmu pengetahuan dengan seni, budaya, dan kebatinan. Guru dalam perspektif Ki Hajar bukan sekadar penyampai informasi, tetapi pembimbing kehidupan.

Keduanya, Soekarno dan Ki Hajar, memiliki titik temu dalam gagasan bahwa pendidikan harus memerdekakan. Merdeka dari ketakutan, dari ketertindasan, dan dari sistem yang mengebiri kreativitas. Merdeka dalam berpikir, bertindak, dan membangun kehidupan bersama. Inilah pendidikan emansipatoris—pendidikan yang membebaskan bukan hanya struktur sosial, tetapi juga struktur kesadaran. Bagi mereka, pendidikan bukan proyek jangka pendek, melainkan gerakan kebudayaan yang menyatu dengan perjuangan politik dan sosial bangsa.

Dalam praktiknya, gagasan ini menuntut guru untuk menjadi pelaku perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana administratif. Guru yang menghidupi semangat Soekarno dan Ki Hajar harus memiliki keberanian berpihak pada yang lemah, ketajaman dalam membaca realitas, serta kreativitas dalam mentransformasikan pembelajaran menjadi alat pemberdayaan. Guru bukan robot kurikulum, tetapi pemantik kesadaran.

Model pendidikan emansipatoris ini sangat relevan di era VUCA dan Society 5.0. Ketika sistem pendidikan global cenderung teknokratis dan berbasis pada data numerik semata, gagasan Soekarno dan Ki Hajar

mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah soal manusia, nilai, dan martabat. Guru harus menjadi penjaga kemanusiaan di tengah gelombang digitalisasi. Teknologi harus diarahkan untuk membebaskan manusia, bukan memperbudaknya dalam logika pasar atau algoritma tanpa nurani.

Pendidikan emansipatoris juga menuntut keberanian dalam mengkritik sistem yang tidak adil. Guru harus menjadi intelektual organik—mereka yang tidak hanya mengerti teori, tetapi juga hidup dalam perjuangan rakyat. Di sinilah posisi Guru Nahdliyin-Marhaenis menemukan makna. Ia bukan hanya guru agama atau guru nasionalisme, tetapi penggabung dua arus besar yang membawa pendidikan kepada cita-cita luhur: kemerdekaan, keadilan, dan peradaban.

### **Relasi Guru–Murid dalam Tradisi Keilmuan Islam Nusantara**

Relasi antara guru dan murid dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara bukanlah sekadar hubungan formal antara pengajar dan pelajar. Ia merupakan sebuah ikatan spiritual, moral, dan kultural yang melampaui batas ruang kelas. Dalam warisan pesantren, guru bukan hanya pemberi ilmu (‘alim), tetapi juga pembentuk adab, penuntun akhlak, dan pembawa cahaya kehidupan. Murid, di sisi lain, bukan sekadar penerima pelajaran, tetapi penempuh jalan ilmu (thâlib al-‘ilm) yang membawa misi keberlanjutan tradisi keilmuan dan keadaban. Relasi ini sarat dengan nilai-nilai Aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah) yang menjunjung tinggi tawassuth, tawazun, dan tasamuh—nilai-nilai yang membuat proses pendidikan menjadi ladang penumbuhan, bukan pemaksaan.

Tradisi keilmuan Islam di Nusantara diwarisi dari ulama-ulama besar yang tidak hanya mendalami kitab-kitab klasik dari Timur Tengah, tetapi juga melakukan proses indigenisasi atau lokalisasi nilai-nilai tersebut agar kontekstual dengan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam pendekatan guru terhadap murid yang sangat menghargai keberagaman karakter, latar sosial, dan perkembangan jiwa anak didik. Dalam sistem pesantren, misalnya, interaksi guru-murid berjalan melalui proses pengabdian (khidmah), bukan transaksional. Murid sering membantu guru

dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk hormat, sekaligus sebagai bagian dari pembelajaran karakter yang tidak tertulis di kitab manapun.

KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Ia menyusun kitab "Adab al-'Alim wa al-Muta'allim" yang menjadi fondasi etika relasi guru-murid. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang murid harus mencintai gurunya, menghormatinya dalam perkataan dan perbuatan, serta menjaga nama baiknya bahkan di luar pengajaran. Sebaliknya, guru harus menjadi teladan moral, bersikap sabar, dan membimbing dengan kelembutan, bukan otoritarianisme. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, melainkan transformasi jiwa dan pembentukan karakter luhur.

Relasi ini sangat jauh berbeda dari model pendidikan modern yang cenderung impersonal dan teknokratis. Dalam sistem sekolah konvensional hari ini, guru lebih banyak menjadi pelaksana kurikulum dan murid menjadi objek evaluasi. Tidak jarang relasi ini terjebak dalam logika target, nilai ujian, dan standar administratif yang kering dari dimensi kemanusiaan. Dalam tradisi Islam Nusantara, murid tidak hanya diukur dari kemampuan akademiknya, tetapi dari ketinggian akhlaknya, kesungguhan mencari ilmu, dan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

Salah satu praktik khas dalam relasi guru-murid di pesantren adalah tradisi ngaji bandongan dan sorogan. Dalam bandongan, guru membaca kitab kuning dengan langgam khas, sementara para santri menyimak dan mencatat. Dalam sorogan, murid membaca teks di hadapan guru dan guru mengoreksi atau menuntun secara langsung. Kedua metode ini menekankan kedekatan personal antara guru dan murid, sekaligus memastikan adanya transfer nilai, bukan hanya isi pelajaran. Bahkan dalam metode sorogan, sang guru tidak hanya memeriksa kebenaran bacaan, tetapi membaca aura keikhlasan, kesabaran, dan keadaban sang murid.

Tradisi keilmuan ini juga menciptakan kesinambungan sanad (mata rantai keilmuan) yang menjadi penanda orisinalitas dan keberkahan ilmu. Seorang guru yang memiliki sanad keilmuan berarti mengajarkan ilmu yang bersambung secara ruhani dan ilmiah kepada Rasulullah. Di sinilah nilai spiritualitas terinternalisasi dalam proses belajar. Guru menjadi

penghubung (wasilah) antara murid dan tradisi agung ilmu-ilmu Islam. Maka, murid yang menghormati gurunya bukan sedang mengkultuskan manusia, tetapi sedang menjaga keberkahan dan keabsahan ilmu yang ia peroleh.

Dalam konteks pendidikan formal di sekolah atau madrasah, nilai-nilai ini sebenarnya masih bisa dihidupkan. Guru bisa menanamkan adab sebagai bagian dari pembelajaran harian, seperti membiasakan salam, mendahulukan etika sebelum materi pelajaran, dan memberikan keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Relasi yang dibangun tidak sekadar formal, melainkan hangat, personal, dan berakar pada nilai kemanusiaan. Di sinilah pendidikan menjadi jalan kasih sayang (rahmah), bukan sekadar kewajiban profesional.

Seorang Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut untuk menghidupkan kembali relasi guru-murid yang berbasis spiritualitas dan nilai kemasyarakatan. Ia bukan hanya menjadi instruktur pelajaran, tetapi juga pembimbing hidup yang memiliki keberpihakan pada murid-murid yang termarginalkan. Guru menjadi tempat bertanya, menumpahkan kegelisahan, sekaligus menjadi teman dalam proses pencarian makna hidup. Relasi semacam ini sangat dibutuhkan di tengah krisis kepercayaan anak muda terhadap sistem pendidikan yang serba kompetitif dan mekanistik.

Pengalaman guru di lapangan menunjukkan bahwa ketika relasi guru dan murid dibangun dengan cinta, kepercayaan, dan ketulusan, maka proses belajar menjadi lebih bermakna. Murid tidak merasa ditekan, tetapi dituntun. Guru tidak merasa harus menguasai, tetapi membimbing. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi ruang dialog yang setara, tempat di mana nilai dan gagasan dipertukarkan dalam semangat saling menghormati. Relasi seperti ini menciptakan keamanan psikologis yang sangat penting dalam perkembangan mental anak.

Relasi guru-murid dalam tradisi Islam Nusantara juga memperlihatkan adanya dimensi intergenerasional yang kuat. Guru seringkali dianggap sebagai orang tua spiritual yang tidak berhenti membimbing meskipun murid telah lulus. Bahkan dalam banyak kisah, alumni pesantren tetap

berkunjung dan meminta doa kepada sang guru ketika hendak menikah, membangun rumah, atau menghadapi persoalan hidup. Ini menunjukkan bahwa relasi ini bukan relasi kontraktual, melainkan relasi ruhaniah yang berkelanjutan.

Dalam era VUCA dan Society 5.0, di mana hubungan sosial menjadi makin cair dan individualistik, relasi guru-murid ala tradisi Islam Nusantara menjadi sangat relevan sebagai penyeimbang. Pendidikan hari ini perlu disuntik kembali dengan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan agar tidak kehilangan arah. Teknologi bisa mempercepat akses informasi, tetapi hanya relasi kemanusiaan yang bisa membentuk karakter. Guru yang mampu membangun relasi semacam ini akan menjadi oase di tengah padang gurun digitalisasi pendidikan.

Bahkan di ruang-ruang daring, guru bisa tetap menanamkan nilai adab dan etika melalui cara berkomunikasi, pemilihan kata, serta sikap empatik. Mengawali kelas dengan doa, menyapa murid dengan nama, dan memberi ruang untuk ekspresi personal adalah beberapa cara untuk menjaga jiwa relasi guru-murid agar tidak hilang ditelan algoritma. Dengan demikian, relasi guru-murid tetap menjadi fondasi peradaban meskipun wadah pembelajarannya berubah.

Relasi ini juga menjadi benteng terhadap masuknya nilai-nilai destruktif ke dalam pendidikan. Ketika murid memiliki ikatan emosional dan spiritual yang kuat dengan gurunya, maka ia lebih sulit terpapar radikalisme, intoleransi, dan kekerasan. Murid yang merasa dihargai dan dicintai cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya. Guru yang dicintai murid bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kepribadiannya, akan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman.

Dalam konteks Marhaenisme, relasi guru-murid semacam ini adalah bentuk konkret pembelaan terhadap yang lemah. Murid dari keluarga miskin, dari daerah terpencil, dari latar belakang budaya minoritas, semuanya mendapat ruang yang setara dan dihargai dalam relasi yang

berkeadaban. Guru menjadi representasi negara yang berpihak, bukan institusi yang menjauh.

Maka, menjadi Guru Nahdliyin-Marhaenis hari ini bukanlah proyek romantik masa lalu, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi. Relasi guru-murid yang hidup, hangat, dan membebaskan harus terus ditumbuhkan di ruang kelas, di pesantren, maupun di ranah digital. Guru yang memahami dan menghidupkan tradisi ini akan menjadi penjaga mata air peradaban, di tengah gurun gersangnya sistem pendidikan yang kehilangan ruh.

### **Pijakan Filosofis Menuju Guru Berdaya di Era Disrupsi**

Dalam pusaran era disrupsi yang ditandai oleh ketidakpastian, percepatan teknologi, dan krisis nilai, guru dituntut tidak sekadar menjadi pelaksana kurikulum, melainkan pemandu transformasi dan penjaga arah kemanusiaan pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan pijakan filosofis yang kokoh, yang dapat menjadi kompas moral dan arah keberpihakan. Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, pijakan itu bersumber dari khazanah pemikiran keislaman yang moderat, spiritual, dan rahmatan lil alamin, sekaligus dari nilai-nilai kebangsaan yang berpihak kepada kaum tertindas dan marjinal. Di tengah dunia yang berubah cepat, guru dengan identitas ini harus berdiri teguh: berpikir dalam, merasakan dalam, dan bertindak nyata.

Filsafat pendidikan bukan sekadar teori tinggi yang terasing dari praktik, tetapi merupakan landasan eksistensial yang menentukan bagaimana guru memandang murid, ilmu, dan perannya dalam masyarakat. Filsafat Islam mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses penyempurnaan jiwa, bukan sekadar pengisian pikiran. Al-Ghazali menyebut ilmu sebagai cahaya, dan guru sebagai penyalur cahaya itu, bukan pemiliknya. Dalam pandangan ini, guru bukanlah birokrat yang mengejar angka, melainkan penjaga nilai yang bekerja dalam kerendahan hati dan rasa tanggung jawab spiritual. Inilah pijakan pertama: pendidikan sebagai ibadah, guru sebagai murobbi (pendidik jiwa).

Pijakan kedua lahir dari tradisi Marhaenisme yang dipelopori Soekarno, yang melihat pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan bukanlah instrumen pelanggeng ketimpangan, tetapi sarana untuk menciptakan manusia merdeka—merdeka berpikir, merdeka merasa, dan merdeka memilih jalan hidupnya. Guru Marhaenis bukan hanya pengajar pelajaran, tetapi juga pembentuk kesadaran kritis, penggerak sosial, dan pengobar semangat perjuangan. Ia hadir untuk membangkitkan murid dari “ketidaksadaran struktural”, membimbing mereka agar tidak hanya tahu, tetapi juga berani memperjuangkan keadilan.

Tradisi pemikiran Nahdliyin dan Marhaenis pada dasarnya bersenyawa dalam nilai-nilai pembebasan dan keberpihakan pada rakyat. KH. Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya akhlak dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan, sementara Soekarno menekankan revolusi mental dan nasionalisme kerakyatan. Keduanya menolak pendidikan yang elitis, menjauh dari rakyat, atau hanya memuja capaian kognitif. Pijakan filosofis ini menjadi dasar penting bagi guru hari ini untuk tidak terseret dalam arus pragmatisme pendidikan yang hanya mengejar skor, akreditasi, atau peringkat.

Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah sosok yang sadar bahwa tugasnya bukan hanya mendidik individu, tetapi membentuk generasi pembaharu. Ia tidak cukup hanya memahami konten pelajaran, tetapi juga harus membaca arah zaman, memahami struktur sosial, dan menguasai strategi perubahan. Dalam kata lain, ia adalah “intellectual organic” yang berpihak kepada rakyat, sebagaimana konsep Gramsci, tetapi dengan dasar iman dan spiritualitas Islam ala pesantren. Ia menjadi penyambung lidah rakyat kecil di ruang-ruang kelas dan penggerak emansipasi sosial di wilayahnya.

Pijakan lain yang tak kalah penting adalah kesadaran historis. Guru yang berdaya harus menyadari dirinya bagian dari mata rantai perjuangan panjang bangsa Indonesia. Dari para ulama pejuang, pahlawan pendidikan, hingga guru-guru desa yang tanpa pamrih mendidik generasi bangsa. Kesadaran sejarah ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa profesi guru bukan karier biasa, melainkan pengabdian ideologis dan spiritual.

Tanpa kesadaran ini, guru mudah terseret dalam komersialisasi pendidikan dan kehilangan esensi pengabdianya.

Dalam praktiknya, pijakan filosofis ini harus terwujud dalam pendekatan pedagogis yang berkarakter. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk iklim belajar yang humanis, inklusif, dan kontekstual. Ia memahami bahwa murid bukan kertas kosong, melainkan pribadi yang unik, penuh potensi, dan sarat konteks sosial. Karena itu, pendekatan pedagogi kritis, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen autentik menjadi alat praksis untuk menghidupkan nilai-nilai pembebasan di kelas.

Era disrupsi juga menuntut guru untuk mengembangkan resilience dan agility—dua karakter yang hanya bisa tumbuh bila guru memiliki nilai yang stabil. Tanpa pijakan filosofis, guru akan mudah goyah oleh kebijakan yang berubah-ubah, teknologi yang cepat usang, atau tekanan administratif yang tak kunjung selesai. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak anti teknologi, tetapi ia bijak memanfaatkannya untuk misi kemanusiaan. Ia menyaring informasi digital dengan nilai-nilai spiritual, bukan menelannya mentah-mentah.

Penguasaan terhadap filsafat pendidikan juga membuat guru mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada peserta didik. Ia berani bersuara, membela sekolah-sekolah di pelosok, dan mengusulkan solusi konkret. Guru dengan pijakan nilai yang kokoh akan bersikap aktif, bukan reaktif; reflektif, bukan sekadar patuh; dan kolaboratif, bukan individualistis. Nilai-nilai ini menjadi akar dari keberdayaan sejati, bukan keberdayaan semu yang hanya tampak dari jumlah sertifikasi atau gelar akademik.

Kemandirian intelektual menjadi bagian integral dari keberdayaan guru. Ia tidak sekadar menunggu pelatihan dari pemerintah, tetapi aktif mencari ilmu, berdiskusi, menulis, dan berbagi praktik baik. Ia sadar bahwa menjadi guru berarti menjadi pembelajar seumur hidup. Pijakan filosofis membuatnya memiliki motivasi intrinsik untuk terus tumbuh dan tidak bergantung pada sistem semata. Ia mampu menjadi “pencerah” di sekolah dan komunitasnya, bukan hanya “pengikut”.

Guru yang berdaya tidak akan takut menghadapi kritik, karena ia sadar bahwa perubahan lahir dari ketidaknyamanan. Ia juga tidak merasa cukup hanya dengan rutinitas, karena hatinya terpaut pada cita-cita besar: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pandangan Islam, ini adalah bentuk jihad fi sabilillah—berjuang di jalan Allah melalui pendidikan. Dalam pandangan Marhaenis, ini adalah revolusi kebudayaan yang membebaskan manusia dari keterbelakangan.

Keteguhan nilai ini juga menjadi bekal menghadapi tekanan moral dan sosial. Di era media sosial yang penuh cacar maki dan polarisasi, guru dengan nilai spiritual dan kebangsaan yang kokoh tidak mudah hanyut. Ia menjadi penjaga kewarasan publik, meneduhkan diskusi, dan mengarahkan energi murid pada kegiatan yang produktif. Pijakannya bukan opini viral, tetapi kearifan yang dibangun dari tradisi panjang keilmuan dan nilai-nilai luhur bangsa.

Kontekstualisasi nilai adalah tantangan utama hari ini. Guru tidak cukup hanya tahu tentang ajaran Hasyim Asy'ari atau pidato Soekarno, tetapi harus mampu menerjemahkannya dalam bentuk tindakan di ruang kelas. Misalnya, menanamkan toleransi dalam diskusi PKN, menyisipkan nilai cinta tanah air dalam pelajaran IPA, atau membangun kepekaan sosial dalam proyek P5. Inilah keberdayaan filosofis yang berujung pada keberdayaan praksis.

Guru juga perlu menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yakni nilai-nilai yang tidak tertulis tetapi terasa dalam sikap guru: ketulusan, empati, ketegasan, dan integritas. Murid belajar lebih banyak dari kepribadian guru ketimbang dari konten pelajaran. Maka, guru yang hidup dari nilai akan menanamkan nilai dengan lebih efektif daripada guru yang hanya menghafalkan nilai.

Sekolah perlu menjadi ruang di mana nilai-nilai ini hidup. Kepemimpinan sekolah harus mendorong guru untuk mendialogkan nilai, bukan hanya menjalankan SOP. Dalam komunitas guru, perlu ada forum refleksi, diskusi filsafat pendidikan, dan berbagi praktik baik yang

menumbuhkan kembali orientasi nilai. Tanpa ini, guru hanya menjadi operator sistem, bukan penggerak perubahan.

Masyarakat pun harus menguatkan posisi guru sebagai pilar nilai. Budaya populer hari ini seringkali menampilkan guru sebagai profesi pasif, kalah pamor dari selebriti atau influencer. Padahal, guru adalah arsitek peradaban. Maka, perlu gerakan budaya yang memuliakan guru, mengangkat narasi-narasi guru pejuang, dan memberi panggung pada kiprah mereka dalam membentuk generasi bangsa.

Akhirnya, keberhasilan guru bukanlah hasil dari pelatihan singkat atau program instan, tetapi buah dari proses panjang pembentukan nilai, refleksi diri, dan perjuangan harian. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah prototipe guru masa depan yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga kuat secara nilai. Dengan pijakan filosofis ini, mereka mampu menavigasi era disrupsi tanpa kehilangan arah, dan justru menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa.

## Sejarah Kebangkitan Kaum Marhaen dan Nahdliyin

Sejarah tidak lahir dari kekosongan, melainkan dibentuk oleh dialektika ide dan tindakan, oleh benturan antara penindasan dan perlawanan, oleh tarikan antara kepentingan elite dan suara rakyat. Dalam konteks Indonesia, kebangkitan kaum Marhaen dan Nahdliyin tidak sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah politik atau sosial keagamaan, tetapi justru menjadi fondasi moral dan praksis dalam membangun bangsa yang berdaulat, berkepribadian, dan berkeadilan. Bab ini berusaha menelusuri akar historis dari kebangkitan dua entitas ideologis yang berakar kuat pada masyarakat bawah: Marhaenisme sebagai gagasan revolusioner Soekarno yang berpihak kepada wong cilik, dan Nahdliyin sebagai gerakan kebudayaan dan spiritual yang menghimpun umat dalam barisan Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah).

Kebangkitan keduanya tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik pasca-kolonial yang mengguncang wajah Nusantara. Di tengah kehancuran akibat penjajahan yang panjang, rakyat Indonesia dihadapkan pada dilema struktural—kemiskinan, kebodohan, dan keterpinggiran. Dalam situasi inilah, ulama dan kaum pergerakan lahir sebagai pelita yang menyalaikan kesadaran kolektif, bukan hanya untuk melawan, tetapi juga untuk membangun. Ulama tidak hanya berdakwah dari mimbar, tetapi juga menyusun kurikulum, mendirikan pesantren, dan mengorganisir pendidikan rakyat sebagai bentuk perlawanan senyap namun strategis. Sementara itu, Soekarno dan para pejuang nasionalis mengartikulasikan penderitaan rakyat melalui bahasa politik dan ideologi, dengan Marhaen sebagai simbol ketertindasan sekaligus kebangkitan.

Dialog antara keduanya, antara suara pesantren dan suara revolusi, antara dzikir dan politik, antara kitab kuning dan manifesto kebangsaan, bukanlah suatu konflik, melainkan penyatuan nilai-nilai luhur yang kemudian melahirkan kekuatan kultural dan spiritual bangsa. Bab ini tidak sekadar ingin menarasikan sejarah sebagai kronologi peristiwa, tetapi lebih dalam: mengkaji bagaimana nilai-nilai Nahdliyin dan Marhaenisme bersenyawa dalam praksis pendidikan dan pergerakan sosial-politik. Kita akan menelusuri jejak peran ulama dalam pendidikan rakyat, bagaimana pesantren menjadi tempat lahirnya gerakan anti-penindasan, serta bagaimana Soekarno menggandeng para ulama dalam menyusun arah kebangsaan.

Memahami sejarah ini menjadi sangat penting bagi guru masa kini—terutama bagi mereka yang hendak menjelma menjadi Guru Nahdliyin-Marhaenis. Sejarah ini bukan untuk dikenang semata, tetapi untuk dihidupkan kembali sebagai energi ideologis dan praksis transformatif di ruang-ruang kelas, di desa-desa yang terpinggirkan, di sekolah-sekolah yang mengabdikan dalam kesunyian. Dalam dunia yang makin dikendalikan oleh algoritma dan pragmatisme pasar, napas sejarah ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukanlah proses netral, melainkan medan perjuangan nilai. Maka, mari kita selami bab ini bukan hanya sebagai pembacaan masa

lalu, tetapi sebagai penyelaman makna untuk membangun masa depan pendidikan yang berpihak, membebaskan, dan membangkitkan.

### **Peta Sosial-Politik Indonesia Pasca-Kolonial**

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan, melainkan permulaan dari rangkaian pergulatan panjang dalam membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pasca-kolonialisme, bangsa ini menghadapi tantangan berat, baik secara struktural maupun kultural. Struktur sosial yang timpang, sistem pendidikan yang terbatas, dan warisan feodalisme yang masih bercokol menjadi warisan kolonial yang tidak mudah dihapus. Dalam ruang-ruang yang luas di pelosok nusantara, rakyat Indonesia masih merasakan sisa-sisa penjajahan: kemiskinan yang mengakar, ketimpangan akses terhadap pendidikan, dan alienasi politik terhadap sistem kekuasaan.

Dalam konteks itu, para guru, terutama dari kalangan pesantren dan gerakan rakyat, memainkan peran strategis sebagai aktor transformasi sosial. Mereka hadir sebagai penerang jalan dalam kegelapan pasca-kolonial. Kehidupan guru tidak terpisah dari denyut nadi rakyat. Mereka bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi penyuluh kesadaran kebangsaan. Para guru yang berangkat dari nilai-nilai Nahdliyin dan semangat Marhaenisme berada dalam posisi unik: mereka mengusung spiritualitas dan keberpihakan kepada rakyat kecil sekaligus. Maka, memahami peta sosial-politik Indonesia pasca-kolonial adalah juga membaca bagaimana peran guru tumbuh dari akar-akar kebangsaan yang nyata dan historis.

Secara filosofis, Indonesia pasca-kolonial berdiri di atas paradoks. Di satu sisi, kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang dan kolektif. Namun di sisi lain, realitas sosial-politik yang terbentuk setelahnya tidak serta merta menghapus struktur ketimpangan. Dalam hal pendidikan misalnya, masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru, buku, dan fasilitas. Ketika elit politik berkutat dalam perdebatan ideologi dan kekuasaan, rakyat kecil berjuang untuk sekadar hidup dan bersekolah.

Dalam kondisi seperti inilah peran guru sebagai “katalis perubahan” sangat menentukan.

Secara historis, dekade awal kemerdekaan ditandai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Revolusi fisik, nasionalisasi aset, pergolakan daerah, dan pergantian sistem pemerintahan adalah gambaran umum periode 1945–1965. Dalam kondisi penuh gejolak itu, pendidikan menjadi medan strategis untuk menanamkan identitas nasional, membangun semangat kebangsaan, dan menyatukan keragaman etnis serta budaya. Guru tidak hanya berhadapan dengan kurikulum, tetapi juga dengan ancaman ideologis dan tekanan politik. Dalam bayang-bayang konflik antara kubu nasionalis, religius, dan komunis, guru dituntut untuk tetap menjadi pelita di tengah badai zaman.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai representasi utama dari kalangan Nahdliyin, mengambil posisi penting dalam mengarahkan narasi kebangsaan yang inklusif dan berakar pada budaya lokal. NU memandang bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan manusia melalui pendidikan yang berbasis pada nilai, etika, dan kebangsaan. Pada saat yang sama, Soekarno dengan semangat Marhaenismenya menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan. Kedua arus ini tidak berseberangan, melainkan bersinggungan dalam ruang yang sama: menciptakan Indonesia yang adil, merdeka secara ekonomi, bermartabat secara budaya, dan religius secara spiritual.

Dalam praktiknya, guru-guru Nahdliyin dan Marhaenis hidup dalam keseharian masyarakat yang penuh keterbatasan. Mereka mengajarkan anak-anak di ruang kelas yang seadanya, membentuk kelompok belajar di serambi masjid, atau mengajar dengan semangat meski tanpa gaji pasti. Komitmen mereka tidak lahir dari insentif, tetapi dari idealisme dan kecintaan terhadap perubahan. Guru semacam ini tumbuh dari tanah rakyat, bukan dari langit kekuasaan. Mereka menghidupkan semangat transformasi bukan dari wacana, melainkan dari tindakan.

Pasca-kolonialisme juga membawa serta tantangan globalisasi dan modernisasi yang belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat saat itu.

Gelombang ideologi asing, pola konsumsi baru, dan sistem pendidikan modern mulai menggantikan sistem tradisional yang telah berlangsung ratusan tahun. Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai lokal dan tuntutan modern. Guru kembali menjadi penengah: antara nilai-nilai tradisi dan tuntutan zaman. Di titik inilah, identitas sebagai Guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi jawaban yang visioner, karena mampu merangkul nilai lokal sekaligus menjawab tantangan global.

Salah satu ironi pasca-kolonial adalah bahwa kemerdekaan sering kali dipahami hanya sebagai kebebasan politik, sementara kebebasan ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan. Guru, dalam kapasitasnya, mengajarkan bahwa merdeka bukan sekadar bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketergantungan. Mereka menjadi agen emansipasi, membebaskan pikiran dari kungkungan mitos, dogma, dan subordinasi. Pendidikan adalah alat perjuangan yang paling strategis dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan mandiri.

Dari perspektif aplikatif, memahami peta sosial-politik pasca-kolonial harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan guru. Guru harus diajak untuk memahami sejarah bangsanya secara mendalam agar tidak terjebak dalam praktik mengajar yang mekanistik dan ahistoris. Tanpa pemahaman konteks sejarah, guru akan kehilangan makna dalam setiap aktivitas pengajaran. Sebaliknya, guru yang sadar akan sejarah kebangkitannya akan lebih reflektif, berkomitmen, dan bermakna dalam mendidik anak-anak bangsa.

Bab ini juga menyadarkan kita bahwa transformasi sosial-politik tidak mungkin terjadi tanpa pendidikan yang berpihak. Peta sosial-politik Indonesia pasca-kolonial menunjukkan bahwa tanpa kehadiran guru yang ideologis dan praksis, bangsa ini bisa terjebak dalam kemerdekaan yang semu. Maka menjadi Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah bentuk keterlibatan aktif dalam sejarah bangsa—mengajar dengan kesadaran, mendidik dengan cinta, dan membebaskan dengan nilai-nilai luhur.

### 3.2 Peran Ulama dalam Pendidikan Rakyat

Peran ulama dalam sejarah pendidikan Indonesia bukan sekadar sebagai penyampai ilmu agama, melainkan sebagai pelita zaman yang

menerangi ruang-ruang kejahilan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Dalam pandangan Islam Nusantara, ulama bukan hanya ahli fikih atau ahli tafsir, tetapi juga pemimpin spiritual, guru kehidupan, dan penggerak transformasi sosial. Di tengah keterbatasan akses terhadap pendidikan formal pada masa penjajahan, pesantren dan surau menjadi benteng terakhir peradaban yang diselamatkan dan dirawat oleh para ulama. Dari ruang-ruang inilah semangat kebangsaan dan kesadaran rakyat mulai tumbuh secara organik.

Secara historis, ulama memainkan peran sentral dalam melawan kolonialisme, tidak dengan senjata modern, tetapi dengan ilmu dan keteladanan. Pendirian pesantren, majelis taklim, dan madrasah merupakan bentuk perlawanan kultural dan intelektual terhadap hegemoni pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif. Jika sekolah-sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kalangan priyayi dan elite terpilih, maka pesantren terbuka bagi siapa saja: anak petani, nelayan, hingga buruh. Kesetaraan ini menjadi cermin dari prinsip keadilan sosial yang melekat dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara.

Ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Hasbullah, dan lainnya, tidak hanya memberikan pendidikan keagamaan, tetapi juga membangkitkan kesadaran nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Melalui kajian kitab kuning, diskusi malam, dan dialog dengan santri, para kiai menyelipkan pesan tentang pentingnya harga diri bangsa, nilai-nilai kemandirian, dan tanggung jawab terhadap tanah air. Di balik doa-doa dan wirid-wirid, terkandung semangat revolusi moral dan sosial yang menjadi fondasi penting bagi terbentuknya karakter bangsa.

Persinggungan antara nilai-nilai Islam dan cita-cita kebangsaan terlihat nyata dalam peran ulama dalam organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis. Mereka tidak hanya berkulat dalam urusan ibadah, tetapi juga mendirikan sekolah, mencetak guru, dan membentuk kurikulum. Pendidikan tidak dilihat sebagai proses mekanis, melainkan sebagai jihad intelektual dan moral. Dalam konteks ini, guru dan ulama

bukan dua profesi yang berbeda, melainkan satu identitas yang menyatu dalam praksis sosial dan spiritual.

Peran ulama dalam pendidikan rakyat juga tercermin dalam pendekatan yang mereka gunakan. Mereka tidak sekadar mengajar, tetapi membimbing. Tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak. Pembelajaran di pesantren penuh dengan nilai-nilai etika, disiplin, dan kebersamaan. Relasi antara guru dan murid sangat kuat, tidak dibatasi oleh sekat formal, tetapi ditopang oleh keikhlasan, penghormatan, dan cinta ilmu. Relasi ini menjadi teladan pedagogi khas Nusantara yang membedakan pendidikan di pesantren dari sistem sekolah modern yang lebih struktural.

Dalam konteks kontemporer, peran ulama tidak boleh dilihat sebagai warisan masa lalu semata, tetapi sebagai inspirasi bagi pengembangan pendidikan alternatif yang lebih membumi dan membebaskan. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang menggerus nilai-nilai lokal, pendekatan ulama yang mengedepankan spiritualitas, etika, dan keberpihakan sosial menjadi sangat relevan. Guru-guru di era VUCA dan Society 5.0 harus belajar dari etos dan spirit para ulama terdahulu: mengajar dengan cinta, membimbing dengan hikmah, dan membebaskan dengan ilmu.

Pengalaman historis menunjukkan bahwa ulama memiliki daya tahan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Ketika kolonialisme memaksakan sistem pendidikan Barat, para ulama tetap mengembangkan sistemnya sendiri. Ketika modernisme datang dengan tawaran teknologi dan sains, para ulama tidak serta-merta menolak, tetapi melakukan adaptasi kritis. Inilah yang perlu diwarisi oleh guru masa kini—kemampuan untuk bersikap reflektif, selektif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan, tanpa kehilangan akar nilai dan identitasnya.

Pendidikan rakyat yang digagas ulama memiliki orientasi pembebasan. Pembebasan dari kebodohan, dari ketertindasan, dan dari keterasingan terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk mencetak buruh intelektual, tetapi insan merdeka yang berpikir kritis dan bertindak etis. Konsep ini sangat selaras dengan gagasan Paulo Freire

tentang pendidikan pembebasan, meski telah lama dipraktikkan dalam dunia pesantren jauh sebelum teori itu lahir. Di sini kita melihat bahwa ulama adalah intelektual organik dalam konteks Gramscian, yang hadir bersama dan untuk masyarakat.

Bagi guru yang ingin menjadi bagian dari arus perubahan dan kebangkitan bangsa, meneladani peran ulama dalam pendidikan rakyat adalah langkah yang sangat strategis. Guru tidak boleh puas hanya sebagai penyampai kurikulum, tetapi harus menjadi agen transformasi sosial yang berpihak kepada kaum tertindas. Dalam hal ini, marhaen dan santri adalah dua wajah dari rakyat yang sama: yang lapar akan ilmu, keadilan, dan masa depan yang lebih bermartabat.

### **Soekarno dan Ulama dalam Dialog Kebangsaan**

Dalam sejarah Indonesia modern, relasi antara pemimpin nasionalis dan ulama tidak pernah berjalan dalam jalur yang terpisah. Keduanya saling menyapa dalam arus sejarah yang penuh gelombang ideologi dan pergulatan politik. Soekarno, sang proklamator sekaligus arsitek Pancasila, tak mungkin berdiri teguh tanpa dukungan moral dan spiritual dari para ulama Nusantara. Sebaliknya, para ulama tidak menutup diri terhadap modernisme dan nasionalisme yang dibawa oleh kaum pergerakan. Di antara mereka terjadi dialog panjang, bukan hanya dalam forum resmi, tetapi juga dalam bahasa simbolik kebangsaan, dalam kerinduan yang sama atas kemerdekaan, dan dalam cita-cita luhur membangun peradaban yang berakar pada keadilan sosial dan keberagaman spiritual.

Dialog ini tidak selalu berlangsung mudah. Ada perbedaan pendektan, bahasa, bahkan strategi. Namun, di balik itu semua, terdapat kesamaan visi yang fundamental: membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme dan mewujudkan masyarakat yang adil, berdaulat, dan bermartabat. Soekarno, dalam berbagai pidatonya, sering kali merujuk pada kekuatan moral umat Islam, peran pesantren, dan pentingnya nilai-nilai religius dalam membangun bangsa. Ia bukan sekadar politisi rasional, melainkan

juga pemimpin spiritual dalam pengertian profetik, yang mampu meramu api revolusi dengan dzikir kebangsaan.

Para ulama besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, dan Kiai Ahmad Dahlan, bukan hanya memberikan restu atas perjuangan Soekarno, tetapi juga terlibat aktif dalam menyusun arah ideologi bangsa. Dalam momen-momen krusial seperti BPUPKI dan PPKI, peran ulama sangat menentukan dalam perumusan dasar negara. Perdebatan tentang dasar negara antara kelompok nasionalis dan Islamis menunjukkan betapa pentingnya dialog ideologis yang berlandaskan pada saling hormat dan cinta tanah air. Pancasila lahir bukan sebagai kompromi hampa, tetapi sebagai hasil dari dialektika mendalam antara berbagai golongan, termasuk antara Soekarno dan ulama.

Salah satu titik temu paling monumental dari dialog ini adalah lahirnya sila pertama Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di balik redaksi tersebut, tersimpan sejarah panjang negosiasi, pengertian, dan kelapangan hati para tokoh Islam. Para ulama menyadari bahwa dasar negara ini harus mampu mengayomi semua warga negara, tanpa menghilangkan ruh spiritualitas yang menjadi napas utama bangsa ini. Maka, sila pertama bukan sekadar simbol, tetapi penegasan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang menolak Tuhan, juga bukan negara teokratis yang hanya milik satu golongan, melainkan negara berketuhanan yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.

Kiai Wahid Hasyim menjadi figur sentral dalam menjembatani pemikiran keagamaan dan gagasan kebangsaan. Ia bukan hanya ulama dengan latar belakang pesantren, tetapi juga negarawan yang berpikir jauh ke depan. Ia paham bahwa pendidikan adalah medan strategis untuk menyemaikan nilai-nilai persatuan dan kesadaran nasional. Maka ia membentuk kurikulum madrasah yang memadukan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Inilah cikal bakal sistem pendidikan integratif yang kemudian berkembang di banyak lembaga NU hingga saat ini. Gagasan ini paralel dengan upaya Soekarno membangun manusia Indonesia seutuhnya—yang berpikir rasional sekaligus berjiwa spiritual.

Dialog antara Soekarno dan para ulama juga tampak dalam pendekatan kepada rakyat. Soekarno berbicara dalam bahasa marhaen, rakyat jelata yang ditindas kapitalisme dan feodalisme. Para ulama berbicara dalam bahasa ummah, umat yang terluka oleh ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dua istilah ini sejatinya berbicara tentang subjek yang sama: rakyat sebagai pusat perjuangan. Maka, ketika Soekarno menyebutkan bahwa “Marhaenisme bukanlah komunisme, tetapi nasionalisme yang berjiwa kerakyatan”, para ulama menyambutnya dengan keyakinan bahwa perjuangan sosial harus tetap dibingkai oleh nilai-nilai keadaban, moral, dan tauhid.

Kedekatan emosional antara Soekarno dan ulama juga tampak dalam hubungan personal. Ia memiliki kedekatan spiritual dengan beberapa kiai besar, bahkan menjadikan tokoh-tokoh pesantren sebagai rujukan moral. Soekarno pernah menyatakan, “Saya cinta NU bukan karena organisasi, tetapi karena NU adalah penjaga moral bangsa.” Pernyataan ini bukan basa-basi politik, melainkan refleksi dari keyakinannya bahwa kekuatan spiritual adalah benteng terakhir bangsa di tengah turbulensi zaman.

Dalam konteks pendidikan, dialog ini melahirkan kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan yang membumi dan membebaskan. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses membentuk manusia Indonesia yang berpikir merdeka, berakhlak mulia, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi benang merah dalam ajaran Soekarno dan spirit pesantren. Maka, guru Marhaenis dan guru Nahdliyin, dalam praksisnya, memiliki tanggung jawab yang sama: menjadi jembatan antara ilmu dan kebajikan, antara teknologi dan akhlak, antara bangsa dan iman.

Dialog yang dibangun antara Soekarno dan ulama merupakan teladan penting dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini. Di era VUCA dan Society 5.0, guru dihadapkan pada dilema antara tuntutan global dan kebutuhan lokal, antara algoritma dan akal budi. Maka, semangat dialog yang mengedepankan nilai, bukan ego, harus dihidupkan kembali. Guru harus menjadi pemimpin dialog di ruang kelas, bukan hanya pengajar

silabus. Ia harus menjadi pewaris nilai-nilai luhur dari dua arus besar ini: keberpihakan pada kaum tertindas dan keteguhan moral dalam berpijak pada nilai-nilai agama.

Di saat dunia pendidikan digempur oleh komersialisasi dan banalitas konten, dialog Soekarno dan ulama memberikan kita arah: bahwa pendidikan sejati tidak boleh tercerabut dari nilai dan tidak boleh menjauh dari rakyat. Pendidikan harus mengakar dan menginspirasi. Ia harus menjadi proses pengubahan manusia, bukan sekadar pencetakan tenaga kerja. Guru Marhaenis-Nahdliyin adalah aktor utama dalam misi ini, karena ia membawa nilai-nilai luhur yang lahir dari sejarah panjang kebangsaan dan keilmuan Nusantara.

### **Pesantren, Revolusi Mental, dan Gerakan Anti Penindasan**

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, telah lama menjadi pusat pembentukan karakter, intelektual, dan spiritual masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin masyarakat, penggerak perubahan, dan penjaga moral bangsa. Di tengah arus kolonialisme yang menindas, pesantren menjadi benteng perlawanan yang tak kasat mata, tetapi berakar dalam. Perlawanan ini bukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan keteguhan nilai. Pesantren mengajarkan bahwa jihad tidak hanya di medan perang fisik, tetapi juga dalam melawan kebodohan dan ketidakadilan struktural.

Revolusi mental, yang digaungkan oleh Soekarno dan kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintah masa kini, sejatinya telah lama dipraktikkan di pesantren. Istilah “revolusi” dalam kacamata pesantren bukan berarti kekerasan atau kudeta sosial, tetapi transformasi batin, perombakan nilai-nilai lama yang menghambat kemajuan, dan penciptaan kesadaran baru yang membebaskan. Santri diajarkan untuk membangun kesadaran sebagai manusia merdeka—merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kejumudan berpikir, dan merdeka dari ketakutan untuk menyuarakan kebenaran.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh perlawanan yang luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Zainul Arifin, hingga para santri yang mengangkat bambu runcing pada Resolusi Jihad 1945, semuanya adalah bagian dari tradisi pesantren yang berpihak kepada rakyat. Mereka tidak hanya mengajar kitab, tetapi juga membakar semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan. Pesantren membuktikan bahwa keilmuan tidak boleh tercerabut dari keberpihakan sosial; bahwa spiritualitas tidak berarti menarik diri dari dunia, melainkan mengubah dunia dengan nilai-nilai langit.

Gerakan anti penindasan yang lahir dari pesantren bukanlah gerakan reaksioner. Ia lahir dari refleksi panjang atas penderitaan rakyat, dari pemahaman mendalam terhadap maqasid syariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Para kiai besar memahami bahwa kolonialisme tidak hanya merampas tanah, tetapi juga merampas martabat. Maka, pendidikan pesantren tidak cukup hanya mengajarkan fiqh ibadah, tetapi juga fiqh sosial, fiqh kebangsaan, dan fiqh kemerdekaan. Di sinilah terlihat integrasi sempurna antara ilmu agama dan perjuangan sosial dalam gerakan Nahdliyin-Marhaenis.

Nilai-nilai pesantren seperti tawadhu, istiqamah, khidmah, dan ikhlas telah menjadi basis revolusi mental yang sejati. Di tengah dunia pendidikan modern yang semakin berorientasi pada capaian administratif dan teknokratis, pesantren menghadirkan pendekatan yang menekankan pada keteladanan, kebersahajaan, dan kebijaksanaan hidup. Guru-guru pesantren bukan hanya mengajar, tetapi hidup bersama murid-muridnya. Mereka menjadi model langsung dari nilai yang diajarkan—sesuatu yang semakin langka dalam sistem pendidikan formal hari ini.

Dalam konteks kekinian, pesantren tidak boleh berhenti pada glorifikasi masa lalu. Ia harus menjelma menjadi pusat inovasi berbasis nilai. Teknologi, digitalisasi, dan transformasi sosial harus disikapi sebagai alat perjuangan baru, bukan ancaman. Guru Nahdliyin-Marhaenis yang berakar di pesantren harus mampu menjembatani antara kitab kuning dan

kode digital, antara teks klasik dan algoritma, antara tradisi dan disrupsi. Ini adalah tantangan generasi baru pesantren yang harus dijawab dengan kreativitas spiritual dan etika profetik.

Pesantren juga harus menjadi ruang pembebasan perempuan dan kelompok marginal. Peran santriwati, pengasuh pondok perempuan, dan komunitas pesantren inklusif harus diperluas sebagai bagian dari gerakan emansipasi yang ramah budaya. Pesantren yang membebaskan bukan yang menciptakan hierarki kaku, melainkan yang membuka ruang tafsir dan partisipasi seluas-luasnya dalam kerangka maqasid syariah. Inilah kontribusi nyata pesantren dalam membangun masyarakat adil, setara, dan beradab.

Guru yang lahir dari tradisi pesantren dan dibentuk oleh semangat Marhaenisme memiliki kekuatan ganda: spiritualitas dan kepekaan sosial. Ia tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu memaknainya dalam konteks realitas kehidupan masyarakat bawah. Ia mengajar bukan dari podium, tetapi dari tengah kehidupan rakyat. Ia hadir di pasar, di sawah, di rumah warga, menyapa dengan bahasa kasih dan keberpihakan. Inilah wajah sejati pendidikan yang membebaskan dan membumikan nilai.

Pesantren, dalam sejarahnya, tidak pernah menutup diri dari transformasi. Bahkan, banyak pesantren yang menjadi pelopor inovasi pendidikan, seperti integrasi kurikulum umum, pelatihan kewirausahaan, pendidikan vokasi, hingga penggunaan media digital dakwah. Namun, semua inovasi itu tetap berpijak pada nilai. Tidak ada sekularisasi nilai dalam pendidikan pesantren. Justru yang terjadi adalah spiritualisasi teknologi: menjadikan setiap inovasi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat.

Gerakan anti penindasan dalam tradisi pesantren tidak hanya diarahkan pada penjajahan fisik, tetapi juga pada penjajahan budaya dan ekonomi. Globalisasi dan kapitalisme neoliberal yang masuk ke sistem pendidikan kita hari ini harus diwaspadai, karena kerap membawa ideologi kompetisi yang membunuh nilai-nilai kolektif, solidaritas, dan kesetaraan. Pesantren,

dengan nilai-nilai tawazun dan tawasuth-nya, harus menjadi penyeimbang dan penjaga moral bangsa dari invasi nilai-nilai yang merusak akar budaya kita.

Dengan demikian, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pusat gerakan kebudayaan dan perlawanan. Ia memiliki kekuatan untuk menyemaikan revolusi batin yang membentuk kesadaran kolektif. Dan dari kesadaran itu lahirlah gerakan—gerakan yang membela yang lemah, melawan penindas, dan membangun peradaban berbasis welas asih. Guru Nahdliyin-Marhaenis yang berangkat dari pesantren harus menghidupkan kembali ruh ini di sekolah-sekolah formal, di SMK, madrasah, dan institusi pendidikan modern lainnya.

# Bagian 2

GURU, KEBANGSAAN,  
DAN KARAKTER PANCASILA





- DR. ANDI HERMAWAN, M.Pd

## Guru Nahdliyin–Marhaenis sebagai Penjaga Bangsa

Di tengah gelombang perubahan global yang mengguncang nilai-nilai lokal, posisi guru semakin krusial sebagai penjaga integritas bangsa. Bukan sekadar pendidik mata pelajaran, guru adalah pemikul amanah sejarah, ideologi, dan kebudayaan bangsa. Terlebih bagi guru Nahdliyin–Marhaenis, perannya semakin kompleks karena membawa dua pusaka besar: warisan nilai-nilai Islam Nusantara yang toleran dan tradisi perjuangan kerakyatan yang berpihak pada kaum tertindas. Dalam diri guru seperti inilah kita melihat sintesis antara keagamaan dan kebangsaan, antara spiritualitas dan nasionalisme, antara pesantren dan proklamasi.

Menjadi penjaga bangsa bukanlah jargon kosong. Ia adalah tanggung jawab moral yang hadir di setiap tindakan, perkataan, dan keteladanan seorang guru. Guru Nahdliyin–Marhaenis tidak hanya mengajarkan sila-sila Pancasila, tetapi menghidupkannya dalam keseharian di sekolah. Ia tidak hanya mengutip ayat dan hadits, tetapi menyulamnya dengan semangat pembebasan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Di tangan merekalah nilai-nilai luhur bangsa tidak menjadi museum ide, tetapi kekuatan hidup yang menembus realitas dan menyapa generasi muda secara relevan.

Pendidikan yang tidak berakar pada nilai dan identitas bangsa akan rapuh diterpa disrupsi. Maka, kehadiran guru yang mampu membumikan kembali semangat ideologi Pancasila dengan semangat keislaman yang moderat adalah kebutuhan mutlak di era kini. Di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, madrasah maupun SMK, tantangan kebangsaan semakin nyata: intoleransi, kekerasan simbolik, radikalisme, dan alienasi identitas menghantui ruang kelas dan interaksi sosial siswa. Guru Nahdliyin–Marhaenis tampil sebagai penjaga benteng terakhir dari dehumanisasi pendidikan.

Bab ini akan menguraikan posisi strategis guru dalam meneguhkan kembali karakter kebangsaan siswa, khususnya melalui empat fondasi penting: keteladanan dalam mengamalkan Pancasila, pemahaman atas konsep Islam Nusantara sebagai pendekatan jalan tengah dalam pendidikan, strategi membendung intoleransi dan ekstremisme di sekolah, serta

penanaman etika, kejujuran, dan kemandirian sebagai pilar pembentuk watak bangsa. Empat tema ini menjadi simpul dari misi besar guru dalam membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan beradab.

Di masa lalu, guru-guru pesantren dan sekolah rakyat bukan hanya mendidik, tetapi juga memimpin komunitas dalam menjaga semangat kemerdekaan dan harga diri bangsa. Mereka hadir di tengah-tengah rakyat, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi penasehat moral, pemimpin adat, dan pelindung nilai-nilai lokal. Tradisi itu kini perlu dihidupkan kembali dalam wujud baru: guru sebagai navigator arah kebangsaan di tengah krisis identitas dan komersialisasi pendidikan.

Guru Nahdliyin–Marhaenis tidak bekerja di ruang hampa. Ia berdiri di tengah medan sosial yang kompleks, di mana anak-anak bangsa kini lebih akrab dengan gawai ketimbang guru, lebih terhubung dengan tren global daripada akar budaya lokal. Dalam situasi ini, peran guru menjadi ganda: sebagai penyaring dan penyambung. Ia menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, sekaligus menyambung nilai-nilai luhur yang terancam terputus oleh derasnya arus zaman.

Konsep Islam Nusantara sebagai jalan tengah, seperti akan dibahas dalam subbab selanjutnya, menjadi salah satu kunci utama dalam merumuskan pendekatan pendidikan yang tidak terjebak pada kutub ekstrem. Guru sebagai agen Islam Nusantara bukan berarti menjauh dari keislaman yang tekstual, tetapi menghadirkan Islam dalam konteks budaya lokal yang penuh hikmah, toleransi, dan cinta tanah air. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya menghindari konflik, tetapi merawat harmoni dalam keberagaman.

Di sisi lain, sejarah telah mencatat bahwa banyak konflik sosial dan perpecahan bangsa bermula dari kegagalan sistem pendidikan dalam membangun kesadaran kebangsaan yang sehat. Ketika pendidikan tidak menjadi ruang dialog, ketika guru tidak hadir sebagai penyejuk dan penuntun, maka sekolah justru bisa menjadi tempat suburnya benih-benih ekstremisme. Guru Nahdliyin–Marhaenis harus berdiri di garis depan, tidak sekadar sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai penjaga jiwa bangsa.

Menjadi penjaga bangsa berarti memiliki komitmen untuk hadir dalam segala dinamika sosial siswa. Guru tidak boleh hanya hadir di ruang kelas dan menghilang ketika bel berbunyi. Ia harus menjadi bagian dari denyut kehidupan sekolah dan masyarakat. Ia terlibat dalam dialog antaragama, aktif dalam kegiatan kultural, dan menjadi teladan hidup bagi nilai-nilai luhur. Tanpa keteladanan yang konsisten, pendidikan kebangsaan hanya akan menjadi hafalan kering yang tidak menyentuh jiwa.

Tantangan ke depan semakin rumit. Bangsa ini tidak hanya menghadapi radikalisme, tetapi juga hedonisme, pragmatisme, dan krisis moral di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, guru menjadi garda depan dalam membentuk watak kebangsaan yang kokoh. Pendidikan karakter bukan hanya slogan, tetapi praksis harian yang menuntut kesabaran, keteguhan nilai, dan kesadaran ideologis. Guru yang menghayati peran sebagai penjaga bangsa akan meresapi makna tugas ini sebagai ibadah yang luhur.

Subbab-subbab dalam bab ini akan memberikan panduan konkret, historis, dan aplikatif tentang bagaimana guru dapat menjadi pelita dalam kegelapan, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer kebangsaan. Kita akan melihat bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar simbol negara, tetapi panduan etis yang sangat relevan untuk membangun pendidikan yang adil dan beradab. Guru Nahdliyin-Marhaenis bukan hanya menjunjung ideologi negara, tetapi menghidupkannya melalui tindakan nyata dan strategi pedagogi yang membumi.

Kita juga akan menelaah konsep Islam Nusantara bukan sebagai dogma, tetapi sebagai pendekatan edukatif yang relevan untuk konteks Indonesia. Dalam setiap tradisi lokal yang dirawat oleh Islam Nusantara, tersimpan kebijaksanaan pendidikan yang luar biasa. Toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, dan cinta tanah air adalah nilai-nilai yang bisa menjadi kurikulum tersembunyi dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Dalam konteks membendung intoleransi dan ekstremisme, guru dituntut menjadi pembaca tanda-tanda zaman. Ia harus peka terhadap perubahan sikap siswa, mampu mendeteksi narasi kebencian, dan memiliki

pendekatan humanistik dalam menyadarkan siswa akan bahaya polarisasi. Guru adalah penjaga narasi kebangsaan di ruang kelas—ruang yang seringkali menjadi arena pertarungan ideologi tanpa disadari.

Pilar etika, kejujuran, dan kemandirian akan diangkat sebagai jantung dari pembangunan karakter kebangsaan. Tanpa etika, kecerdasan hanya akan melahirkan manipulasi. Tanpa kejujuran, prestasi hanyalah topeng. Tanpa kemandirian, pendidikan menjadi candu. Guru Nahdliyin-Marhaenis hadir untuk membalikkan arah: membentuk generasi yang berkarakter kuat, memiliki integritas moral, dan siap memimpin perubahan dengan semangat gotong royong.

Bab ini bukan hanya reflektif, tetapi juga praktis. Akan disajikan berbagai pendekatan pembelajaran, aktivitas sekolah, dan strategi komunikasi yang bisa diterapkan oleh guru. Harapannya, bab ini bisa menjadi inspirasi dan pedoman dalam merancang pendidikan kebangsaan yang hidup dan berdampak. Sebab, sebagaimana yang diyakini para pendiri bangsa, masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas gurunya.

Menjadi guru penjaga bangsa adalah tugas seumur hidup. Ia tidak selesai saat jam pelajaran berakhir, atau ketika guru pensiun dari tugas formal. Ia terus berlanjut dalam bentuk pengaruh nilai, inspirasi yang hidup dalam kenangan murid, dan jejak moral yang tertanam dalam masyarakat. Inilah jalan sunyi guru yang sejati, jalan para guru Nahdliyin-Marhaenis yang memilih berpihak pada bangsa, rakyat, dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Di tengah guncangan VUCA dan tekanan globalisasi nilai, guru semacam inilah yang menjadi jangkar. Ia menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan arah, agar anak-anak kita tetap punya akar. Dan dengan akar yang kuat itulah kita bisa melompat ke masa depan yang terang, dengan penuh keyakinan dan keberanian.

## **Guru dan Keteladanan Ideologi Pancasila**

Dalam setiap dinamika bangsa Indonesia, guru memegang posisi sentral sebagai penjaga nilai dan pembentuk karakter generasi muda. Ketika Pancasila dicanangkan sebagai dasar negara, ia tidak dimaksudkan hanya

sebagai produk hukum atau ideologis belaka, tetapi sebagai pedoman hidup bersama yang harus ditanamkan dalam hati dan perilaku warga negara, terutama generasi penerus. Dalam konteks ini, guru bukan hanya pengajar pengetahuan, tetapi juga pendidik nilai—sebuah peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, sistem, atau kurikulum semata. Guru menjadi representasi hidup dari nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Keteladanan menjadi instrumen utama dalam menginternalisasikan Pancasila. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tidak akan bermakna apabila hanya disampaikan secara kognitif. Ia harus dihidupkan melalui sikap dan tindakan guru sehari-hari. Ketika seorang guru menunjukkan kejujuran dalam menilai, menghormati keberagaman di kelas, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan hak siswa miskin, maka saat itulah Pancasila bukan lagi sekadar konsep, tetapi realitas yang dapat dirasakan dan ditiru oleh siswa.

Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki kedekatan ideologis dengan semangat Pancasila. Islam Nusantara sebagai identitas keislaman guru NU memuat nilai ketuhanan yang inklusif dan penuh kasih sayang, senada dengan sila pertama. Sementara semangat Marhaenisme yang digagas oleh Soekarno menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil dan keadilan sosial, yang sejalan dengan sila kelima. Kombinasi ini menjadikan guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai figur yang ideal untuk merepresentasikan dan menghidupkan Pancasila dalam praktik pendidikan.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak guru yang juga menjadi aktivis kemanusiaan dan tokoh pergerakan. Mereka menyatukan ilmu dengan nilai perjuangan. Dalam konteks kekinian, semangat itu perlu dihidupkan kembali dalam bentuk keteladanan ideologis yang konsisten. Guru menjadi pemegang obor yang menerangi arah siswa dalam menghadapi disorientasi moral akibat pengaruh media sosial, konsumerisme, dan krisis identitas yang marak di era digital. Ketika Pancasila dipertanyakan oleh

sebagian kelompok, guru tampil menjelaskan dan menegaskan kembali makna ideologisnya dengan pendekatan naratif yang menyentuh.

Pancasila bukanlah nilai asing bagi bangsa ini. Ia lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri, dengan perenungan mendalam yang dilakukan para pendiri bangsa. Dalam lingkungan sekolah, nilai-nilai Pancasila bisa dihidupkan melalui proyek pembelajaran kontekstual. Misalnya, siswa diajak mengenali praktik gotong royong di masyarakat sebagai pengejawantahan sila ketiga dan kelima. Guru memainkan peran penting dalam merancang pengalaman belajar yang mempertemukan siswa dengan realitas sosial dan nilai-nilai luhur bangsa.

Keteladanan guru menjadi titik awal dari proses internalisasi nilai. Ketika siswa melihat guru tidak memihak dalam konflik, adil dalam memberi tugas, menghargai perbedaan, dan berani bersikap ketika prinsip moral dilanggar, maka pembelajaran Pancasila terjadi secara implisit dan efektif. Ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menjadikan Pancasila sebagai materi hafalan atau ulangan pilihan ganda. Pembelajaran nilai tidak bisa direduksi menjadi sekadar transfer informasi, ia adalah proses peneladanan dan pergaulan nilai secara intensif.

Guru sebagai figur keteladanan juga harus konsisten dalam membangun dialog antarumat beragama dan antarbudaya. Sekolah adalah miniatur masyarakat. Keberagaman agama, budaya, dan latar belakang ekonomi harus dijadikan kekayaan yang dikelola dengan bijak. Dalam hal ini, guru yang memahami makna Pancasila secara mendalam akan menempatkan diri sebagai pemersatu, bukan pemecah. Ia mampu mengelola konflik dengan bijak dan menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran yang memperkaya.

Implementasi nilai-nilai Pancasila juga harus menyentuh dimensi kebijakan dan tata kelola sekolah. Guru harus kritis terhadap ketidakadilan sistemik, seperti ketimpangan akses pendidikan, pungutan yang membebani siswa, atau praktik diskriminatif. Keteladanan ideologi Pancasila menuntut guru untuk bersikap jujur, adil, dan berpihak kepada kebenaran, meskipun itu berarti bersuara melawan arus. Keberanian ini menjadi

bagian dari karakter luhur yang diwariskan oleh para tokoh bangsa dan ulama terdahulu.

Dalam masyarakat modern yang sarat kompetisi, siswa kerap terjebak pada orientasi nilai materi dan ranking. Guru perlu menyeimbangkan narasi ini dengan pendekatan nilai yang menekankan pada tanggung jawab sosial, kesadaran ekologis, dan kepedulian terhadap sesama. Keteladanan guru dalam menggunakan sumber daya secara bijak, menanamkan sikap sederhana, dan mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial, adalah bentuk konkret dari pengamalan sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat Pancasila, yang menekankan pada musyawarah dan demokrasi, juga dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Guru bisa memberikan ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan, mendengarkan suara siswa, dan membangun iklim dialogis. Hal ini melatih siswa untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan menyadari bahwa setiap keputusan bersama harus melalui proses deliberatif, bukan pemaksaan. Di sini, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi fasilitator demokrasi kecil.

Krisis keteladanan di ruang publik menjadi tantangan serius dalam penguatan ideologi Pancasila. Ketika tokoh-tokoh publik justru menampilkan sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka guru harus menjadi benteng terakhir. Ia menjadi rujukan moral, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar sekolah. Guru yang tetap konsisten dalam nilai-nilai Pancasila di tengah pragmatisme sosial adalah bentuk perlawanan terhadap degradasi moral.

Keteladanan juga berarti kesetiaan terhadap proses. Guru tidak boleh hanya mencari hasil instan. Ia harus percaya bahwa nilai akan tumbuh melalui proses yang sabar, dialogis, dan reflektif. Siswa membutuhkan waktu untuk mencerna, menyerap, dan menginternalisasi nilai. Guru harus hadir sebagai pendamping yang sabar, bukan penghukum yang reaktif. Pancasila hidup dalam proses ini, bukan dalam slogan.

Dalam realitas kebangsaan yang kompleks, guru harus mampu menjelaskan Pancasila secara kontekstual. Misalnya, dalam isu lingkungan hidup, guru bisa mengaitkannya dengan tanggung jawab sosial dan keadilan antargenerasi. Dalam isu korupsi, guru bisa mengaitkannya dengan nilai kejujuran dan pengabdian kepada bangsa. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan di buku PPKn, ia harus menjadi lensa untuk membaca dan menyikapi persoalan kontemporer.

Sebagai figur publik, guru juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan nilai-nilai Pancasila. Di tengah banjir informasi yang menyekat, kehadiran guru sebagai sumber narasi positif sangat penting. Keteladanan digital menjadi bagian dari keteladanan ideologis. Sikap, bahasa, dan konten yang dibagikan oleh guru di dunia maya harus merefleksikan nilai-nilai keadaban dan kebangsaan.

Guru Nahdliyin-Marhaenis bisa memperkuat keteladanan Pancasila dengan menampilkan perpaduan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan semangat kerakyatan Soekarno yang membela kaum tertindas. Pancasila bukanlah titik temu antara agama dan nasionalisme secara paksa, tetapi titik simpul yang sudah menyatu secara kultural dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penerus tradisi tersebut di ruang kelas dan ruang publik.

Perlu digarisbawahi bahwa keteladanan tidak berarti kesempurnaan. Guru tetap manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, kesadaran akan peran ideologis ini menuntut guru untuk terus merefleksi diri, memperbaiki sikap, dan menguatkan komitmen pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Keteladanan adalah proses menjadi, bukan status yang sudah selesai. Guru terus tumbuh bersama siswa dalam kesetiaan pada nilai.

Dalam praktiknya, keteladanan ideologis bisa diwujudkan dalam kegiatan sekolah yang berbasis nilai. Upacara bendera, kegiatan sosial, diskusi kelas, hingga konten pembelajaran bisa didesain untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Guru menjadi sutradara nilai, bukan hanya pengisi silabus. Ia merancang pembelajaran sebagai pengalaman hidup yang membentuk watak dan arah berpikir siswa.

Penguatan kapasitas guru dalam memahami Pancasila secara filosofis dan praktis menjadi kunci. Oleh karena itu, pelatihan guru yang terintegrasi dengan nilai-nilai ideologis perlu dikembangkan secara masif dan kontekstual. LPTK dan kementerian pendidikan harus memprioritaskan pengembangan kompetensi ideologis, tidak hanya kompetensi pedagogis dan digital. Tanpa itu, guru akan kehilangan arah dalam mendidik generasi yang tercerabut dari akar nilai.

Akhirnya, keteladanan ideologi Pancasila tidak bisa diserahkan kepada narasi besar semata. Ia harus hidup dalam keseharian. Dalam senyum guru saat menyapa siswa, dalam sikap adil saat mengoreksi tugas, dalam kepedulian terhadap siswa miskin, dalam keberanian menyuarakan kebenaran. Itulah cara paling kuat untuk mentransformasikan Pancasila dari teks menjadi tindakan, dari simbol menjadi semangat hidup bangsa.

### **Konsep Islam Nusantara: Jalan Tengah dalam Pendidikan**

Islam Nusantara hadir bukan sebagai varian ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok Islam, tetapi sebagai representasi bagaimana Islam hidup, tumbuh, dan beradaptasi secara kultural di bumi Indonesia. Sebagai jalan tengah, Islam Nusantara menawarkan pendekatan keberislaman yang ramah, inklusif, moderat, dan seimbang antara teks dan konteks. Dalam ranah pendidikan, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi tantangan intoleransi, polarisasi ideologi, serta krisis kebangsaan yang merongrong ruang belajar dan kehidupan masyarakat sekolah.

Guru Nahdliyin-Marhaenis secara historis merupakan aktor penting dalam menghidupkan prinsip-prinsip Islam Nusantara di lembaga pendidikan. Mereka memadukan nilai-nilai keislaman yang berakar dari kitab-kitab klasik (turats), dengan semangat nasionalisme dan pembebasan ala Marhaenisme. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya mendidik siswa menjadi pintar, tetapi juga menjadi manusia Indonesia yang beriman, berbudaya, dan berjiwa sosial. Islam dalam kerangka ini bukan hanya soal ritual, tapi juga etika dalam berbangsa.

Islam Nusantara juga mengedepankan prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *tawasuth* (moderat), dan *i'tidal* (tegak lurus). Dalam konteks sekolah, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi untuk mengelola keberagaman siswa dari berbagai latar belakang. Guru yang menjadikan Islam Nusantara sebagai pijakan akan lebih mudah menciptakan iklim pembelajaran yang aman, inklusif, dan harmonis. Tidak ada pemaksaan keyakinan, tidak ada pelabelan negatif terhadap perbedaan, dan tidak ada diskriminasi terhadap murid yang minoritas.

Dalam konteks sejarah, Islam Nusantara bukanlah konstruksi baru. Sejak era Walisongo, pendekatan dakwah kultural sudah menjadi strategi utama dalam menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Nusantara. Pendidikan Islam kala itu tidak lepas dari pendekatan seni, budaya, dan nilai-nilai lokal. Inilah yang menjadikan Islam dapat diterima secara luas tanpa konflik dengan budaya setempat. Guru yang memahami warisan ini akan lebih mampu mendidik dengan sentuhan lokalitas dan kearifan tradisi, bukan dengan pendekatan dogmatis atau tekstual semata.

Pendidikan yang berbasis Islam Nusantara memberi ruang untuk penguatan identitas nasional dan nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka keislaman. Tidak ada dikotomi antara menjadi muslim dan menjadi nasionalis. Justru keduanya saling menguatkan. Guru dapat menggunakan referensi sejarah perjuangan tokoh-tokoh NU seperti KH. Wahid Hasyim, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdurrahman Wahid, yang mengabdikan diri untuk negara tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Ini penting agar siswa tidak terjebak dalam narasi politik identitas yang sempit.

Islam Nusantara juga sangat menekankan pentingnya *akhlaqul kari-mah* dalam proses pendidikan. Guru bukan hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap rendah hati, kasih sayang, dan komitmen terhadap nilai-nilai universal. Dalam era digital yang serba cepat dan dingin, kehadiran guru dengan pendekatan yang penuh welas asih adalah obat bagi anak-anak yang kehilangan arah nilai. Islam Nusantara memberi dasar moral yang membumi dan berkeadaban.

Di tengah arus fundamentalisme dan kekerasan simbolik berbasis agama yang mengancam harmoni masyarakat, Islam Nusantara menjadi benteng sekaligus jalan tengah. Guru yang mempraktikkan nilai ini akan berperan sebagai penjaga benteng akhlak dan penjaga nalar sehat dalam menghadapi ujaran kebencian, hoaks keagamaan, dan narasi perpecahan. Pendidikan yang berpijak pada Islam Nusantara adalah pendidikan yang membebaskan dari ketakutan dan ketidaktahuan, dan membangun kepercayaan serta harapan.

Di kelas, pendekatan Islam Nusantara bisa diwujudkan melalui pembelajaran yang terbuka, diskursif, dan menghargai keragaman tafsir. Guru tidak memaksakan satu cara berpikir, tetapi memberi ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi ajaran agama dalam semangat kebhinekaan dan keilmuan. Kitab-kitab pesantren seperti *Talim Muta'allim*, *Bidayatul Hidayah*, dan *Ihya Ulumuddin* bisa dijadikan sumber etika belajar yang bersifat lintas zaman dan relevan hingga kini.

Islam Nusantara mendorong pendidikan agar tidak tercerabut dari konteks sosial-budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh melulu berorientasi pada pasar atau globalisme semata. Harus ada ruang untuk nilai-nilai lokal, sejarah perjuangan bangsa, dan budaya asli Nusantara. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki tugas strategis untuk menjadi jembatan antara kearifan lokal dengan tuntutan zaman modern.

Dalam praktiknya, Islam Nusantara mendorong terciptanya sekolah yang menjadi pusat peradaban, bukan hanya institusi formal. Sekolah menjadi tempat di mana siswa belajar hidup bersama, menghargai perbedaan, dan merawat perdamaian. Guru yang berpijak pada Islam Nusantara akan memperkuat nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan solidaritas sebagai nilai utama pendidikan. Hal ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah ancaman disintegrasi.

Penguatan narasi Islam Nusantara di sekolah juga penting untuk melawan penetrasi ideologi transnasional yang intoleran. Guru harus mampu menjelaskan kepada siswa tentang bahaya ideologi yang memecah belah umat, mengkafirkan orang lain, dan merongrong NKRI. Melalui

pembelajaran lintas perspektif, guru bisa mengajarkan bahwa Islam hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk menanamkan rasa takut atau kebencian.

Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat mengembangkan modul pembelajaran berbasis Islam Nusantara yang kontekstual dan aplikatif. Modul ini bisa memasukkan unsur sejarah lokal, praktik budaya pesantren, hingga cerita-cerita inspiratif dari ulama Nusantara. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar agama secara kognitif, tetapi juga mengalami dan menginternalisasi nilai melalui narasi dan praktik kehidupan sehari-hari.

Islam Nusantara juga mendorong pendekatan pembelajaran yang membumi, misalnya melalui dialog, cerita, syair, tembang, dan tradisi lisan lainnya. Ini menjadikan pendidikan agama lebih cair, tidak menegangkan, dan lebih dekat dengan jiwa murid. Guru menjadi fasilitator nilai, bukan pendoktrin nilai. Pendidikan menjadi ruang dialog, bukan medan tempur ideologi.

Di tengah tekanan globalisasi yang sering kali menggerus identitas budaya, Islam Nusantara memberi pegangan kokoh untuk menjaga keislaman yang tetap berpijak pada akar lokal. Guru memiliki peran penting untuk memperkuat identitas siswa sebagai muslim Indonesia yang bangga akan tanah air, terbuka terhadap dunia, dan kukuh dalam nilai keislaman. Ini adalah bentuk nasionalisme spiritual yang langka dan berharga.

Islam Nusantara juga menciptakan ruang untuk inovasi dalam pendidikan agama. Guru bisa mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, keberlanjutan lingkungan, dan etika digital ke dalam pembelajaran agama. Ini membuat agama menjadi responsif, tidak stagnan. Guru menjadi agen perubahan nilai dalam masyarakat yang terus bergerak.

Secara filosofis, Islam Nusantara mengajarkan pentingnya keseimbangan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada aspek vertikal (ritual dan ibadah), tetapi juga pada dimensi horizontal (etika sosial). Guru yang konsisten dalam dua dimensi ini akan mencetak lulusan yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga berkepribadian luhur dan berjiwa sosial.

Pendidikan berbasis Islam Nusantara juga sangat cocok diterapkan di SMK, pesantren, dan madrasah yang menjadi basis kekuatan pendidikan akar rumput. Di tempat-tempat ini, nilai-nilai tradisional dan semangat kebangsaan masih hidup. Guru tinggal mengolah dan mengarahkan agar nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks Society 5.0 dan VUCA.

Kehadiran Islam Nusantara dalam ruang pendidikan adalah harapan bagi keberlanjutan Indonesia yang damai, adil, dan beradab. Guru memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup, berkembang, dan diwariskan. Bukan hanya dalam bentuk kurikulum, tetapi dalam bentuk kepribadian dan keteladanan sehari-hari.

Pada akhirnya, Islam Nusantara adalah jembatan antara langit dan bumi, antara wahyu dan budaya, antara teks dan konteks. Dalam diri guru Nahdliyin-Marhaenis, jembatan ini hidup dan bekerja. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi membentuk arah sejarah bangsa. Mereka tidak sekadar hadir, tetapi menjadi suluh dalam gelapnya zaman.

### **Membendung Intoleransi dan Ekstremisme di Sekolah**

Intoleransi dan ekstremisme bukan lagi isu di luar sekolah; ia telah merayap masuk melalui berbagai saluran, dari media sosial hingga kegiatan ekstrakurikuler yang dibajak oleh ideologi kaku. Sekolah, yang semestinya menjadi ruang aman bagi pertumbuhan intelektual dan spiritual anak, kini dihadapkan pada tantangan menyaring nilai dan paham yang bertentangan dengan kebhinekaan Indonesia. Dalam konteks ini, peran guru—terutama yang berideologi Nahdliyin-Marhaenis—menjadi sangat strategis untuk membendung arus intoleransi dan ekstremisme yang mengancam masa depan pendidikan dan keutuhan bangsa.

Intoleransi tumbuh bukan semata karena perbedaan, tetapi karena ketidaksiapan menerima dan mengelola perbedaan itu secara sehat. Sekolah, sebagai mikrokosmos masyarakat, menjadi tempat pertama di mana anak-anak belajar mengenali keberagaman. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus berperan sebagai fasilitator dialog antarperbedaan, bukan

sekadar pengampu materi. Sikap terbuka, rendah hati, dan keberanian membela prinsip kemanusiaan adalah modal utama untuk membentengi ruang pendidikan dari infiltrasi ideologis yang sempit.

Dalam sejarahnya, kaum Nahdliyin selalu menekankan pentingnya *tasamuh* (toleransi) dan *ukhuwah* (persaudaraan) sebagai prinsip dasar bermasyarakat. Demikian pula kaum Marhaen, melalui ajaran Soekarno, menolak segala bentuk penindasan—termasuk penindasan pemikiran dan keyakinan. Ketika kedua spirit ini digabungkan dalam diri seorang guru, maka lahirlah sosok pendidik yang tegas terhadap ekstremisme, namun tetap ramah dalam menuntun siswa yang masih mencari arah pemahaman. Guru tidak boleh menyerah pada diam; ia harus menjadi penjaga nilai yang berani.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menyusun kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang memuat narasi-narasi toleransi, keberagaman, dan kebhinekaan. Ini bisa diwujudkan dalam pemilihan teks bacaan, kegiatan proyek sosial, atau pembiasaan upacara dengan tema kebangsaan. Guru harus kreatif menanamkan nilai tanpa harus terjebak pada formalitas. Keteladanan menjadi bentuk pendidikan paling kuat dalam membendung intoleransi yang cenderung bergerak diam-diam.

Ekstremisme tidak hanya tumbuh dari luar, tetapi juga dari krisis eksistensial di dalam diri siswa. Ketika mereka merasa tidak dimengerti, tidak dihargai, atau terasing dari komunitas, maka ideologi ekstrem bisa hadir sebagai pelarian. Guru harus hadir sebagai pendengar yang sabar dan pembimbing yang bijak. Dialog, bukan debat; pelukan, bukan tudingan; pendampingan, bukan penghakiman—itulah cara guru Nahdliyin-Marhaenis mematikan benih ekstremisme sejak dini.

Pemahaman agama yang rigid dan anti-dialog harus diluruskan melalui pendekatan keilmuan dan kultural. Guru dapat mengajak siswa untuk membaca kitab-kitab klasik Islam Nusantara yang mengajarkan adab sebelum ilmu, kasih sayang sebelum penegakan hukum. Penguatan pemahaman terhadap maqasid syariah—tujuan luhur dari syariat Islam—menjadi

penting agar siswa memahami bahwa agama diturunkan untuk melindungi nyawa, akal, agama, keturunan, dan harta, bukan untuk menimbulkan permusuhan.

Dalam pendekatan Marhaenis, guru diajak untuk membaca situasi sosial siswa: apakah mereka berasal dari keluarga termarginalkan, apakah mereka mengalami tekanan ekonomi, atau apakah mereka menjadi korban narasi radikal yang menyasar ketimpangan. Dalam konteks ini, pendidikan harus menjadi alat emansipasi, bukan alat hegemoni. Guru harus membangun sekolah sebagai ruang keadilan sosial, di mana setiap anak merasa setara dan memiliki harapan masa depan.

Ekstrakurikuler dan organisasi siswa juga menjadi sarana potensial membendung intoleransi. Guru perlu terlibat aktif dalam mendampingi kegiatan siswa, memastikan bahwa nilai-nilai keindonesiaan, toleransi, dan semangat gotong royong hidup dalam setiap aktivitas. Pembentukan komunitas dialog antaragama, diskusi lintas pandangan, serta proyek sosial kolaboratif bisa menjadi program konkret yang merawat keberagaman di tingkat akar rumput.

Pendidikan kewargaan tidak cukup hanya dengan hafalan Pancasila atau Undang-Undang. Ia harus dihidupkan dalam pengalaman keseharian siswa di sekolah. Guru perlu menciptakan ruang di mana siswa bisa mengungkapkan pendapat, mendengar pandangan berbeda, dan belajar dari pengalaman teman. Melalui praktik deliberasi ini, siswa belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan dalam demokrasi.

Sanksi terhadap intoleransi harus ada, namun lebih penting adalah pencegahan. Guru harus tanggap jika melihat tanda-tanda siswa yang mulai menyendiri, mengonsumsi konten ekstremis, atau menunjukkan gejala radikalisasi. Pendekatan persuasif yang humanis lebih efektif ketimbang pendekatan represif yang kaku. Di sinilah pentingnya guru menjadi figur yang dicintai, bukan ditakuti.

Pendidikan karakter harus diperluas definisinya, tidak hanya disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga keberanian menyatakan kebenaran, empati terhadap yang lemah, dan kejujuran dalam menyikapi perbedaan.

Guru bisa menggunakan metode cerita, film, atau kisah nyata untuk menyampaikan pesan moral yang kuat. Penceritaan kembali perjuangan tokoh-tokoh pluralis seperti KH Wahid Hasyim atau Gus Dur sangat efektif menanamkan nilai.

Dalam ruang digital, guru juga harus aktif mengimbangi narasi ekstrem dengan konten edukatif yang ramah dan inklusif. Media sosial kelas bisa diisi dengan kutipan tokoh Islam Nusantara, kisah pluralisme pesantren, atau refleksi spiritual yang menyejukkan. Literasi digital menjadi tameng sekaligus senjata untuk mengatasi penyebaran hoaks dan provokasi agama.

Di antara bentuk intoleransi paling berbahaya adalah diskriminasi diam-diam di ruang kelas. Guru harus introspektif: apakah ia memberikan perhatian yang sama pada semua siswa? Apakah ada kecenderungan memihak atau menstigma? Pendidikan yang membebaskan harus dimulai dari ruang paling kecil: interaksi harian antara guru dan murid.

Menumbuhkan toleransi juga membutuhkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Guru bisa menjalin kolaborasi dengan tokoh agama lokal, tokoh adat, dan komunitas lintas iman untuk memperkuat pesan damai. Dengan pendekatan ini, sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi simpul perdamaian dalam komunitas.

Dalam jangka panjang, guru Nahdliyin-Marhaenis harus memperjuangkan reformasi kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada keberagaman. Buku teks harus dikaji ulang agar tidak menyuburkan homogenisasi dan dogmatisme. Guru harus berani mengadvokasi pendekatan pedagogi yang terbuka dan humanis.

Intoleransi tidak hanya melemahkan pendidikan, tetapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Jika tidak diantisipasi, sekolah bisa menjadi ladang subur radikalisasi. Oleh karena itu, membentengi siswa dengan nilai-nilai moderat dan berpikiran terbuka adalah bentuk bela negara yang paling hakiki.

Pada akhirnya, membendung intoleransi adalah tanggung jawab moral dan kultural guru. Ia tidak bisa dipaksakan oleh peraturan semata, tetapi harus dilandasi oleh kesadaran ideologis dan spiritual. Guru

Nahdliyin-Marhaenis, dengan warisan nilai yang kaya, memiliki modal besar untuk menjalankan peran ini.

Perjuangan melawan ekstremisme tidak akan selesai dalam satu dekade. Ia adalah proyek panjang lintas generasi. Maka, guru harus tetap berdiri di garis depan, menjadi benteng nalar sehat, pelindung nilai-nilai Pancasila, dan pembawa cahaya Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Jika sekolah adalah rumah kedua, maka guru adalah penjaga gerbangnya. Dari tangan guru yang bersih dan hati yang bijak, akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga arif dalam hidup bersama dalam perbedaan. Di situlah kemenangan sejati pendidikan.

### **Etika, Kejujuran, dan Kemandirian sebagai Pilar Kebangsaan**

Dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat, fondasi utama yang tak boleh dilupakan adalah etika, kejujuran, dan kemandirian. Ketiga nilai ini tidak hanya menjadi prinsip moral individual, tetapi juga merupakan tiang penyangga kehidupan kolektif bangsa yang ingin maju secara beradab dan berkelanjutan. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki posisi strategis untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam praksis pendidikan, baik secara langsung melalui proses pembelajaran, maupun secara tidak langsung melalui keteladanan hidup yang konsisten.

Etika, dalam pengertian filosofisnya, adalah dasar dari segala tindakan manusia yang ingin dianggap bermakna dan sah dalam dimensi sosial maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, khususnya Aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah), etika bukan hanya aturan perilaku, tetapi manifestasi iman. Etika melibatkan kejujuran hati, kebersihan niat, dan kesalehan sosial. Demikian pula dalam perspektif Marhaenis, etika tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberpihakan kepada kaum tertindas dan penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Guru yang berpijak pada kedua fondasi ini akan mampu menuntun murid bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk bijaksana.

Kejujuran adalah anak kandung dari etika yang sejati. Dalam pendidikan, kejujuran harus menjadi roh yang menyatu dalam proses belajar

mengajar. Ketika guru berlaku jujur—mengakui kesalahan, menepati janji, menolak manipulasi nilai—maka murid akan merekamnya sebagai bentuk pembelajaran yang jauh lebih berharga daripada hafalan apapun. Kejujuran bukan sekadar soal tidak menyontek dalam ujian, tetapi tentang kesetiaan terhadap kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan. Di era VUCA yang sarat disrupsi informasi dan hoaks, kejujuran menjadi nilai yang semakin langka dan mahal. Oleh karena itu, guru harus menjadi benteng integritas.

Kemandirian merupakan nilai yang sering disalahpahami sebagai individualisme. Padahal, dalam konteks pendidikan kebangsaan, kemandirian berarti kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tanpa menjadi objek dari hegemoni budaya dan kekuasaan yang menindas. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus mampu membangun kemandirian intelektual dan spiritual dalam diri siswa. Murid tidak diajarkan untuk takluk terhadap dogma kekuasaan atau tunduk pada pasar bebas global tanpa kritik, tetapi justru didorong untuk membangun kesadaran diri sebagai subjek sejarah yang aktif dan merdeka.

Dalam konteks historis, nilai-nilai ini sejatinya telah dihidupi oleh para ulama pendiri NU dan oleh kaum Marhaen dalam perjuangan kemerdekaan. KH Hasyim Asy'ari, misalnya, meletakkan kejujuran dan adab sebagai syarat utama keberhasilan pendidikan. Sementara Soekarno, dalam banyak pidatonya, menekankan bahwa revolusi yang sejati bukan hanya mengganti kekuasaan kolonial, tetapi juga membebaskan mental bangsa dari ketergantungan dan kebohongan. Maka, tugas guru kini adalah melanjutkan warisan perjuangan tersebut dalam konteks abad ke-21.

Nilai-nilai etika, kejujuran, dan kemandirian dapat dimasukkan dalam berbagai elemen pendidikan sekolah secara kreatif. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa, siswa dapat diajak menganalisis teks tentang tokoh-tokoh jujur. Dalam pembelajaran IPS, diskusi tentang tokoh mandiri dan etis dalam sejarah bangsa bisa menjadi bahan refleksi. Dalam kehidupan sekolah, guru dapat mengembangkan sistem penilaian perilaku yang bukan

sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kedewasaan siswa dalam bertindak.

Implementasi nilai-nilai ini juga membutuhkan reformasi pada sistem evaluasi. Selama ini, keberhasilan siswa banyak diukur dari aspek kognitif semata. Padahal, di banyak kasus, siswa cemerlang dalam akademik belum tentu memiliki etika yang baik. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mulai berani memberi ruang besar untuk menilai karakter. Guru harus terlibat dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa karakter adalah bentuk kecerdasan yang tak kalah penting dari IQ atau nilai rapor.

Selain itu, peran guru sebagai role model menjadi aspek paling vital. Murid lebih mudah meniru daripada mendengar. Guru yang membela kejujuran di tengah tekanan, yang menolak manipulasi administratif, dan yang setia pada nilai kemanusiaan, akan menjadi cahaya bagi siswanya. Sebaliknya, guru yang abai terhadap etika akan menanamkan ketidakjujuran sebagai budaya baru. Keteladanan bukan tambahan, tetapi inti dari strategi membangun bangsa beretika.

Etika dalam pendidikan juga menyentuh relasi guru dengan murid, antar sesama guru, bahkan dengan birokrasi pendidikan. Etika komunikasi, etika profesi, dan etika pelayanan publik harus menjadi bagian dari refleksi harian guru. Tanpa itu, sekolah akan menjadi arena formal yang kehilangan ruh kemanusiaan. Guru Nahdliyin-Marhaenis ditantang untuk menjaga akhlak dan martabat profesi dengan tetap bersikap kritis terhadap struktur yang menindas.

Dalam dunia yang makin terjerumus dalam pragmatisme dan materialisme, guru juga perlu menjadi suara moral yang menegaskan kejujuran sebagai prinsip hidup, bukan sekadar kewajiban hukum. Ini berarti menanamkan keberanian kepada siswa untuk mengatakan “tidak” pada kebohongan, meski harus berbeda dari arus utama. Guru harus membangun keyakinan bahwa hidup jujur bukan hanya mungkin, tetapi bermartabat.

Kemandirian juga berarti guru harus memiliki keberanian untuk tidak bergantung pada politik kekuasaan dan birokrasi semata. Guru yang mandiri adalah guru yang berpikir otonom, terus belajar, dan membangun

jejaring kolaboratif secara horizontal. Dalam hal ini, komunitas guru Nahdliyin-Marhaenis bisa menjadi kekuatan alternatif dalam membangun gerakan pendidikan akar rumput yang bebas dari intervensi pragmatis.

Sebagai pilar kebangsaan, ketiga nilai ini harus bersifat lintas kurikulum. Mereka tidak bisa dibatasi dalam satu mata pelajaran atau waktu tertentu. Nilai-nilai ini harus menjadi atmosfer yang mengelilingi seluruh proses pendidikan. Dalam setiap keputusan, pertemuan, dan kebijakan sekolah, etika, kejujuran, dan kemandirian harus menjadi acuan utama.

Guru juga perlu mengajak siswa untuk memahami bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar moral individual, tetapi juga landasan politik kebangsaan. Negara yang jujur dan mandiri lahir dari rakyat yang menjunjung tinggi nilai yang sama. Ketika guru mengajarkan nilai-nilai ini, sesungguhnya ia sedang membangun fondasi bangsa yang kuat dari dalam.

Pengalaman empiris juga menunjukkan bahwa sekolah yang menumbuhkan nilai etika dan kemandirian memiliki iklim belajar yang sehat, siswa yang lebih berprestasi secara sosial, dan lulusan yang lebih tahan terhadap godaan korupsi. Maka, investasi pada pendidikan nilai adalah investasi masa depan bangsa yang tidak bisa ditunda.

Guru Nahdliyin-Marhaenis, dengan spirit spiritualitas dan sosialisme khas Indonesia, sangat relevan untuk mengemban amanat ini. Dengan pendekatan yang humanistik dan membumi, mereka bisa menjangkau siswa dari semua latar belakang dan mengajak mereka bersama-sama membangun Indonesia yang jujur dan berdaulat.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan lebih banyak guru yang tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga teguh dalam nilai. Etika, kejujuran, dan kemandirian bukan hanya pelajaran di sekolah, tetapi nyawa pendidikan yang bermakna. Di tangan guru-guru seperti inilah, Indonesia bisa bermimpi tentang masa depan yang lebih adil dan beradab.

## Moderasi, Multikulturalisme, dan Peran Guru

Dalam iklim global yang kian kompleks dan masyarakat yang semakin majemuk, moderasi dan multikulturalisme menjadi kata kunci dalam menjaga keutuhan bangsa dan membentuk generasi yang inklusif serta bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan bukan hanya ladang transfer ilmu, tetapi ruang pembentukan nilai yang menentukan apakah anak didik kita tumbuh sebagai penjaga perdamaian atau pemicu perpecahan. Di sinilah peran guru—terutama guru yang memiliki akar ideologis kuat seperti Nahdliyin dan Marhaenis—menjadi sangat strategis sebagai jembatan nilai antara generasi dan antar kelompok. Bab ini menyajikan refleksi mendalam dan praktik aplikatif tentang bagaimana pendidikan moderasi, toleransi, dan kebangsaan dapat dijalankan secara nyata oleh para guru.

Multikulturalisme sebagai fakta sosial dan sejarah bangsa Indonesia telah menjadi kekayaan sekaligus tantangan tersendiri. Negara ini berdiri di atas perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang jumlah dan kompleksitasnya sangat tinggi. Namun, sejarah juga mencatat bahwa harmoni dalam keberagaman bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis; ia harus dijaga, diajarkan, dan dihidupi. Guru berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam ruang kelas dan kehidupan sekolah. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, moderasi (*wasathiyah*) adalah prinsip utama dalam menyikapi keberagaman, sedangkan dalam pemikiran Marhaenisme, keberagaman adalah potensi kekuatan kolektif dalam perjuangan pembebasan dari ketimpangan struktural. Keduanya berpadu secara harmonis dalam membentuk visi pendidikan yang toleran dan emansipatoris.

Moderasi beragama, yang selama ini menjadi agenda besar Kementerian Agama dan MUI, bukanlah agenda politik semata, melainkan kebutuhan nyata dalam kehidupan pendidikan, khususnya di SMK dan pesantren. Guru di lembaga-lembaga ini menghadapi langsung realitas pluralitas yang tidak hanya bersifat agama, tetapi juga gaya hidup, ideologi, dan aspirasi. Jika guru tidak memiliki kedewasaan dalam memandang perbedaan dan kecakapan dalam mengelola keberagaman, maka sekolah mudah sekali

menjadi lahan subur bagi berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan eksklusivisme identitas. Karena itu, bab ini tidak hanya mengupas konsep moderasi secara filosofis, tetapi juga menyajikan strategi kurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat dijalankan oleh sekolah dalam mengembangkan ekosistem pendidikan yang inklusif.

Toleransi dan kerukunan sosial tidak mungkin tumbuh dalam ruang pendidikan yang masih sarat dengan dikotomi “kami dan mereka”, prasangka ideologis, serta miskin pengalaman lintas budaya. Guru memiliki tanggung jawab moral dan kultural untuk menciptakan ruang dialog, bukan hanya monolog. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan algoritma media sosial yang seringkali menguatkan bias dan polarisasi, guru harus menjadi penjaga nalar sehat dan jembatan emosi sosial. Di sinilah pendekatan pedagogi kritis—yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Paulo Freire dan relevan pula dengan prinsip Aswaja serta ajaran Bung Karno—mendapat tempat penting untuk diterapkan.

Dalam bab ini juga akan dibahas pentingnya membumikan pendidikan kebangsaan agar tidak sekadar menjadi hafalan empat pilar atau jargon nasionalisme dangkal, melainkan menjadi sikap hidup yang membumi. Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat mengambil pendekatan lokalitas—yakni menggali kearifan budaya dan sejarah lokal untuk membentuk nasionalisme yang otentik. Dalam konteks Indonesia, mencintai bangsa harus dimulai dari mencintai kampung halaman, mengenal tokoh adat, memahami narasi perjuangan masyarakat kecil, serta melihat Indonesia sebagai mozaik yang tersusun dari ribuan entitas unik.

Penguatan wawasan kebangsaan juga harus melibatkan transformasi metode mengajar. Pendekatan indoktrinatif harus digantikan dengan pendekatan partisipatif dan reflektif, yang memungkinkan siswa bertanya, mengkritik, dan menemukan makna nasionalisme melalui pengalaman mereka sendiri. Guru yang mampu menginspirasi bukanlah yang banyak memberi ceramah, tetapi yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang transformatif. Maka dari itu, bab ini juga akan memberikan model

dan contoh konkret bagaimana penguatan kebangsaan bisa terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah.

Singkatnya, Bab 5 ini akan menguraikan bagaimana guru Nahdliyin-Marhaenis harus dan bisa menjadi penjaga nilai dalam dunia yang terus berubah. Mereka bukan hanya pendidik, tetapi juga arsitek sosial yang merancang dan membentuk watak bangsa. Dengan landasan etis dari Aswaja dan keberpihakan historis dari Marhaenisme, guru dapat menjadi juru damai dalam keberagaman, penguat kohesi sosial di tengah keterpecahan, dan pembentuk masa depan yang berkeadaban. Bab ini menjadi simpul penghubung antara idealisme pendidikan dan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Mari kita selami dan renungkan bersama dengan jiwa terbuka dan semangat perubahan.

### **Pendidikan Moderasi Beragama di SMK dan Pesantren**

Dalam konteks pendidikan Indonesia masa kini, moderasi beragama bukan sekadar slogan politik atau program sektoral, melainkan kebutuhan kultural yang mendesak. Semakin berkembangnya arus informasi, mobilitas sosial, dan intensitas interaksi lintas identitas di ruang digital maupun nyata, membuat sekolah, termasuk SMK dan pesantren, menjadi arena strategis pembentukan pemahaman keagamaan yang tidak ekstrem, terbuka, dan menyejukkan. Pendidikan moderasi beragama di SMK dan pesantren menjadi benteng utama dalam menjaga kerukunan serta mencegah lahirnya generasi yang berpikiran biner, eksklusif, dan intoleran terhadap perbedaan.

Pesantren sebagai basis pendidikan Nahdliyin memiliki khazanah yang sangat kaya dalam pendidikan moderasi. Kitab-kitab turats yang diajarkan tidak hanya berisi ilmu fikih, tetapi juga adab, akhlak, dan hikmah. Di sinilah pentingnya mengembalikan marwah pesantren sebagai ruang kontemplatif, bukan hanya pusat hafalan atau penguasaan hukum. Di sisi lain, SMK sebagai institusi pendidikan vokasional menghadapi tantangan tersendiri karena siswa di dalamnya berasal dari berbagai latar belakang agama, etnik, dan sosial. Maka, pendidikan moderasi beragama harus

dikemas dalam bentuk yang membumi, aplikatif, dan kontekstual agar mampu menjadi jembatan antar nilai dan antargenerasi.

Moderasi beragama sejatinya adalah keberanian untuk mengambil jalan tengah yang adil, bukan berada di titik kompromi yang lunak. Jalan tengah ini berpijak pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ke-NU-an, sikap ini tercermin dalam prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i'tidal (tegak lurus). Guru Nahdliyin di SMK dan pesantren perlu menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai kerangka pembelajaran dan interaksi sosial di lingkungan sekolah, baik secara eksplisit dalam mata pelajaran maupun implisit dalam relasi harian dengan siswa.

Secara historis, pendidikan moderasi beragama telah menjadi ruh dari perjuangan ulama nusantara. Ulama seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Ahmad Dahlan, hingga Gus Dur membuktikan bahwa agama dan kebangsaan dapat bersinergi, bukan bertentangan. Dalam ajaran mereka, Islam tidak dibatasi oleh simbol-simbol politik atau dominasi mazhab tertentu, melainkan dibumikan melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Di sinilah letak korelasi yang kuat antara nilai Aswaja dengan gagasan Marhaenisme yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan pembebasan dari penindasan struktural.

Dalam tataran praktis, pendidikan moderasi beragama di SMK dan pesantren harus dimulai dari desain kurikulum. Mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta bimbingan konseling perlu disinergikan dengan pendekatan dialogis dan transformatif. Kurikulum bukan hanya memuat konten ajaran agama, tetapi juga strategi interaksi lintas iman dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Guru menjadi fasilitator yang mengajak siswa berdialog tentang keberagaman, bukan mendikte kebenaran secara sepihak.

Metode pembelajaran pun perlu diperbarui. Pengajaran berbasis ceramah sepihak yang hanya menekankan dalil dan dogma perlu dilengkapi dengan pendekatan naratif, studi kasus, simulasi interaksi lintas agama, serta pengalaman langsung dalam kegiatan lintas komunitas. Siswa diajak

untuk merasakan pengalaman keberagaman, bukan hanya mengetahuinya. Misalnya, melalui program kunjungan ke rumah ibadah, diskusi dengan pemuka agama lain, atau pengabdian masyarakat lintas kepercayaan. Pendekatan ini tidak mengikis identitas keagamaan, justru memperkuat rasa percaya diri karena pemahaman terhadap diri dan orang lain menjadi lebih utuh.

Penting juga bagi sekolah untuk menciptakan budaya dialog yang sehat dan terbuka. Forum OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kegiatan keagamaan sekolah bisa dijadikan ruang pembelajaran toleransi. Guru dan kepala sekolah harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertutur. Sekecil apapun ucapan yang diskriminatif, stereotip, atau merendahkan kelompok lain dapat menjadi benih intoleransi di benak siswa. Karenanya, pendekatan pendidikan karakter harus dimaknai sebagai pendidikan multikultural yang berpijak pada prinsip etika bersama.

Moderasi tidak berarti menghilangkan semangat religiusitas atau keteguhan iman. Justru sebaliknya, hanya individu yang matang secara spiritual yang mampu bersikap terbuka terhadap perbedaan. Guru Nahdliyin dan Marhaenis harus menyadari bahwa keberagaman bukanlah musuh, melainkan realitas sosial yang dikehendaki Tuhan. Tugas guru adalah membentuk siswa agar tidak tumbuh menjadi manusia yang takut terhadap perbedaan, tetapi mampu merangkulnya dengan bijak dan cerdas.

Implementasi pendidikan moderasi beragama juga perlu dukungan sistem. Sekolah dan pesantren harus memiliki visi yang jelas, aturan yang mendukung, serta program pembinaan yang konsisten. Supervisi dari kepala sekolah, pelatihan bagi guru, serta evaluasi terhadap narasi keagamaan di lingkungan sekolah menjadi bagian penting dari sistem penguatan moderasi. Guru tidak dapat berjalan sendiri. Mereka memerlukan dukungan komunitas, birokrasi, dan ormas keagamaan untuk menguatkan pesan moderasi yang mereka sampaikan di kelas.

Pendidikan moderasi juga sangat relevan untuk generasi Z yang saat ini duduk di bangku SMK dan pesantren. Generasi ini hidup dalam dunia terbuka, terpapar berbagai pandangan global, dan cenderung kritis

terhadap dogma. Mereka tidak cukup hanya diberi nasihat atau doktrin, melainkan perlu diajak berdialog, dilibatkan dalam kegiatan reflektif, dan diberi ruang untuk membangun kesimpulan sendiri. Guru harus menjadi teman belajar yang mendorong kebebasan berpikir, bukan pengontrol pemikiran.

Dalam hal ini, peran pesantren menjadi sangat penting sebagai lembaga pendidikan yang selama berabad-abad telah menjadi laboratorium hidup dari pendidikan toleransi dan moderasi. Di pesantren, perbedaan pendapat dalam mazhab, pendekatan fikih, dan bahkan praktik budaya dalam beragama dipahami sebagai rahmat, bukan ancaman. Budaya diskusi kitab kuning, musyawarah bahtsul masail, hingga pembacaan ulang terhadap teks klasik dalam konteks kontemporer, membentuk mentalitas santri yang inklusif. Oleh karena itu, SMK yang ingin membangun pendidikan moderasi bisa banyak belajar dari praktik pendidikan di pesantren.

Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Masih terdapat guru atau lembaga pendidikan yang secara tidak sadar membawa narasi-narasi eksklusif dan hitam-putih dalam menyampaikan ajaran agama. Pola pikir semacam ini bisa tumbuh karena ketidaktahuan, kurangnya pelatihan, atau minimnya literasi keagamaan yang berimbang. Maka, revitalisasi wawasan keagamaan para guru menjadi sebuah keniscayaan. Guru perlu dibekali dengan pendekatan tafsir sosial, maqashid syariah (tujuan syariah), dan pemikiran keagamaan progresif yang membebaskan.

Perlu juga disadari bahwa pendidikan moderasi beragama bukanlah proyek jangka pendek. Ia menuntut keberlanjutan, konsistensi, dan ketekunan. Tidak cukup dengan seminar atau pelatihan sekejap, tetapi harus ditanamkan dalam struktur berpikir dan budaya kelembagaan. Untuk itu, diperlukan integrasi antara kurikulum nasional, kurikulum pesantren, serta penguatan regulasi yang menjamin praktik moderasi beragama tidak hanya menjadi slogan, tetapi nilai yang hidup dalam sistem pendidikan kita. Inilah medan juang utama guru Nahdliyin-Marhaenis.

Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan kurikulum tematik berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal seperti tradisi gotong royong, selamatan, tradisi lisan tokoh lokal, atau praktik budaya lintas agama di daerah tertentu bisa dijadikan bahan ajar. Dengan ini, siswa tidak hanya mengenal nilai toleransi dari teks-teks formal, tetapi juga melalui pengalaman riil di lingkungannya. Guru sebagai fasilitator dapat menanamkan rasa cinta terhadap kebhinekaan yang tumbuh dari akarnya sendiri.

Di sinilah peran guru sebagai teladan moral dan narator nilai menjadi sangat penting. Nilai tidak cukup diajarkan, tetapi harus diteladankan. Sikap hormat pada perbedaan, kemauan untuk mendengar suara yang lain, dan kesediaan untuk berdialog secara terbuka, akan jauh lebih membekas di hati siswa daripada sekadar kutipan ayat atau hadis. Dalam konteks ini, guru menjadi agen transformasi sosial yang mendidik dengan ketulusan, bukan sekadar mengajar dengan instruksi.

Selain pendekatan naratif, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) bisa menjadi media pendidikan moderasi yang efektif. Misalnya, siswa diajak membuat film pendek tentang toleransi, menulis esai tentang pengalaman antaragama, atau mengadakan bakti sosial bersama siswa dari sekolah berbeda latar belakang keagamaan. Kegiatan semacam ini bukan hanya meningkatkan empati, tetapi juga memperluas horizon berpikir siswa terhadap realitas sosial yang kompleks.

Pendekatan reflektif juga perlu dikembangkan. Guru bisa memfasilitasi ruang-ruang renungan di mana siswa diajak memahami makna nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar hafalan teks, tetapi perenungan tentang mengapa manusia harus berbuat baik, mengapa menghargai orang lain itu penting, dan bagaimana menyikapi perbedaan dengan hati terbuka. Tradisi tadarus, zikir, dan muhasabah di pesantren bisa menjadi inspirasi dalam membangun refleksi bersama ini di SMK.

Di tingkat kebijakan, perlu keterlibatan aktif pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memastikan pendidikan moderasi masuk dalam indikator kualitas sekolah. Insentif dapat diberikan bagi sekolah

yang secara konsisten menerapkan program moderasi dan keberagaman. Demikian juga, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perlu merancang modul pelatihan guru berbasis moderasi yang berakar pada konteks Indonesia dan bukan sekadar mengadopsi konsep luar negeri.

Pada akhirnya, pendidikan moderasi beragama di SMK dan pesantren bukan sekadar benteng pertahanan terhadap radikalisme. Ia adalah jalan menuju kemanusiaan yang lebih beradab, lebih inklusif, dan lebih damai. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga dewasa dalam keberagaman.

Maka tugas kita sebagai pendidik bukan hanya menyampaikan pelajaran, melainkan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa keberagaman adalah anugerah, bahwa perbedaan adalah keniscayaan, dan bahwa harmoni tidak terjadi dengan sendirinya tetapi dibangun lewat niat dan kerja keras. Pendidikan moderasi beragama menjadi langkah kunci membentuk masa depan bangsa yang kokoh dalam iman, tetapi juga luas dalam pandangan dan lapang dalam kasih sayang.

### **Guru sebagai Penjaga Toleransi dan Kerukunan Sosial**

Guru dalam sistem pendidikan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga peradaban. Di tengah maraknya polarisasi sosial, fragmentasi identitas, dan menguatnya sentimen sektarian, guru memainkan peran vital sebagai penjaga toleransi dan penenun harmoni sosial. Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, peran ini semakin penting karena mereka mengemban dua misi sekaligus: menjaga nilai-nilai Islam moderat (Aswaja) dan melestarikan semangat kebangsaan yang berpihak pada kaum kecil sebagaimana diwariskan Marhaenisme. Guru bukan hanya mengajar di kelas, melainkan membentuk karakter, membangun pemahaman lintas perbedaan, dan menjaga perdamaian dari akar rumput.

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, guru selalu menjadi aktor utama dalam upaya menjaga kohesi sosial. Bahkan sebelum kemerdekaan,

guru-guru di pesantren, sekolah rakyat, hingga Taman Siswa telah menunjukkan komitmen untuk membangun bangsa yang damai dan bersatu. Mereka tidak sekadar mengajarkan baca tulis, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai hidup bersama dalam keberagaman. Dalam realitas Indonesia yang majemuk, guru tidak bisa hanya berpikir sebagai “tenaga pengajar,” melainkan harus menjadi agen dialog, penengah konflik, dan fasilitator rekonsiliasi sosial.

Persoalan toleransi di Indonesia bukan hanya berada di ranah ideologis, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Ketegangan antaragama, prasangka terhadap kelompok minoritas, atau eksklusi sosial terhadap yang berbeda masih menjadi tantangan nyata di sekolah. Guru yang berjiwa Nahdliyin-Marhaenis perlu menyadari bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirawat. Ini bukan sekadar slogan, tetapi kerja sunyi yang harus terus dilakukan dalam interaksi sehari-hari bersama siswa. Memberikan ruang untuk bertanya, membuka diskusi lintas identitas, serta tidak cepat menghakimi menjadi bagian dari keterampilan sosial yang harus dimiliki guru masa kini.

Salah satu pendekatan praktis yang dapat dilakukan guru adalah menggunakan prinsip *inclusive pedagogy*. Pendekatan ini menempatkan semua peserta didik sebagai subjek utuh yang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan potensi yang unik. Guru membangun kelas sebagai ruang aman (safe space) di mana siswa dari berbagai latar agama, suku, budaya, dan ekonomi merasa dihargai dan diperlakukan setara. Dalam model seperti ini, guru tidak hanya mengajarkan kognisi, tetapi juga membangun empati dan penghargaan terhadap keberagaman, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial.

Nilai-nilai Aswaja seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i’tidal (adil) menjadi dasar spiritualitas guru Nahdliyin dalam membimbing peserta didik untuk hidup bersama. Di saat dunia dilanda ketegangan ideologis dan ekstremisme berbasis agama, justru guru-lah yang bisa menyelamatkan generasi muda dari paham eksklusif yang mengancam persatuan bangsa. Seorang guru yang mampu

menghadirkan nilai-nilai Aswaja dalam dialog kelas akan menanamkan perspektif keberagaman yang damai, terbuka, dan kontekstual, jauh dari kebencian dan fanatisme buta.

Selain itu, semangat Marhaenis yang berpihak pada rakyat kecil menambah dimensi sosial dari praktik toleransi. Bagi guru Marhaenis, menjaga kerukunan bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, tetapi juga perbedaan kelas dan akses. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah seringkali menjadi korban diskriminasi struktural di sekolah. Guru yang memiliki kesadaran kelas akan memperlakukan semua murid dengan adil, tanpa bias status sosial. Ia akan memastikan bahwa anak dari buruh pabrik memiliki hak yang sama dalam pendidikan sebagaimana anak dari pejabat atau pengusaha.

Pengalaman praktik baik juga bisa ditemukan dalam gerakan sekolah multikultural di berbagai daerah. Di beberapa SMK dan pesantren inklusif, guru membangun budaya dialog lintas iman dengan melibatkan tokoh lintas agama, mendiskusikan isu-isu kemanusiaan global, serta mendorong proyek sosial kolaboratif. Kegiatan seperti ini membantu siswa untuk mengalami toleransi secara langsung, bukan hanya mengetahuinya lewat ceramah. Guru menjadi pemantik semangat siswa untuk peduli, berempati, dan bertindak nyata membangun harmoni sosial.

Untuk memperkuat peran guru sebagai penjaga toleransi, perlu adanya pelatihan profesional yang mengintegrasikan pendekatan interkultural, pendidikan perdamaian, dan rekonsiliasi. Guru perlu memahami dinamika psikologi sosial, teori konflik, serta metode mediasi agar mampu mengelola ketegangan yang mungkin muncul di lingkungan sekolah. Hal ini penting mengingat tidak semua konflik terjadi secara eksplisit—kadang dalam bentuk bisik-bisik diskriminatif, stereotip, atau pengucilan diam-diam yang berdampak pada kesehatan psikologis siswa.

Kementerian Pendidikan dan lembaga seperti LP Ma'arif NU serta organisasi pendidikan lainnya dapat mengambil peran dengan menyusun panduan praktis untuk guru tentang bagaimana mengimplementasikan toleransi dalam kurikulum dan kegiatan harian. Modul yang menekankan

pada keterampilan komunikasi empatik, analisis kritis terhadap ujaran kebencian, serta penguatan nilai-nilai bersama seperti kejujuran, kerja sama, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian integral dari pelatihan guru. Guru tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun toleransi; ia membutuhkan dukungan sistemik dari seluruh ekosistem pendidikan.

Lebih jauh, guru juga harus menjadi *role model* dalam kehidupan sosialnya. Di luar kelas, kehadiran guru dalam forum masyarakat, masjid, majelis taklim, atau kegiatan desa menjadi bukti nyata bahwa toleransi bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga tanggung jawab warga negara. Ketika guru aktif dalam kegiatan sosial yang inklusif, ia sedang memberi pesan kuat bahwa hidup damai bersama adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Bahkan dalam ruang digital, guru bisa menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan narasi perdamaian, bukan provokasi.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, peran guru sebagai penjaga toleransi menghadapi tantangan baru. Arus informasi yang deras dan tidak terkendali seringkali memperbesar misinformasi dan ujaran kebencian. Di sinilah pentingnya peran guru dalam membangun literasi digital yang kritis di kalangan siswa. Guru tidak cukup hanya mengajarkan teknologi, tetapi juga harus menjadi pembimbing etik dalam menggunakan media sosial, menyaring informasi, serta mempromosikan narasi damai. Literasi digital tanpa nilai hanya akan melahirkan generasi cerdas tapi keras hati. Sebaliknya, guru Nahdliyin-Marhaenis memadukan kecakapan digital dengan nilai-nilai kasih sayang dan kebijaksanaan lokal.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah integrasi antara kearifan lokal dengan kurikulum nasional. Di banyak daerah, terdapat nilai-nilai luhur seperti *gotong royong*, *musyawarah*, dan *tepa salira* yang menjadi bagian dari etika sosial masyarakat. Guru yang cermat dapat mengangkat kearifan ini sebagai sumber pembelajaran toleransi. Misalnya, dalam pelajaran sejarah atau PPKn, guru bisa menghadirkan tokoh lokal lintas agama yang hidup rukun di masa lalu sebagai inspirasi. Atau dalam pelajaran bahasa, siswa bisa membuat cerita pendek bertema toleransi berbasis

budaya lokal. Dengan demikian, toleransi tidak terasa sebagai ajaran asing, melainkan tumbuh dari akar budaya sendiri.

Penting untuk ditekankan bahwa toleransi bukan berarti meniadakan perbedaan atau menurunkan standar keyakinan pribadi. Toleransi dalam perspektif Nahdliyin-Marhaenis adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, tanpa harus menyamakan segalanya. Ini adalah bentuk akhlak tinggi, bukan kompromi terhadap kebenaran. Guru perlu mengajarkan kepada siswa bahwa kita bisa tetap teguh dalam keyakinan masing-masing, namun tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka yang berbeda. Dengan cara ini, sekolah menjadi laboratorium kecil bagi praktik hidup berbangsa yang damai dan inklusif.

Peran guru sebagai penjaga kerukunan sosial juga sangat krusial dalam situasi pascakonflik atau di wilayah yang pernah mengalami ketegangan antarkelompok. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran guru yang netral, bijak, dan berpihak pada perdamaian bisa menjadi titik awal pemulihan sosial. Guru dapat menjadi fasilitator forum silaturahmi antar orang tua murid lintas agama, menginisiasi program seni lintas budaya, atau menyelenggarakan dialog antar iman dengan dukungan sekolah. Inisiatif semacam ini memerlukan sensitivitas sosial dan keberanian moral yang hanya dimiliki oleh guru yang menjadikan toleransi sebagai panggilan hidup, bukan sekadar program kerja.

Menghadapi era Society 5.0 yang serba kompleks dan dinamis, kompetensi sosial emosional menjadi semakin penting. Guru tidak hanya mengajarkan siswa untuk cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara emosional. Empati, kemampuan mendengarkan, serta sikap terbuka terhadap keberagaman adalah *soft skills* yang harus dilatihkan sejak dini. Guru menjadi pelatih empati di kelas, yang menuntun siswa mengenali perasaan orang lain, memahami perspektif berbeda, dan bertindak dengan belas kasih. Dalam dunia yang mudah terbakar oleh isu identitas, empati adalah pemadam kebakaran sosial yang paling ampuh.

Penguatan karakter toleransi juga harus menjadi bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah, guru, staf, hingga petugas

keamanan harus menunjukkan sikap adil dan inklusif. Ketika sekolah memberi tempat yang setara bagi semua siswa, tanpa diskriminasi agama, suku, atau ekonomi, maka nilai toleransi tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan. Guru bisa mendorong terciptanya aturan sekolah yang berlandaskan keadilan sosial, misalnya dengan menyiapkan ruang ibadah untuk semua agama, menyelenggarakan peringatan hari besar lintas iman, atau membuka dialog antar OSIS dari berbagai latar belakang.

Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, toleransi juga bermakna perjuangan untuk kesetaraan. Ini berarti tidak cukup hanya menghindari kekerasan verbal atau fisik, tetapi juga aktif memperjuangkan akses yang setara bagi semua siswa. Guru harus berani menyuarakan ketimpangan yang terjadi di sekolah, seperti perlakuan istimewa kepada siswa kaya, pengabaian terhadap anak berkebutuhan khusus, atau stereotip terhadap kelompok tertentu. Toleransi sejati menuntut keberpihakan kepada yang lemah, bukan hanya netralitas semu.

Menjadi guru penjaga toleransi bukan pekerjaan yang mudah. Ia harus berhadapan dengan tekanan masyarakat, narasi ekstrem yang menyusup melalui media sosial, dan bahkan resistensi dari kolega sendiri. Namun, justru di tengah tantangan itulah martabat seorang guru diuji. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak diam saat melihat intoleransi merongrong anak-anak bangsa. Ia menjadi suara yang tenang namun tegas, menjadi perisai bagi keberagaman, dan menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan.

Akhirnya, menjaga toleransi dan kerukunan sosial bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan. Guru adalah arsitek nilai yang bekerja dalam diam, namun hasilnya membentuk wajah masa depan bangsa. Di tengah pusaran globalisasi dan arus fundamentalisme yang mengikis nilai-nilai lokal, guru menjadi cahaya yang menuntun generasi baru untuk tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Dalam kerangka Nahdliyin-Marhaenis, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga *mujahid* kemanusiaan yang memanggul harapan untuk Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban.

## Pendidikan Kebangsaan Berbasis Lokalitas

Pendidikan kebangsaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks keindonesiaan itu sendiri. Indonesia bukan sekadar sebuah negara, melainkan sebuah peradaban yang hidup dari keragaman bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal yang menyatu dalam semangat Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan kebangsaan berbasis lokalitas menjadi sebuah strategi yang penting dan strategis untuk memperkuat identitas nasional tanpa menghilangkan karakter kultural masyarakat. Guru Nahdliyin-Marhaenis memegang peran penting dalam menjembatani semangat nasionalisme dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Pendidikan kebangsaan berbasis lokalitas mengandaikan bahwa nasionalisme tidak bersifat abstrak, tetapi harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai cinta tanah air, gotong royong, dan bela negara dapat diajarkan melalui praktik budaya lokal yang sudah lama diwariskan oleh nenek moyang. Misalnya, di daerah Jawa, semangat kebangsaan bisa ditumbuhkan lewat budaya *sambatan*, *rukun tetangga*, dan *sedekah bumi*. Di Sumatera Barat, nilai *musyawarah* dan *adat basandi syarak* menjadi fondasi kolektif yang membentuk karakter warga. Guru yang memahami konteks ini akan mampu merumuskan strategi pembelajaran yang membumi, kontekstual, dan menyentuh pengalaman siswa.

Sejarah pendidikan Indonesia sejatinya telah menunjukkan keberhasilan pendidikan berbasis lokalitas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, misalnya, selalu mengakar pada konteks sosial dan budaya setempat. Kyai bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai cinta tanah air, semangat persatuan, dan tanggung jawab sosial. Dalam tradisi pesantren Nahdliyin, pendidikan kebangsaan tidak disampaikan melalui doktrin formal, melainkan ditanamkan melalui keteladanan, kehidupan komunal, dan pengabdian. Model ini dapat dijadikan inspirasi dalam menyusun kurikulum pendidikan kebangsaan yang relevan di SMK maupun sekolah umum.

Pendidikan kebangsaan yang baik tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dalam pendekatan lokalitas, pembelajaran kebangsaan bisa dilakukan melalui proyek berbasis budaya, pengenalan tokoh lokal yang menginspirasi, hingga pelibatan siswa dalam kegiatan sosial masyarakat. Guru bisa mengajak siswa meneliti sejarah desa mereka, membuat dokumentasi tradisi lokal, atau terlibat dalam kegiatan gotong royong. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami nasionalisme dalam teks, tetapi juga menjalaninya dalam kehidupan nyata. Pendidikan kebangsaan pun menjadi hidup, bermakna, dan membentuk karakter.

Lokalitas juga dapat menjadi jembatan untuk mengatasi sentralisme dalam sistem pendidikan nasional. Ketika semua nilai kebangsaan hanya dirumuskan dari perspektif pusat, ada potensi keterasingan yang dirasakan siswa di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang bagi ekspresi kebangsaan yang plural. Guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan materi kebangsaan dengan konteks daerah, tanpa mengurangi semangat nasional. Ini sejalan dengan semangat *Merdeka Belajar* yang menempatkan guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan kontekstual.

Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki kepekaan terhadap dimensi lokalitas karena mereka sendiri lahir dari rahim masyarakat yang berakar pada tradisi. Mereka memahami bahasa, simbol, dan struktur sosial lokal, sehingga lebih mudah menjalin komunikasi yang bermakna dengan siswa dan komunitas. Mereka juga tidak mengalami kegamangan antara nilai agama dan nasionalisme, karena dalam kerangka Aswaja, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dalam Marhaenisme, membela kaum lemah dan menjaga tanah kelahiran adalah bentuk konkret dari nasionalisme. Kombinasi ini menjadikan guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai agen strategis pendidikan kebangsaan.

Salah satu tantangan dalam pendidikan kebangsaan berbasis lokal adalah menumbuhkan semangat nasionalisme tanpa terjebak dalam primordialisme sempit. Perlu dibedakan antara cinta daerah dan fanatisme lokal yang bisa menjadi bibit disintegrasi. Oleh karena itu, guru harus

cermat membimbing siswa agar mampu mencintai budaya lokal sebagai bagian dari mozaik kebangsaan Indonesia. Siswa perlu diajarkan bahwa keberagaman bukan penghalang persatuan, melainkan kekayaan yang harus dirawat dan dihargai.

Pendidikan kebangsaan berbasis lokal juga menjadi alat untuk merawat memori kolektif bangsa. Banyak peristiwa sejarah lokal yang heroik, tetapi tidak tercatat dalam buku teks nasional. Guru bisa mengangkat kisah para pejuang daerah, perlawanan kultural terhadap penjajahan, hingga inisiatif rakyat dalam membangun pendidikan dan kesehatan. Kisah-kisah ini akan membentuk narasi kebangsaan yang lebih inklusif dan menghidupkan semangat perjuangan dalam diri siswa. Pendidikan tidak lagi menjadi ruang asing, tetapi menjadi cermin sejarah dan jati diri komunitasnya.

Dalam praktiknya, pendidikan kebangsaan berbasis lokal dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara sekolah, masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Misalnya, kegiatan pembelajaran luar kelas bisa melibatkan kunjungan ke situs sejarah lokal, wawancara dengan tokoh masyarakat, atau partisipasi dalam upacara adat. Guru menjadi fasilitator yang menjembatani dunia sekolah dengan realitas sosial budaya di sekitarnya. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih partisipatif dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang autentik.

Ke depan, pendidikan kebangsaan harus mampu menjawab tantangan globalisasi yang seringkali mengikis identitas lokal. Anak-anak muda mudah terpengaruh oleh budaya luar yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam situasi ini, pendidikan kebangsaan yang berbasis lokalitas menjadi benteng identitas yang kokoh. Guru harus kreatif meramu materi lokal dengan pendekatan kekinian, misalnya melalui video dokumenter, platform digital, atau media sosial. Nilai-nilai lokal tidak harus disampaikan secara tradisional, tetapi bisa dikemas secara modern agar relevan dengan generasi digital.

Pendidikan berbasis lokalitas juga membuka ruang untuk rekonsiliasi antara sejarah nasional dan sejarah rakyat. Dalam sejarah versi negara, sering kali hanya elit yang ditonjolkan sebagai pahlawan. Padahal

di pelosok desa dan kampung, terdapat banyak guru, ulama, petani, dan pejuang lokal yang berjasa bagi bangsa. Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat berperan sebagai penutur sejarah alternatif—sejarah yang membebaskan dan memberdayakan. Dengan mendekatkan siswa pada sejarah komunitasnya, maka kebanggaan dan rasa memiliki terhadap bangsa akan tumbuh secara alami dan tulus.

Kontekstualisasi pendidikan kebangsaan melalui lokalitas juga berarti memperhatikan bahasa daerah sebagai media pembelajaran. Dalam banyak masyarakat di Indonesia, bahasa ibu memiliki kekuatan afektif yang mendalam. Ketika nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan cinta tanah air disampaikan dalam bahasa yang familiar bagi siswa, maka pesan akan lebih menyentuh dan mudah diinternalisasi. Guru harus cakap menggunakan variasi bahasa dan pendekatan budaya sebagai jembatan komunikasi. Ini merupakan bagian dari strategi pedagogis transformatif berbasis akar budaya.

Dalam praktik sekolah, pendekatan lokal dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, pelajaran sejarah bisa mengangkat kisah tokoh lokal, pelajaran Bahasa Indonesia bisa menggunakan cerita rakyat setempat, sedangkan pelajaran seni budaya bisa menggali kearifan lokal seperti tari, musik, dan kuliner tradisional. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga menghargai warisan budaya yang menjadi fondasi identitas bangsa. Pendidikan menjadi sarana konservasi budaya sekaligus transformasi sosial.

Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut memiliki kepekaan ganda: pada satu sisi berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan keislaman tradisional, pada sisi lain bersikap terbuka terhadap dinamika nasional dan global. Mereka harus menjadi penghubung antara nilai-nilai kearifan lokal dengan arah pembangunan bangsa. Mereka tidak bersikap pasif terhadap perubahan, tetapi justru menjadi aktor yang mengarahkan perubahan agar tetap berpijak pada nilai dan jati diri. Peran ini membutuhkan kesadaran ideologis, wawasan kebangsaan, dan kemampuan pedagogis yang reflektif.

Sebagai agen transformasi, guru juga berperan mengidentifikasi persoalan-persoalan lokal yang menghambat kemajuan pendidikan. Banyak

daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan, minimnya infrastruktur, dan ketimpangan akses informasi. Dalam konteks ini, pendidikan kebangsaan tidak bisa bersifat seremonial, tetapi harus menjadi alat advokasi dan pemberdayaan. Guru dapat mengajak siswa memetakan masalah lokal dan merancang solusi melalui proyek komunitas. Pendidikan menjadi wahana praksis, bukan hanya teori.

Penting juga untuk menyadari bahwa pendidikan kebangsaan berbasis lokalitas tidak berarti eksklusif atau menutup diri dari luar. Sebaliknya, ia mengajarkan keterbukaan yang berbasis jati diri. Dengan menghargai budaya sendiri, siswa akan lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan dunia luar. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi karena memiliki akar yang kuat. Inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai “berkepribadian dalam kebudayaan.” Guru adalah penjaga akar itu.

Kegiatan budaya lokal yang diselenggarakan oleh sekolah juga menjadi bentuk konkret dari pendidikan kebangsaan berbasis lokalitas. Festival budaya, lomba pidato bahasa daerah, pementasan seni tradisional, dan pameran makanan lokal dapat menjadi medium pembelajaran yang menyenangkan sekaligus edukatif. Dalam kegiatan ini, siswa belajar tidak hanya secara kognitif, tetapi juga melalui pengalaman nyata. Guru memfasilitasi proses ini agar menjadi ruang pertemuan antarnilai dan antargenerasi.

Lebih jauh, pendidikan kebangsaan harus menjadi medan penyemaian nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks lokalitas, ini berarti menumbuhkan empati terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan: petani kecil, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Guru Marhaenis, dalam semangat ajaran Bung Karno, harus menanamkan kepedulian sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil. Sementara itu, semangat Nahdliyin menegaskan pentingnya akhlak, tawadhu, dan peradaban dalam memperjuangkan keadilan.

Untuk memperkuat implementasi, diperlukan pelatihan guru yang menekankan pada metode pembelajaran berbasis budaya lokal dan wawasan kebangsaan. LPTK, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan seperti NU harus bekerja sama membangun kapasitas guru

agar mampu menjadi pemikir sekaligus pelaksana pendidikan berbasis lokalitas. Bukan hanya sekadar menjalankan kurikulum nasional, tetapi juga menghidupkan kurikulum yang relevan dengan jiwa masyarakatnya.

Akhirnya, pendidikan kebangsaan berbasis lokalitas adalah bentuk dari pendidikan yang membumi, menyentuh realitas, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang otentik. Ini adalah jalan tengah antara nasionalisme simbolik dan pendidikan global yang kering makna. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah jembatan antara langit nilai-nilai luhur dan tanah tempat anak-anak bangsa berpijak. Melalui mereka, pendidikan menjadi cahaya yang menyinari kampung-kampung Indonesia dengan semangat kebangsaan yang hidup dan membebaskan.

### **Model Penguatan Wawasan Kebangsaan di Sekolah.**

Penguatan wawasan kebangsaan di sekolah bukanlah sekadar penambahan materi pelajaran atau kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi proses pendidikan yang utuh, mendalam, dan transformatif. Di tengah tantangan zaman VUCA dan derasny arus globalisasi, wawasan kebangsaan bukan hanya perlu dipertahankan, melainkan diperbarui dengan pendekatan yang kontekstual. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki peran strategis dalam menghidupkan nilai-nilai kebangsaan tersebut melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan harian.

Model pertama penguatan wawasan kebangsaan dapat dimulai dari penyusunan dan pengembangan kurikulum tematik yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial ke dalam seluruh mata pelajaran. Misalnya, pada pelajaran sains dapat ditanamkan semangat kemandirian dan kontribusi untuk negeri, sedangkan dalam pelajaran IPS, siswa diajak menganalisis dinamika sosial Indonesia dengan pendekatan sejarah lokal dan nasional. Guru memegang kunci untuk mengintegrasikan muatan kebangsaan dalam tiap proses pembelajaran.

Kegiatan kokurikuler seperti upacara bendera, diskusi kebangsaan, pelatihan kepemimpinan siswa, atau simulasi parlemen sekolah bukan sekadar formalitas. Bila dirancang dengan baik dan disertai refleksi nilai,

kegiatan tersebut mampu membangun kesadaran kritis siswa tentang pentingnya hidup berbangsa yang adil dan demokratis. Kegiatan ini juga menjadi wahana latihan berorganisasi, mengemukakan pendapat, dan menghargai perbedaan secara sehat, sebagaimana dijunjung tinggi dalam semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendekatan yang bersifat proyek berbasis komunitas (project-based learning) juga menjadi strategi yang efektif. Siswa dapat diajak mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar—kemiskinan, intoleransi, kerusakan lingkungan—dan merancang solusi dalam bentuk kegiatan nyata. Melalui proses ini, wawasan kebangsaan tidak lagi diajarkan sebagai hafalan konsep, melainkan sebagai nilai yang dialami dan diperjuangkan. Guru Marhaenis di sini menjadi fasilitator keberpihakan, bukan sekadar penyampai materi.

Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan juga memerlukan revitalisasi praktik budaya sekolah. Lingkungan sekolah harus menjadi miniatur kehidupan berbangsa yang inklusif, adil, dan beradab. Ketika siswa menyaksikan guru yang menjunjung nilai kejujuran, gotong royong, kesederhanaan, dan cinta tanah air dalam kesehariannya, mereka akan belajar lebih banyak dari teladan itu dibandingkan ceramah satu arah. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadi role model—tokoh hidup yang mencerminkan karakter kebangsaan sejati.

Kolaborasi dengan lembaga luar sekolah juga penting dalam penguatan wawasan kebangsaan. Sekolah bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi pemuda, dan bahkan dunia usaha untuk memberikan pengalaman belajar kebangsaan yang kontekstual dan relevan. Misalnya, program kunjungan ke pesantren, museum perjuangan, atau pabrik lokal bisa membuka mata siswa tentang sejarah, nilai gotong royong, dan kontribusi berbagai elemen masyarakat dalam membangun bangsa.

Penerapan teknologi dalam pendidikan kebangsaan juga menjadi keniscayaan di era Society 5.0. Guru dapat memanfaatkan platform digital untuk membuat video pembelajaran, podcast, atau simulasi daring yang menyentuh tema-tema seperti toleransi, pluralisme, dan sejarah bangsa.

Pendekatan digital bukan pengganti nilai, tetapi medium baru untuk menyampaikan nilai secara lebih efektif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh dalam dunia digital dan visual.

Penilaian dalam pendidikan kebangsaan pun harus diubah dari sekadar ulangan pilihan ganda ke arah refleksi mendalam dan proyek sosial. Siswa dapat diminta menulis esai tentang pengalaman mereka dalam membela nilai keadilan, membuat video kampanye kebangsaan, atau merancang kegiatan literasi multikultural di lingkungan mereka. Evaluasi seperti ini mendorong mereka untuk tidak hanya tahu, tetapi juga merasa dan melakukan sesuatu atas nama kebangsaan.

Guru perlu memperkuat literasi sejarah dan ideologi Pancasila agar tidak terjebak pada pengajaran dangkal. Pemahaman kritis terhadap sejarah kemerdekaan, peran tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan bangsa, serta relevansi UUD 1945 dan Pancasila harus terus diperkuat. Buku-buku sejarah alternatif, tulisan para ulama nasionalis, serta dokumen sejarah perjuangan rakyat kecil perlu dihidupkan kembali di ruang-ruang belajar sekolah. Inilah tanggung jawab guru Marhaenis untuk menjaga sejarah rakyat tetap hidup.

Tidak kalah penting adalah pendekatan dialogis dalam pembelajaran kebangsaan. Guru sebaiknya menciptakan ruang diskusi terbuka yang aman di kelas untuk membahas isu-isu kebangsaan, baik lokal maupun global. Siswa perlu didengarkan suaranya, diperkenankan berbeda pendapat, dan dibimbing secara bijak agar perbedaan itu membentuk karakter kebangsaan yang inklusif dan dewasa. Pendidikan dialogis menumbuhkan rasa kepemilikan atas bangsa.

Wawasan kebangsaan juga mesti bersifat progresif dan kritis, bukan statis dan dogmatis. Guru Marhaenis tidak boleh membiarkan siswa puas dengan nasionalisme simbolik, tetapi mendorong mereka untuk berpikir, “Apa arti menjadi warga negara yang adil dan bertanggung jawab?” Siswa harus didorong bertanya tentang kesenjangan sosial, keadilan hukum, dan distribusi kekayaan nasional. Dengan cara ini, pendidikan kebangsaan menjadi alat pembebasan, bukan pengaburan realitas.

Di sisi lain, guru Nahdliyin juga harus memperkuat akhlak dan spiritualitas dalam pendidikan kebangsaan. Nasionalisme tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai keimanan dan peradaban. Pendidikan kebangsaan yang bersandar pada akhlak akan menjauhkan siswa dari ekstremisme dan fanatisme buta. Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan Pancasila yang adil dan beradab akan menemukan titik pertemuannya dalam ruang kelas yang dipimpin guru dengan hati bersih.

Penguatan wawasan kebangsaan juga harus menyentuh dimensi ekonomi dan kemandirian. Siswa perlu dibekali semangat membangun ekonomi lokal, mendukung produk dalam negeri, dan berwirausaha berbasis nilai kebangsaan. Ini adalah kelanjutan dari semangat Marhaenisme Bung Karno: kemandirian dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Pendidikan kebangsaan yang tidak menyentuh dimensi kesejahteraan hanya akan menjadi utopia kosong.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah melalui integrasi kegiatan kepramukaan dan ekstra kurikuler dengan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi. Pramuka bukan hanya tempat bermain dan baris-berbaris, tetapi bisa menjadi ruang untuk menanamkan cinta tanah air, kerja sama, disiplin, dan kepedulian sosial. Guru bisa menyusun modul kepramukaan yang kontekstual dengan tantangan sosial saat ini.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus menjadi peneliti sosial. Mereka harus peka terhadap gejala intoleransi, radikalisme, dan kekerasan yang mungkin mengintai sekolah. Melalui observasi dan dialog, mereka dapat mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi pencegahan. Wawasan kebangsaan di sini menjadi upaya merawat kohesi sosial dan menguatkan integrasi bangsa dari ruang kelas yang kecil.

Penguatan wawasan kebangsaan juga memerlukan dukungan dari kepala sekolah dan kebijakan institusional. Sekolah harus punya visi kebangsaan yang dijabarkan dalam program kerja konkret. Mulai dari pelatihan guru, pembelajaran tematik, hingga kegiatan kesiswaan harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

Dukungan sistemik ini akan memperkuat posisi guru dalam melaksanakan peran kebangsaannya.

Pada akhirnya, pendidikan kebangsaan adalah upaya terus-menerus untuk menanamkan cinta yang berpijak pada kesadaran, bukan sekadar slogan. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah penanam benih-benih cinta itu. Di tangan mereka, bangsa ini tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dalam keberagaman, adil dalam sistem, dan bermartabat dalam peradaban. Mereka bukan hanya pengajar, tapi penjaga keutuhan jiwa bangsa.

▪ Urgensi

*Menjadi* **Guru**  
**Nahdliyin**  
**Marhaenis**

*di* **VUCA dan Society 5.0**

Ideologi, Kebangsaan, Transformasi,  
dan Inovasi Pendidikan



# Bagian 3

TRANSFORMASI GURU  
DI ERA VUCA DAN  
SOCIETY 5.0





## Menyikapi Dunia yang VUCA

Dunia pendidikan kini berada dalam pusaran perubahan yang tidak secepat, tetapi juga membingungkan, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Istilah *VUCA*—Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity—tidak hanya menjadi jargon militer atau manajerial, tetapi telah menembus ruang-ruang kelas, laboratorium, dan mushola sekolah. Guru tidak lagi dapat berpegang pada kepastian masa lalu, tetapi harus berenang di tengah gelombang realitas yang cair, penuh paradoks, dan menuntut kesiapan jiwa untuk beradaptasi dengan segala kemungkinan yang terjadi. Bab ini merupakan pengantar penting bagi siapa saja yang ingin memahami posisi strategis dan peran substantif guru Nahdliyin-Marhaenis dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini.

*VUCA* bukan sekadar tantangan teknologi, tetapi tantangan terhadap cara kita berpikir, merasa, dan mengambil keputusan sebagai pendidik. Guru yang dulunya hanya mengajarkan konten, kini dituntut membentuk karakter yang tahan terhadap disrupsi. Ketika algoritma bisa menggantikan pekerjaan teknis dan AI dapat memberikan informasi lebih cepat dari guru, maka kehadiran guru tidak lagi diukur dari seberapa banyak ia tahu, melainkan seberapa bijak ia membimbing. Guru Nahdliyin-Marhaenis ditantang untuk menghadirkan nilai-nilai keikhlasan, kesetiaan pada prinsip, dan keberanian untuk berdiri dalam badai perubahan dengan tetap mengakar pada nilai Aswaja dan Marhaenisme.

Dalam kerangka filosofis, *VUCA* dapat dilihat sebagai ujian ontologis terhadap eksistensi manusia. Bagaimana guru memaknai kehadirannya dalam dunia yang terus berubah? Bagaimana ia membedakan antara perubahan yang progresif dengan yang semu? Dalam filsafat pendidikan Islam, ketidakpastian dunia justru menjadi peluang untuk memperkuat keimanan dan kesadaran diri sebagai hamba dan khalifah. Dalam pandangan Marhaenis, kompleksitas sosial justru menuntut sikap berpihak pada rakyat yang terpinggirkan oleh sistem. Maka, memahami *VUCA* bukan dengan kegelisahan yang cemas, tetapi dengan keberanian yang bersumber dari keyakinan filosofis dan ideologis.

Secara historis, bangsa Indonesia telah berulang kali menghadapi situasi VUCA. Dari penjajahan, revolusi kemerdekaan, pergolakan politik, hingga reformasi, kita hidup dalam ketidakpastian. Namun dari setiap masa sulit itu, muncul figur-figur guru, ulama, dan pejuang yang tidak hanya bertahan, tetapi memberi arah. Guru-guru di masa penjajahan tidak takut mengajarkan nasionalisme di balik tembok pesantren. Di masa Orde Baru, guru-guru Marhaenis tetap menyelipkan nilai-nilai keadilan sosial dalam pembelajaran mereka. Maka kini, saat digitalisasi mengguncang tatanan lama, giliran guru Nahdliyin-Marhaenis masa kini menunjukkan keteguhan serupa.

Konsep VUCA bukan untuk ditakuti, tetapi dipahami secara kritis. Volatility mengajarkan bahwa perubahan bisa terjadi tiba-tiba, maka guru harus lentur, bukan kaku. Uncertainty mengingatkan bahwa perencanaan pun bisa goyah, maka guru perlu membangun intuisi dan refleksi. Complexity menuntut guru untuk berpikir sistemik, menghubungkan berbagai variabel kehidupan. Ambiguity mengharuskan guru tidak hanya mengandalkan logika hitam-putih, tetapi mengasah hikmah dan kebijaksanaan. Seluruh tantangan ini sesungguhnya adalah ladang amal bagi guru yang ingin mendidik bukan hanya kepala, tapi juga hati dan jiwa.

Dalam realitas SMK, madrasah, dan sekolah-sekolah di pinggiran, gejala VUCA tampak dalam bentuk hilangnya orientasi belajar siswa, tekanan administratif yang terus bertambah, serta ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi. Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut hadir bukan sebagai korban sistem, tetapi sebagai penentu arah. Mereka harus membangun atmosfer kelas yang resilien, merancang pembelajaran yang lentur terhadap perubahan, dan tetap berpegang pada prinsip bahwa pendidikan adalah alat pembebasan, bukan sekadar pemenuhan kurikulum.

Model peran guru pun kini bergeser. Dari pengajar menjadi mentor. Dari instruktur menjadi fasilitator nilai. Dari pengontrol menjadi pembimbing kebebasan bertanggung jawab. Di tengah VUCA, guru dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tidak hanya memutakhirkan

pengetahuan, tetapi juga memurnikan niat. Mereka harus menjadi cermin nilai Aswaja yang tawassuth, tawazun, dan tasamuh, serta menjadi penggerak semangat Marhaen yang membela yang lemah dan menjaga yang kecil agar tidak tertindas oleh sistem yang besar.

Aspek spiritualitas menjadi benteng yang tak tergantikan dalam menghadapi dunia VUCA. Guru yang senantiasa mengawali hari dengan doa, yang menjadikan mengajar sebagai ibadah, akan memiliki ketahanan jiwa yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya berpikir teknis. Dalam semangat Nahdliyin, guru bukan hanya pengajar, tapi juga murobbi yang membimbing dengan kasih sayang, sabar dalam ujian, dan teguh dalam menghadapi badai kehidupan.

Demikian pula dimensi sosialisme kerakyatan ala Marhaenisme. Di tengah disrupsi yang makin memperlebar jurang sosial, guru ditantang untuk membela anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat agar tidak tenggelam dalam ketidakadilan sistemik. Guru tidak cukup hanya mengajarkan teknologi, tetapi juga harus menyemai kesadaran kritis, keberanian menyuarakan ketimpangan, dan kemauan menciptakan ruang belajar yang berpihak pada mereka yang tersisih.

Pendidikan dalam era VUCA tidak bisa lagi dibangun dengan pendekatan linear. Diperlukan desain kurikulum yang lentur, metode pengajaran yang partisipatif, dan pengambilan keputusan yang berbasis pada konteks sosial. Guru Nahdliyin-Marhaenis, dengan karakter spiritual dan keberpihakan sosialnya, memiliki modal kuat untuk memimpin transisi ini. Ia tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi juga perancang masa depan sekolah yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

Bab ini akan mengeksplorasi empat hal pokok yang menjadi tuntutan bagi guru Nahdliyin-Marhaenis dalam merespons VUCA secara kritis dan transformatif. Pertama, memahami esensi VUCA dan bagaimana ia bekerja dalam konteks pendidikan. Kedua, menggali dan membangun kecakapan adaptif agar guru tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan menumbuhkan. Ketiga, memperkuat ketahanan mental, spiritual, dan sosial guru agar menjadi teladan di tengah krisis. Dan keempat, merumuskan strategi

pendidikan yang lentur, bijak, dan progresif untuk menghadapi dunia yang tak pasti.

Ketika sistem seringkali rapuh dan kebijakan tak mampu mengantisipasi perubahan secara cepat, maka guru menjadi benteng terakhir harapan bangsa. Guru yang sadar sejarah, paham nilai, dan sanggup bertransformasi adalah wujud ideal dari Guru Nahdliyin-Marhaenis masa kini. Ia tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi menyiapkan masa depan. Ia bukan sekadar saksi perubahan, tapi aktor utama pembentuk peradaban baru.

### **Memahami Konsep VUCA secara Kritis**

Konsep VUCA pertama kali diperkenalkan oleh U.S. Army War College pada awal 1990-an untuk menggambarkan dunia pasca-Perang Dingin yang tidak lagi memiliki pola geopolitik yang jelas. VUCA merupakan akronim dari Volatility (ketidakstabilan), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kerumitan), dan Ambiguity (ketidakjelasan). Meskipun berasal dari ranah militer dan manajemen strategis, VUCA kemudian diadopsi secara luas dalam berbagai disiplin, termasuk pendidikan. Bagi guru, memahami dunia yang digambarkan dengan VUCA bukan sekadar wacana teori, tetapi sebuah keharusan strategis untuk mampu merancang pendidikan yang relevan, tangguh, dan berpihak kepada kemanusiaan.

Volatility merujuk pada perubahan yang cepat dan tidak terduga. Dalam dunia pendidikan, ini tampak dari seringnya perubahan kurikulum, arah kebijakan pendidikan, hingga kebutuhan kompetensi siswa yang terus bergeser. Guru Nahdliyin-Marhaenis perlu memahami bahwa kestabilan bukanlah norma baru, melainkan kesiapan untuk berubah yang menjadi keniscayaan. Filosofi Aswaja yang berpijak pada ijtihad dan tajdid memberi ruang bagi guru untuk tetap teguh dalam prinsip, namun lentur dalam bentuk implementasi.

Uncertainty menggambarkan ketidakpastian masa depan yang sulit diprediksi. Dalam konteks pendidikan, guru dihadapkan pada kondisi sosial yang mudah berubah, kondisi ekonomi keluarga siswa yang fluktuatif, dan arah teknologi yang kadang membingungkan. Ketidakpastian ini

menuntut guru untuk tidak terjebak pada kepastian masa lalu. Di sinilah pentingnya sikap istiqamah namun terbuka. Sebagaimana pesan para ulama, kepastian hanya milik Tuhan, sementara tugas manusia adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya di tengah ketidakpastian.

Complexity berarti bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi tunggal karena melibatkan banyak variabel yang saling terkait. Dunia pendidikan menghadapi kompleksitas mulai dari beragamnya latar belakang siswa, tekanan administratif, kebijakan pusat dan daerah yang belum sinkron, hingga relasi sosial yang berlapis. Guru harus memiliki kemampuan berpikir sistemik dan holistik, dan inilah yang menjadikan pendekatan Marhaenis yang kontekstual, membumi, dan penuh kepedulian sosial menjadi sangat relevan. Pendidikan bukanlah sistem linier, tapi ekosistem kehidupan.

Ambiguity menggambarkan situasi yang penuh ketidakjelasan. Dalam ruang kelas, guru menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak selalu punya jawaban pasti. Apakah teknologi selalu baik? Apakah nilai kognitif lebih penting dari karakter? Apakah semua inovasi mendukung kemanusiaan? Guru yang paham VUCA tidak buru-buru menjawab, tetapi mengajak siswa berpikir kritis dan reflektif. Di sinilah letak pentingnya pendidikan yang humanistik dan transformatif, bukan sekadar teknis.

Dalam pandangan filsafat Islam klasik, dunia memang penuh ketidak-tetapan. Al-Ghazali menyebut dunia sebagai *dar al-bala*, tempat ujian dan perubahan. Maka yang diperlukan bukan kepastian duniawi, melainkan keistiqamahannya hati dan kejernihan akal dalam menyikapi ketidakpastian. Guru Nahdliyin dapat menarik hikmah ini dalam membentuk ketahanan spiritual dan akhlak mulia, sehingga tidak mudah goyah di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, Marhaenisme mengajarkan bahwa perubahan sosial harus dipandu oleh keberpihakan kepada rakyat kecil. Dalam situasi VUCA, yang paling rentan adalah mereka yang tak memiliki akses dan daya tawar. Oleh karena itu, guru Marhaenis memaknai VUCA bukan sebagai ancaman,

melainkan peluang untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui pendidikan yang berpihak pada mereka yang tertinggal—siswa di daerah miskin, anak buruh, nelayan, petani, dan kelompok minoritas.

Secara aplikatif, pemahaman akan VUCA dapat diwujudkan dalam desain pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Guru tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional semata, tetapi harus mampu menggunakan pendekatan kolaboratif, berbasis proyek, dan kontekstual. Misalnya, ketika membahas konsep ekonomi di kelas akuntansi, guru dapat mengaitkan dengan dinamika harga sembako di masyarakat sekitar dan dampaknya terhadap keluarga siswa. Ini bukan hanya pengajaran konten, tetapi pemberdayaan cara berpikir kritis.

Sebagai konsekuensi dari pemahaman atas VUCA, guru juga perlu mengembangkan literasi baru: literasi data, literasi teknologi, dan literasi nilai. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Literasi data memungkinkan guru menginterpretasi dinamika yang berubah; literasi teknologi memungkinkan guru memanfaatkan platform pembelajaran daring secara efektif; dan literasi nilai menjaga agar semua inovasi tetap berpijak pada kemaslahatan. Ini adalah bentuk *ijtihad pedagogik* yang membumikan ilmu dengan kebajikan.

Pemahaman terhadap VUCA juga berarti guru harus memperluas jejaring kolaborasi, baik dengan rekan sejawat, orang tua, tokoh masyarakat, maupun lembaga eksternal. Dunia yang kompleks menuntut solusi yang kolaboratif. Guru tidak bisa lagi bekerja sendirian. Di sinilah pentingnya membangun komunitas belajar, forum musyawarah, dan ruang-ruang refleksi yang menumbuhkan solidaritas antarguru dan antarpendidik lintas latar belakang.

Dalam tradisi Nahdliyin, kerja berjamaah menjadi kunci ketahanan sosial. Ketika kompleksitas hidup menekan, maka kebersamaan dalam niat baik dan amal pendidikan menjadi penyangga utama. Semangat gotong royong, *khidmah* kepada masyarakat, dan *tawadhu'* dalam ilmu adalah warisan besar pesantren yang sangat sesuai untuk menjawab tantangan

VUCA. Guru tidak boleh merasa hebat sendiri, tapi harus bersedia tumbuh bersama.

Ambiguitas yang muncul dalam dunia VUCA juga mengharuskan guru memperdalam kemampuan berpikir reflektif dan naratif. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali tradisi bercerita (hikayat), kisah hikmah dari ulama terdahulu, dan perenungan nilai dalam setiap pertemuan kelas. Guru bukan hanya pengantar informasi, tetapi pemakna kehidupan. Di tengah derasnya arus konten digital, suara guru yang penuh hikmah menjadi penyeimbang dan pembimbing nurani.

Dari segi kebijakan, VUCA mengajarkan bahwa perencanaan yang kaku dan birokratis tidak lagi memadai. Guru harus mampu merancang pembelajaran berbasis konteks lokal, dengan kurikulum yang berpihak pada kebutuhan dan potensi siswa. Maka, konsep Kurikulum Merdeka sebenarnya menjadi peluang besar jika guru memahami VUCA secara kritis—yakni mengubah ketidakpastian menjadi kebebasan bermakna untuk merdeka belajar.

Dengan membaca dunia VUCA melalui lensa Nahdliyin dan Marhaen, guru tidak terjebak dalam kecemasan berlebihan, tetapi mampu mengarahkan harapan yang berpijak pada kearifan. Ia sadar bahwa perubahan memang tak bisa dihindari, namun arah perubahan bisa dibimbing. Di sinilah peran sentral guru sebagai *agen transformasi yang bernurani*.

### **Kecakapan Adaptif Guru Nahdliyin-Marhaenis**

Dalam menghadapi dunia yang terus berubah cepat, guru tidak cukup hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus memiliki kecakapan adaptif yang memungkinkan mereka tetap relevan, resilien, dan berdaya. Cakupan kecakapan adaptif meliputi kemampuan untuk menyesuaikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap perubahan lingkungan sosial, budaya, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Di sinilah peran strategis Guru Nahdliyin-Marhaenis hadir: menjadi sosok yang lentur tanpa kehilangan akar, yang berubah namun tetap berpegang pada nilai.

Tradisi Nahdliyin menekankan prinsip *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (toleran). Ketiganya bukan hanya prinsip dalam beragama, tetapi juga dasar dalam membangun kecakapan adaptif guru. Seorang guru yang bersikap moderat akan mampu menerima perbedaan cara pandang, mampu menyikapi perubahan kurikulum tanpa panik, dan membuka diri pada teknologi baru tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang diyakininya. Di tengah ketidakpastian dan arus ideologi, sikap moderat adalah pelindung jiwa profesionalisme guru.

Di sisi lain, Marhaenisme menanamkan semangat perjuangan yang membumi. Guru tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga peka terhadap ketimpangan. Adaptasi bukan sekadar mengikuti arus, tetapi memilih posisi etis untuk berpihak pada keadilan. Dalam konteks ini, guru menjadi agen perubahan yang tidak hanya bertahan di tengah VUCA, tetapi juga menyuarakan aspirasi mereka yang tak bersuara—para siswa dari keluarga marjinal, daerah 3T, atau yang tersingkir karena sistem.

Kecakapan adaptif memerlukan kemampuan literasi kritis. Guru tidak cukup sekadar tahu cara menggunakan teknologi, tetapi harus memahami implikasi sosial dari penggunaannya. Apakah platform digital memudahkan atau justru memperlebar ketimpangan? Apakah pembelajaran daring menjangkau semua siswa atau hanya sebagian kecil? Guru Nahdliyin-Marhaenis akan bertanya lebih dalam, tidak berhenti pada efisiensi, tetapi menuntut keadilan dan kebermaknaan.

Selain literasi kritis, adaptabilitas juga memerlukan empati. Dalam banyak tradisi keilmuan Islam, empati disebut sebagai *rahmah*, kasih sayang yang aktif. Guru yang adaptif adalah mereka yang memahami kondisi siswanya—baik yang memiliki gawai maupun yang tidak, baik yang tinggal di kota maupun desa, baik yang secara ekonomi kuat maupun yang lemah. Di tengah era VUCA, *rahmah* menjadi fondasi pedagogi profetik.

Kecakapan adaptif juga ditentukan oleh kemampuan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Guru harus menjadi pembelajar yang tekun, bukan hanya pengajar. Seorang guru Marhaenis memahami bahwa pengetahuan tidak statis; ia berkembang mengikuti dinamika sosial. Karenanya, guru

harus aktif mengikuti pelatihan, membaca literatur baru, berpartisipasi dalam komunitas belajar, dan terus meninjau praktik mengajarnya agar tetap kontekstual dan relevan.

Dalam Islam, semangat *tholab al-'ilm* atau mencari ilmu tak pernah berhenti. Ini bukan semata-mata ibadah individual, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Guru yang terus belajar adalah guru yang terus bertumbuh. Dan pertumbuhan ini adalah bentuk jihad intelektual di tengah perubahan zaman. Dalam perspektif ini, kecakapan adaptif adalah bentuk keberagaman yang aktif dan progresif.

Kecakapan adaptif juga berarti mampu membangun sinergi lintas generasi. Guru yang adaptif tak merasa superior karena usianya lebih tua, tetapi bersedia belajar dari generasi Z yang hidup dalam ekosistem digital. Mereka merangkul perbedaan cara pandang, gaya komunikasi, dan cara berpikir siswa tanpa kehilangan otoritas nilai. Inilah bentuk kematangan psikologis dan spiritual yang diteladankan para ulama terdahulu.

Di sekolah, kecakapan adaptif diwujudkan dalam bentuk strategi pembelajaran yang fleksibel. Guru mampu merancang RPP yang tidak kaku, mengintegrasikan materi lokal dalam kurikulum nasional, dan menyesuaikan penilaian dengan situasi siswa. Misalnya, pada masa pandemi, guru yang adaptif mengubah metode dari ceramah ke proyek berbasis rumah tangga, dari ulangan ke jurnal reflektif. Di sinilah kreativitas bertemu dengan empati.

Kreativitas juga merupakan komponen penting dari kecakapan adaptif. Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut untuk tidak hanya mengikuti modul dari pusat, tetapi mengembangkan materi sesuai konteks. Di pesantren, kreativitas ini bisa berbentuk penggunaan kisah-kisah hikmah; di SMK bisa berupa simulasi bisnis kecil berbasis lokal; di sekolah umum bisa dalam bentuk proyek sosial berbasis isu kebangsaan. Adaptasi menjadi alat untuk menciptakan makna, bukan sekadar bertahan hidup.

Tantangan terbesar adaptasi bukan teknologi, tetapi mentalitas. Guru yang terbiasa nyaman dengan metode lama sering kali enggan berubah. Di sinilah peran organisasi seperti NU sangat penting: menghadirkan

pelatihan yang tidak hanya teknis, tetapi juga membangkitkan kesadaran ideologis bahwa perubahan bukan ancaman, melainkan lahan dakwah dan perjuangan baru. Guru harus diyakinkan, bukan diintimidasi.

Dalam Islam, perubahan adalah bagian dari sunatullah. Surat Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Ayat ini bukan hanya doktrin spiritual, tetapi juga motivasi sosial. Guru harus menjadi bagian dari kaum yang mengubah, bukan yang menunggu. Adaptasi adalah bentuk pengabdian.

Dalam pandangan Marhaenis, perubahan bukanlah monopoli elite. Kaum Marhaen—rakyat kecil, petani, guru honorer—memiliki hak dan kemampuan untuk mengubah sejarah. Maka kecakapan adaptif bukan hanya milik guru di kota atau mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi, tetapi bisa tumbuh dari kesadaran kritis siapa pun. Adaptasi bukan urusan sumber daya, tapi urusan keberanian.

Kecakapan adaptif juga harus dibarengi dengan *manajemen diri*. Guru harus mampu mengelola stres, waktu, dan energi dengan bijak. Dunia VUCA menimbulkan tekanan luar biasa, dan guru yang tidak memiliki keseimbangan emosional akan mudah lelah, sinis, dan kehilangan makna kerja. Maka spiritualitas dan disiplin diri menjadi fondasi dari kecakapan adaptif.

Untuk itu, dukungan ekosistem sangat penting. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi guru untuk bereksperimen, gagal, belajar ulang, dan berkembang. Kepala sekolah dan dinas pendidikan harus menjadi fasilitator adaptasi, bukan penjaga status quo. Adaptasi yang didukung sistem akan melahirkan inovasi yang berkelanjutan.

Komunitas juga berperan. Forum-forum KKG, MGMP, dan komunitas belajar guru Nahdliyin-Marhaenis harus dihidupkan kembali. Bukan sekadar sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai ruang refleksi, berbagi praktik baik, dan saling menguatkan. Di era VUCA, adaptasi tak bisa dilakukan sendiri. Harus berjamaah.

Penting pula menghadirkan mentor. Guru-guru senior yang sudah mengalami banyak perubahan dapat menjadi sumber inspirasi dan pembimbing adaptasi. Pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan kurikulum, politik pendidikan, dan krisis sosial menjadi bekal tak ternilai untuk guru muda. Inilah nilai *silsilah* keilmuan yang menjadi kekuatan dalam tradisi NU.

Akhirnya, kecakapan adaptif adalah bukti bahwa guru tidak hanya menjadi korban zaman, tetapi subjek sejarah. Ia tidak sekadar diajar oleh perubahan, tetapi juga mengajarkan bagaimana bersikap dalam perubahan. Guru Nahdliyin-Marhaenis bukan hanya pelayan sistem, tetapi penggerak peradaban. Jika adaptasi dilakukan dengan nilai dan strategi, maka guru akan tetap menjadi obor di tengah gelapnya zaman. Ia tidak tenggelam dalam teknologi, tidak terbelenggu dalam kebijakan yang berubah, tetapi terus melangkah dengan cahaya hikmah dan keberanian. Ia adalah penjaga nilai, pemimpin kecil dalam dunia yang besar.

### **Ketahanan Mental, Spiritual, dan Sosial Guru**

Ketahanan seorang guru di era disrupsi bukan hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi atau metodologi pembelajaran, melainkan oleh kekuatan mental, kedalaman spiritual, dan jejaring sosial yang ia bangun. Dunia VUCA yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas menuntut seorang guru untuk tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga tahan banting secara batin, teguh secara ideologis, dan kokoh dalam jejaring sosial kemasyarakatan. Ketahanan menjadi benteng eksistensial sekaligus spiritual bagi guru dalam menjalankan amanat keilmuan dan kemanusiaannya.

Ketahanan mental seorang guru terwujud dalam kemampuannya menghadapi tekanan dan stres, baik yang bersumber dari siswa, orang tua, kebijakan pemerintah, maupun dinamika institusional di sekolah. Dalam tradisi Nahdliyin, ketahanan ini bersumber dari sikap *ikhlas* dan *sabar*, yang bukan pasif atau menyerah, tetapi bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah. Guru Nahdliyin yang ikhlas

bekerja akan menghadapi tantangan bukan dengan keluhan, melainkan refleksi dan perbaikan terus-menerus.

Sejalan dengan itu, Marhaenisme mengajarkan *keteguhan dalam perjuangan*. Guru yang berpihak pada kaum kecil, pada siswa-siswa dari keluarga marginal, tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi sistem yang tidak adil. Ketahanan mental ala Marhaenisme adalah tentang *konsistensi ideologis*, yakni keberanian untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai pendidikan yang membebaskan meskipun jalan itu penuh rintangan. Dalam konteks ini, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pejuang dalam senyap.

Ketahanan spiritual bagi guru sangat penting karena ia menjadi penopang batin di tengah turbulensi dunia luar. Dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara, guru adalah pewaris nabi yang tugasnya bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menyalurkan cahaya batiniah kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ketahanan spiritual dibangun dari rutinitas ibadah yang khusyuk, laku dzikir yang kontemplatif, serta keterhubungan hati yang mendalam dengan Sang Pencipta. Guru yang memiliki spiritualitas kuat akan menjadi sumber ketenangan bagi lingkungan sekitarnya.

Salah satu ciri ketahanan spiritual adalah sikap *tawakal*—berserah diri tanpa meninggalkan ikhtiar. Guru yang tawakal akan melakukan yang terbaik dalam mengajar, membina karakter siswa, dan menciptakan iklim pembelajaran yang adil, namun tetap menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan. Sikap ini menjadikan guru tidak mudah kecewa ketika menghadapi kegagalan atau ketidakadilan, karena ia memiliki keyakinan transendental bahwa perjuangannya bernilai ibadah.

Dalam sejarah pergerakan nasional, para ulama dan pendidik Nahdliyin seperti KH Hasyim Asy'ari menunjukkan ketahanan spiritual yang luar biasa. Mereka mengajar, memimpin pesantren, dan membela bangsa dalam situasi penjajahan dan ancaman fisik. Spirit tersebut menjadi teladan bagi guru masa kini bahwa mengajar bukan hanya profesi, melainkan jalan hidup, bahkan jihad fi sabilillah dalam konteks pendidikan.

Di sisi lain, ketahanan sosial guru mencakup kemampuan untuk membangun relasi yang sehat dengan sesama guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan masyarakat luas. Guru yang memiliki jejaring sosial kuat tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Ia akan saling belajar, berbagi, dan mendukung dalam komunitas yang saling menguatkan. Ketahanan sosial adalah modal penting untuk membangun solidaritas dan keberlanjutan gerakan pendidikan.

Komunitas Nahdliyin secara historis dikenal memiliki jaringan sosial yang kuat—baik melalui struktur organisasi, pesantren, maupun komunitas pengajian. Guru yang berakar dalam komunitas semacam ini cenderung memiliki daya tahan yang lebih tinggi karena mendapat dukungan moral, spiritual, dan sosial dari lingkungannya. Ketika tekanan pekerjaan memuncak, jaringan sosial inilah yang menjadi pelindung sekaligus penguat.

Sementara itu, Marhaenisme menekankan pentingnya solidaritas kelas. Guru sebagai bagian dari kelas pekerja harus membangun kesadaran kolektif dan kekuatan bersama. Ketahanan sosial dalam perspektif ini adalah tentang membentuk serikat guru, forum diskusi kritis, atau ruang berbagi yang memungkinkan suara guru akar rumput terdengar. Ketahanan sosial bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga strategi perjuangan kolektif.

Ketahanan mental, spiritual, dan sosial saling terkait. Ketika guru memiliki kekuatan batin, ketangguhan mental, dan dukungan komunitas, maka ia akan mampu bertahan dan berkembang bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Ia tidak mudah putus asa, tidak gampang terprovokasi, dan tetap fokus pada esensi tugasnya: mendidik generasi bangsa.

Pendidikan di era VUCA tidak lagi hanya tentang kurikulum dan penilaian, tetapi juga tentang *ketahanan emosional*. Guru yang memiliki *emotional intelligence* mampu mengenali emosi dirinya dan siswanya, mengelola konflik di kelas, serta menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan suportif. Dalam tradisi pendidikan pesantren, kemampuan ini sering dibangun melalui relasi personal yang erat dan saling menghormati.

Ketahanan mental dan spiritual juga memperkuat integritas moral guru. Di tengah godaan korupsi, manipulasi nilai, dan pelanggaran etika

profesi, guru yang tahan banting secara batin tidak akan tergoda untuk menyimpang. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya bukan hanya pada kepala sekolah atau dinas, tetapi juga pada Allah dan bangsa. Keteguhan moral menjadi indikator utama ketahanan batiniah.

Pada akhirnya, ketahanan guru harus dibangun secara sistemik. Lembaga pendidikan perlu menyediakan pelatihan penguatan karakter, pendampingan psikologis, serta pembinaan spiritual berkala. Ini bukan hanya urusan personal guru, tetapi tanggung jawab kolektif institusi. Ketahanan tidak boleh diserahkan pada nasib, tetapi harus dibentuk dengan desain strategis.

Dalam dunia yang terus berubah, guru yang memiliki ketahanan spiritual dan sosial adalah laksana batu karang di tengah gelombang. Ia tidak hanya mengarungi badai, tetapi menjadi penanda arah bagi kapal pendidikan. Ia tetap tenang, teguh, dan bijak meski situasi di sekitarnya kacau. Ketenangan batinnya adalah oase bagi murid-murid yang gelisah.

Refleksi mendalam perlu dilakukan agar guru tidak hanya menyalahkan kondisi, tetapi juga menata diri. Ketahanan bukan diberikan, tetapi dibentuk. Ia dibangun dari pengalaman, nilai, dan pembiasaan. Guru yang memiliki ketahanan akan mampu membangun benteng peradaban yang kokoh di tengah perubahan.

Dengan ketahanan ini, guru Nahdliyin-Marhaenis akan tetap berdiri tegak sebagai penjaga nilai, penggerak perubahan, dan pembimbing generasi masa depan. Ia adalah penjaga lilin dalam gelap, yang menyala dengan tenang, meski dunia di sekitarnya terus berubah. Ia tidak pernah padam, karena sumber cahayanya adalah iman, perjuangan, dan cinta akan ilmu.

### **Strategi Pendidikan dalam Dunia yang Tidak Pasti**

Menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, pendidikan tidak bisa lagi bersandar pada strategi lama yang bersifat statis dan linier. Dunia yang bergerak cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu menuntut pendekatan baru dalam menyusun strategi pendidikan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga transformatif. Dalam konteks ini, guru Nahdliyin-Marhaenis

dihadapkan pada tuntutan untuk merumuskan langkah yang tangguh secara nilai dan fleksibel secara metodologi, agar tetap mampu membentuk generasi pembelajar yang resilien.

Strategi pertama yang harus dikembangkan adalah *pendidikan berbasis nilai dan karakter*, bukan sekadar kognisi. Dalam dunia yang tak pasti, nilai menjadi jangkar. Guru harus memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Inilah kekuatan utama dari pendekatan Nahdliyin-Marhaenis yang berakar pada nilai religius dan sosial kerakyatan.

Kedua, strategi pendidikan mesti menempatkan fleksibilitas sebagai prinsip utama. Kurikulum, metode, dan pendekatan pembelajaran tidak bisa kaku. Dunia yang cepat berubah menuntut guru untuk merespons kondisi secara real time. Misalnya, ketika terjadi pandemi, guru harus mampu mengubah metode pembelajaran menjadi daring, namun tetap menjaga makna dan kedalaman interaksi. Strategi fleksibel ini mengandainkan kesiapan mental dan kemampuan teknologi yang memadai.

Strategi ketiga adalah *personalized learning*—pembelajaran yang berpusat pada potensi unik setiap siswa. Dalam masyarakat yang kompleks dan beragam, tidak ada lagi satu formula yang cocok untuk semua. Guru harus mampu membaca kebutuhan dan latar belakang masing-masing siswa, lalu menyusun strategi pedagogis yang inklusif dan relevan. Di sinilah sentuhan kasih sayang ala pesantren dan semangat keberpihakan Marhaenis menjadi penting.

Keempat, strategi kolaboratif antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci. Guru tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus membangun ekosistem pendidikan bersama orang tua, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan bahkan dunia usaha. Dunia yang tidak pasti hanya dapat dihadapi dengan gotong royong. Konsep *ukhuwah* dalam tradisi Nahdliyin dan *solidaritas kelas* dalam Marhaenisme memberikan fondasi kuat untuk membangun kolaborasi yang bermakna.

Strategi kelima adalah *pembelajaran berbasis proyek dan masalah nyata*. Alih-alih sekadar mentransfer teori, guru harus membawa siswa pada pengalaman langsung memecahkan persoalan sosial, lingkungan, dan teknologi di sekitar mereka. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya belajar, tetapi berlatih menjadi manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Inilah cara pendidikan membentuk *problem solver* di dunia yang tidak memberi kepastian.

Keenam, strategi penting lainnya adalah *mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan*. Teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga ruang etika dan pendidikan karakter. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus bisa menjadikan media sosial, aplikasi digital, dan kecerdasan buatan sebagai sarana dakwah nilai, bukan sekadar tempat hiburan atau komersialisasi pengetahuan. Ini adalah tantangan spiritual dan intelektual yang sangat besar di era Society 5.0.

Strategi ketujuh, *pendekatan kontemplatif dan reflektif* dalam mengajar. Dunia yang gaduh dan cepat sering mengabaikan pentingnya jeda untuk berpikir dan merenung. Guru yang memberi ruang untuk refleksi, baik bagi dirinya maupun muridnya, akan menumbuhkan kesadaran mendalam akan makna belajar. Inilah strategi yang tak banyak diajarkan secara teknis, tetapi sangat kuat dalam membentuk guru dan murid yang bermakna.

Kedelapan, strategi penguatan literasi multidimensi: literasi baca-tulis, literasi digital, literasi budaya, dan literasi spiritual. Guru harus menjadi agen utama dalam membangun keempat jenis literasi ini agar siswa siap menghadapi masa depan yang penuh disinformasi, polarisasi sosial, dan kompleksitas identitas. Literasi bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi kekuatan untuk bertahan dan berkembang di tengah badai zaman.

Strategi kesembilan, *membangun ketahanan komunitas sekolah*. Sekolah harus menjadi ruang yang aman, mendukung, dan penuh kepercayaan. Ketika dunia luar goyah, sekolah harus kokoh sebagai rumah kedua yang menenangkan. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan atmosfer psikososial yang menyehatkan melalui empati, kepemimpinan, dan konsistensi nilai.

Kesepuluh, strategi penting lainnya adalah *mendorong kepemimpinan murid*. Dalam dunia yang tidak pasti, siswa harus belajar memimpin dirinya dan orang lain. Guru harus menyediakan ruang partisipasi bagi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah, proyek komunitas, dan diskusi kebangsaan. Di sinilah makna *pendidikan politik kewargaan* sebagaimana diwariskan oleh Bung Karno dan para ulama pejuang.

Strategi kesebelas mencakup *pembelajaran lintas disiplin*. Dunia masa depan tidak lagi memisahkan secara kaku antara sains, humaniora, agama, dan seni. Guru harus mulai membangun jembatan antara berbagai disiplin ilmu agar siswa memiliki perspektif yang menyeluruh. Inilah strategi yang mampu melahirkan *manusia utuh* yang siap menavigasi kompleksitas realitas.

Strategi kedua belas adalah *membangun kesadaran sejarah dan akar budaya*. Siswa tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Guru harus menjadi narator sejarah lokal, nasional, dan peradaban. Strategi ini memperkuat jati diri siswa sebagai warga bangsa dan dunia. Guru Nahdliyin-Marhaenis sangat relevan dalam mengemban peran ini, karena mereka berpijak pada tradisi, tetapi juga menatap masa depan.

Ketigabelas, pendidikan harus mendorong *daya inovatif* yang berbasis empati. Inovasi bukan untuk kesombongan teknologi, tetapi untuk menjawab persoalan nyata. Guru harus mengajarkan siswa bahwa teknologi tanpa cinta akan membawa kehancuran. Maka, strategi pendidikan harus mengajarkan bahwa *menemukan solusi adalah ibadah*, dan *inovasi adalah bagian dari akhlak sosial*.

Strategi keempat belas, pentingnya *evaluasi yang humanistik*. Penilaian dalam pendidikan harus melihat proses, bukan hanya hasil. Strategi ini menuntut guru untuk lebih memahami dinamika siswa, bukan sekadar menilai angka. Evaluasi yang adil dan memanusiakan akan menjadi alat pertumbuhan, bukan alat hukuman. Ini adalah bentuk *rahmatan lil alamin* dalam penilaian.

Kelima belas, *mentoring personal* harus diperkuat. Guru tidak cukup hanya menjadi pengajar di kelas, tetapi juga menjadi pendamping

kehidupan. Siswa membutuhkan figur yang hadir secara emosional dan spiritual. Strategi ini menuntut keikhlasan dan kedekatan relasi ala guru pesantren dan aktivis rakyat.

Strategi keenam belas, pentingnya *penguatan keimanan yang kontekstual*. Iman bukan sekadar dogma, tetapi harus menjadi kekuatan untuk bertahan, berkembang, dan berbagi. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus bisa membumikan nilai-nilai ilahiah dalam keseharian siswa, agar mereka tangguh, empatik, dan tidak mudah goyah.

Ketujuh belas, *revitalisasi pembelajaran moral di era digital*. Tantangan moral di era internet sangat besar. Strategi pendidikan harus membekali siswa dengan kemampuan menilai, memilah, dan mengambil keputusan etis dalam ruang virtual. Guru harus hadir sebagai penuntun moral, bukan hanya penyampai konten.

Kedelapan belas, *penguatan jiwa kewirausahaan sosial*. Pendidikan harus membuka ruang bagi siswa untuk menjadi pelaku perubahan berbasis usaha sosial, bukan hanya pencari kerja. Strategi ini relevan untuk membentuk generasi Marhaen baru—yang mandiri, berdaya, dan berkontribusi untuk masyarakatnya.

Kesembilan belas, pendidikan yang efektif harus bersifat *transformatif, bukan transaksional*. Strategi guru harus melampaui tugas administratif, menuju perjuangan nilai. Guru adalah transformator sosial, bukan sekadar operator sistem. Inilah semangat Nahdliyin-Marhaenis yang menjadikan pendidikan sebagai jalan pembebasan dan pencerahan. Akhirnya, strategi utama dari semua strategi adalah *keberanian untuk terus belajar dan berubah*. Guru di era VUCA dan Society 5.0 tidak boleh berhenti belajar. Dunia berubah cepat, dan hanya guru yang terus tumbuh yang mampu mengarahkan murid menuju masa depan. Strategi ini sederhana namun revolusioner: jadilah murid sepanjang hayat.

## Society 5.0 dan Lompatan Inovasi Pendidikan

Perjalanan pendidikan dalam menghadapi gelombang zaman telah sampai pada titik kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya: era Society 5.0. Sebuah konsep masyarakat yang dirumuskan tidak hanya untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam arus deras transformasi teknologi. Jika Revolusi Industri 4.0 berfokus pada integrasi mesin cerdas dan otomatisasi dalam sistem industri, maka Society 5.0 hadir untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses inovasi—mengembalikan pendidikan dan peradaban pada kodratnya: menciptakan manusia seutuhnya. Bab ini mengajak guru Nahdliyin-Marhaenis untuk tidak hanya memahami perubahan, melainkan turut mengarahkan arah perubahan tersebut demi masa depan bangsa dan kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, Society 5.0 bukan sekadar jargon futuristik yang berasal dari Jepang, melainkan sebuah tantangan nyata yang mengharuskan pendidikan bersikap reflektif dan transformatif. Arus globalisasi dan teknologi telah membentuk lanskap sosial baru: realitas hybrid antara dunia fisik dan digital, antara kecerdasan buatan dan kesadaran moral manusia. Di sinilah guru memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai, pembimbing etik, dan arsitek kemanusiaan. Namun pertanyaannya, bagaimana seorang guru—terutama guru Nahdliyin-Marhaenis—menghadapi dunia yang berubah begitu cepat dan kompleks ini?

Sebagai bagian dari masyarakat keilmuan, guru tidak bisa menempatkan dirinya hanya sebagai pengamat pasif dalam proses perubahan. Justru dalam Society 5.0, peran guru menjadi semakin penting karena nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang mereka bawa menjadi filter kritis terhadap determinisme teknologi. Sebab teknologi bukanlah entitas netral. Tanpa arah moral, inovasi bisa menjadi alat dominasi baru, bahkan menindas manusia dengan cara yang lebih halus dan sistematis. Guru Nahdliyin-Marhaenis, yang memadukan nilai-nilai Aswaja dengan semangat pembebasan ala Marhaenisme, sejatinya memiliki posisi unik untuk menyusun narasi tanding terhadap dehumanisasi teknologi.

Lebih jauh, Society 5.0 adalah panggilan untuk berpikir lintas batas, melampaui dikotomi tradisional antara agama dan sains, antara tradisi dan modernitas. Di era ini, tidak lagi relevan memisahkan kitab kuning dari coding, atau membenturkan pesantren dengan pusat inovasi digital. Yang dibutuhkan adalah sintesis kreatif, rekonsiliasi epistemologis, dan keberanian untuk merancang masa depan berbasis nilai luhur. Pendidikan dalam Society 5.0 bukan hanya soal mencetak teknokrat, tetapi tentang melahirkan manusia unggul yang arif dalam ilmu, kuat dalam iman, dan berpihak pada rakyat kecil.

Dalam kerangka itu, lompatan inovasi pendidikan bukan semata bersifat teknologis, tetapi juga ideologis dan paradigmatik. Lompatan yang dibutuhkan adalah perubahan dari model pendidikan hierarkis dan seragam menuju pendidikan partisipatif, kontekstual, dan manusiawi. Guru bukan lagi penguasa kelas, tetapi fasilitator pertumbuhan dan penumbuh kebijaksanaan. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menyemai kesadaran. Dengan demikian, inovasi yang sejati tidak datang dari luar, melainkan lahir dari dalam diri guru yang sadar akan mandat profetiknya.

Guru Nahdliyin-Marhaenis berada di persimpangan yang menentukan. Mereka membawa warisan spiritualitas Islam Nusantara yang penuh hikmah dan keterbukaan, serta semangat pembebasan Marhaenisme yang berpihak pada kaum tertindas. Kombinasi ini menjadi modal dasar yang luar biasa untuk menafsirkan dan memandu implementasi Society 5.0 dalam ruang-ruang pendidikan. Dalam konteks ini, guru harus menjadi penafsir aktif terhadap teknologi, bukan pengikut pasif. Mereka harus mengkritisi arah kebijakan, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan menumbuhkan kesadaran etik dalam praktik pendidikan digital.

Sementara dunia berlari kencang dengan kecerdasan buatan, algoritma, dan automasi, pendidikan tidak boleh kehilangan nuraninya. Society 5.0 menuntut pendidikan untuk tetap memanusiakan manusia. Maka pendidikan harus berjalan bukan hanya dengan akal dan logika, tetapi juga hati dan empati. Dalam situasi inilah peran guru menjadi semakin kompleks dan multidimensi. Ia dituntut menjadi seorang intelektual publik,

penggerak sosial, komunikator antar generasi, sekaligus penjaga etika. Tugas ini berat, namun juga mulia, dan hanya dapat dijalankan oleh mereka yang menapaki profesinya sebagai laku spiritual dan perjuangan sosial.

Di tengah maraknya platform digital, media sosial, dan big data yang memengaruhi cara berpikir generasi muda, guru tidak boleh kalah langkah. Mereka harus memahami ekosistem digital bukan untuk menjadi buzzer pendidikan, melainkan sebagai pembimbing arah berpikir yang sehat dan beradab. Kecakapan literasi digital harus menyatu dengan kecakapan moral. Karena hanya dengan itu, guru dapat menjadi *digital ethicist* yang mengarahkan peserta didik untuk tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga bijak dalam memilih, memilah, dan memutuskan.

Akhirnya, Society 5.0 bukan ancaman, tetapi peluang. Bagi guru Nahdliyin-Marhaenis, ini adalah medan perjuangan baru untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kerakyatan bukanlah warisan usang, tetapi justru fondasi kuat dalam mengarungi masa depan. Dengan memadukan hikmah tradisi, kekuatan nalar kritis, dan keterbukaan terhadap inovasi, guru dapat membentuk generasi baru yang tidak tercerabut dari akarnya, tidak terseret arus teknologi, dan tetap menjadi subjek aktif dalam sejarah bangsanya.

### **Falsafah Society 5.0: Manusia sebagai Pusat Inovasi**

Society 5.0 adalah konsep yang lahir dari kegelisahan peradaban modern. Jepang pertama kali memperkenalkannya bukan semata karena teknologi telah berkembang begitu pesat, melainkan karena mereka menyadari adanya potensi bahaya besar: ketika kemajuan teknologi tidak lagi memperkuat martabat manusia, tetapi justru mereduksi nilai-nilainya. Maka Society 5.0 tidak dimaksudkan untuk menggantikan Revolusi Industri 4.0, melainkan memperbaikinya dengan mengembalikan manusia sebagai pusat dan tujuan dari setiap inovasi. Dalam konteks ini, guru adalah penjaga nilai tertinggi dalam proses pendidikan dan teknologi.

Paradigma Society 5.0 menawarkan pergeseran mendasar: dari *technocentric* ke *human-centric*, dari eksploitasi sistem menuju pemberdayaan

manusia. Dalam dunia pendidikan, falsafah ini berarti bahwa teknologi harus memperkuat proses humanisasi, bukan menggantikannya. Proses mengajar tidak boleh hanya menjadi penyampaian materi melalui perangkat digital, tetapi tetap mempertahankan relasi personal, nilai kebijaksanaan, dan sentuhan spiritualitas yang membentuk karakter manusia. Di sinilah letak urgensi falsafah Society 5.0 untuk guru Nahdliyin-Marhaenis.

Falsafah Society 5.0 selaras dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan Marhaenisme yang membela kaum kecil. Aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah) meletakkan manusia sebagai makhluk mulia yang bertanggung jawab atas kemaslahatan dunia. Marhaenisme menempatkan rakyat biasa sebagai subjek utama dari proses pembangunan dan pembebasan. Maka keduanya tidak bertentangan dengan Society 5.0, justru menjadi ruh yang memperkaya falsafah kemanusiaan dalam kerangka teknologi masa depan.

Dalam khazanah pemikiran Islam, posisi manusia sebagai pusat kehidupan ditegaskan oleh banyak ulama klasik. Al-Ghazali memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Imam Syafi’i menekankan pentingnya ilmu sebagai jalan menegakkan keadilan. Dalam konteks modern, tugas ini semakin menantang karena manusia kini bersaing dengan mesin dan algoritma. Maka tugas guru menjadi jauh lebih kompleks: menjaga agar anak-anak tetap memiliki kesadaran sebagai makhluk spiritual dan sosial, bukan sekadar pelaku ekonomi digital.

Falsafah Society 5.0 mendorong integrasi antara data, kecerdasan buatan, dan manusia. Dalam dunia pendidikan, ini berarti bahwa pembelajaran bisa menjadi lebih personal dan adaptif. Namun, guru harus hadir sebagai pengarah nilai. Data bisa mengukur kemampuan, tetapi tidak dapat menilai ketulusan. Algoritma bisa menyarankan materi, tetapi tidak bisa menginspirasi. Robot bisa memberikan jawaban, tetapi tidak mampu menenangkan hati anak yang resah. Guru, sebagai manusia, tetap menjadi pusat relasi pendidikan yang otentik dan bermakna.

Society 5.0 menuntut kita untuk memiliki *deep humanity*. Inilah nilai utama yang harus dimiliki guru Nahdliyin-Marhaenis. Bukan sekadar paham teknologi, tetapi juga mampu menafsirkan arah kemajuan dengan kebijaksanaan, serta mampu menjaga agar inovasi tidak kehilangan roh kemanusiaannya. Di sinilah posisi guru menjadi lebih dari sekadar penyampai materi: ia adalah pelindung nurani publik, pembimbing etika digital, dan penjaga marwah bangsa di tengah arus globalisasi.

Guru juga berperan sebagai pemandu spiritual di tengah dunia digital yang hampa makna. Banyak siswa yang hidup dalam kelimpahan informasi, namun miskin makna. Mereka bisa mengakses ribuan video pembelajaran, tetapi merasa kesepian dan kehilangan arah hidup. Maka guru bukan hanya mengajar, tetapi menjadi pelita batin. Society 5.0 memberi peluang besar untuk itu, asalkan guru mampu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual secara kreatif, kontekstual, dan inspiratif.

Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat menempatkan falsafah Society 5.0 dalam kerangka pendidikan profetik. Pendidikan tidak hanya mencetak siswa menjadi pekerja, tetapi menjadi manusia yang memiliki kesadaran diri, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada keadilan. Misi ini memerlukan penguasaan teknologi sekaligus pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai agama dan ideologi kebangsaan. Maka penguatan kompetensi guru harus menyentuh dua dimensi: literasi digital dan literasi ideologis.

Pendekatan interdisipliner menjadi penting dalam memahami dan menerapkan Society 5.0. Guru tidak bisa hanya mengandalkan satu paradigma berpikir. Mereka harus menggabungkan ilmu agama, filsafat, teknologi, dan ilmu sosial secara kreatif. Pendekatan ini selaras dengan model pendidikan integratif yang banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh NU dan pendidik kebangsaan. Pendidikan berbasis *adab dan ilmu* adalah modal utama untuk menghadapi dunia yang canggih namun berpotensi kehilangan arah moral.

Dalam praktiknya, guru dapat menerjemahkan falsafah Society 5.0 ke dalam desain pembelajaran yang memanusiakan. Misalnya dengan menggunakan teknologi untuk eksplorasi konteks lokal, menyusun proyek

pembelajaran berbasis masalah nyata di masyarakat, atau membangun jejaring digital yang mempertemukan siswa dengan komunitas inspiratif. Guru harus menjadi kurator konten dan fasilitator diskusi yang memantik empati, bukan hanya pengendali kelas.

Di banyak pesantren dan madrasah, sebenarnya sudah lama diterapkan prinsip Society 5.0 secara nilai. Relasi antara santri dan kyai bersifat personal, adaptif, dan berbasis karakter. Teknologi bisa menjadi alat untuk mengembangkan model ini dalam skala lebih luas. Namun, guru perlu diberikan pelatihan dan pendampingan agar mampu menjembatani antara nilai tradisional dengan kecanggihan modern. Inilah peran strategis lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama dan pemerintah.

Penerapan Society 5.0 juga membutuhkan perubahan kebijakan pendidikan. Guru harus diberi ruang untuk berinovasi, bukan dibebani administrasi. Sistem evaluasi harus lebih menekankan pada proses belajar dan keterlibatan, bukan sekadar hasil ujian. Sekolah harus menjadi tempat dialog, bukan pabrik nilai. Kurikulum harus memberi tempat pada nilai-nilai spiritualitas, bukan hanya keterampilan teknis. Guru harus menjadi subjek utama dalam perubahan ini, bukan objek kebijakan semata.

Falsafah Society 5.0 mengajak kita untuk menolak dehumanisasi yang sering datang bersama digitalisasi. Di banyak negara, kecanggihan teknologi tidak serta-merta meningkatkan kualitas hidup. Justru banyak yang mengalami depresi, keterasingan, dan krisis identitas. Maka teknologi harus dibarengi dengan pendalaman nilai, spiritualitas, dan makna hidup. Pendidikan harus menjadi tempat menemukan identitas, bukan kehilangan arah.

Di sinilah nilai-nilai Aswaja dan Marhaenisme menjadi sangat relevan. Aswaja mengajarkan sikap tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang), yang sangat dibutuhkan dalam dunia digital yang ekstrem dan cepat berubah. Marhaenisme mengajarkan pentingnya keberpihakan pada yang lemah dan pembelaan terhadap keadilan sosial, dua nilai yang mudah hilang dalam logika pasar digital. Guru yang memadukan keduanya adalah penjaga masa depan.

Ketika manusia mulai dikuasai oleh algoritma dan kebisingan digital, maka pendidikan harus menjadi ruang kontemplasi dan penjernihan. Guru menjadi pemantik keheningan yang bermakna, bukan hanya pengisi kebisingan informasi. Maka tugas guru adalah mengajak siswa untuk berpikir mendalam, merenung, dan bertanya: untuk apa semua ini? Ke mana arah hidup kita? Apa nilai dari kecanggihan jika kehilangan cinta, kasih, dan tanggung jawab?

Society 5.0 bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang nilai-nilai baru yang harus diaktualisasikan. Guru harus menjadi pelaku utama dalam proses ini, bukan sekadar penerima dampak. Mereka harus belajar, berjejaring, berinovasi, dan bergerak bersama. Perubahan tidak datang dari pusat kekuasaan, tetapi dari ruang kelas yang hidup, dari interaksi yang jujur, dan dari komitmen guru untuk menjadi manusia sepenuhnya.

Falsafah Society 5.0 juga mengajak kita untuk menata ulang relasi antara sekolah, masyarakat, dan negara. Pendidikan bukan hanya tugas negara, tetapi juga urusan umat dan komunitas. Maka guru harus terlibat dalam gerakan sosial, advokasi kebijakan, dan penguatan peran masyarakat dalam pendidikan. Di sinilah prinsip gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pilar utama.

Dengan menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, falsafah Society 5.0 memberi harapan besar bagi masa depan pendidikan. Tapi harapan itu hanya akan menjadi kenyataan jika kita memiliki guru-guru yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani, bijak, dan penuh cinta. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah model ideal untuk menjawab tantangan ini. Mereka adalah jembatan antara masa lalu yang kaya nilai dan masa depan yang penuh kemungkinan.

### **Tantangan Teknologi, AI, dan Guru sebagai Pembimbing Etik**

Di tengah lonjakan kecanggihan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), dunia pendidikan menghadapi dilema etis yang semakin kompleks. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menyampaikan konten, menganalisis data, hingga mengelola pembelajaran. Namun di sisi

lain, ada kekhawatiran besar: apakah sistem ini dapat menggantikan peran manusia dalam pendidikan? Lebih dari itu, apakah generasi muda akan tetap mampu membedakan antara kebenaran dan informasi manipulatif, antara nilai dan sekadar data? Di titik ini, peran guru sebagai pembimbing etik menjadi tidak tergantikan.

Teknologi, sebagaimana sejarah mencatat sejak era industrialisasi, selalu bersifat netral. Ia bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi bencana, tergantung pada siapa yang mengendalikannya dan untuk tujuan apa ia digunakan. Dalam dunia pendidikan, teknologi mestinya menjadi alat bantu untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan mereduksi atau menggantikannya. Maka, guru bukan hanya harus paham teknologi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menilai, mengarahkan, dan membimbing teknologi dalam batasan nilai etik, moral, dan spiritual.

Kecerdasan buatan semakin pintar, tetapi tetap tanpa hati. Mesin dapat mengenali pola, tetapi tidak bisa mengenali rasa. AI dapat merespon pertanyaan dengan presisi, namun tak dapat membimbing anak yang sedang galau, murid yang kehilangan semangat hidup, atau siswa yang mengalami kekerasan di rumahnya. Dalam konteks ini, guru menjadi pembeda utama antara pendidikan yang manusiawi dan sistem yang dingin. Kehadiran guru—dengan empati, teladan, dan kearifan—menjadi fondasi utama dalam pendidikan masa kini dan masa depan.

Tantangan utama dari AI adalah bagaimana guru tidak tergantikan, tetapi justru menguatkan perannya melalui penguasaan teknologi secara kritis dan kontekstual. Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut untuk membekali diri dengan literasi digital yang kuat, bukan hanya agar tidak tertinggal, tetapi juga agar mampu melindungi peserta didik dari bahaya disinformasi, manipulasi data, hingga algoritma yang membentuk ekosistem digital yang bias, eksklusif, atau destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kita menyaksikan bagaimana generasi muda kini tenggelam dalam arus informasi yang nyaris tanpa filter. TikTok, YouTube, dan platform media sosial lainnya bukan sekadar hiburan, tetapi telah menjadi sumber pembentukan nilai, opini, bahkan identitas diri. Di sinilah guru memiliki

peran strategis untuk mendampingi siswa dalam membangun kesadaran kritis digital. Bukan sekadar melarang atau menggurui, tetapi mendampingi, memberi arah, dan menyadarkan murid tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, dan empati di tengah dunia yang serba cepat dan instan.

Ketika sekolah mulai mengadopsi teknologi seperti chatbot AI, analisis big data untuk asesmen, atau gamifikasi dalam proses belajar, maka guru harus hadir sebagai pengendali kebijakan, bukan hanya pengguna pasif. Tanpa refleksi etik, teknologi hanya akan mempercepat ketimpangan, memperkuat sistem kontrol yang kaku, bahkan menciptakan pendidikan yang dehumanistik. Sebaliknya, jika guru menjadi arsitek inovasi, maka sekolah bisa tetap menjadi ruang pembebasan dan pemberdayaan.

Marhaenisme menekankan pentingnya keberpihakan kepada yang lemah, termasuk dalam konteks distribusi teknologi. Jika akses teknologi hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah elite atau urban, maka pendidikan akan semakin tidak adil. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus memperjuangkan agar teknologi tidak menjadi alat penindasan baru, tetapi alat pemerdekaan dan pemerataan. Guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dalam akses dan penggunaan teknologi.

Dalam perspektif Aswaja, segala sesuatu harus berada pada jalan tengah (wasathiyah), termasuk dalam menyikapi kemajuan teknologi. Tidak anti teknologi, namun juga tidak silau. Teknologi harus dibingkai dalam maqasid syariah—yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka AI dan teknologi digital harus dikritisi secara etis: apakah ia memperkuat lima maqasid ini? Apakah ia menjauhkan siswa dari akhlak, atau justru mendekatkan mereka pada nilai-nilai adiluhung?

Guru sebagai pembimbing etik juga berperan dalam membentuk karakter murid dalam menggunakan teknologi. Sikap disiplin digital, etika berbagi konten, kejujuran dalam mengerjakan tugas daring, serta kesadaran akan jejak digital adalah nilai-nilai baru yang harus diajarkan secara eksplisit dan konsisten. Guru adalah model dalam penggunaan teknologi yang bijak—baik di kelas maupun di kehidupan nyata.

Tantangan etis juga muncul dalam ranah privasi dan keamanan data. Banyak platform pendidikan yang tanpa sadar mengeksploitasi data siswa, mulai dari kebiasaan belajar, lokasi, hingga minat. Di sinilah guru harus memiliki kapasitas memahami sistem dan memperjuangkan regulasi yang adil bagi peserta didik. Guru tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga advokat kebijakan yang berpihak pada anak-anak dan orang tua.

Dalam proses pembelajaran, AI bisa membantu menyederhanakan konsep, membuat simulasi, atau mempercepat evaluasi. Namun hanya manusia—dalam hal ini guru—yang dapat mengaitkan konsep dengan kehidupan, membangun motivasi intrinsik, dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Maka relasi guru dan murid dalam dunia digital tidak boleh menghilang, justru harus diperkuat melalui komunikasi yang empatik dan pedagogi yang reflektif.

Penting pula untuk membangun komunitas guru yang saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam memanfaatkan teknologi. Melalui forum daring, pelatihan partisipatif, hingga kolaborasi antarsekolah, guru dapat memperkaya diri secara kolektif. Kekuatan kolektif guru akan menjadi benteng terhadap teknologi yang terlalu cepat dan sistem yang terlalu top-down.

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, guru harus menjadi pelita nurani yang memandu arah. Mereka bukan sekadar “pembicara konten,” tetapi “penjaga makna.” Mereka membantu siswa memilah antara yang viral dan yang bernilai, antara yang tren dan yang benar. Inilah fungsi etik yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau sistem otomatisasi secanggih apa pun.

Bahkan dalam teknologi pengenalan wajah, AI belum mampu membaca raut keresahan, kegelisahan batin, atau potensi kreatif siswa yang belum muncul. Hanya guru, dengan hati yang tajam dan empati yang dalam, yang mampu menangkap sinyal-sinyal pendidikan yang paling hakiki. Inilah yang disebut dalam Islam sebagai hikmah, yakni kebijaksanaan yang tumbuh dari akal, hati, dan pengalaman.

Di era AI, kehadiran guru tidak menjadi berkurang nilainya, justru makin penting. Kecanggihan sistem harus diimbangi oleh kebijaksanaan

manusia. Guru adalah satu-satunya entitas yang mampu menjaga keberlangsungan pendidikan sebagai proses yang membentuk manusia seutuhnya. Tanpa guru, teknologi hanyalah sistem kosong yang kehilangan arah dan makna.

Tugas utama guru sebagai pembimbing etik adalah menjaga agar kemajuan tidak kehilangan akar moralitas. Dalam pendidikan, kemajuan bukan hanya soal hasil belajar, tetapi juga soal keadaban, karakter, dan visi hidup. Maka setiap teknologi baru harus ditakar ulang: apakah ia memperkuat nilai kemanusiaan, atau justru merusaknya?

Melalui pendekatan Nahdliyin yang arif dan Marhaenisme yang membumi, guru dapat menjadi benteng terakhir peradaban manusia dalam era digital. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, melindungi, dan menerangi jalan masa depan dengan nilai dan nurani. Merekalah sang penjaga nilai dalam dunia yang kian cair dan cepat berubah.

Dengan terus belajar dan memperkuat kolaborasi, guru Nahdliyin-Marhaenis akan mampu menjadi pembimbing etik yang relevan di era Society 5.0. Mereka menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah pendidikan yang menolak dehumanisasi dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan kebajikan, pembebasan, dan kemuliaan hidup manusia.

## **Menjaga Nurani dalam Dunia Digital**

Dunia digital bukan hanya menghadirkan kemajuan dan konektivitas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terhadap nurani manusia. Dalam ruang virtual yang serba cepat, tanpa batas, dan kadang anonim, nilai-nilai moral, etika, dan empati seringkali mengalami pergeseran. Di sinilah guru, khususnya yang berpijak pada nilai-nilai Nahdliyin-Marhaenis, harus hadir sebagai penjaga nurani yang mampu menuntun generasi muda agar tidak kehilangan arah dan akar kemanusiaan dalam arus digitalisasi.

Nurani merupakan dimensi terdalam dari jiwa manusia, tempat nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab bermuara. Dalam tradisi Islam, nurani sering dikaitkan dengan qalb (hati) yang menjadi pusat

kesadaran moral. Ketika teknologi berkembang, nurani bukan semakin tak relevan, tetapi justru menjadi kompas utama. Guru dengan dasar spiritualitas yang kuat, dengan referensi Aswaja yang tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran), memiliki potensi besar untuk membimbing siswa agar tidak terperangkap dalam nihilisme digital yang kehilangan makna.

Era digital sering kali mendorong manusia untuk bertindak impulsif—menyebarkan informasi tanpa verifikasi, menanggapi isu secara emosional, bahkan menghukum tanpa proses yang adil. Di tengah budaya cancel culture, hoaks, dan banjir konten viral, tugas guru menjadi jauh lebih mendesak: membentuk akhlak digital. Guru Nahdliyin-Marhaenis dituntut membina peserta didik agar mampu menyaring informasi, menahan diri dari komentar yang destruktif, serta mengedepankan kejujuran, sopan santun, dan kebijaksanaan dalam bermedia sosial.

Pendidikan bukan semata transmisi pengetahuan, tetapi lebih mendalam—ia adalah penanaman nilai. Guru yang menjaga nurani akan memosisikan dirinya sebagai model integritas. Ia tidak hanya mengajarkan tentang “apa yang benar,” tetapi juga “bagaimana tetap benar di tengah arus digital.” Ini merupakan pendidikan karakter berbasis nurani yang tidak bisa digantikan oleh algoritma, program, atau aplikasi apa pun. Di sinilah makna profetik guru—sebagai penerus perjuangan para nabi yang menuntun umatnya dengan hati dan kesadaran ilahiah.

Fenomena dehumanisasi dalam dunia digital adalah ancaman nyata. Ketika komunikasi hanya berupa teks, emoji, atau video singkat, dimensi afektif manusia mudah hilang. Rasa hormat pada guru, empati pada teman, atau ketulusan dalam berbagi makin kabur dalam komunikasi daring. Guru sebagai penjaga nurani perlu membimbing peserta didik untuk memahami bahwa setiap jejak digital adalah cerminan moralitas. Di sinilah relevansi nilai-nilai Marhaenisme—kesadaran sosial, solidaritas, dan cinta pada sesama—harus ditanamkan sebagai fondasi dalam menggunakan teknologi.

Para ulama terdahulu seperti Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa adab mendahului ilmu. Ini menjadi sangat relevan ketika ilmu dan informasi kini tersedia melimpah di internet. Tanpa adab digital, informasi dapat menjadi senjata yang menyakiti, bukan membangun. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus mampu mentransformasikan konsep adab ke dalam etika digital: menghargai privasi, menghindari cyberbullying, menjaga lisensi intelektual, dan menghormati keberagaman opini dalam ruang maya.

Menjaga nurani juga berarti menjaga keseimbangan antara dunia maya dan nyata. Guru harus mampu mendampingi siswa untuk tidak kecanduan gawai, mampu menikmati hidup tanpa tergantung pada notifikasi, dan menemukan makna dalam pertemuan tatap muka. Kegiatan seperti diskusi luring, proyek komunitas, dan kegiatan spiritual kolektif menjadi sarana membumikan kembali nilai kemanusiaan di tengah gelombang digitalisasi.

Di tengah algoritma yang cenderung memperkuat polarisasi dan mengurung individu dalam “ruang gema” (echo chamber), guru memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog, pertanyaan kritis, dan keberanian untuk berbeda secara santun. Pendidikan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang mencerna, mengkritisi, dan menyikapi dengan hati yang terbuka. Nurani menjadi alat ukur dalam menentukan apakah sebuah konten atau informasi layak disebar atau justru harus dihentikan.

Guru juga harus menjadi pengingat bahwa dunia digital bukan ruang bebas nilai. Setiap klik, unggahan, dan komentar merefleksikan kualitas batin dan integritas personal. Dengan pendekatan reflektif—melalui pembelajaran kontekstual, studi kasus nyata, hingga praktik tafakur digital—guru dapat membantu siswa menemukan keseimbangan antara logika digital dan etika spiritual.

Menjaga nurani tidak selalu berarti bersikap konservatif. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk keberanian progresif dalam menjaga nilai-nilai hakiki manusia. Guru yang progresif adalah yang tidak larut dalam teknologi, tetapi menggunakannya untuk memperluas kasih, mempertebal kejujuran,

dan memperkokoh akhlak. Guru seperti inilah yang akan menjadi agen perubahan di dunia digital—bukan sebagai pengikut tren, tetapi sebagai penentu arah.

Kesadaran untuk menjaga nurani juga harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Tidak cukup hanya dengan ceramah moral, tetapi melalui pengalaman nyata: menulis refleksi digital, membuat kampanye kebaikan daring, atau proyek komunitas yang mendigitalisasi nilai lokal dan spiritualitas. Guru menjadi fasilitator bukan hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam membangun gerakan kebaikan di ruang digital.

Tugas guru sebagai penjaga nurani digital juga memerlukan dukungan sistem. Sekolah harus menyediakan ruang etik dan spiritual, bukan hanya laboratorium komputer. Kurikulum perlu menyentuh aspek karakter digital, bukan hanya literasi teknis. Kepala sekolah dan pengawas perlu memahami bahwa pendidikan berbasis nurani adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Dalam konteks Society 5.0, manusia menjadi pusat dari segala inovasi. Namun manusia seperti apa yang kita harapkan? Jawabannya adalah manusia yang beradab. Guru adalah pihak yang paling mampu membentuk manusia semacam itu. Dengan sentuhan nilai-nilai Nahdliyin-Marhaenis, guru tidak hanya menjaga nalar, tetapi juga membangkitkan nurani, dan dengan itu, membangun pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.

Krisis nurani di dunia digital juga terkait erat dengan keadilan sosial. Akses terhadap teknologi tidak merata, namun tuntutan terhadap literasi digital berlaku sama. Di sinilah guru Nahdliyin-Marhaenis hadir sebagai pejuang keadilan—membantu anak-anak yang terpinggirkan agar tetap punya masa depan dalam sistem yang kerap tidak adil. Memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat pembeda, tetapi jembatan menuju persamaan kesempatan.

Penguatan nurani harus dilakukan secara holistik: melalui pendekatan spiritual, kultural, dan kontekstual. Guru harus membumikan konsep-konsep besar seperti kejujuran, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial ke

dalam kebiasaan sehari-hari siswa. Seperti mengajarkan bahwa menyalin tugas dari internet tanpa izin adalah pelanggaran etik, atau menyebar foto teman tanpa izin adalah pelanggaran martabat.

Pendidikan nurani digital juga harus berakar pada keteladanan. Guru yang selalu menghormati hak digital siswa, tidak menyebarkan informasi pribadi, dan menjaga akhlak dalam setiap media sosialnya, akan jauh lebih berpengaruh dibandingkan nasihat teoritis semata. Keteladanan adalah bentuk tertinggi dari pendidikan nurani.

Dalam dunia yang semakin otomatis, manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Inilah misi pendidikan sejati. Dan guru adalah panglima dalam perjuangan ini. Dengan fondasi nilai-nilai luhur, guru akan tetap menjadi obor yang menerangi jalan siswa—bahkan dalam lorong tergelap ruang digital.

Nurani adalah kekuatan terakhir yang tidak bisa diretas oleh siapa pun. Jika pendidikan gagal menjaga nurani, maka secanggih apa pun teknologi yang dikuasai, bangsa ini tetap akan kehilangan jiwanya. Maka menjaga nurani adalah pekerjaan paling strategis dan luhur dalam dunia pendidikan saat ini.

Di tengah pusaran perubahan, guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi penjaga terakhir nilai. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga penafsir zaman, pembimbing spiritual, dan pemelihara nurani bangsa. Dengan nurani yang tajam dan hati yang hidup, mereka akan terus menyalakan cahaya dalam dunia yang makin gelap oleh algoritma.

### **Guru sebagai Penggerak Inovasi Berbasis Nilai**

Dalam kerangka Society 5.0, di mana manusia menjadi titik sentral dalam integrasi antara dunia fisik dan digital, guru memegang peran yang tak tergantikan sebagai penggerak inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur. Inovasi dalam pendidikan bukan semata berorientasi pada teknologi, tetapi harus berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah aktor utama dalam transformasi

pendidikan yang tidak tercerabut dari akar kebudayaan, religiositas, dan semangat emansipasi.

Inovasi berbasis nilai adalah jawaban atas tantangan dehumanisasi yang kerap menyertai teknologi. Di tengah derasnya digitalisasi, penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam pendidikan tidak sekadar mempercepat proses atau mempercantik tampilan, melainkan menumbuhkan karakter, memperkuat identitas, dan menumbuhkan daya kritis siswa. Guru harus menjadi penjaga agar inovasi tidak berubah menjadi imitasi kosong, melainkan menjadi lompatan kemajuan yang membebaskan dan membentuk manusia utuh.

Dalam perspektif Nahdliyin, inovasi senantiasa lahir dari proses ijtihad—usaha sungguh-sungguh dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan maqashid syariah (tujuan luhur agama): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Guru sebagai mujtahid pendidikan perlu menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pondasi dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Begitu pula semangat Marhaenisme yang berpihak pada kaum tertindas menjadi daya dorong agar inovasi pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kalangan elit, tetapi justru memerdekakan mereka yang selama ini termarginalkan.

Inovasi berbasis nilai dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk: mulai dari metode pengajaran yang kolaboratif dan partisipatif, pemanfaatan teknologi untuk merawat budaya lokal, hingga pengintegrasian literasi moral dan spiritual dalam setiap mata pelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berani keluar dari pakem lama yang kaku dan memberdayakan ruang kelas sebagai laboratorium transformasi nilai dan karakter.

Menjadi penggerak inovasi tidak berarti guru harus menguasai semua aplikasi canggih atau robotik mutakhir, melainkan mampu membaca konteks siswa dan lingkungan, serta menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Inovasi sejati sering kali berawal dari kepekaan dan empati—memahami kendala siswa, menjembatani jurang digital, dan menciptakan strategi yang relevan dengan kehidupan nyata. Guru Nahdliyin-Marhaenis

memiliki keunggulan dalam hal ini karena mereka dibentuk dalam kultur sosial-keagamaan yang penuh kepedulian.

Praktik inovasi berbasis nilai juga bisa dilihat dalam integrasi pembelajaran dengan aktivitas sosial. Misalnya, guru mengajak siswa mengidentifikasi persoalan sosial di sekitar mereka, membuat proyek komunitas, atau menggunakan media digital untuk menyuarakan nilai keadilan dan toleransi. Proyek-proyek ini tidak hanya mengasah keterampilan abad 21, tetapi juga menanamkan nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi ciri khas ajaran Marhaen dan Nahdliyin.

Inovasi juga menyentuh aspek relasi antara guru dan murid. Dalam tradisi Islam Nusantara, relasi ini bukan relasi transaksional, tetapi relasi batin yang sarat dengan doa, keteladanan, dan cinta. Inovasi pembelajaran seharusnya memperkuat relasi ini, bukan mengaburkannya dengan kecanggihan teknologi yang membuat guru menjadi “pengelola sistem” semata. Guru harus hadir sebagai manusia, bukan hanya sebagai operator digital.

Selain itu, penggerak inovasi berbasis nilai perlu memiliki keberanian untuk melawan arus pragmatisme pendidikan. Ketika dunia pendidikan cenderung menilai kualitas siswa dari skor ujian atau prestasi akademik formal, guru harus hadir dengan perspektif holistik. Mereka harus melihat keberhasilan siswa dalam bagaimana mereka menjadi pribadi yang jujur, empatik, dan bertanggung jawab. Inilah inovasi dalam cara pandang yang tak kalah penting dari inovasi teknis.

Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, atau Ki Hajar Dewantara, yang tidak hanya memikirkan pendidikan sebagai proses instruksional, tetapi sebagai gerakan kebudayaan dan pembebasan. Menghidupkan semangat ini berarti menghadirkan pendidikan sebagai ruang transformasi nilai, bukan sekadar ruang pelatihan kerja.

Sebagai penggerak inovasi berbasis nilai, guru juga perlu terus belajar dan memperkaya diri. Inovasi tidak datang dari ruang kosong, tetapi dari proses belajar yang panjang, keterbukaan terhadap pemikiran baru, dan keberanian untuk merefleksikan diri. Komunitas guru seperti MGMP,

Forum Madrasah, atau komunitas marhaenis digital bisa menjadi ruang pertukaran ide dan penguatan kolektif menuju perubahan yang bernilai.

Inovasi berbasis nilai tidak hanya relevan untuk sekolah unggulan di perkotaan, tapi juga sangat penting di daerah terpencil. Di tempat-tempat inilah guru seringkali menjadi satu-satunya agen perubahan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan nilai-nilai keislaman yang moderat, mereka bisa menjadikan keterbatasan sebagai sumber kreativitas dan solidaritas sebagai energi utama pendidikan.

Kurikulum Merdeka memberi peluang luas bagi guru untuk berinovasi. Namun kebebasan ini bisa menjadi bumerang jika tidak diisi dengan kompas nilai. Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat memanfaatkan ruang ini untuk merancang pembelajaran yang membumi dan membebaskan—mengintegrasikan teks-teks keagamaan klasik dengan isu-isu kontemporer, menggabungkan hikmah lokal dengan teknologi digital, dan membentuk karakter siswa sebagai warga bangsa sekaligus insan beriman.

Inovasi juga menyentuh bidang evaluasi. Guru penggerak nilai tidak semata mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga merancang penilaian yang merekam proses, sikap, dan refleksi siswa. Rubrik-rubrik nilai seperti empati, tanggung jawab, dan komitmen sosial menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pendidikan yang holistik dan manusiawi.

Tantangan inovasi nilai tentu tidak ringan. Dalam sistem yang kadang lebih mementingkan administratif daripada esensi, guru inovatif sering kali dianggap tidak sesuai pakem. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral dan keyakinan ideologis bahwa yang mereka lakukan adalah demi kemanusiaan dan keberlanjutan bangsa. Dukungan komunitas dan pemahaman stakeholder sangat menentukan keberhasilan inovasi ini.

Guru juga harus cakap berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat agar inovasi yang dibawa tidak disalahpahami. Mengubah cara pandang bahwa pendidikan bukan sekadar nilai ujian, tetapi perjalanan pembentukan karakter, membutuhkan kerja sama lintas pihak. Guru yang mampu menjelaskan visi ini akan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan yang lebih besar.

Inovasi berbasis nilai juga mengandung misi spiritual. Ia bukan semata praktik teknis, tetapi bagian dari ibadah. Dalam pandangan Islam, bekerja dengan niat yang baik dan nilai-nilai kemanusiaan adalah amal saleh. Dengan demikian, setiap upaya guru dalam merancang pembelajaran yang adil, menghargai keberagaman, dan membebaskan siswa dari belenggu kebodohan menjadi bagian dari jihad pendidikan.

Sebagai penggerak nilai, guru perlu hadir dalam kebijakan publik. Suara guru perlu terdengar dalam forum-forum pengambilan keputusan, agar kebijakan tidak hanya teknokratis tetapi juga etik dan inklusif. Guru Nahdliyin-Marhaenis bisa menjadi kekuatan moral yang mengingatkan arah pendidikan Indonesia agar tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Menjadi penggerak inovasi berbasis nilai adalah tugas sejarah. Di tengah perubahan besar dan ketidakpastian global, hanya pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai luhur yang bisa menyelamatkan peradaban. Guru adalah lokomotif perubahan itu. Bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembentuk arah masa depan bangsa.

Akhirnya, tugas guru Nahdliyin-Marhaenis dalam Society 5.0 adalah menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebijaksanaan spiritual, antara inovasi modern dan nilai-nilai lokal, antara masa depan digital dan akar tradisi. Inilah jalan tengah yang akan membawa pendidikan Indonesia tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan membebaskan.

## Literasi, Digitalisasi, dan Pembebasan

Di tengah laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat, dunia pendidikan berada dalam pusaran transformasi yang sangat fundamental. Digitalisasi bukan lagi wacana masa depan, melainkan kenyataan yang membentuk cara belajar, cara mengakses pengetahuan, hingga cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat pembelajar yang kritis, mandiri, dan sadar nilai. Namun, persoalannya

tidak berhenti pada kemampuan teknis menggunakan gawai atau platform digital, melainkan pada bagaimana digitalisasi diarahkan untuk pembebasan, bukan sekadar konsumsi, kontrol, atau bahkan penindasan terselubung.

Bagi guru Nahdliyin-Marhaenis, literasi dan digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ideologis dan etis. Literasi bukan hanya tentang membaca huruf, tetapi membaca dunia, membaca ketimpangan, membaca sejarah, dan membaca masa depan secara reflektif. Demikian pula digitalisasi bukan semata urusan kecepatan akses, tetapi persoalan hak, pemerataan, dan keadilan. Maka, bab ini akan membahas secara mendalam bagaimana literasi digital dapat dimaknai dan diimplementasikan sebagai alat pembebasan kaum marhaen—rakyat kecil, tertindas, dan termarginalkan—sebagaimana diperjuangkan oleh Soekarno dan para ulama pejuang.

Secara historis, pendidikan di Indonesia telah lama menjadi arena perebutan makna antara pembebasan dan penjinakan. Dalam masa kolonial, sekolah dibentuk untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik yang patuh, bukan manusia merdeka yang berpikir kritis. Dalam masa kontemporer, ancaman serupa muncul dalam bentuk baru: ketika teknologi menjadi candu konsumtif, platform digital menjadi alat kontrol, dan sistem pendidikan tergiring dalam algoritma komersial. Di sinilah guru sebagai subjek ideologis harus mengambil peran sentral—bukan sebagai pengguna pasif teknologi, tetapi sebagai subjek yang mampu mengarahkan, mengkritisi, dan menciptakan ruang-ruang digital yang membebaskan.

Bab ini akan mengurai relasi antara literasi, teknologi, dan pembebasan dalam perspektif Nahdliyin-Marhaenis. Nilai-nilai Aswaja seperti tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) sangat relevan dalam menyikapi dunia digital yang serba ekstrem: antara banjir informasi dan minim refleksi, antara akses global dan isolasi lokal, antara kebebasan berbicara dan hilangnya etika. Begitu pula nilai-nilai marhaenisme seperti keberpihakan kepada rakyat kecil, semangat produksi mandiri, dan anti-penindasan sangat kontekstual ketika kita bicara tentang

digital divide, ketimpangan akses teknologi, dan ketergantungan terhadap produk luar negeri dalam dunia pendidikan.

Pengantar ini juga ingin mengajak kita menyadari bahwa melek digital tidak cukup hanya dilihat dari aspek keterampilan teknis seperti mengoperasikan laptop atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Melek digital harus dimaknai sebagai literasi kritis terhadap konten, algoritma, dan dampak sosial yang menyertai penggunaan teknologi. Guru harus memahami bagaimana big data bekerja, bagaimana media sosial membentuk opini, bagaimana disinformasi dan hoaks merusak ruang dialog. Semua ini menjadi bagian dari literasi digital yang membebaskan: mengajari siswa untuk menjadi warga digital yang cerdas, kritis, dan etis.

Bab ini juga akan menelaah bagaimana guru, terutama di daerah tertinggal dan pinggiran, menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur digital. Pemerataan akses digital menjadi bagian penting dari keadilan sosial. Di tengah program pemerintah yang gencar mempromosikan digitalisasi sekolah, masih banyak sekolah yang tidak memiliki sinyal internet, tidak memiliki perangkat, bahkan tidak memiliki listrik yang stabil. Guru di medan semacam ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Maka, bab ini juga akan mengulas strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan semangat gotong royong, kreatif, dan solutif.

Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah figur yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memimpin perubahan sosial. Mereka menjadi juru dakwah digital yang tidak memaksakan doktrin, tetapi mengajak kepada nilai-nilai kebajikan. Mereka juga menjadi penggerak budaya digital yang berkarakter, menjadikan internet sebagai ruang ekspresi etis, dan bukan ruang kecacauan informasi. Maka, dalam bagian ini akan ditampilkan praktik-praktik baik (best practices) guru di berbagai daerah yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk membangun komunitas belajar, memproduksi konten edukatif, dan memperkuat solidaritas antarwarga sekolah.

Literasi digital juga memiliki sisi spiritual. Dalam pandangan Islam, termasuk tradisi pesantren dan ulama Nahdlatul Ulama, ilmu harus

mendekatkan manusia kepada kebaikan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan dalam bingkai akhlak. Kita tidak hanya butuh guru yang bisa membuat konten YouTube atau infografis menarik, tetapi guru yang mampu menyampaikan pesan kebaikan, menyentuh nurani, dan mengarahkan siswa kepada nilai-nilai kebenaran. Inilah makna digitalisasi yang berjiwa, bukan sekadar berbasis angka.

Pada bagian akhir bab ini akan ditekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor—pemerintah, guru, orang tua, dunia usaha, dan komunitas lokal—dalam membangun ekosistem digital pendidikan yang humanistik dan kontekstual. Literasi digital harus menjadi gerakan kolektif, bukan proyek elite. Dan guru harus menjadi motor utamanya: memimpin dengan keteladanan, menyalakan obor nilai, dan menyinari jalan masa depan pendidikan Indonesia dengan cahaya ilmu dan keadaban.

Dengan semangat tersebut, Bab 8 akan menjadi titik kulminasi bagaimana gagasan Nahdliyin-Marhaenis mampu menjawab tantangan paling mutakhir dalam dunia pendidikan. Dari soal literasi digital hingga strategi melawan alienasi akibat teknologi, semua akan diurai secara filosofis, historis, dan aplikatif. Mari kita lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya untuk menyelami bagaimana literasi dan digitalisasi dapat benar-benar menjadi alat pembebasan kaum marhaen di era Society 5.0.

### **Literasi Digital untuk Pemberdayaan Marhaen**

Literasi digital di era kontemporer bukan lagi sekadar keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi telah berubah menjadi kompetensi fundamental yang menyangkut kesadaran, etika, dan keberdayaan. Dalam perspektif Marhaenis, literasi digital harus menjadi alat pembebasan rakyat kecil dari keterkungkungan informasi, ketergantungan teknologi asing, dan pemiskinan struktural akibat ketimpangan akses. Hal ini sejalan dengan semangat Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat melalui penguasaan terhadap alat-alat produksi. Di era digital ini, alat produksi itu adalah pengetahuan, akses terhadap jaringan informasi, dan kemampuan menciptakan konten bermakna.

Filosofi pemberdayaan marhaen tidak akan bisa terwujud jika warga negara hanya menjadi konsumen digital, bukan produsen pengetahuan. Literasi digital memberi peluang bagi siapa pun, termasuk warga kelas bawah, untuk menyuarakan aspirasinya, memproduksi narasi tandingan, dan membentuk identitas budaya baru yang membumi dan membebaskan. Guru memiliki peran sentral dalam proses ini. Ia bukan sekadar penyampai materi, tetapi fasilitator kesadaran. Ia mengajak siswa tidak hanya meng-klik dan menggulir layar, tetapi merenungkan, mencipta, dan menggugat ketidakadilan digital.

Secara historis, tradisi pesantren dalam lingkungan Nahdlatul Ulama telah mengajarkan literasi dalam bentuk yang sangat mendalam. Santri diajarkan untuk membaca (iqra') tidak hanya sebagai kegiatan kognitif, tetapi juga aktivitas spiritual dan sosial. Membaca berarti memahami realitas dengan hati dan pikiran. Maka ketika konsep literasi digital diperkenalkan, ia semestinya tidak dipahami secara terpisah dari nilai-nilai keislaman yang mendorong keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat. Tradisi halaqah, bahtsul masail, dan musyawarah adalah bentuk literasi kritis yang perlu dikontekstualisasikan ke dalam ruang digital.

Dalam kerangka itu, literasi digital sejati adalah literasi yang memberdayakan: yang menolak dominasi informasi tunggal, yang menggugat algoritma yang bias, dan yang menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Kaum marhaen, sebagaimana dimaknai oleh Soekarno, adalah mereka yang secara sosial-ekonomi dan politik terpinggirkan. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadikan literasi digital sebagai jalan bagi siswa untuk keluar dari ketergantungan terhadap informasi pasif dan bergerak menuju penciptaan pengetahuan aktif.

Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Di berbagai wilayah tertinggal, guru dan siswa masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur: internet yang lemah, perangkat yang terbatas, bahkan listrik yang tidak stabil. Dalam kondisi semacam ini, literasi digital harus dimulai dari keberanian untuk berpikir strategis dan solutif. Guru harus mampu menyiasati teknologi dengan pendekatan lokal yang inklusif: mengajar

dengan video sederhana, memanfaatkan radio komunitas, atau menciptakan materi digital berbasis lokalitas.

Pemberdayaan marhaen melalui literasi digital juga menuntut kemampuan guru dalam menyusun narasi tandingan terhadap dominasi media arus utama. Banyak siswa dan orang tua yang terpapar informasi palsu, ujaran kebencian, dan nilai-nilai konsumtif yang memiskinkan mental. Guru harus hadir sebagai pemandu dalam proses literasi kritis: mengajarkan cara memverifikasi informasi, membedakan opini dan fakta, serta memahami konstruksi sosial dari media.

Pengalaman historis bangsa Indonesia juga menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari narasi alternatif yang lahir dari rakyat. Dalam konteks digital, narasi itu harus dimulai dari sekolah—dari ruang kelas hingga grup WhatsApp orang tua, dari media sosial siswa hingga komunitas literasi digital. Guru menjadi penggerak yang menyalakan lentera kesadaran, bahwa ruang digital bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan nilai, menyuarakan kebenaran, dan merayakan keanekaragaman identitas.

Literasi digital harus pula mencakup dimensi etika dan spiritualitas. Di sinilah nilai-nilai Aswaja menjadi sangat relevan. Prinsip tawazun dan tasamuh menjadi dasar dalam menyikapi perbedaan pendapat di ruang digital. Guru harus menanamkan kepada siswa bahwa menjadi pengguna teknologi yang cerdas berarti juga menjadi manusia yang bijak, tidak mudah marah, tidak menyebarkan kebencian, dan selalu mencari titik temu dalam perbedaan.

Peran guru sebagai transformator sosial dalam konteks literasi digital juga dapat diwujudkan melalui pelatihan komunitas, pendampingan keluarga, dan kerja sama dengan pesantren atau lembaga lokal. Dalam banyak kasus, keterlibatan guru dalam kegiatan literasi digital berbasis komunitas telah berhasil meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak. Literasi digital menjadi pintu masuk pembentukan ekosistem belajar yang kolaboratif, partisipatif, dan membumi.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus peka terhadap bahasa. Di era digital, narasi dan simbol menjadi alat kekuasaan. Bahasa yang digunakan dalam media sosial atau aplikasi pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal, mudah dipahami, dan mengandung makna kebudayaan. Penggunaan istilah yang elitis dan asing justru akan menciptakan jarak antara teknologi dan rakyat kecil. Oleh karena itu, guru harus menjadi penerjemah antara dunia digital dan kehidupan sehari-hari siswa.

Lebih jauh lagi, literasi digital harus membangun semangat produksi. Siswa didorong bukan hanya menjadi penikmat konten, tetapi pencipta konten: membuat blog, video edukatif, podcast lokal, dan karya digital lain yang berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas. Guru bisa memfasilitasi workshop, proyek berbasis masalah, atau lomba konten digital bertema kebangsaan, toleransi, dan kearifan lokal.

Konsep pemberdayaan dalam literasi digital juga menuntut adanya kebijakan yang berpihak. Pemerintah harus menjamin infrastruktur teknologi bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Namun di luar itu, guru dapat menjadi agen advokasi: menyuarakan ketidaksetaraan, melibatkan LSM, dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan digital yang sistemik.

Dalam dunia yang ditandai dengan banjir informasi, kemampuan menyaring menjadi lebih penting daripada kemampuan menyerap. Guru harus mengajarkan cara memilih sumber yang kredibel, cara menyikapi informasi viral, dan cara menjaga kesehatan mental di tengah terpaan notifikasi yang tak berkesudahan. Literasi digital harus dimaknai pula sebagai literasi emosional dan spiritual.

Pendidikan literasi digital juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki kebebasan untuk mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis literasi digital. Ini dapat berupa proyek kampanye digital untuk toleransi, dokumenter lokal tentang pahlawan marhaen, atau dialog daring dengan narasumber dari kalangan pesantren dan NU.

Salah satu aspek penting dari literasi digital yang sering diabaikan adalah keamanan digital. Guru harus mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya menjaga data pribadi, etika dalam berinteraksi daring, serta bahaya eksploitasi digital seperti perundungan siber, phishing, atau penipuan daring. Literasi digital bukan hanya membebaskan, tetapi juga melindungi.

Dalam semangat emansipatoris, guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadi contoh nyata dalam penggunaan teknologi untuk kebaikan. Mereka tidak alergi terhadap teknologi, tetapi juga tidak terpesona secara buta. Mereka bijak, selektif, dan reflektif. Mereka menggunakan teknologi untuk menyampaikan nilai, memperkuat iman, dan memperjuangkan keadilan sosial.

Akhirnya, literasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju transformasi pendidikan dan sosial. Melalui literasi digital, kaum marhaen dapat bangkit sebagai subjek pengetahuan, bukan objek dari kekuasaan algoritma. Dan guru—dengan semangat Nahdliyin dan Marhaenis—menjadi juru mudi yang membawa kapal besar pendidikan Indonesia menuju pelabuhan keadaban digital yang adil dan membebaskan.

### **Teknologi dan Spirit Keteladanan**

Teknologi tidak pernah hadir sebagai entitas netral. Ia selalu dibungkus oleh nilai, kepentingan, dan orientasi kekuasaan. Oleh karena itu, menyikapi perkembangan teknologi tidak cukup dengan pendekatan fungsional atau teknis semata, tetapi harus disertai dengan kedalaman nilai dan keteladanan moral. Dalam konteks pendidikan, guru memegang peran penting dalam memberikan arah pada penggunaan teknologi, menjadikannya sarana penguatan nilai kemanusiaan dan spiritualitas, bukan alat pengasingan atau dehumanisasi.

Keteladanan dalam konteks teknologi berarti mempraktikkan prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi digital. Di era ketika guru mudah tergoda menjadi selebritas edukatif di media sosial, semangat Nahdliyin dan Marhaenis justru menuntut keikhlasan,

kesederhanaan, dan pengabdian. Keteladanan bukan berarti menolak eksistensi digital, melainkan menghadirkan nilai-nilai luhur dalam setiap konten, komunikasi, dan keputusan yang melibatkan teknologi.

Dalam sejarah Islam, keteladanan telah menjadi inti dari proses pendidikan. Nabi Muhammad SAW adalah “uswah hasanah”—teladan agung—yang mengajarkan umat tidak sekadar melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, akhlak mulia, dan konsistensi hidup. Tradisi pesantren yang diwarisi Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya akhlak sebagai pusat dari keilmuan. Maka ketika guru menggunakan teknologi, ia harus melakukannya dengan kesadaran etik dan tanggung jawab moral, bukan semata demi popularitas atau efisiensi.

Keteladanan berbasis teknologi juga bisa dimaknai sebagai praktik digital yang mencerminkan kesantunan, kepedulian, dan keberpihakan kepada yang lemah. Guru bisa menunjukkan keteladanan saat ia membalas komentar siswa dengan empati, menghindari perundungan digital, atau ketika ia menolak menyebarkan konten yang memperkeruh suasana sosial-politik. Dalam semua itu, guru menjadi penjaga nurani di tengah derasnya arus digital yang sering kali tidak berperasaan.

Lebih jauh, keteladanan dalam penggunaan teknologi juga terlihat dalam bagaimana guru mengajarkan kesederhanaan digital. Di tengah budaya konsumtif terhadap gawai terbaru dan aplikasi paling mutakhir, guru dapat menunjukkan bahwa keefektifan pembelajaran tidak bergantung pada kemewahan alat, tetapi pada kedalaman niat, kreativitas dalam menyusun pembelajaran, dan kepedulian terhadap siswa. Nilai ini sejalan dengan prinsip Marhaenisme yang menolak hegemoni kapital dan menekankan kemandirian rakyat.

Keteladanan ini pun harus bersifat kontekstual, tidak hanya berlaku di sekolah urban yang terjangkau teknologi tinggi, tetapi juga di sekolah-sekolah pelosok. Guru yang mampu merancang bahan ajar digital sederhana, merekam suara pengajian, atau membuat slideshow edukatif untuk disebar lewat WA Group, menunjukkan keteladanan inovatif yang berpihak pada

kebutuhan rakyat kecil. Inilah bentuk teknologi yang dibumikan dalam konteks lokal.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus mampu menunjukkan keteladanan dalam menggunakan teknologi sebagai alat advokasi sosial. Di era digital, ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran HAM seringkali tersembunyi di balik layar kekuasaan. Guru dapat menggunakan platform digital untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kecil, menulis opini edukatif, atau mendukung gerakan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Aswaja.

Sikap selektif terhadap teknologi juga merupakan bentuk keteladanan. Guru tidak harus mengikuti semua tren atau menggunakan semua platform yang sedang viral. Ia dapat memilih dan memilah alat yang sesuai dengan nilai pendidikan yang ia anut. Misalnya, menolak aplikasi yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi meskipun digemari siswa, atau menghindari platform yang menyebarkan konten hoaks dan intoleran.

Aspek lain dari keteladanan adalah kemampuan guru untuk mengajarkan kepada siswa tentang waktu. Di era digital, distraksi adalah penyakit kronis. Keteladanan guru dalam mengelola waktu secara produktif, membatasi penggunaan gawai, dan memberi ruang untuk refleksi dan dialog tatap muka menjadi sangat penting. Guru bisa menunjukkan bahwa teknologi hanyalah alat, sementara kualitas hubungan antarmanusia tetap yang utama.

Spirit keteladanan juga bisa diwujudkan dalam pengembangan konten digital lokal. Guru dapat mendorong siswa membuat vlog tentang budaya daerah, menulis artikel tentang kearifan lokal, atau merekam kegiatan keagamaan sebagai dokumentasi pendidikan. Semua ini menjadi simbol bahwa teknologi bisa digunakan untuk memperkuat jati diri bangsa, bukan meleburkannya dalam budaya global yang seragam dan hedonistik.

Keteladanan berbasis teknologi juga berarti keberanian untuk mengakui keterbatasan. Tidak semua guru mahir teknologi, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah keterbukaan untuk belajar, kemauan untuk berubah, dan keikhlasan untuk dibantu oleh yang lebih muda. Guru yang

rendah hati dan adaptif menjadi teladan bagi murid bahwa belajar adalah proses seumur hidup.

Keteladanan juga menuntut kesadaran ekologis dalam penggunaan teknologi. Dalam semangat Marhaenis yang berpihak pada kelestarian bumi, guru harus mengajarkan etika digital ramah lingkungan—mengurangi jejak karbon digital, menghemat daya, dan mendaur ulang perangkat bekas. Literasi ekologis ini penting agar teknologi tidak menjadi alat eksploitasi baru terhadap bumi dan umat manusia.

Dalam banyak pesantren, keteladanan tidak hanya berupa ajaran, tapi dalam keseharian: bagaimana kiai makan, berpakaian, menggunakan air, dan bersikap kepada santri. Keteladanan guru dalam konteks teknologi harus memiliki muatan yang sama: tampak dalam pilihan aplikasi, gaya berkomunikasi di media sosial, bahkan dalam caption yang ia tulis. Setiap tindakan digital menjadi bagian dari pendidikan moral.

Keteladanan juga bisa muncul dari keberanian guru menghadirkan konten-konten alternatif yang bernuansa spiritual, kontemplatif, dan membumi. Misalnya, membuat refleksi harian di media sosial, membagikan doa-doa pendek, atau berbagi kisah inspiratif yang membangkitkan semangat belajar. Ini menjadi oase di tengah gempuran konten banal dan viral yang miskin makna.

Sebagai figur yang dikagumi, guru memiliki kekuatan untuk membentuk imajinasi siswa tentang apa itu “digital yang sehat”. Keteladanan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Sebab dalam dunia tanpa batas, panutan bukan lagi orang yang hadir secara fisik, tetapi yang tampil dalam layar. Guru harus mengisi ruang ini dengan narasi yang jernih dan nilai yang kokoh.

Dalam kerangka Nahdliyin dan Marhaenis, keteladanan dalam teknologi harus bersifat holistik—menggabungkan spiritualitas, sosialisme, dan nasionalisme. Guru adalah penjaga nilai sekaligus inovator. Ia berdiri di dua dunia: yang satu terhubung dengan langit melalui nilai-nilai Ilahiyah, dan yang satu berpijak pada bumi melalui pengabdian kepada rakyat.

Keteladanan pun mencakup cara guru menyikapi kebaruan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI). Alih-alih takut atau menolak, guru dapat

menjadi fasilitator diskusi kritis tentang implikasi etis dari AI, mempertanyakan keadilan algoritma, dan merumuskan peran manusia dalam dunia otomatisasi. Ini merupakan bentuk keteladanan intelektual dan moral yang sangat dibutuhkan.

Akhirnya, keteladanan dalam dunia digital adalah tentang komitmen untuk tetap manusiawi. Dalam kesibukan mengajar daring, membuat konten, dan mengelola platform digital, guru tidak boleh kehilangan sentuhan pribadi, empati, dan kasih sayang kepada murid. Keteladanan itu tampak dalam cara menyapa, mendengar, dan memahami. Inilah inti dari spiritualitas digital. Keteladanan bukanlah pamer kesempurnaan, tetapi ketekunan dalam perbaikan. Guru Nahdliyin-Marhaenis hadir sebagai pelita dalam kegelapan zaman digital—tidak memaksakan cahaya, tapi menyalakannya pelan-pelan, dengan sabar dan ikhlas, hingga satu per satu jiwa anak bangsa ikut bercahaya.

### **Etika dan Batas Moral di Era Siber**

Era siber atau dunia maya bukanlah ruang hampa nilai. Ia adalah jagat baru tempat miliaran interaksi terjadi dalam sekejap mata—memungkinkan distribusi pengetahuan, hiburan, spiritualitas, sekaligus kebencian, fitnah, dan kebohongan. Dunia ini menuntut hadirnya fondasi etik yang kokoh, terutama bagi guru sebagai agen moral dan penjaga nilai dalam pendidikan. Jika dunia fisik memiliki batas-batas sosial, maka dunia siber memerlukan batas moral yang dijaga bukan oleh algoritma, melainkan oleh kesadaran pribadi dan kebijakan kolektif.

Etika di era digital menjadi semacam benteng yang harus dibangun secara sadar oleh setiap individu, dan guru berada di garda depan pembentukannya. Dalam tradisi Nahdliyin, etika atau akhlak tidak dipisahkan dari ilmu. Bahkan, dalam pesantren, adab mendahului ilmu. Santri diajarkan menghormati kitab, guru, dan sesama santri sebelum mengkaji isi teks. Konsep ini bisa diadaptasi dalam dunia siber: bagaimana siswa diajarkan adab berkomentar, etika menyebarkan informasi, serta tanggung jawab digital yang tidak kalah penting dari literasi digital itu sendiri.

Dunia maya menciptakan jarak emosional dan ilusi anonimitas yang memungkinkan orang melontarkan kata-kata kasar tanpa rasa bersalah. Inilah mengapa batas moral sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Guru tidak cukup hanya mengajarkan cara membuat akun atau mencari informasi, tetapi juga perlu membimbing siswa agar menyadari dampak emosional dari satu komentar, satu unggahan, satu klik. Di sinilah letak pentingnya etika digital yang berpijak pada nilai-nilai religius dan kebangsaan.

Dalam sejarah kebudayaan Islam, etika digital dapat dirunut pada ajaran Imam Al-Ghazali mengenai penjagaan lisan, hati, dan niat. Dalam konteks hari ini, lisan telah bermetamorfosis menjadi jempol. Maka, “ghibah” bisa terjadi dalam status Facebook, “fitnah” tersebar lewat forward WhatsApp, dan “ujub” menjelma dalam jumlah likes dan followers. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus mampu menganalogikan ajaran-ajaran klasik ini dalam konteks digital, sehingga pesan moral agama tetap relevan di dunia teknologi tinggi.

Selain itu, batas moral dalam dunia siber juga berkaitan erat dengan privasi dan hak digital. Banyak siswa dan guru belum memahami bahwa menyebarkan foto, video, atau data pribadi orang lain tanpa izin adalah bentuk pelanggaran etika yang serius. Guru harus menjadi contoh dalam menghormati hak digital orang lain—tidak menyebarkan aib, tidak mengeksploitasi momen, dan tidak menjadikan media sosial sebagai alat pembuktian kekuasaan atau otoritas.

Guru juga memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan siswa tentang bahaya konten yang merusak moral dan melemahkan akal. Pornografi, ujaran kebencian, konten provokatif—semua tersebar luas di ruang maya dan bisa diakses hanya dengan sentuhan jari. Etika di sini bukan berarti pelarangan semata, melainkan pendekatan edukatif yang menguatkan kontrol diri, logika kritis, dan spiritualitas siswa. Pendidikan etika digital yang kuat membuat siswa mampu memilih dan memilah, bukan sekadar mengikuti arus.

Batas moral juga berkaitan dengan konsep keadilan dan keberpihakan. Dunia digital seringkali memperkuat ketimpangan: yang punya kuota besar dan perangkat canggih lebih diuntungkan. Dalam hal ini, guru Marhaenis harus memperjuangkan keadilan digital—mendorong pemerataan akses, membuat konten yang ringan data, dan tidak menyudutkan siswa yang terbatas teknologinya. Etika bukan hanya urusan personal, tetapi juga menyangkut struktur sosial.

Etika digital dalam dunia pendidikan juga melibatkan kejujuran akademik. Di tengah maraknya copy-paste dan penggunaan AI untuk tugas-tugas sekolah, guru harus mengajarkan pentingnya orisinalitas, proses belajar, dan nilai kerja keras. Dalam hal ini, keteladanan guru menjadi penting: tidak hanya melarang plagiarisme, tetapi juga menunjukkan bagaimana berpikir kritis, membuat catatan sendiri, dan menghargai hak kekayaan intelektual.

Batas moral lain yang harus dijaga adalah terkait hubungan antardinividu. Dunia maya sering mengaburkan batas antara guru dan murid, antara profesionalitas dan keakraban. Guru harus mampu menjaga jarak yang sehat dalam interaksi digital—bersahabat namun tetap menjaga etika profesi, dekat namun tidak melanggar batas pribadi. Ini penting untuk menjaga kehormatan, kepercayaan, dan integritas hubungan pedagogik.

Nilai-nilai etika juga harus meresap dalam semua dimensi pengajaran daring. Guru yang terbiasa menyampaikan materi tanpa salam, tanpa memperhatikan respons siswa, atau tanpa menyiapkan bahan dengan baik, sebenarnya sedang melanggar etika profesional. Dunia digital bukan alasan untuk menurunkan standar integritas, melainkan tantangan untuk memperkuatnya dalam format yang baru.

Dalam pendidikan Nahdliyin, etika tidak hanya terkait dengan hubungan manusia, tetapi juga dengan hubungan kepada Tuhan dan alam. Maka, dalam dunia siber, guru harus mengajarkan etika ekologis digital: menggunakan teknologi secara bijak, menghindari konsumsi data berlebihan, serta mendorong kesadaran bahwa dunia maya pun memiliki dampak terhadap lingkungan fisik.

Etika digital juga menyangkut bahasa. Dunia digital sering mengabaikan sopan santun karena tidak ada intonasi atau ekspresi wajah. Guru harus mengajarkan cara menulis pesan, memberi umpan balik, dan menyampaikan ketidaksepakatan dengan cara santun. Kata-kata adalah cerminan akhlak, dan dalam dunia siber, kata-kata lebih abadi dari jejak kaki.

Guru harus memahami bahwa di era ini, pelanggaran etika bisa berujung pada konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik bisa menghancurkan reputasi dan masa depan seseorang. Maka, membangun kesadaran hukum digital sejak dini menjadi bagian dari pendidikan moral di sekolah.

Nilai-nilai Aswaja (tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal) bisa dijadikan kerangka dalam membangun etika digital. Guru dapat mengajarkan moderasi dalam berkomentar, toleransi dalam menyikapi perbedaan pandangan, keseimbangan antara dunia maya dan nyata, serta keadilan dalam memberikan informasi. Inilah bentuk aktualisasi ajaran klasik dalam ruang virtual.

Bagi guru Marhaenis, batas moral juga berarti berpihak kepada kaum lemah di dunia digital. Guru bisa mengajak siswa membuat kampanye literasi, mengadvokasi isu anak putus sekolah karena digital divide, atau menyuarakan ketimpangan akses pendidikan daring. Etika digital bukan hanya tentang tidak merugikan orang lain, tetapi juga tentang berkontribusi pada keadilan sosial.

Pendidikan etika digital harus menjadi gerakan sistemik, bukan sekadar wacana. Sekolah bisa membuat kode etik digital, membentuk tim moderasi konten siswa, atau mengadakan pelatihan bagi guru dan orang tua tentang keamanan dan moralitas digital. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadi penggerak dari gerakan ini.

Dalam menghadapi tantangan etika di era siber, penting bagi guru untuk membangun komunitas belajar yang saling mendukung. Forum diskusi etika digital, kolaborasi pembuatan materi edukatif, dan refleksi kolektif tentang praktik daring bisa menjadi ruang pertumbuhan moral

bersama. Guru tidak boleh berjalan sendiri dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks ini.

Etika digital adalah fondasi masa depan pendidikan. Tanpa itu, teknologi hanya akan menjadi alat untuk memperluas ketimpangan, menyuburkan kekacauan, dan merusak nilai-nilai kebangsaan. Dengan itu, teknologi bisa menjadi alat pembebasan, penyatuan, dan transformasi. Maka, tugas kita semua—terutama guru—adalah memastikan bahwa etika tetap menjadi cahaya dalam gelapnya dunia maya.

### **Membangun Ekosistem Pendidikan Digital Humanistik**

Membangun ekosistem pendidikan digital tidak semata-mata berbicara tentang penggunaan perangkat keras atau lunak, tetapi yang lebih esensial adalah membangun sistem nilai, budaya kerja, dan relasi yang tetap menempatkan manusia sebagai pusatnya. Inilah inti dari pendekatan *humanistik digital*—suatu paradigma pendidikan yang tidak kehilangan sentuhan kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi. Dalam dunia yang makin terdigitalisasi, peran guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi krusial untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap selaras dengan nilai-nilai luhur agama, kebangsaan, dan martabat manusia.

Filsafat pendidikan humanistik menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah aktualisasi potensi manusia secara utuh—bukan sekadar kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual. Ketika sistem pendidikan memasuki ruang digital, nilai-nilai tersebut seringkali terpinggirkan oleh efisiensi, kecepatan, dan kuantifikasi hasil. Guru dituntut mengembalikan ruh pendidikan ke jalurnya: bahwa mendidik bukanlah memindahkan data dari satu layar ke layar lain, tetapi menyentuh hati, membangkitkan kesadaran, dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan.

Secara historis, pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional di Indonesia telah mewariskan model pembelajaran yang sangat humanistik. Interaksi guru-siswa (kyai-santri) tidak dibatasi oleh waktu belajar formal. Kedekatan emosional, keteladanan hidup, serta nilai-nilai spiritualitas menyatu dalam keseluruhan proses belajar. Pendekatan ini bisa dijadikan

inspirasi untuk membangun model digital yang tetap menjaga relasi antar-manusia. Platform digital seharusnya dirancang tidak sekadar fungsional, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi, interaksi bernuansa etik, dan kehangatan hubungan pedagogik.

Dalam konteks Marhaenisme, membangun ekosistem digital humanistik juga berarti memastikan akses yang adil bagi semua. Kaum Marhaen seringkali menjadi korban digital divide—ketimpangan dalam akses, literasi, dan infrastruktur. Guru yang berpijak pada nilai-nilai Marhaenis harus menjadi penggerak keadilan digital, memperjuangkan internet murah untuk daerah tertinggal, membuat konten yang mudah diakses, dan mendidik siswa dengan semangat gotong royong dalam belajar daring.

Ekosistem digital humanistik juga menuntut pendekatan kurikulum yang integratif. Alih-alih hanya mengajarkan keterampilan digital secara teknis, guru harus menggabungkan dimensi etika, budaya, dan spiritualitas dalam pembelajaran. Pelajaran TIK bisa menjadi ruang untuk berdiskusi tentang hoaks, pelanggaran privasi, atau jejak digital. Pelajaran agama bisa menjadi media untuk merefleksikan perilaku di media sosial. Integrasi ini menjadikan pendidikan digital tidak terlepas dari akar budaya dan nilai bangsa.

Kultur gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial harus tetap hidup dalam ruang maya. Guru dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, diskusi daring yang menghargai perbedaan, dan praktik refleksi bersama sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai luhur Indonesia dalam format digital. Di sinilah guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai arsitek budaya belajar.

Teknologi bukanlah pengganti guru, melainkan alat yang memperkuat relasi belajar. Namun, tanpa pemahaman filosofis yang kuat, guru bisa terjebak menjadi operator teknologi tanpa jiwa. Ekosistem digital yang humanistik harus didesain dari bawah, oleh komunitas guru, siswa, dan masyarakat, bukan sekadar instruksi teknokratik dari pusat. Kemandirian sekolah dalam memilih platform, menyusun konten, dan mengatur ritme belajar sangat penting agar tidak kehilangan konteks dan nilai lokal.

Pendidikan digital yang humanistik juga menghargai keberagaman gaya belajar. Bukan semua anak cocok dengan video, atau kuis daring, atau forum diskusi. Guru harus sensitif terhadap kebutuhan siswa: menyediakan pilihan, memahami ritme individu, dan membuka ruang umpan balik yang tulus. Di sinilah sentuhan kemanusiaan menjadi pembeda antara guru sejati dan mesin algoritmik.

Dalam nilai Aswaja, prinsip tawazun (keseimbangan) menjadi fondasi etika belajar digital. Guru perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan interaksi luring, antara kecanggihan alat dengan kelembutan hati, antara kecepatan informasi dengan kedalaman makna. Dengan cara ini, ruang belajar digital tidak berubah menjadi ruang alienasi, tetapi menjadi ruang pemanusiaan.

Ekosistem digital humanistik juga menuntut guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dunia digital selalu berubah, aplikasi terus berganti, metode selalu diperbarui. Guru harus memiliki mentalitas terbuka, rendah hati untuk terus belajar, dan komitmen untuk tidak gagap teknologi tetapi tetap bersikap bijak. Sikap ini menjadi teladan nyata bagi siswa bahwa belajar bukanlah kewajiban usia muda, melainkan bagian dari jatidiri manusia.

Tidak kalah pentingnya adalah dukungan institusional. Sekolah harus memberikan pelatihan, ruang refleksi, dan kebebasan pedagogik bagi guru untuk mengeksplorasi model pembelajaran digital yang sesuai dengan karakternya. Kepala sekolah perlu menumbuhkan budaya kolaborasi, bukan kontrol berlebihan. Komunitas guru bisa menjadi ruang berbagi praktik baik, kesulitan, dan inovasi, sehingga ekosistem digital berkembang dari bawah secara organik.

Dalam pendekatan Marhaenistik, teknologi juga harus dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Guru bisa mengaitkan pembelajaran digital dengan penguatan wirausaha siswa, pengembangan konten lokal, atau pemanfaatan platform untuk pemasaran produk sekolah. Teknologi menjadi alat pembebasan, bukan komodifikasi semata. Nilai ekonomi yang dihasilkan harus kembali ke komunitas, bukan hanya ke platform besar.

Salah satu tantangan besar adalah menjaga *kehadiran* guru secara penuh dalam ruang digital. Banyak guru yang secara teknis hadir—melalui absen daring atau video—namun secara pedagogik absen. Ekosistem digital humanistik menuntut kehadiran yang utuh: guru hadir dengan empati, perhatian, dan komitmen yang nyata dalam proses belajar, meski hanya lewat layar.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus menjadi penjaga narasi. Dunia digital dipenuhi oleh wacana yang bersaing: individualisme, konsumerisme, bahkan radikalisme. Guru harus berani menyuarakan narasi alternatif—tentang kasih sayang, keadilan sosial, keberagaman, dan semangat kebangsaan. Konten-konten pembelajaran harus menjadi media penyemaian nilai, bukan hanya informasi netral.

Kurikulum Merdeka membuka peluang besar untuk mendesain ekosistem digital yang humanistik. Guru bisa menyusun proyek berbasis kehidupan nyata, eksplorasi nilai-nilai lokal, dan tantangan dunia nyata siswa. Teknologi bukan sekadar medium, tetapi jembatan antara dunia belajar dan dunia hidup yang kompleks. Di sinilah pembelajaran menemukan makna terdalamnya.

Pendidikan digital yang humanistik juga menuntut keberanian mengambil jeda. Tidak semua harus online, tidak semua harus cepat, tidak semua harus diklik. Kadang, merenung, berdiskusi secara langsung, atau menulis tangan memberi kedalaman yang tak tergantikan. Guru harus mengajarkan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata.

Terakhir, ekosistem digital humanistik tidak akan lahir dari kebijakan semata, tetapi dari kesadaran kolektif. Guru sebagai agen transformatif memiliki posisi strategis untuk menghidupkan nilai-nilai ini. Dengan menggandeng siswa, orang tua, komunitas, dan pemangku kepentingan, pendidikan digital bisa menjadi ruang perjumpaan antara teknologi dan kemanusiaan.

## Tantangan Ketimpangan Akses dan Digital Divide

Ketimpangan digital atau *digital divide* merupakan salah satu persoalan struktural paling serius yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Ketika teknologi digadang-gadang sebagai solusi atas berbagai persoalan pembelajaran, fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat, koneksi internet, dan lingkungan belajar yang mendukung. Realitas ini menjadi ironi dalam pembangunan pendidikan berbasis keadilan sosial. Guru Nahdliyin-Marhaenis, dengan spirit keberpihakan kepada kaum lemah dan terpinggirkan, perlu menyadari dan melawan ketimpangan ini sebagai bagian dari perjuangan intelektual dan praksisnya.

Dalam pemikiran Marhaenis, ketimpangan bukan sekadar perbedaan akses, tetapi hasil dari relasi kuasa dan struktur sosial yang timpang. Akses terhadap teknologi bukan semata urusan teknis, tetapi juga tentang siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang menentukan distribusi, dan siapa yang menikmati manfaatnya. Maka, dalam konteks pendidikan, guru tidak bisa bersikap netral. Ketika satu kelompok siswa menikmati pembelajaran daring dengan perangkat canggih, sementara lainnya bertarung dengan sinyal atau bahkan tidak bisa mengaksesnya sama sekali, netralitas guru justru menjadi pembiaran atas ketidakadilan.

Sejarah pendidikan di Indonesia pun menunjukkan bagaimana ketimpangan selalu menjadi bagian dari tantangan bangsa. Dari zaman kolonial hingga pascareformasi, ketidaksetaraan dalam hal geografis, ekonomi, dan sosial selalu menjadi hambatan utama pemerataan pendidikan. Kini, di era digital, bentuknya bertransformasi menjadi *digital divide*. Namun esensinya tetap sama: menciptakan kelas-kelas sosial dalam dunia belajar. Murid kota dan murid desa, anak orang kaya dan anak buruh tani, semua menghadapi kenyataan berbeda ketika memasuki dunia digital. Guru yang berpihak tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga mencari solusi konkret untuk menjembatani ketimpangan ini.

Literasi digital bukanlah titik awal yang merata bagi semua peserta didik. Mereka yang sejak kecil terbiasa dengan gawai, dilatih orang tua

yang terdidik secara digital, dan tinggal di wilayah dengan infrastruktur kuat, tentu jauh lebih siap. Sementara siswa dari keluarga marginal, yang bahkan mungkin tidak memiliki listrik stabil, menghadapi jurang pemisah yang semakin lebar. Guru Nahdliyin-Marhaenis perlu menyadari bahwa dalam konteks ini, pengajaran bukan hanya soal isi, tetapi juga strategi untuk memastikan inklusi.

Ketimpangan digital juga sering dibingkai dalam bahasa statistik semata: persentase wilayah tanpa sinyal, rasio perangkat per siswa, atau jumlah sekolah yang belum terhubung internet. Padahal, di balik angka-angka itu terdapat kisah-kisah nyata tentang anak-anak yang harus berjalan ke bukit demi sinyal, guru yang harus mengetik soal di ponsel karena tak punya laptop, dan orang tua yang harus memilih antara membeli kuota atau kebutuhan pokok. Kisah-kisah ini adalah cermin wajah bangsa yang belum sepenuhnya merdeka dalam dunia digital.

Penting bagi guru untuk membangun *empati struktural*, bukan hanya kasihan. Empati struktural adalah kesadaran mendalam bahwa ketimpangan akses bukanlah kesalahan individu, tetapi hasil dari kebijakan, prioritas pembangunan, dan struktur ekonomi yang tidak berpihak. Guru yang memiliki empati struktural akan merancang pembelajaran dengan keberpihakan: memodifikasi tugas, menyediakan opsi luring, memfasilitasi berbagi perangkat, atau bahkan memperjuangkan bantuan langsung bagi siswa marginal.

Gerakan gotong royong digital menjadi salah satu cara aplikatif yang bisa dilakukan. Sekolah, komunitas guru, alumni, dan masyarakat dapat bersama-sama membangun sistem berbagi perangkat, hotspot komunitas, atau ruang belajar kolektif. Di beberapa tempat, gerakan seperti *rumah belajar digital* sudah menjadi solusi inovatif. Guru Nahdliyin-Marhaenis dapat memimpin gerakan ini, menjadikannya bukan hanya solusi teknis, tetapi juga bentuk pengabdian sosial.

Ketimpangan digital juga menciptakan *kesenjangan pedagogis*. Guru yang terbiasa mengajar daring dengan siswa melek teknologi harus menyesuaikan strategi ketika menghadapi siswa yang tidak mengenal aplikasi

dasar sekalipun. Ini menuntut kreativitas pedagogik dan fleksibilitas yang tinggi. Metode pengajaran tidak bisa seragam, tetapi harus responsif terhadap kondisi siswa. Prinsip *al-muhafadzatu 'ala al-qadim as-shalih wal akhdu bil jadid al-ashlah* dari Aswaja sangat relevan: mempertahankan yang baik dari masa lalu (pembelajaran kontekstual luring) dan mengambil yang baru yang lebih baik (teknologi yang sesuai kebutuhan).

Kebijakan pendidikan pun harus dikritisi. Ketika sistem ujian berbasis daring diberlakukan secara nasional tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah, maka yang terjadi adalah diskriminasi sistemik. Guru memiliki peran sebagai *advokat kebijakan*, menyuarakan kondisi nyata dari bawah kepada para pengambil keputusan. Sikap ini tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan, tetapi justru sebagai bentuk tanggung jawab etis terhadap anak-anak bangsa yang tidak bersuara.

Penggunaan teknologi seharusnya berbasis kebutuhan, bukan gengsi. Tidak semua inovasi harus diikuti, terutama jika justru memperdalam ketimpangan. Guru yang kritis akan selalu bertanya: apakah ini membantu semua siswa? Apakah ini menciptakan jarak atau mendekatkan? Apakah ini memberdayakan atau meminggirkan? Sikap kritis ini adalah cerminan dari pemikiran Marhaenistik yang selalu berpihak kepada yang kecil dan dilemahkan.

Ekosistem sekolah harus menjadi ruang di mana digitalisasi dilakukan dengan kearifan. Tidak semua siswa harus dipaksa masuk ke dunia digital jika belum siap. Tahapan adaptasi, penyediaan sarana dasar, dan pendampingan harus dilakukan terlebih dahulu. Guru harus menjadi mediator antara idealisme sistem dan realitas siswa, dengan tetap menjaga integritas profesional.

Selain akses, *digital divide* juga mencakup kualitas penggunaan. Banyak siswa dan bahkan guru yang memiliki perangkat, tetapi hanya digunakan untuk hiburan, bukan pembelajaran. Literasi digital kritis harus menjadi bagian dari kurikulum. Guru harus mengajarkan bagaimana menggunakan internet secara produktif, membedakan informasi valid, dan menghindari manipulasi algoritma.

Ketimpangan gender juga muncul dalam dunia digital. Anak perempuan di banyak wilayah masih menghadapi pembatasan akses teknologi karena norma sosial atau beban domestik. Guru harus peka terhadap ini dan memastikan bahwa program digitalisasi tidak memperbesar ketimpangan gender, tetapi justru menjadi alat pemberdayaan.

Penguatan komunitas belajar berbasis lokal menjadi solusi jangka menengah. Dalam model ini, sekolah menjadi pusat sinergi antar pemangku kepentingan: orang tua, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah lokal. Gerakan ini bisa menghadirkan solusi kolektif seperti perpustakaan digital desa, kelas hibrid berbasis komunitas, dan pelatihan digital untuk keluarga.

Guru juga dapat mengembangkan *modul pembelajaran adaptif* yang bisa diakses baik secara daring maupun luring. Pendekatan ini memastikan tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan teknologi. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadi pelopor dalam inovasi seperti ini.

Media sosial dapat digunakan secara strategis untuk menyuarakan ketimpangan ini dan memobilisasi dukungan publik. Banyak kebijakan berubah karena tekanan sosial. Ketika guru menyuarakan kondisi di lapangan dengan data, narasi, dan empati, maka perubahan akan lebih mungkin terjadi.

Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Teknologi harus menjadi alat yang memperluas hak tersebut, bukan menyempitkannya. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa terhalang oleh kabel, sinyal, atau biaya kuota. Prinsip inilah yang harus diperjuangkan oleh setiap guru yang memihak rakyat.

Dengan mengakui dan menghadapi tantangan digital divide, kita tidak hanya berbicara tentang perangkat, tetapi tentang masa depan keadilan sosial. Di sinilah panggilan moral dan intelektual guru Nahdliyin-Marhaenis diuji. Bukan hanya cakap mengajar, tetapi juga tangguh dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan mereka yang dilupakan sistem.

## Strategi Pemerataan Digitalisasi oleh Guru di Daerah Tertinggal

Pemerataan digitalisasi di daerah tertinggal bukanlah sekadar tugas teknis atau administratif, melainkan sebuah amanah kultural dan ideologis yang memanggil peran strategis guru, khususnya mereka yang memiliki kesadaran sebagai Nahdliyin-Marhaenis. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, masih ada jutaan anak bangsa yang terputus dari jaringan, tak tersentuh sinyal, dan bahkan tak memiliki perangkat dasar untuk belajar. Guru di daerah tertinggal tidak hanya harus mengajar, tetapi juga menjadi arsitek pemerataan digital yang memperjuangkan keadilan teknologi sebagai bagian dari hak atas pendidikan.

Guru Nahdliyin-Marhaenis hadir dengan kesadaran ideologis bahwa keberpihakan pada kaum marjinal merupakan panggilan moral. Digitalisasi yang berpihak tidak dimulai dari teknologi, tetapi dari nurani. Maka, strategi pemerataan digital harus berbasis nilai-nilai keadilan sosial, empati komunitas, dan keterlibatan aktif warga. Guru bukan hanya eksekutor program, melainkan penggerak perubahan yang membumikan teknologi agar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan top-down dari pemerintah sering kali perlu dikritisi dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif akar rumput yang lebih adaptif.

Salah satu strategi awal adalah membangun *peta kebutuhan digital lokal*. Guru harus melakukan pemetaan partisipatif mengenai kondisi akses teknologi, ketersediaan perangkat, jenis jaringan, dan kemampuan digital siswa serta keluarganya. Data ini tidak hanya menjadi bahan advokasi ke pemerintah, tetapi juga dasar menyusun pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Guru yang memiliki kesadaran kultural akan memahami bahwa pendekatan digital di desa pegunungan tentu berbeda dengan di kawasan pesisir atau perbatasan.

Penguatan *literasi digital komunitas* juga menjadi pilar penting. Guru dapat melatih orang tua, tokoh masyarakat, dan siswa tentang penggunaan teknologi yang produktif, hemat kuota, dan relevan dengan kehidupan mereka. Program ini bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan singkat di balai desa, mushola, atau rumah warga dengan pendekatan informal dan

humanis. Pendidikan teknologi harus dipraktikkan sebagai alat pemberdayaan, bukan alat eksklusi. Semakin banyak warga paham digital, semakin luas ekosistem belajar yang inklusif terbentuk.

Guru juga dapat memimpin inisiatif pembentukan *ruang belajar digital kolektif* di desa atau lingkungan. Bekas aula, balai warga, atau sudut perpustakaan sekolah bisa dialihfungsikan menjadi ruang berbagi gawai dan sinyal. Anak-anak dapat belajar bersama di bawah bimbingan guru atau relawan. Di sinilah prinsip gotong royong diterjemahkan dalam bentuk nyata: mereka yang punya berbagi dengan yang tidak punya. Guru menjadi moderator solidaritas digital yang hidup dalam semangat Aswaja dan Marhaenisme.

Strategi lain yang aplikatif adalah mengembangkan *modul hybrid* yang bisa diakses secara daring maupun luring. Guru dapat menyusun bahan ajar yang fleksibel: tersedia dalam format cetak untuk yang tidak memiliki gawai dan dalam format digital untuk yang bisa mengakses internet. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berhenti hanya karena perbedaan alat, dan siswa tidak merasa tertinggal karena keterbatasan ekonomi atau geografis.

Advokasi kebijakan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi guru di daerah tertinggal. Guru harus menyuarakan kebutuhan riil kepada kepala daerah, dinas pendidikan, hingga pemerintah pusat. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi publik, penulisan laporan, hingga penggunaan media sosial strategis menjadi keterampilan baru yang harus dimiliki guru. Mereka harus tampil sebagai agen perubahan sekaligus diplomat komunitas digital.

Kerja sama lintas sektor perlu diperkuat. Guru bisa menjalin kemitraan dengan alumni, perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan perusahaan lokal untuk menyediakan perangkat, wifi gratis, atau pelatihan daring. Semangat kolaborasi yang dimulai dari tingkat lokal akan memperkuat akar keadilan digital. Guru berperan sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan dunia luar, menjembatani kebutuhan dengan sumber daya.

Di beberapa wilayah, guru bahkan telah menjadi *inovator teknologi sederhana*. Mereka membuat antenna penguat sinyal dari bahan bekas,

menyusun sistem peminjaman tablet bergilir, hingga mengembangkan sistem pembelajaran SMS berbasis fitur ponsel jadul. Inovasi-inovasi ini lahir bukan karena ketersediaan sumber daya, tetapi karena daya juang guru yang berpihak dan berani bertindak.

Penting pula menyadari bahwa digitalisasi di daerah tertinggal harus memperhatikan *konteks budaya lokal*. Jangan sampai teknologi menjadi kekuatan yang merusak nilai-nilai kearifan lokal, memicu ketergantungan, atau menciptakan alienasi budaya. Guru harus memediasi antara dunia digital dan kearifan lokal, menjadikan teknologi sebagai alat pelestari nilai, bukan penghancur identitas.

Guru di daerah tertinggal juga perlu difasilitasi untuk *mengakses pelatihan dan pembinaan yang adil*. Banyak guru desa tertinggal yang tidak mendapat akses pelatihan daring karena minimnya sinyal. Pemerintah dan institusi pendidikan harus hadir secara afirmatif: mendatangkan pelatihan ke desa, menyebarkan modul cetak, dan menyesuaikan model evaluasi berbasis realitas daerah.

Pemerataan digital juga membutuhkan *dukungan psikososial* bagi guru. Tidak sedikit guru di daerah tertinggal yang mengalami tekanan mental karena keterbatasan fasilitas, beban ganda, dan perasaan tertinggal dari rekan-rekannya di kota. Pendampingan, apresiasi, dan pengakuan terhadap perjuangan mereka sangat diperlukan. Guru adalah manusia yang perlu dikuatkan untuk bisa menguatkan orang lain.

Transformasi digital yang merata membutuhkan *kebijakan afirmatif berbasis data*. Sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) harus mendapat alokasi khusus dalam hal perangkat, pelatihan, dan program. Guru harus dilibatkan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan agar kebijakan tidak hanya berbasis statistik, tetapi juga realitas lapangan.

Dukungan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama juga penting. Lembaga NU, LTN, LP Ma'arif, dan pesantren dapat berperan aktif dalam membantu digitalisasi di wilayah-wilayah marginal. Dengan pendekatan dakwah yang humanistik dan inklusif, upaya ini akan lebih mudah diterima masyarakat.

Digitalisasi bukanlah proyek instan, tetapi proses berkelanjutan. Guru harus menyusun *roadmap digitalisasi lokal* yang memuat tahapan-tahapan: mulai dari literasi dasar, penguatan infrastruktur, hingga integrasi teknologi dalam pembelajaran. Roadmap ini menjadi panduan jangka panjang agar pemerataan digital tidak terhenti pada proyek pendek.

Keteladanan guru menjadi kekuatan utama. Guru yang menggunakan teknologi dengan bijak, beradaptasi dengan rendah hati, dan mengajar dengan penuh cinta akan menjadi teladan hidup yang menumbuhkan semangat belajar siswa. Di sinilah nilai-nilai Nahdliyin dan Marhaenis bertemu: menjadi guru yang membebaskan, bukan mendominasi; yang membangkitkan, bukan menghakimi.

Pemerataan digital juga harus menyasar *pendidikan karakter digital*. Guru harus mengajarkan tanggung jawab, etika, dan akhlak dalam penggunaan teknologi. Siswa yang melek digital tetapi tidak melek moral justru akan tersesat dalam dunia maya yang tanpa batas. Di sinilah nilai-nilai keislaman dan kebangsaan harus terus diinternalisasikan.

Menjadi guru di daerah tertinggal adalah kehormatan, bukan hukuman. Justru dari wilayah inilah lahir kekuatan pembaruan sejati. Ketika teknologi disandingkan dengan ketulusan, inovasi bertemu dengan pengabdian, maka pendidikan menjadi jalan emansipasi sejati. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menjadi pionir perubahan dari pinggiran untuk masa depan Indonesia yang adil dan beradab.

## **Peran Guru Marhaenis dalam Mencerdaskan Kaum Terpinggirkan**

Guru Marhaenis lahir dari keyakinan bahwa pendidikan adalah hak setiap insan, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang lahir dalam kemapanan. Dalam pandangan Marhaenisme, kaum terpinggirkan—baik karena faktor ekonomi, geografis, sosial, maupun budaya—harus menjadi prioritas utama dalam agenda pendidikan nasional. Guru yang memegang teguh prinsip Marhaenis tidak akan bersikap netral di

hadapan ketimpangan, karena netralitas dalam situasi ketidakadilan justru berpihak pada penindasan.

Soekarno dalam berbagai pidatonya menegaskan bahwa revolusi Indonesia harus menjangkau desa-desa, ladang-ladang, dan perkampungan kaum marhaen. Dalam konteks ini, guru menjadi ujung tombak revolusi tersebut, bukan dengan mengangkat senjata, melainkan dengan buku, papan tulis, dan kasih sayang. Guru yang menyadari dirinya sebagai bagian dari gerakan emansipatoris akan selalu menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan alat domestikasi atau pelanggengan ketimpangan sosial.

Kaum terpinggirkan hari ini hadir dalam beragam bentuk: anak-anak buruh, anak petani gurem, anak nelayan tanpa jaminan hidup, hingga anak-anak dari keluarga korban konflik dan bencana. Mereka hidup dalam ketidakpastian, dengan akses pendidikan yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, dan sering kali harus bekerja sambil belajar demi membantu keluarga. Di sinilah guru Marhaenis diuji: bukan hanya dalam kemampuannya mengajar, tetapi dalam keberaniannya hadir, memahami, dan membela.

Pendidikan untuk kaum terpinggirkan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan standar nasional atau kurikulum baku yang bersifat seragam. Dibutuhkan *pedagogi kontekstual* yang memahami realitas murid, menghargai latar belakang budaya, dan mampu memodifikasi strategi belajar agar relevan dengan kondisi lokal. Guru Marhaenis memahami bahwa anak-anak petani harus diajar dengan pendekatan yang mengenali tanah dan alam mereka, sementara anak-anak buruh harus didekati dengan empati terhadap kerja keras dan keteguhan hidup keluarga mereka.

Peran guru juga mencakup menjadi advokat bagi murid-muridnya. Mereka perlu memperjuangkan hak-hak anak didik untuk mendapatkan bantuan pendidikan, fasilitas belajar, hingga akses ke program sosial. Guru tidak boleh diam saat melihat muridnya putus sekolah karena tidak mampu membeli seragam atau tidak bisa membayar transportasi. Dalam semangat Marhaenisme, pendidikan harus menjadi bentuk nyata dari keberpihakan pada rakyat kecil.

Guru Marhaenis juga menjadi penggugah kesadaran kolektif di komunitas. Ia tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga berdialog dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga desa untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ia membantu membentuk komunitas belajar yang saling menguatkan dan tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan pada sekolah. Dalam hal ini, guru menjelma menjadi pemimpin moral di lingkungan sosialnya.

Penting juga bagi guru untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri pada murid dari kelompok terpinggirkan. Terlalu sering mereka tumbuh dalam narasi bahwa mereka “tidak mampu”, “tidak cukup pintar”, atau “tidak berpeluang sukses”. Guru Marhaenis menolak semua narasi ini. Ia memupuk semangat, mengangkat potensi yang tersembunyi, dan memperlihatkan bahwa keberhasilan bukan hak eksklusif anak-anak kota atau kalangan elite.

Kehadiran guru di daerah marginal juga harus dibarengi dengan sikap rendah hati dan terbuka. Ia harus belajar dari komunitasnya, menghormati tradisi lokal, dan tidak membawa arogansi akademik ke tengah masyarakat. Guru Marhaenis adalah bagian dari rakyat, bukan pihak luar yang datang untuk “mencerahkan” dengan sikap superior. Ia belajar bersama, tumbuh bersama, dan melayani dengan tulus.

Sebagai pelaksana kurikulum, guru Marhaenis harus kritis terhadap isi materi ajar. Ia perlu memilih dan menyusun pembelajaran yang tidak hanya mengejar kognisi, tetapi juga membangun kesadaran sosial, solidaritas, dan semangat gotong royong. Pendidikan bukan semata untuk lolos ujian nasional, tetapi untuk membangun generasi yang peka terhadap ketidakadilan dan siap membela nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam era digital, guru juga harus menjadi jembatan agar kaum terpinggirkan tidak tertinggal dalam revolusi teknologi. Ia harus memastikan bahwa anak-anak dari komunitas marginal juga bisa mengakses teknologi, belajar menggunakannya secara produktif, dan tidak tersingkir dari transformasi digital yang terjadi begitu cepat. Ini menuntut kreativitas dan keteguhan dalam membangun solusi berbasis komunitas.

Guru Marhaenis adalah mereka yang bekerja tidak karena gaji, tetapi karena panggilan jiwa. Ia tahu bahwa mungkin tidak akan mendapat penghargaan dari pemerintah atau media, tetapi ia menyadari bahwa setiap anak yang berhasil ia selamatkan dari jurang keterpinggiran adalah prestasi kemanusiaan tertinggi. Ia adalah pahlawan sunyi yang menyalakan lentera di tempat yang paling gelap.

Peran ini juga harus mendapat dukungan dari negara. Pemerintah wajib hadir melalui kebijakan afirmatif, penyediaan insentif bagi guru di daerah terpencil, fasilitas belajar, dan pengakuan profesional. Guru-guru seperti ini harus mendapat ruang untuk berkembang, akses pelatihan berkualitas, dan jalur promosi yang adil.

Organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan jaringan civil society lainnya harus memberi perhatian serius pada agenda pendidikan kaum marjinal. Dukungan moral, pelatihan, dan gerakan kolaboratif dapat memperkuat kerja-kerja kultural yang dilakukan para guru Marhaenis di lapangan. Pendidikan adalah proyek kolektif, bukan kerja soliter.

Guru juga harus menjadi penulis narasi. Ia perlu mendokumentasikan perjuangannya, menyuarakan pengalaman murid-muridnya, dan menulis dari pinggiran agar dunia tahu bahwa masih ada Indonesia yang belum merdeka secara pendidikan. Narasi-narasi ini bisa menjadi modal perubahan kebijakan dan kesadaran publik.

Di tengah tekanan administratif, tuntutan kurikulum, dan keterbatasan fasilitas, guru Marhaenis tetap teguh karena ia tidak berjalan sendiri. Ia meyakini bahwa perjuangan ini adalah bagian dari jihad pendidikan, dari revolusi kemanusiaan yang diwariskan oleh Soekarno, Hasyim Asy'ari, dan para pendidik sejati lainnya.

Guru bukan sekadar profesi, tetapi amanah. Guru Marhaenis memaknai amanah ini sebagai mandat sejarah untuk membangkitkan kembali harapan, menyuburkan mimpi, dan membangun masa depan dari tanah yang tandus sekalipun. Dalam setiap kata yang ia ucapkan di kelas, terselip doa dan harapan agar negeri ini menjadi lebih adil, setara, dan manusiawi. Kaum terpinggirkan bukan beban pembangunan, tetapi potensi kemajuan

jika diberi ruang yang layak. Dan ruang itu hanya bisa dibuka melalui pendidikan. Di tangan guru Marhaenis, pendidikan kembali menjadi senjata pembebasan yang membentuk manusia merdeka: berpikir, berpe-rasaan, dan bertindak untuk kemaslahatan bersama.

### **Teknologi sebagai Alat Emansipasi, Bukan Alienasi**

Teknologi, dalam sejarahnya, adalah produk kebudayaan yang netral. Ia tidak lahir dengan moralitas tertentu, namun keberpihakannya ditentukan oleh tangan-tangan yang menggunakannya. Di tangan kekuasaan yang eksploitatif, teknologi bisa menjadi alat alienasi: memisahkan manusia dari martabatnya, menjadikan individu sebagai angka-angka statistik, dan menggantikan relasi manusiawi dengan sistem dingin yang meka-nistik. Namun di tangan para pendidik yang berjiwa pembebas—seperti guru Marhaenis—teknologi justru menjadi alat emansipasi, sarana untuk mengangkat harkat kaum tertindas, dan jembatan menuju pendidikan yang lebih setara.

Dalam perspektif Marxisme Kultural yang juga mengilhami sema-ngat Marhaenisme, alienasi terjadi ketika manusia tercerabut dari hakikat kemanusiaannya, ketika kerja menjadi keterpaksaan, dan ketika relasi sosial digantikan oleh logika pasar. Dalam konteks pendidikan, alienasi muncul saat teknologi menggantikan peran guru, mengaburkan interaksi afektif, dan menempatkan siswa hanya sebagai pengguna sistem digital yang pasif. Ini adalah tantangan nyata di era digital—ketika platform pembelajaran daring tidak disertai dengan kerangka kritis, maka teknologi bisa menjadi tirani baru dalam kelas.

Namun guru Marhaenis tidak menyerah pada pesimisme teknologi. Ia justru memanfaatkannya untuk tujuan luhur: membuka akses belajar bagi mereka yang jauh dari pusat kota, menyediakan bahan ajar yang tidak terse-dia di sekolah, dan menciptakan ruang diskusi lintas daerah yang selama ini tidak mungkin terjadi. Teknologi di tangan guru pembebas menjadi sarana pelipatganda potensi. Internet, misalnya, bukan hanya ladang informasi,

tetapi ruang perjuangan narasi, di mana guru bisa menyuarakan kisah-kisah dari pinggiran dan melawan arus dominasi pusat.

Untuk menjadikan teknologi sebagai alat emansipasi, guru harus memiliki kesadaran kritis atas penggunaannya. Ia harus membedakan antara teknologi yang memperkuat kemanusiaan dan teknologi yang memperkerdikan manusia. Platform digital yang memberi ruang kreasi, dialog, dan pengembangan karakter jauh lebih berharga dibanding aplikasi yang hanya mengejar kuis cepat dan penilaian instan. Guru Marhaenis menolak pendekatan “teaching to the test” yang kini justru diperparah oleh sistem digitalisasi yang tak humanistik.

Teknologi harus diorientasikan sebagai sarana membangun dialog, bukan monolog. Dalam pembelajaran, ini berarti menggunakan teknologi untuk memperluas perspektif, menghubungkan siswa dengan konteks global, tetapi tetap membumi dalam kearifan lokal. Guru Marhaenis, misalnya, bisa memanfaatkan video YouTube tentang sejarah desa tempatnya mengajar, lalu menghubungkannya dengan nilai perjuangan lokal dan narasi nasional. Inilah bentuk teknologi yang membebaskan: bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menumbuhkan kesadaran sejarah dan identitas.

Emansipasi digital juga berarti mendorong siswa menjadi kreator, bukan hanya konsumen. Guru harus memfasilitasi siswa untuk membuat konten: menulis blog, membuat vlog reflektif, menyusun infografis tentang isu sosial, atau merancang kampanye digital bertema kemanusiaan. Dengan ini, siswa tidak teralienasi dalam dunia digital, tetapi hadir sebagai subjek yang aktif, kritis, dan sadar akan nilai yang diusungnya.

Salah satu praktik baik adalah penggunaan teknologi untuk menggali akar budaya lokal. Di beberapa SMK di daerah, guru Marhaenis telah mendorong siswa membuat dokumentasi digital tentang tradisi desa, lagu daerah, hingga praktik pertanian lokal. Mereka mengubah tugas sekolah menjadi gerakan kebudayaan digital. Di sinilah teknologi menjadi alat untuk merawat tradisi, bukan menghapusnya. Sekali lagi, ini adalah bentuk emansipasi: menyatukan modernitas dengan kearifan lokal.

Guru Marhaenis juga menjadi fasilitator penguatan literasi digital kritis. Ia mengajarkan muridnya cara menilai kebenaran informasi, menangkal hoaks, dan memahami etika dalam berselancar di dunia maya. Siswa yang hidup di era disrupsi membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan teknis; mereka perlu dibekali dengan nilai, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial agar tidak menjadi korban arus informasi yang manipulatif.

Penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritualitas. Guru Marhaenis tidak memisahkan antara dunia digital dan nilai-nilai ruhani. Dalam setiap aktivitas daring, ia selalu menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini adalah pendidikan karakter berbasis digital. Ia tidak membiarkan siswa menjadikan dunia maya sebagai tempat pelarian, tetapi sebagai ruang tanggung jawab dan kebermanfaatan.

Tentu, tantangan tetap ada. Ketimpangan akses, keterbatasan perangkat, hingga rendahnya kompetensi digital di kalangan guru dan siswa adalah realitas yang tak bisa diabaikan. Namun guru Marhaenis tidak menyerah. Ia berusaha mencari solusi kolaboratif: bekerja sama dengan orang tua, pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan bahkan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan Wi-Fi gratis, perangkat bekas layak pakai, atau pelatihan digital komunitas.

Guru Marhaenis juga perlu menjadi pengembang sumber daya digital mandiri. Ia tidak selalu menunggu modul dari pusat atau menunggu pelatihan dari dinas. Ia bisa membuat bahan ajar sederhana, menyusun podcast lokal, atau merekam video pembelajaran kontekstual. Dalam semangat gotong royong dan kebebasan belajar, guru justru menjadi pionir inovasi, bukan sekadar pelaksana instruksi.

Pendidikan digital juga membuka ruang pembelajaran lintas batas. Guru Marhaenis bisa mengajak muridnya berdiskusi dengan siswa dari daerah lain, dari luar negeri, bahkan dengan narasumber inspiratif yang tak terjangkau secara fisik. Pertemuan-pertemuan virtual ini memperkaya cakrawala dan menghubungkan anak-anak marhaen dengan dunia yang lebih luas, tanpa harus meninggalkan identitasnya.

Namun penting untuk diingat, bahwa emansipasi tidak hanya bicara soal akses, tetapi juga soal orientasi. Teknologi yang digunakan untuk memperkuat kapitalisme pasar, mempercepat kompetisi, dan mereduksi pendidikan menjadi komoditas tetap akan menjauhkan pendidikan dari tujuan pembebasannya. Guru Marhaenis harus terus mengingat bahwa tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia merdeka, bukan sekadar tenaga kerja.

Dalam jangka panjang, teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat demokrasi pendidikan. Siswa harus dilibatkan dalam menentukan kurikulum digital, guru diberi ruang untuk berkreasi, dan masyarakat dilibatkan dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang inklusif. Emansipasi sejati hanya mungkin jika semua pihak terlibat dan berdaya.

Sebagai penutup, kita kembali pada pertanyaan mendasar: untuk siapa teknologi ini bekerja? Jika jawaban kita adalah “untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan”, maka kita berada di jalan yang tepat. Guru Marhaenis tidak hanya mengajar, tetapi mengarahkan teknologi ke arah perjuangan kemanusiaan.

Dengan teknologi yang dikuasai, diarahkan, dan dimaknai secara kritis, guru Marhaenis menjelma sebagai agen perubahan yang tak hanya merombak sistem pembelajaran, tetapi juga membentuk wajah masa depan bangsa yang lebih adil dan manusiawi. Maka, teknologi bukan musuh, melainkan sekutu dalam perjuangan membebaskan manusia dari keterpinggiran dan ketakberdayaan.

# Bagian 4

STRATEGI IMPLEMENTATIF  
DAN PRAKTIK BAIK





## Model Pedagogi Nahdliyin-Marhaenis

Dalam setiap denyut kehidupan pendidikan, terdapat ruh yang tak tertulis di dalam silabus dan tak tersurat di dalam rancangan pembelajaran. Ruh tersebut adalah kehadiran nilai—nilai yang menjadikan proses belajar bukan hanya aktivitas kognitif, tetapi juga peristiwa spiritual, sosial, dan kultural. Model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pendidikan yang tidak sekadar mencerdaskan akal, tetapi juga membebaskan jiwa dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah arus globalisasi yang menstandarkan cara mengajar dan mengukur keberhasilan hanya lewat angka-angka, pendekatan ini menghidupkan kembali kesadaran bahwa mendidik adalah membangun manusia seutuhnya.

Model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis merupakan perjumpaan antara kearifan tradisi Islam Nusantara dan semangat pembebasan ala Marhaenisme. Dari Nahdliyin, kita belajar tentang pendidikan sebagai bentuk kasih sayang, kelembutan, dan penanaman nilai-nilai akhlaqul karimah secara kontekstual. Dari Marhaenisme, kita menyerap gagasan pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat derajat rakyat kecil dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap struktur ketidakadilan. Kedua pandangan ini bertemu dalam satu simpul: pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.

Pendidikan dalam perspektif ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi lebih luas lagi: pendidikan sebagai jalan spiritual, sosial, dan ideologis. Dalam Islam, terutama dalam tradisi pesantren dan pendidikan Nahdliyin, pengajaran dilakukan dengan pendekatan yang penuh welas asih. Santri bukan hanya murid, tetapi anak yang dituntun dengan keteladanan. Proses pendidikan adalah dialog, bukan indoktrinasi. Prinsip “ilm, amal, dan adab” dijunjung tinggi, menjadikan guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembimbing ruhani dan akhlak.

Sementara dalam Marhaenisme, pendidikan adalah instrumen revolusi kebudayaan. Soekarno menggambarkan pendidikan sebagai jalan mengubah mental inlander menjadi manusia merdeka. Pendidikan harus

menyadarkan rakyat tentang hak-haknya, membangun keberanian untuk berpikir sendiri, dan mendorong keberdayaan untuk membangun tatanan masyarakat yang adil. Dalam perspektif ini, guru adalah pemantik kesadaran, bukan sekadar penyampai pengetahuan. Ia menumbuhkan keberanian, menanamkan nilai perjuangan, dan menghidupkan semangat kolektivitas.

Model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis tidak membenturkan aspek spiritual dan ideologis, melainkan memadukannya secara harmoni. Di dalam kelas, pengajaran yang memuat nilai religius tidak harus menghapus diskusi kritis. Sebaliknya, nilai-nilai agama justru menjadi fondasi dalam membangun keberanian berpikir, sikap adil, dan kasih sayang terhadap sesama. Guru Nahdliyin mengajarkan makna hidup melalui kisah-kisah Nabi dan ulama, sementara guru Marhaenis mengajarkan keberpihakan melalui kisah perjuangan petani, buruh, dan rakyat kecil.

Pendekatan ini membutuhkan perubahan paradigma dalam melihat murid. Murid bukan “gelas kosong” yang harus diisi, melainkan benih kehidupan yang perlu ditumbuhkan. Setiap anak adalah pribadi yang unik, dengan potensi yang lahir dari pengalaman hidup, latar sosial, dan spiritualitas keluarga mereka. Guru harus mendengarkan lebih banyak, merangkul lebih erat, dan membimbing lebih manusiawi. Dalam kerangka ini, model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis tidak mengenal diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi.

Konsep “rahmatan lil ‘alamin” dalam Islam menjadi pijakan spiritual model ini. Guru tidak mengajarkan agama dengan marah atau ancaman, tetapi dengan cinta dan hikmah. Dalam sejarah pesantren, para kiai mendidik dengan keteladanan: hidup sederhana, terbuka, dan egaliter. Dalam Marhaenisme, guru harus menempatkan dirinya sejajar dengan rakyat, tidak elitis, dan memahami bahasa keseharian masyarakat. Maka lahirlah pendekatan pedagogi yang membumi dan membebaskan, bukan menyeragamkan dan menundukkan.

Bab ini akan membahas empat dimensi utama dari model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis. Pertama, bagaimana kasih sayang dan hikmah

menjadi fondasi dalam membangun relasi pembelajaran yang sehat dan bermakna. Kedua, pentingnya pembelajaran kontekstual yang membumi dalam kehidupan siswa serta mendorong kolaborasi sebagai wujud keadilan struktural. Ketiga, bagaimana Kurikulum Merdeka dapat diadopsi dengan perspektif keadilan sosial untuk menjawab kebutuhan komunitas marjinal. Keempat, pengembangan praktik pembelajaran profetik yang menjadikan guru sebagai agen perubahan spiritual dan sosial.

Melalui pemaparan ini, kita tidak hanya diajak untuk memahami model ini sebagai teori, tetapi juga sebagai praksis yang dapat diterapkan di ruang kelas, pesantren, maupun sekolah negeri. Pembelajaran bukan sekadar metode, tetapi juga sikap hidup. Guru harus menjadi pelaku pembaruan yang tidak tercerabut dari nilai-nilai spiritualitas lokal maupun kepekaan sosial global.

Penting juga ditegaskan bahwa pendekatan ini bukan romantisme masa lalu, melainkan strategi relevan di era disrupsi. Dalam dunia yang dibanjiri teknologi dan informasi, anak-anak membutuhkan figur guru yang tidak hanya kompeten secara digital, tetapi juga berkarakter kuat, welas asih, dan memiliki kesadaran kebangsaan. Guru Nahdliyin-Marhaenis menjelma sebagai sosok transformatif yang menjawab tantangan global dengan akar lokal yang kokoh.

Kurikulum Merdeka yang sedang dijalankan oleh Kemendikbudristek sebenarnya membuka ruang besar bagi implementasi nilai-nilai pedagogi ini. Namun tanpa kesadaran filosofis, implementasinya hanya akan menjadi aktivitas administratif. Diperlukan guru yang mampu menafsirkan kembali kebijakan ini melalui lensa keberpihakan terhadap siswa dari keluarga miskin, daerah tertinggal, dan komunitas minoritas. Di sinilah peran sentral model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis.

Model ini juga menolak pendekatan yang mengedepankan kompetisi tanpa kolaborasi. Dunia pendidikan tidak boleh menjadikan anak didik sebagai pesaing satu sama lain. Sebaliknya, model ini mendorong gotong royong, kesalingan, dan semangat membangun bersama. Di ruang kelas,

tugas tidak harus dinilai berdasarkan kecepatan dan ketepatan semata, tetapi juga dari keberanian, proses berpikir, dan niat mulia.

Bab ini juga akan menunjukkan contoh konkret praktik pedagogi yang hidup di pesantren dan sekolah-sekolah akar rumput. Seperti misalnya “ngaji kontekstual” di beberapa pesantren Nahdliyin yang menghubungkan kitab kuning dengan isu lingkungan, HAM, atau buruh. Atau proyek pembelajaran sosial di sekolah berbasis Marhaenisme yang melibatkan siswa dalam advokasi hak-hak warga desa. Ini adalah bentuk praktik pendidikan yang memanusiakan sekaligus membebaskan.

Perlu digarisbawahi, bahwa model ini tidak menolak modernitas, tetapi mengarahkan modernitas ke jalan yang beradab. Teknologi tetap digunakan, tapi tidak dijadikan pusat. Nilai tetap menjadi orientasi utama. Dalam kelas guru Nahdliyin-Marhaenis, presentasi berbasis digital bisa berpadu dengan kisah hikmah para ulama. Google Form bisa dipakai berdampingan dengan penilaian naratif yang memperhatikan proses dan kejujuran anak.

Guru juga tidak bisa berjalan sendiri. Ia perlu jejaring dan komunitas belajar yang mendukung nilai-nilai ini. Sekolah harus menyediakan ruang-ruang pembelajaran bagi guru untuk berdiskusi tentang isu keadilan sosial, teologi pembebasan, dan filsafat pendidikan. Kebijakan pendidikan juga harus mendukung terciptanya ruang alternatif seperti ini—bukan hanya mengejar nilai UN dan ranking sekolah.

Bab ini akan ditutup dengan perenungan penting: bahwa guru sejati adalah mereka yang tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga mengubah. Mengubah cara berpikir, mengubah cara hidup, dan mengubah arah sejarah ke jalan yang lebih manusiawi. Model pedagogi Nahdliyin-Marhaenis adalah wujud konkret dari misi tersebut. Pendidikan tidak boleh netral, ia harus berpihak—pada kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan.

## **Pendidikan Berbasis Kasih Sayang dan Hikmah**

Pendidikan berbasis kasih sayang dan hikmah merupakan jantung dari tradisi pendidikan Islam Nusantara sekaligus denyut nadi dari semangat

perjuangan Marhaenis. Dalam ruang-ruang kelas yang berakar pada nilai-nilai Nahdliyin, kasih sayang bukan sekadar sikap emosional, tetapi menjadi prinsip dasar dalam mentransfer ilmu, membentuk karakter, dan membimbing peserta didik menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan berjiwa merdeka. Di dalamnya, terdapat pandangan bahwa pendidikan bukan proses indoktrinasi, melainkan pendampingan yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan.

Dalam Islam, konsep *rahmah* (kasih sayang) adalah salah satu nama Tuhan yang paling utama, “Ar-Rahman Ar-Rahim”. Ini bukan sekadar doa dalam shalat, tetapi filosofi mendasar bahwa seluruh aktivitas kemanusiaan, termasuk mendidik, harus dilandasi oleh kasih sayang. Tradisi pesantren yang menjadi basis Nahdliyin mewariskan nilai bahwa guru adalah orang tua kedua, bukan hanya secara status, tapi secara spiritual dan emosional. Maka, guru tidak bisa memperlakukan siswa sebagai objek evaluasi semata, melainkan subjek manusia yang tumbuh dalam cinta.

Kasih sayang dalam pendidikan melahirkan pendekatan personal yang memahami bahwa setiap murid memiliki keunikan dan perjalanan hidup masing-masing. Guru yang mengedepankan kasih sayang akan lebih dahulu mengenal muridnya secara personal: latar belakangnya, keluarganya, nilai-nilai yang dia bawa dari rumah, dan kecemasan-kecemasan yang ia bawa ke sekolah. Dengan pemahaman ini, interaksi dalam proses belajar mengajar menjadi lebih manusiawi, lebih bernilai, dan lebih efektif karena membangun jembatan hati antara guru dan murid.

Hikmah, sebagai sisi lain dari pendekatan ini, merujuk pada kebijaksanaan dalam mendidik. Dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan Luqman sebagai orang yang diberi hikmah, dan hikmah itulah yang menjadi dasar ia memberikan nasihat pendidikan kepada anaknya. Dalam praktik pendidikan, hikmah berarti bahwa guru tidak buru-buru menilai atau menghukum, tetapi menganalisis konteks, memilih waktu yang tepat untuk menegur, dan menggunakan kata-kata yang membangun kesadaran. Guru dengan hikmah bukan hanya tahu isi kurikulum, tetapi juga paham kapan dan bagaimana menyampaikannya agar tertanam kuat di hati murid.

Model pembelajaran berbasis kasih sayang dan hikmah ini sejalan dengan ajaran Marhaenisme, di mana pendidikan adalah jalan pembebasan, bukan penindasan. Pendidikan tidak boleh memaksa anak menjadi seperti yang dikehendaki sistem, tetapi mengembangkan potensi anak dari bawah, dari realitas sosial dan kultural yang ia hidupi. Guru harus membimbing anak bukan untuk menghafal doktrin, tetapi untuk memahami hidup, untuk menumbuhkan keberanian berpikir, dan membentuk empati sosial. Dengan demikian, kasih sayang menjadi dasar relasi, dan hikmah menjadi strategi dalam penyampaian pesan-pesan pembebasan.

Dalam sejarah pesantren, para kiai mendidik santri dengan kesabaran dan penghormatan terhadap proses. Tak sedikit kisah di mana kiai menunggu santri menyadari kesalahannya, bukan dengan marah, tetapi dengan doa dan keteladanan. Proses ini melahirkan rasa hormat yang tulus dari santri terhadap guru, bukan karena ketakutan, melainkan karena cinta. Dalam Marhaenisme, pendekatan ini tampak dalam ajaran Bung Karno yang menyebutkan bahwa revolusi mental harus dimulai dari pendampingan rakyat secara sadar, bukan dengan kekerasan, tetapi melalui pendidikan yang menghidupkan akal dan rasa.

Penerapan kasih sayang dan hikmah di sekolah bisa dimulai dari hal sederhana: bagaimana guru membuka kelas, bagaimana menyapa siswa, bagaimana menyikapi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga konselor, motivator, bahkan dalam banyak kasus, menjadi figur pengganti keluarga bagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang di rumah. Dalam pendekatan ini, empati menjadi kunci yang harus terus diasah dalam pelatihan guru dan refleksi harian.

Salah satu tantangan dalam menerapkan pendekatan ini adalah budaya evaluasi yang kaku dan berbasis angka. Kasih sayang dan hikmah sulit diukur dengan rubrik teknis. Maka dibutuhkan keberanian dari guru untuk mengembangkan cara penilaian yang lebih naratif, yang menghargai proses, bukan hanya hasil. Guru dapat menyusun jurnal perkembangan siswa, melakukan dialog personal, dan memberikan umpan balik yang membangun. Ini adalah bentuk kasih sayang dalam bentuk sistematis.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendekatan berbasis kasih sayang dan hikmah ini sangat relevan. Kurikulum ini membuka ruang diferensiasi pembelajaran, memungkinkan guru menyesuaikan materi dan pendekatan dengan kebutuhan siswa. Namun tanpa kesadaran filosofis, kebebasan ini justru bisa membingungkan. Di sinilah pendekatan Nahdliyin-Marhaenis memberikan kerangka nilai: bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan sosial.

Di sekolah-sekolah di daerah tertinggal, guru sering menjadi satu-satunya figur pendidikan dan motivasi. Dalam keterbatasan sarana, sering kali yang bisa diberikan guru hanyalah waktu, perhatian, dan ketulusan. Namun justru dari situ lahirlah proses pendidikan yang sejati. Anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan nelayan tidak membutuhkan guru yang serba tahu, tetapi guru yang mau mendengarkan, memahami, dan menumbuhkan mereka. Itulah bentuk paling nyata dari pendidikan berbasis kasih sayang dan hikmah.

Model ini juga memiliki implikasi pada desain ruang belajar. Ruang kelas tidak boleh menjadi ruang tekanan, tetapi ruang kenyamanan dan dialog. Poster-poster penuh nilai, suasana keterbukaan, dan kehadiran guru yang hangat adalah bagian dari desain pedagogis ini. Pendidikan bukan hanya tentang isi pelajaran, tetapi suasana batin yang menyertai proses belajar.

Di era digital, pendidikan berbasis kasih sayang dan hikmah bisa hadir lewat interaksi daring yang humanis. Guru yang menyapa siswa dengan ramah di platform digital, memberi feedback personal, atau bahkan memahami alasan keterlambatan tugas karena situasi keluarga, sedang menerapkan pendekatan ini. Dalam dunia yang makin tergesa-gesa dan terotomatisasi, kehadiran guru yang tetap membangun relasi hangat adalah oase bagi siswa.

Secara filosofis, pendekatan ini bersumber dari ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat. Pendidikan tidak boleh merendahkan, mempermalukan, apalagi menghapus identitas. Sebaliknya, pendidikan harus mengangkat derajat

manusia, membimbingnya menemukan cahaya dalam dirinya. Dalam Marhaenisme, prinsip ini diterjemahkan dalam semangat membebaskan dari belenggu keterasingan dan struktur sosial yang menindas.

Guru yang menerapkan kasih sayang dan hikmah akan membangun kepercayaan diri siswa. Mereka memberi ruang bagi siswa untuk gagal, lalu bangkit kembali. Mereka tidak mempermalukan siswa yang salah, tetapi menjadikan kesalahan sebagai pintu belajar. Mereka merayakan keberagaman bakat, bukan menyeragamkan impian. Semua ini adalah bentuk resistensi terhadap sistem pendidikan yang terlalu teknokratis dan mengabaikan sisi kemanusiaan.

Bab ini ingin mengajak kita kembali pada akar-akar pendidikan yang humanis, spiritual, dan membebaskan. Di tengah disrupsi teknologi dan tekanan kinerja yang makin tinggi, guru ditantang untuk menjadi sosok yang hadir secara utuh: sebagai pendidik, pembimbing, dan penyemai harapan. Pendidikan berbasis kasih sayang dan hikmah bukan utopia, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun pendidikan yang bermakna dan beradab.

### **Pembelajaran Kontekstual, Kolaboratif, dan Berkeadilan**

Pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan berkeadilan merupakan manifestasi praksis dari semangat pedagogi Nahdliyin-Marhaenis yang berpihak pada kemanusiaan, kebhinekaan, dan keadilan sosial. Dalam dunia pendidikan yang makin terdigitalisasi dan tersentralisasi, keberanian guru untuk kembali ke akar realitas lokal dan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan menjadi sangat penting. Konteks sosial-budaya peserta didik, kekuatan kolaborasi komunitas, dan upaya distribusi kesempatan belajar secara merata harus menjadi orientasi utama dalam membentuk pembelajaran bermakna di era VUCA dan Society 5.0.

Pembelajaran kontekstual berarti menghadirkan materi ajar yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Di pesantren-pesantren Nahdliyin, metode sorogan dan bandongan telah mengakar kuat karena memosisikan santri sebagai subjek pembelajaran yang aktif mengaitkan teks dengan konteks

kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam Marhaenisme, prinsip bahwa pendidikan harus berpijak pada realitas kehidupan rakyat kecil mengilhami model pembelajaran yang tidak menjadikan siswa sebagai menara gading, melainkan sebagai bagian dari masyarakatnya.

Sebagai contoh, dalam mengajarkan matematika atau ekonomi, guru di sekolah pinggiran bisa menggunakan data riil dari usaha tani warga, penghasilan pedagang pasar, atau distribusi hasil kebun. Dengan begitu, pembelajaran bukan hanya menyentuh kognisi, tetapi juga membentuk empati dan kesadaran sosial siswa terhadap lingkungan hidupnya. Model ini juga melatih kepekaan siswa untuk berpikir kritis atas ketimpangan sosial yang mereka saksikan sehari-hari.

Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pedagogis yang menempatkan siswa dalam posisi setara untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan. Ini selaras dengan ajaran Islam tentang *ta'awun* (saling tolong-memolong) dan prinsip gotong royong dalam budaya bangsa Indonesia. Kolaborasi juga menjadi ciri khas perjuangan kaum Marhaen yang tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi melalui organisasi, koperasi, dan forum-forum rakyat. Di ruang kelas, kolaborasi menjadi wadah bagi siswa untuk membangun solidaritas, belajar mendengarkan, dan menyatukan kekuatan.

Dalam implementasinya, pembelajaran kolaboratif bisa berbentuk proyek lintas mata pelajaran, diskusi kelompok lintas kelas, atau forum terbuka dengan masyarakat sekitar. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola dinamika kelompok secara adil, memperhatikan suara siswa yang terpinggirkan, dan menjamin semua anggota kelompok mendapatkan ruang ekspresi dan kontribusi. Di sinilah keadilan belajar bukan hanya jargon, tetapi diwujudkan secara nyata.

Keadilan dalam pembelajaran tidak hanya menyangkut akses terhadap sumber belajar, tetapi juga terhadap cara belajar yang menghormati keberagaman potensi dan latar belakang siswa. Keadilan bukan berarti semua siswa diperlakukan sama, melainkan setiap siswa diberikan sesuai kebutuhannya. Dalam konsep keadilan distributif, guru dituntut mampu merancang perlakuan yang berbeda namun setara untuk setiap siswa. Ini

adalah bentuk keberpihakan terhadap murid sebagai manusia utuh, bukan sekadar angka dalam sistem evaluasi.

Seorang guru Nahdliyin-Marhaenis tidak akan pernah membiarkan ada satu siswa pun tertinggal tanpa perhatian. Ia akan mencari tahu alasan ketertinggalan itu—apakah karena beban rumah tangga, kurang gizi, hambatan bahasa, atau trauma psikologis. Ia akan mengembangkan metode diferensiasi yang tidak menghakimi, tetapi justru membimbing dengan sabar dan empatik. Di sinilah nilai-nilai spiritual bertemu dengan praktik keadilan sosial dalam pendidikan.

Aspek penting dari pembelajaran berkeadilan adalah keberanian guru menentang standar ganda dan diskriminasi di sekolah. Tidak jarang, siswa dari keluarga tidak mampu atau kelompok minoritas kultural mendapat perlakuan tidak adil, baik dalam penilaian, bimbingan, maupun ekspektasi. Guru yang mengusung semangat Marhaenis akan menjadi pelindung bagi siswa-siswa ini, bukan malah menguatkan stigma sosial. Ia akan menjadi suara bagi yang tak bersuara.

Dalam sejarah Indonesia, praktik pembelajaran kontekstual dan kolaboratif bukanlah barang baru. Ki Hadjar Dewantara dengan konsep *among-nya* telah mempraktikkan prinsip pembelajaran yang menghargai keunikan anak dan kolaborasi sebagai landasan tumbuh kembang. Dalam pesantren, santri belajar dalam jaringan sosial yang organik, membentuk budaya belajar berbasis komunitas yang tak tergantikan. Model-model ini perlu direvitalisasi agar relevan di zaman modern.

Untuk menerapkan pembelajaran ini secara efektif, sekolah harus menyediakan kebijakan yang mendukung. Kurikulum harus lentur, waktu belajar harus fleksibel, dan sistem evaluasi harus reflektif dan formatif. Guru tidak bisa bekerja sendiri. Ia perlu didukung kepala sekolah, pengawas, bahkan komunitas orang tua yang memahami bahwa keberhasilan pendidikan bukan semata tentang nilai ujian, tetapi tentang transformasi diri dan sosial.

Penting pula untuk menghadirkan pembelajaran ini dalam platform digital. Dalam kelas daring atau *blended learning*, guru tetap bisa

menerapkan pembelajaran kontekstual melalui tugas proyek berbasis komunitas atau studi kasus lokal. Kolaborasi bisa dilakukan dengan teknologi seperti forum diskusi, video call kelompok, atau berbagi dokumen bersama. Keadilan digital juga harus diperjuangkan: siswa yang tak memiliki gawai atau kuota perlu difasilitasi agar tidak tertinggal.

Dalam konteks penguatan kurikulum Merdeka, pendekatan ini sangat mendukung pencapaian Profil Pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan berkebhinekaan global bisa hidup dalam model pembelajaran kontekstual dan kolaboratif yang berkeadilan. Dengan demikian, guru tidak hanya melaksanakan kurikulum, tetapi benar-benar menjadikannya alat pembebasan.

Guru Marhaenis-Nahdliyin harus menjadikan setiap kelas sebagai ruang perubahan sosial. Ia bukan sekadar menyampaikan konten, tetapi menyalakan kesadaran. Ia melihat potensi transformasi dalam setiap kerja kelompok, setiap pertanyaan kritis, dan setiap proyek komunitas yang dihasilkan siswa. Ia mengerti bahwa pendidikan adalah jalan panjang menuju keadilan sosial.

Untuk itu, pengembangan profesional guru juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas merancang pembelajaran semacam ini. Pelatihan guru harus melampaui soal perangkat ajar, dan menyentuh pada filsafat pendidikan yang membebaskan. Guru harus diberi ruang refleksi dan kolaborasi antar-rekan untuk saling belajar, saling menyemangati, dan merancang inovasi lokal.

Akhirnya, pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berkeadilan adalah cara untuk menyemai harapan di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Ketika siswa melihat dirinya dipahami dan dihargai, ia akan tumbuh menjadi manusia yang percaya diri dan empatik. Dan ketika siswa belajar bersama, dari dan untuk sesama, mereka akan membangun masa depan yang tidak hanya pintar, tetapi juga berperikemanusiaan.

## **Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Keadilan Sosial**

Kurikulum Merdeka adalah sebuah lompatan dalam desain pendidikan Indonesia yang memuat semangat untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dan merdeka dalam belajar. Namun, kemerdekaan belajar tidak akan memiliki makna sejati jika tidak disertai kesadaran akan ketimpangan struktural yang masih melingkupi sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka harus dibaca dan dilaksanakan dalam kerangka keadilan sosial, sebuah nilai yang diusung dengan lantang oleh Marhaenisme dan telah mengakar kuat dalam praksis pendidikan di kalangan Nahdliyin. Bukan hanya merdeka untuk yang punya sumber daya, tetapi juga merdeka bagi yang termarjinalkan dan kurang beruntung.

Dalam falsafah pendidikan Ki Hadjar Dewantara, kemerdekaan belajar bukanlah bebas tanpa arah, melainkan bebas yang bertanggung jawab dan terarah untuk menumbuhkan watak dan kecerdasan lahir-batin. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang menghormati martabat semua manusia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga petani kecil, buruh pabrik, nelayan miskin, atau komunitas adat terpencil. Kurikulum Merdeka yang tidak disinari oleh semangat keadilan sosial akan terjebak pada romantisme teknokratis semata, sekadar ganti struktur dan istilah, tanpa menyentuh akar ketidakadilan di ruang kelas.

Di sinilah peran guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi penting untuk mengawal penerapan Kurikulum Merdeka agar benar-benar menjadi alat emansipasi. Guru tidak boleh hanya menjadi pelaksana kurikulum, tetapi harus menjadi pelurus arah, penjaga nurani, dan pengemban misi keadilan. Ia harus membaca konteks sosial muridnya, menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan lokal, dan menegosiasikan antara tuntutan sistem dengan realitas lapangan. Dalam semangat Islam rahmatan lil ‘alamin dan perjuangan Marhaen, guru menjadi agen perubahan dan pembebasan.

Keadilan sosial dalam Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan melalui diferensiasi pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Guru perlu merancang kegiatan belajar yang memberi ruang bagi semua karakter siswa—baik yang cepat tangkap maupun yang lambat proses, baik yang vokal maupun

yang pendiam. Guru tidak boleh memaksakan satu standar keberhasilan, melainkan mengakui keberagaman bentuk kecerdasan dan potensi. Di sinilah semangat \*adl (keadilan) dalam tradisi Aswaja dan prinsip kesetaraan dalam sosialisme Pancasila bertemu secara harmonis.

Kurikulum Merdeka juga membuka ruang bagi proyek-proyek sosial yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Dalam pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), siswa diajak terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah nyata yang mereka hadapi atau temui di lingkungannya. Guru dapat mendorong proyek tentang pengelolaan sampah, penguatan UMKM lokal, pelestarian budaya daerah, atau pendidikan literasi digital bagi warga desa. Proyek-proyek semacam ini menjadikan sekolah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya tempat ujian dan raport.

Dalam konteks sekolah marjinal atau daerah tertinggal, penerapan Kurikulum Merdeka harus disesuaikan dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Guru harus kreatif memanfaatkan potensi lokal dan teknologi sederhana untuk menyampaikan materi secara kontekstual. Ketika tidak ada internet, guru bisa menggunakan narasi lokal, dongeng rakyat, atau media cetak untuk menanamkan nilai. Ketika tidak ada laboratorium lengkap, guru bisa mengajak siswa belajar dari alam, pasar tradisional, atau bengkel masyarakat. Itulah bentuk nyata keadilan yang membumi.

Penting pula bagi guru untuk melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan belajar. Dalam Kurikulum Merdeka, partisipasi murid bukan hanya retorika, tetapi harus menjadi realitas. Guru bisa memberikan pilihan tugas, memberikan ruang untuk diskusi terbuka, dan menghargai pendapat yang beragam. Dengan cara ini, siswa belajar menjadi warga negara yang demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah bentuk pembelajaran politik yang paling dasar, tetapi sangat menentukan arah bangsa ke depan.

Keadilan sosial juga harus hadir dalam proses penilaian. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian formatif dan sumatif harus mempertimbangkan kemajuan individu dan bukan hanya capaian standar. Guru perlu mencatat perjalanan belajar siswa dengan empati, mencermati upaya dan kemauan, bukan hanya hasil akhir. Penilaian berbasis portofolio, refleksi

diri, dan asesmen proyek merupakan cara yang manusiawi dan membebaskan untuk mengukur keberhasilan siswa. Ini menghindarkan siswa dari tekanan yang tak adil dan kompetisi yang destruktif.

Kurikulum Merdeka memerlukan guru yang reflektif dan sadar posisi. Artinya, guru tidak sekadar tahu isi kurikulum, tetapi memahami relasi kuasa dalam pendidikan. Ia menyadari bahwa kurikulum bisa menjadi alat hegemonik jika tidak dikritisi dan dimaknai secara kontekstual. Oleh karena itu, guru harus mengasah kesadaran kritisnya: untuk siapa ia mengajar? Nilai apa yang ia tanamkan? Dan siapa yang paling diuntungkan dari sistem ini? Ini adalah bentuk jihad intelektual yang sejati di ruang kelas.

Dalam praktiknya, guru Marhaenis-Nahdliyin dapat mengintegrasikan nilai-nilai ideologis dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Misalnya, kegiatan pramuka tidak hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga keberpihakan sosial; kegiatan keagamaan tidak hanya pada ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial. Pendidikan karakter yang digalakkan pemerintah tidak boleh menjadi pengulangan dogma, tetapi harus diisi dengan nilai-nilai praksis: keberanian, kejujuran, kepedulian, dan keberpihakan pada kaum lemah.

Program guru penggerak, sekolah penggerak, dan komunitas belajar dapat menjadi medan perjuangan untuk mewujudkan Kurikulum Merdeka yang berpihak. Guru tidak harus mengikuti semua program secara formal, tetapi bisa membentuk komunitas kecil di sekolahnya sendiri untuk berdiskusi, mengevaluasi praktik, dan merancang inovasi. Semangat gotong royong dalam Islam Nusantara dan Marhaenisme menjadi ruh yang menghidupkan perubahan dari bawah.

Peran kepala sekolah juga sangat penting dalam mendorong keadilan sosial dalam kurikulum. Ia harus memberi kepercayaan kepada guru untuk bereksperimen, mendukung inisiatif lokal, dan tidak membebani guru dengan laporan-laporan administratif yang tidak substansial. Kepala sekolah menjadi penyambung suara antara idealisme pendidikan dan kebijakan teknokratik di atasnya.

Demikian juga peran pengawas dan dinas pendidikan. Mereka harus bertransformasi dari posisi kontrol menjadi posisi pendamping dan pemberdaya. Evaluasi kinerja guru tidak boleh hanya didasarkan pada nilai akademik siswa, tetapi juga pada upaya kreatif guru dalam menciptakan pendidikan yang adil dan kontekstual. Jika sistem birokrasi tidak berubah, maka Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi jargon baru dengan substansi lama.

Untuk itulah, guru Marhaenis-Nahdliyin harus menguasai dimensi filosofis Kurikulum Merdeka sekaligus kepekaan sosial. Ia harus mampu menjembatani antara dokumen kurikulum dengan realitas kelas. Ia harus berani menyuarakan kebutuhan muridnya ke forum-forum yang lebih luas. Dan ia harus menjaga agar semangat keadilan sosial tidak pudar dalam rutinitas sekolah.

Dalam menghadapi tantangan teknologi, globalisasi, dan disrupsi, Kurikulum Merdeka dapat menjadi jalan untuk menciptakan ruang belajar yang membebaskan, tetapi hanya jika para guru memaknainya sebagai proyek kolektif menuju keadilan. Kurikulum bukan sekadar isi, tetapi arah. Dan arah itu harus membawa kita ke masa depan yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

## **Praktik Pembelajaran Profetik di Sekolah**

Pembelajaran profetik adalah pendekatan pendidikan yang tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan menghidupkan nilai-nilai kenabian: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Konsep ini berasal dari pemikiran Prof. Kuntowijoyo, yang merumuskan bahwa pendidikan harus menjadi jalan untuk memanusiakan manusia, membebaskan dari segala bentuk penindasan, serta menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks guru Nahdliyin-Marhaenis, pembelajaran profetik menjadi cara untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya akademik dan teknis, tetapi juga sarat makna, berkeadilan sosial, dan mendekatkan pada nilai-nilai spiritual.

Guru yang mempraktikkan pembelajaran profetik harus memulai dengan mengubah relasi kuasa di kelas. Siswa bukan objek pasif yang

menerima informasi, tetapi subjek aktif yang dihargai akal budinya, emosinya, serta latar sosial-budayanya. Guru tidak lagi tampil sebagai “tuan kelas” yang mengontrol semua aktivitas, tetapi menjadi fasilitator, pembimbing, dan sahabat belajar. Ini sejalan dengan semangat Aswaja an-Nahdliyah yang menempatkan kasih sayang, adab, dan keilmuan sebagai landasan interaksi guru dan murid.

Nilai humanisasi dalam pembelajaran profetik mendorong guru untuk membentuk lingkungan belajar yang berkeadaban. Guru tidak hanya fokus pada capaian kognitif, tetapi juga empati, kerjasama, penghargaan terhadap perbedaan, dan perhatian pada yang lemah. Siswa diajak untuk memahami persoalan sosial di sekitar mereka dan melihat pendidikan sebagai jalan untuk mengubah kondisi masyarakat. Di sinilah Marhaenisme berperan—bahwa ilmu bukan untuk dominasi, tetapi untuk pemberdayaan.

Liberasi sebagai pilar kedua dalam pembelajaran profetik mengajak guru untuk membebaskan siswa dari belenggu struktural dan mental. Ini berarti membongkar mitos-mitos yang menghambat potensi siswa: bahwa anak dari desa tidak bisa sukses, bahwa siswa miskin tidak bisa berprestasi, bahwa hanya nilai ujian yang menentukan masa depan. Guru harus melatih siswa berpikir kritis, berani bersuara, dan mampu mengambil sikap dalam menghadapi ketidakadilan.

Aspek transendensi menghubungkan proses pembelajaran dengan dimensi spiritual. Dalam tradisi Nahdliyin, ilmu bukan sekadar pengetahuan duniawi, tetapi bagian dari ibadah dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Guru Nahdliyin-Marhaenis menghidupkan nilai ini melalui keteladanan akhlak, doa pembuka setiap pelajaran, serta mengaitkan pelajaran dengan hikmah dan makna hidup. Siswa tidak sekadar tahu, tetapi juga sadar dan bijaksana.

Praktik pembelajaran profetik juga terlihat dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Sikap guru terhadap keberagaman, caranya menegur siswa, ketepatannya dalam bersikap adil, semuanya merupakan bagian dari pembelajaran nilai. Guru harus sadar bahwa dirinya adalah contoh hidup dari nilai-nilai yang diajarkan, dan bahwa tindakan

kecil—seperti memberi ruang bicara kepada siswa pemalu atau memberi tugas sesuai minat—adalah bagian dari emansipasi pendidikan.

Di tingkat strategi, pembelajaran profetik dapat diimplementasikan melalui metode diskusi reflektif, proyek sosial, studi kasus lokal, dan pembelajaran berbasis masalah. Siswa dilibatkan dalam memahami realitas sosial mereka dan mencari solusi berbasis kolaborasi dan nilai. Misalnya, siswa diajak menyusun kampanye toleransi di lingkungan sekolah, membuat proyek literasi di kampung halaman, atau menyusun modul edukatif tentang bahaya perundungan. Semua aktivitas ini menyatu dengan nilai profetik.

Dalam pengelolaan kelas, guru perlu mengembangkan budaya saling menghargai dan keadilan. Hukuman bukan lagi bentuk dominasi, melainkan bagian dari pendidikan karakter. Sanksi diberikan dengan pendekatan restoratif—mengajak siswa memahami dampak kesalahannya, memperbaiki, dan belajar dari situ. Pendekatan ini menghindari kekerasan simbolik dalam pendidikan dan menguatkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang lembut namun tegas.

Evaluasi pembelajaran profetik tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Guru bisa menggunakan portofolio reflektif, jurnal pembelajaran, dan asesmen diri untuk mengukur perkembangan siswa sebagai manusia utuh. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya “Apakah kamu tahu?” tetapi juga “Apa makna dari yang kamu pelajari?,” “Apa dampaknya bagi hidupmu dan lingkunganmu?” Inilah evaluasi yang membangun kesadaran.

Guru juga perlu membangun komunitas belajar yang mendukung praktik pembelajaran profetik. Diskusi antar guru, kolaborasi dengan wali murid, dan keterlibatan tokoh lokal dalam pembelajaran menjadi penting. Sekolah menjadi pusat transformasi sosial yang menghidupkan nilai-nilai keadaban, kesetaraan, dan spiritualitas. Di sinilah guru Marhaenis-Nahdliyin menjadi bagian dari gerakan perubahan sosial yang bermula dari ruang kelas.

Dalam menghadapi era digital dan tekanan globalisasi, pembelajaran profetik menjadi pagar nilai agar pendidikan tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya. Teknologi digunakan secara selektif dan kritis, bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi memperkuat misinya. Nilai-nilai lokal, budaya pesantren, dan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyeimbang modernitas.

Penguatan kapasitas guru dalam menerapkan pembelajaran profetik memerlukan dukungan kebijakan dan pelatihan. Pemerintah, LPTK, dan organisasi profesi perlu merancang modul pelatihan yang mengintegrasikan pendekatan profetik ini dalam kurikulum dan pedagogi. Dalam hal ini, NU dan organisasi masyarakat lainnya dapat menjadi mitra penting dalam menyiapkan guru sebagai agen perubahan sosial.

Di daerah-daerah marginal, pembelajaran profetik menjadi sangat relevan. Ia dapat membangkitkan semangat siswa yang sempat putus asa, membangun harapan di tengah keterbatasan, dan membuka cakrawala baru bahwa mereka juga layak bermimpi besar. Guru menjadi penggerak sosial yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menghidupkan mimpi.

Dalam tradisi Islam Nusantara, banyak praktik pendidikan profetik yang diwariskan oleh para kiai, seperti metode halaqah, dialog sufistik, dan keteladanan akhlak. Tradisi ini perlu direvitalisasi dan disandingkan dengan pendekatan pedagogi modern agar pendidikan tidak kehilangan ruhnyanya. Guru menjadi penerus tradisi keilmuan yang hidup dan membumi.

Secara politis, pembelajaran profetik juga menjadi bentuk perlawanan terhadap komersialisasi dan teknokratisasi pendidikan. Ia mengembalikan makna pendidikan sebagai proses pemanusiaan dan pemberdayaan, bukan sekadar pabrik pencetak tenaga kerja. Guru Marhaenis-Nahdliyin harus berani bersuara ketika kebijakan tidak adil, dan membela hak-hak siswa dari kelompok yang termarginalkan.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan—sekolah, masyarakat, organisasi keagamaan, dan negara—harus dibangun untuk menciptakan ekosistem pendidikan profetik. Ini mencakup perbaikan kurikulum, kebijakan afirmatif, pembangunan karakter guru, dan peran serta masyarakat.

Pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada guru, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif.

Akhirnya, pembelajaran profetik adalah panggilan jiwa. Ia tidak bisa dibentuk hanya oleh aturan atau insentif, tetapi oleh kesadaran mendalam tentang peran guru sebagai penjaga peradaban. Di tengah dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, guru yang profetik adalah cahaya yang menuntun generasi ke jalan nilai dan kebermaknaan.

## Kepemimpinan Guru dalam Komunitas

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, guru bukan hanya pendidik dalam arti formal, tetapi juga pemimpin nilai dalam komunitasnya. Di balik gubuk sekolah di pedesaan atau ruang kelas sederhana di pelosok negeri, guru sering kali menjadi satu-satunya rujukan moral, penentu arah diskusi sosial, dan penyambung harapan warga terhadap masa depan. Konsep kepemimpinan guru tidak bisa dibatasi dalam kerangka administratif atau birokratis semata, tetapi harus dilihat sebagai kepemimpinan kultural, spiritual, dan transformasional—terutama dalam konteks guru yang berpijak pada nilai-nilai Nahdliyin dan Marhaenis. Bab ini mengangkat pentingnya peran guru sebagai pemimpin komunitas, bukan sekadar agen kurikulum, melainkan penggerak kehidupan lokal yang sarat nilai.

Kepemimpinan guru dalam perspektif Nahdliyin-Marhaenis mengandung tiga dimensi utama: pemihakan kepada rakyat kecil (Marhaen), pengabdian kepada ilmu dan adab (Nahdliyin), serta kesanggupan mentransformasikan realitas sosial secara kontekstual dan berkesadaran. Guru adalah jembatan antara nilai-nilai luhur Islam Nusantara yang penuh kelembutan, toleransi, dan spiritualitas dengan aspirasi sosial-politik masyarakat yang merindukan keadilan dan pemberdayaan. Guru semacam ini menjadi sosok yang tidak hanya mendidik di kelas, tetapi juga menjadi pemimpin informal di tengah komunitas yang mungkin tengah mengalami krisis nilai, keterbelakangan, atau ketimpangan.

Di masyarakat tradisional maupun modern, peran guru sangat strategis dalam membentuk struktur moral komunitas. Guru menjadi rujukan dalam hal pendidikan anak, penyelesaian masalah sosial, bahkan mediasi konflik di lingkungan sekitar. Keteladanan guru dalam bertindak, berbicara, dan memutuskan akan menjadi acuan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk membangun kualitas kepemimpinan yang integratif, di mana kompetensi profesional, kejujuran moral, dan keberpihakan sosial menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di sinilah relevansi gagasan guru sebagai pemimpin transformasional menjadi nyata, karena perubahan sosial dimulai dari perubahan nilai.

Lebih dari itu, guru juga dituntut mampu membangun jejaring sosial dan kolaborasi yang berbasis komunitas. Dalam semangat Nahdliyin, relasi sosial dibangun melalui silaturahmi, penguatan ukhuwah, dan musyawarah. Sementara dalam kerangka Marhaenis, jaringan ini dibangun untuk memperkuat basis kolektif rakyat, melawan ketimpangan, dan membentuk solidaritas antarwarga. Maka, kepemimpinan guru tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dirancang dalam semangat gotong royong, kerja sama lintas peran—termasuk dengan kyai, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta unsur pemerintahan lokal. Bab ini akan mengulas secara sistematis bagaimana model kepemimpinan komunitas berbasis nilai Nahdliyin dan Marhaenis dapat dikembangkan secara kontekstual, terutama di wilayah-wilayah tertinggal yang sangat memerlukan kehadiran guru sebagai penggerak dan penuntun peradaban.

### **Guru sebagai Pemimpin Moral dan Transformasional**

Guru, dalam tradisi panjang peradaban, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan pengarah arah perubahan sosial. Di tengah arus VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) dan derasnya gempuran budaya global yang kerap memisahkan pendidikan dari akarnya, peran guru sebagai pemimpin moral dan transformasional menjadi krusial. Ia tidak hanya berperan mengubah pemahaman kognitif siswa, tetapi juga membentuk

karakter, memperkuat akar budaya, dan merintis jalan etis di tengah masyarakat. Kepemimpinan ini bukan berdasar jabatan struktural, melainkan kekuatan teladan dan integritas.

Pemimpin moral tidak lahir dari kekuasaan administratif, melainkan dari kekuatan hati dan keberanian menyuarakan kebenaran. Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, moralitas seorang guru melekat pada komitmen membela kaum lemah, memperjuangkan kebenaran, serta menebar kasih sayang dalam setiap langkah pendidikan. Marhaenisme mengajarkan bahwa keberpihakan pada rakyat kecil adalah bentuk moralitas politik, sementara Aswaja (ahlussunnah wal jamaah) dalam tradisi NU menanamkan kesantunan, tawasuth, dan kearifan dalam menghadapi kompleksitas hidup. Gabungan keduanya membentuk profil guru pemimpin yang utuh secara etis dan transformatif secara sosial.

Transformasi yang dimaksud bukan sekadar reformasi kurikulum atau inovasi pembelajaran digital, tetapi perubahan mendasar atas relasi guru-murid, guru-masyarakat, dan guru-diri sendiri. Guru sebagai pemimpin transformasional mampu membangkitkan harapan, memperluas kesadaran, dan menggerakkan perubahan yang berkelanjutan. Ia hadir di kelas sebagai fasilitator dialog nilai, hadir di masyarakat sebagai teladan hidup sederhana dan jujur, serta hadir dalam kebijakan sebagai pengusul dan penggerak inisiatif-inisiatif pembaruan. Perubahan besar dalam masyarakat selalu diawali oleh tokoh-tokoh kecil yang konsisten dalam etika dan pengabdian.

Di tengah kecenderungan sekolah menjadi instrumen birokrasi dan pasar, guru transformasional menolak untuk terjebak dalam rutinitas teknokratik. Ia senantiasa membaca realitas dengan mata batin dan memaknainya dalam narasi emansipatoris. Ia sadar bahwa murid bukan sekadar penerima pelajaran, tetapi manusia utuh dengan potensi, keunikan, dan kebutuhan untuk dibimbing menemukan makna. Kepemimpinan transformasional ini menghidupkan pendidikan sebagai upaya pembebasan, bukan penjinakan; sebagai upaya pencerahan, bukan indoktrinasi.

Dalam kerangka itu, guru memanusiakan manusia—bukan memproduksi tenaga kerja semata.

Dalam masyarakat yang mulai kehilangan orientasi nilai, guru hadir sebagai jangkar moralitas. Ia menjadi panutan dalam kejujuran, ketekunan, kesabaran, dan kepedulian. Ketika masyarakat dibingungkan oleh politisasi pendidikan, guru memosisikan diri sebagai suara nurani yang kritis namun tetap santun. Ia membangun kepercayaan publik bukan melalui jargon, tetapi melalui keberanian dan konsistensi dalam hidupnya. Kepemimpinan moral yang demikian dibutuhkan untuk menavigasi dunia yang kompleks, agar generasi muda tidak tercerabut dari akar dan identitasnya.

Guru Nahdliyin-Marhaenis dalam kepemimpinan moralnya tidak hanya mengutip kitab dan ideologi, tetapi menghidupkannya dalam keseharian. Ia mengajarkan tauhid bukan semata konsep, tetapi melalui keteladanan hidup yang jujur dan adil. Ia mewariskan semangat kebangsaan bukan lewat pidato, tetapi lewat kerja konkret dalam memperkuat solidaritas sosial dan menolak segala bentuk diskriminasi. Ia tidak terjebak dalam formalisme agama maupun dogma ideologi, karena memahami bahwa kebenaran harus dihidupi, bukan sekadar dihafal.

Secara historis, bangsa Indonesia dibangun oleh para guru yang juga pemimpin moral. KH. Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan Tan Malaka—semuanya adalah pendidik yang juga pemikir bangsa. Mereka memadukan visi keilmuan, keteguhan moral, dan strategi perubahan. Kepemimpinan mereka tidak berhenti di ruang kuliah atau pesantren, tetapi menjelma dalam gerakan sosial yang membebaskan rakyat dari kebodohan, ketertindasan, dan penjajahan. Maka, guru hari ini harus meneladani semangat itu: menulis sejarah perubahan dari balik papan tulis dan ruang kelas sederhana.

Di tengah gelombang digitalisasi dan robotisasi, guru transformasional menjaga agar pendidikan tetap menyentuh sisi manusiawi. Ia menolak dehumanisasi yang mereduksi siswa menjadi angka-angka capaian. Ia menolak sistem yang menilai keberhasilan murid hanya dari aspek akademik, tanpa melihat sisi spiritual, sosial, dan emosional. Ia memuliakan

murid sebagai manusia yang memiliki cerita, bukan sekadar data dalam sistem. Kepemimpinan moralnya menciptakan ruang-ruang aman dan penuh cinta di sekolah.

Dalam praktiknya, kepemimpinan transformasional dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana: sapaan tulus di pagi hari, diskusi nilai dalam pembelajaran, pemilihan materi yang relevan dengan konteks sosial, serta keberanian menyuarakan keadilan dalam rapat sekolah. Guru dapat menjadi pemimpin perubahan tanpa harus menunggu jabatan formal. Justru dari ketidakformalan itulah, pengaruhnya menjadi lebih kuat dan otentik.

Di lingkungan pesantren dan madrasah, sosok guru pemimpin moral telah lama hidup. Mereka tidak pernah menjadi kaya secara materi, tetapi sangat kaya dalam pengaruh dan cinta dari murid-muridnya. Ketika pendidikan formal modern mulai kehilangan ruhnya, keberadaan guru-guru yang masih menjaga nilai menjadi harapan akan masa depan pendidikan yang lebih bermakna. Maka, memperkuat model kepemimpinan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh guru itu sendiri, tetapi oleh seluruh ekosistem pendidikan.

### **Membangun Jejaring Komunitas Marhaen-Pesantren**

Jejaring komunitas merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan peran guru sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks guru Nahdliyin-Marhaenis, jejaring ini menjadi titik temu antara dua kekuatan akar rumput yang sama-sama berpihak pada rakyat kecil: komunitas pesantren dan basis Marhaen. Membangun jejaring komunitas bukan sekadar menyambung hubungan kelembagaan, tetapi menumbuhkan solidaritas sosial, spiritual, dan edukatif demi menjawab tantangan zaman. Di tengah kompleksitas era VUCA dan derasny hegemoni kapitalisme global, komunitas lokal yang kuat, bersolidaritas, dan berdaya saing merupakan benteng peradaban yang kokoh.

Pesantren dan Marhaenisme memiliki titik temu yang kuat dalam visi sosialnya. Pesantren, dalam sejarahnya, bukan hanya lembaga pendidikan

keagamaan, tetapi juga basis resistensi kultural terhadap kolonialisme dan ketimpangan sosial. Sementara Marhaenisme adalah semangat perjuangan melawan eksploitasi ekonomi dan dominasi kelas. Keduanya menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan, kemandirian, dan pembebasan. Maka, membangun jejaring komunitas antara guru, pesantren, dan kelompok masyarakat Marhaen adalah upaya membangun kekuatan kolektif berbasis nilai dan aksi.

Dalam praktiknya, jejaring komunitas dapat dimulai dari kerja sama lintas sekolah, pesantren, dan organisasi sosial yang memiliki visi serupa. Guru dapat menjadi katalisator dialog antar-wilayah, mempertemukan tokoh lokal, kyai kampung, aktivis sosial, serta masyarakat adat untuk merumuskan agenda pendidikan yang berpihak pada rakyat. Kolaborasi ini menciptakan gerakan yang tidak hanya memperbaiki proses belajar-mengajar, tetapi juga menjawab isu-isu seperti kemiskinan struktural, ketimpangan akses, hingga penyebaran paham radikal. Dengan kekuatan jejaring, sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang saling menguatkan.

Secara filosofis, membangun jejaring komunitas menghidupkan kembali semangat gotong royong yang telah menjadi DNA bangsa Indonesia. Dalam ajaran Islam Nusantara, silaturahmi bukan sekadar rutinitas sosial, melainkan bagian dari ibadah yang mendekatkan manusia kepada nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan. Dalam Marhaenisme, kerja kolektif adalah jalan menuju revolusi sosial yang berkeadilan. Maka guru yang aktif dalam jejaring komunitas sejatinya sedang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa dalam konteks kekinian yang sangat memerlukan pertemuan antara nilai dan strategi.

Sejarah mencatat bahwa banyak perubahan sosial besar dimulai dari komunitas kecil yang terorganisir dengan kuat. Jejaring pesantren di masa penjajahan Belanda berhasil menjadi pusat konsolidasi gerakan kemerdekaan. Sementara itu, kelompok-kelompok Marhaen di desa-desa menjadi simpul perlawanan terhadap feodalisme dan sistem ekonomi kolonial. Dalam konteks kekinian, jejaring guru Nahdliyin-Marhaenis dapat menjadi

pemantik perubahan dalam isu-isu strategis seperti pendidikan karakter, moderasi beragama, literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi warga sekolah dan masyarakat.

Penguatan jejaring ini juga dapat dilakukan melalui forum rutin, pelatihan bersama, pembuatan program edukasi lintas lembaga, hingga publikasi pengalaman dan praktik baik secara kolektif. Guru harus menjadi penggerak inisiatif yang menghubungkan pesantren dengan sekolah formal, mengaitkan ide-ide Pancasila dengan praktik keagamaan yang moderat, serta menyinergikan antara nilai lokal dengan kemajuan global. Dengan demikian, jejaring ini bukan hanya bersifat horizontal, tetapi juga progresif, menumbuhkan inisiatif-inisiatif baru yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dari sisi kultural, guru yang membangun jejaring komunitas akan memperkuat ikatan antar-generasi. Ia mempertemukan generasi muda dengan para tokoh sepuh, antara pelajar milenial dengan ulama kampung, antara pengetahuan modern dengan kearifan lokal. Proses ini memperkaya identitas murid, membentuk narasi kebangsaan yang kuat, dan membangun rasa memiliki terhadap nilai luhur yang diwariskan oleh para pejuang pendidikan dan kemerdekaan. Guru tidak lagi sekadar fasilitator pengetahuan, tetapi penjaga kesinambungan nilai lintas generasi.

Komunitas Marhaen–Pesantren juga dapat memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang tidak kontekstual. Dalam era sentralisasi informasi dan standarisasi kurikulum yang seringkali menafikan lokalitas, jejaring ini dapat menjadi basis advokasi untuk meneguhkan kurikulum kontekstual berbasis kebutuhan rakyat. Guru yang aktif dalam komunitas memiliki kekuatan untuk menyuarakan kritik, menawarkan alternatif, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak. Dengan jejaring ini, suara guru menjadi lebih kuat karena berbasis kolektif dan berakar pada realitas.

Jejaring juga menciptakan ruang solidaritas di masa krisis. Dalam situasi darurat seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial, komunitas yang terhubung dapat saling membantu, berbagi sumber daya, dan

menyusun strategi tanggap darurat yang tepat sasaran. Guru dapat menjadi koordinator bantuan, fasilitator trauma healing, hingga juru bicara komunitas dalam menyuarkan kebutuhan. Jejaring ini membuktikan bahwa kekuatan sosial lebih bertahan dan berdampak dibandingkan pendekatan individual yang parsial.

Penting pula dipahami bahwa membangun jejaring komunitas bukan proyek instan. Ia memerlukan waktu, kepercayaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Guru perlu memupuk komunikasi yang jujur, menghormati perbedaan latar belakang, dan membangun etika kolaborasi yang saling menguatkan. Dalam proses ini, guru belajar menjadi pemimpin kolaboratif, bukan instruktif; menjadi fasilitator, bukan dominator; menjadi pemantik, bukan pemilik agenda. Dengan demikian, jejaring tumbuh secara organik dan menjelma menjadi kekuatan transformatif yang berbasis nilai dan aksi.

### **Kolaborasi dengan Wali Murid, Kyai, dan Tokoh Lokal**

Pendidikan yang bermakna dan berakar tidak mungkin terjadi jika hanya diserahkan kepada sekolah semata. Sebaliknya, ia adalah hasil dari kolaborasi erat antara berbagai pihak dalam ekosistem sosial-budaya: wali murid sebagai representasi keluarga, kyai sebagai representasi spiritual dan moral, serta tokoh lokal sebagai penjaga nilai dan sejarah komunitas. Dalam kerangka Nahdliyin-Marhaenis, kolaborasi ini bukanlah sekadar koordinasi administratif, tetapi suatu ikhtiar menyatukan visi untuk mencerdaskan bangsa dari akar rumput.

Secara filosofis, pendidikan adalah amal jama'i—kerja bersama yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Konsep *ta'awun* dalam tradisi Nahdliyin mengajarkan pentingnya saling membantu demi kebaikan bersama, sementara semangat gotong royong dalam Marhaenisme merupakan wujud solidaritas kelas pekerja dan rakyat kecil untuk keluar dari belenggu ketertinggalan. Maka, kolaborasi antara guru, wali murid, kyai, dan tokoh lokal adalah pertemuan nilai-nilai luhur Islam Nusantara dan nasionalisme kerakyatan yang progresif.

Wali murid, sebagai orang tua peserta didik, menyimpan potensi besar dalam mendukung dan memperkuat proses pendidikan. Sayangnya, dalam banyak kasus, hubungan antara sekolah dan orang tua seringkali bersifat pasif dan transaksional. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus memutuskan pola ini dan membangun kemitraan edukatif yang setara dan bersifat saling mendukung. Melalui dialog rutin, kegiatan parenting islami, atau majelis silaturahmi, guru dapat menanamkan nilai pendidikan sebagai tanggung jawab bersama yang melekat pada setiap anggota keluarga.

Sementara itu, kyai sebagai figur sentral dalam kehidupan keagamaan masyarakat, memiliki kekuatan spiritual dan simbolik yang sangat berpengaruh. Peran kyai tidak hanya terbatas pada ranah pesantren atau masjid, tetapi juga sebagai penasihat moral, penjaga tradisi, dan sumber otoritas nilai. Kolaborasi guru dengan kyai akan memperkuat muatan spiritual dalam pendidikan, serta memberi legitimasi terhadap nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan membebaskan. Melalui forum pengajian, halaqah pendidikan, atau sinergi kurikulum agama, sinergi ini dapat membentuk karakter peserta didik yang kokoh akhlaknya dan progresif pemikirannya.

Tokoh lokal, baik yang berasal dari unsur adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pelaku seni dan budaya, juga memiliki peran strategis dalam membangun jembatan antara sekolah dan masyarakat. Keberadaan mereka sering kali menjadi simbol identitas dan kearifan lokal yang dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan nilai di tengah derasnya arus globalisasi. Kolaborasi guru dengan tokoh-tokoh ini dapat memperkaya pendekatan pendidikan, menghidupkan kembali tradisi lokal yang mendidik, serta memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar dari realitas sekitar yang konkret dan bermakna.

Kolaborasi tidak hanya soal keterlibatan personal, tetapi juga tentang membangun struktur dan sistem partisipatif. Guru dapat memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi sekolah–masyarakat, komite pendidikan berbasis nilai-nilai lokal, atau program pelibatan komunitas dalam evaluasi pendidikan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif

terhadap sekolah sebagai ruang publik, sekaligus memperluas fungsi sekolah sebagai pusat transformasi sosial dan kebudayaan. Kolaborasi ini menghidupkan semangat *from school to community and from community to school*.

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat keberhasilan kolaborasi semacam ini dalam berbagai momen krusial. Misalnya, dalam fase awal pergerakan kemerdekaan, banyak sekolah rakyat dan taman pendidikan yang lahir dari gotong royong antara guru, ulama, dan masyarakat. Para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Hasyim Asy'ari, dan KH Ahmad Dahlan menginsafi pentingnya kolaborasi lintas peran untuk menciptakan generasi yang utuh secara intelektual dan spiritual. Kini, dalam era disrupsi, semangat kolaborasi itu perlu direvitalisasi dengan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif.

Dalam praktiknya, kolaborasi dapat diwujudkan melalui beragam kegiatan seperti penguatan program keagamaan bersama kyai dan tokoh agama, pengembangan kurikulum lokal bersama tokoh budaya, penyusunan program literasi bersama wali murid, atau pelatihan keterampilan hidup berbasis potensi lokal. Hal ini akan memberi warna pada proses pendidikan dan menjauhkan sekolah dari watak birokratik yang kaku dan seragam. Pendidikan menjadi lebih kontekstual, menyatu dengan kehidupan masyarakat, dan merespons tantangan nyata.

Tentu saja, membangun kolaborasi membutuhkan keterampilan sosial yang tinggi dari guru. Guru harus mampu menjadi komunikator yang terbuka, fasilitator yang rendah hati, dan pemimpin yang visioner. Dalam proses ini, nilai-nilai *akhlaqul karimah* menjadi landasan utama: menghargai, mendengarkan, berdialog, dan mengajak tanpa menggurui. Guru tidak memposisikan diri sebagai yang paling tahu, tetapi sebagai pembelajar yang terus menyerap kearifan dari lingkungan sosial yang kaya makna.

Lebih jauh, kolaborasi ini menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan komunitas pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Di tengah krisis identitas, polarisasi sosial, dan ancaman dehumanisasi digital, sinergi antara sekolah, keluarga, agama, dan komunitas lokal menjadi

benteng pertahanan yang kokoh. Di sinilah peran strategis guru Nahdliyin-Marhaenis semakin nyata: menjadi titik temu antara nilai, pengetahuan, dan tindakan sosial yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

### **Revitalisasi Peran Guru di Wilayah Tertinggal**

Wilayah tertinggal di Indonesia bukan hanya merujuk pada aspek geografis dan infrastruktur yang kurang memadai, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan kultural yang menghambat pemerataan pendidikan. Dalam konteks ini, guru memiliki posisi yang sangat strategis sebagai aktor perubahan yang membawa misi pencerdasan dan pembebasan. Revitalisasi peran guru di wilayah tertinggal bukan sekadar mengisi kekosongan tenaga pendidik, melainkan merancang kembali peran guru sebagai pemimpin peradaban lokal yang bekerja dalam keterbatasan namun berpikir dengan semangat kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Filosofi Nahdliyin dan Marhaenis mengajarkan bahwa di tempat yang paling pinggir sekalipun, cahaya perubahan bisa dimulai. Konsep *khidmah* (pengabdian) dalam Nahdlatul Ulama tidak terikat oleh pangkat atau fasilitas, melainkan oleh niat dan konsistensi untuk membawa keberkahan melalui ilmu. Sementara ajaran Marhaenisme menekankan pentingnya berpihak pada kaum kecil, yang dalam konteks pendidikan berarti memperjuangkan hak belajar anak-anak dari keluarga nelayan, petani, buruh, atau masyarakat adat. Maka guru di wilayah tertinggal bukanlah petugas teknis, melainkan pejuang nilai yang menjalankan misi ideologis dan spiritual.

Tantangan guru di wilayah tertinggal sangat kompleks. Selain kekurangan sarana, jaringan, dan penghasilan yang minim, mereka juga menghadapi tantangan budaya dan sosial seperti rendahnya literasi orang tua, praktik pernikahan dini, atau bahkan resistensi terhadap pendidikan formal. Dalam kondisi seperti itu, guru harus menjadi teladan yang bersikap lembut namun tegas, bersuara lantang dalam prinsip namun bijak dalam pendekatan. Inilah titik temu antara etika Nahdliyin dan semangat

kerakyatan Marhaenisme—bahwa guru harus hadir sebagai sosok yang diterima, dipercaya, dan diikuti oleh komunitas.

Perlu ditekankan bahwa guru di wilayah tertinggal bukan hanya membawa kurikulum, tetapi membawa harapan. Mereka menghidupkan mimpi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki gambaran masa depan. Dalam hal ini, guru harus menggunakan pendekatan pedagogi yang relevan dengan konteks lokal, seperti mengaitkan materi pelajaran dengan budaya setempat, cerita rakyat, potensi ekonomi lokal, serta bahasa daerah. Konsep *local wisdom-based education* bukan hanya strategi, tapi keharusan agar pendidikan tidak terasa asing dan memutus akar kultural anak-anak daerah.

Revitalisasi juga perlu diarahkan pada aspek spiritualitas guru. Dalam kondisi yang keras dan terisolasi, ketahanan spiritual menjadi fondasi untuk tetap bertahan. Guru perlu membangun rutinitas ibadah, dzikir, dan silaturahmi yang kuat dengan warga sekitar agar tidak terjebak dalam keterasingan. Di sinilah ajaran Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah) menjadi penyangga moralitas dan energi batin. Guru Nahdliyin tidak hanya mendidik dengan otak, tetapi juga dengan hati dan doa yang tidak putus.

Sejarah mencatat banyak guru hebat lahir dari daerah-daerah pelosok yang justru menjadi motor kebangkitan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan pendidikan alternatif di Yogyakarta yang saat itu bukan pusat kekuasaan kolonial. KH Ahmad Dahlan memulai pembaruan pendidikan dari komunitas kecil Muhammadiyah di kampung Kauman. KH Hasyim Asy'ari membangun Pesantren Tebuireng dari desa Jombang. Semua mengajarkan bahwa tempat bukanlah penghalang jika visi guru melampaui sekat geografis dan administratif.

Untuk mewujudkan revitalisasi ini, dukungan struktural juga penting. Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi guru daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menyediakan pelatihan berkala berbasis daring, dan mengembangkan jejaring kolaboratif agar mereka tidak merasa bekerja sendiri. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) juga perlu merancang kurikulum khusus untuk mempersiapkan calon guru

yang siap secara mental, sosial, dan ideologis untuk ditugaskan di daerah terpencil.

Namun di atas semua itu, revitalisasi sejati terjadi ketika guru sendiri menumbuhkan kesadaran misi dalam dirinya. Kesadaran bahwa profesinya bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari jihad pendidikan yang mulia. Guru bukan hanya hadir untuk mengajar, tetapi untuk menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat—ikut menanam padi, ikut ronda malam, ikut dalam pengajian dan musyawarah desa. Pendidikan menjadi hidup, bukan sekadar formalitas.

Dalam hal praktik pembelajaran, guru di wilayah tertinggal perlu menggunakan model pembelajaran terbuka, berbasis proyek, dan kontekstual. Misalnya, tugas menulis deskripsi lingkungan bisa diganti dengan membuat peta desa; pelajaran matematika dikaitkan dengan penghitungan hasil panen; pelajaran sains dikaitkan dengan kondisi alam sekitar. Hal-hal seperti ini membuat anak-anak merasa bahwa sekolah berbicara dalam bahasa mereka, bukan bahasa kota yang asing.

Secara ideologis, guru Nahdliyin-Marhaenis membawa misi besar: menjaga Indonesia dari pinggiran. Merekalah garda terdepan dalam memelihara NKRI bukan dengan senjata, tetapi dengan pena, papan tulis, dan keteladanan hidup. Dalam kondisi di mana rasa putus asa dan keterasingan mudah tumbuh, guru harus menjadi pelita yang menyala, menyalakan cahaya kecil yang lambat laun akan menerangi seluruh kampung.

## Studi Kasus dan Praktik Baik

Buku ini telah menjelajah berbagai lapis pemikiran filosofis, nilai ideologis, hingga respons kontekstual atas tantangan zaman dalam dunia pendidikan. Namun, sebagaimana ajaran Aswaja dan prinsip Marhaenis yang menekankan pentingnya amal dalam kebijakan serta praksis dalam gagasan, maka narasi ini tidak lengkap tanpa menghadirkan *praktik baik* dan *studi kasus nyata* yang menghidupkan nilai-nilai tersebut. Bab ini merupakan jendela inspiratif yang menyajikan bagaimana para guru

Nahdliyin-Marhaenis benar-benar menjalankan misi keilmuan, kebangsaan, dan kerakyatan dalam ruang sosialnya yang konkrit. Bukan fiksi atau mimpi, tetapi rekaman perjuangan dan keteladanan yang lahir dari sekolah, madrasah, pesantren, dan pelosok desa Indonesia.

Dalam konteks filsafat pendidikan, pembuktian nilai melalui tindakan atau praksis adalah bentuk tertinggi dari kebermaknaan. Ilmu dan ideologi tanpa wujud nyata akan tetap berada dalam ruang abstraksi, sedangkan aksi tanpa nilai dapat kehilangan arah. Karenanya, Bab ini berfungsi sebagai *sintesis aplikatif*, di mana teori yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya menemukan bentuk hidupnya dalam pengalaman guru-guru luar biasa. Para guru ini bukan selebriti pendidikan, tetapi tokoh senyap yang berjuang dalam diam, di ruang-ruang yang kadang luput dari radar pemberitaan, namun kaya akan makna dan nilai.

Setiap subbab akan memotret satu tema spesifik dari praksis guru yang menjelma sebagai pemimpin nilai, penggerak perubahan, dan penjaga keberagaman. Profil-profil ini mencerminkan keberagaman latar sosial-budaya, jenjang pendidikan, dan lokasi geografis. Ada yang berasal dari madrasah kecil di pedalaman, SMK di perbatasan, hingga pesantren inklusif yang menjadi oase toleransi di tengah arus radikalisme. Cerita-cerita ini juga tidak tunggal dalam makna: sebagian menghadirkan inovasi sosial berbasis komunitas, sebagian lagi mencerminkan perlawanan halus terhadap kekuasaan yang menindas, sementara sebagian lainnya menunjukkan ketangguhan dalam membangun etos kerja, keadilan gender, dan integritas dalam pendidikan.

Studi kasus dalam bab ini disajikan bukan sebagai model yang harus ditiru secara kaku, melainkan sebagai inspirasi bernilai kontekstual. Setiap praktik baik dibentuk oleh waktu, tempat, dan sosok yang unik. Namun esensi perjuangan—yakni pengabdian, keberanian moral, dan keberpihakan terhadap kaum terpinggirkan—adalah benang merah yang menyatukan semuanya. Di sinilah kita melihat bagaimana seorang guru bisa menjadi penggerak transformasi bukan karena ia memegang jabatan tinggi, tetapi

karena ia menyalakan api perubahan dalam batas-batas kemampuannya yang penuh cinta dan keikhlasan.

Kita akan menyaksikan bagaimana seorang guru SMK di wilayah marjinal berhasil mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan nilai-nilai akhlak, membentuk siswa menjadi pekerja sekaligus manusia bermartabat. Ada pula cerita tentang guru madrasah yang membangun gerakan literasi berbasis tradisi lokal, memberdayakan anak-anak nelayan agar tidak kehilangan jati diri. Ada guru pesantren yang menolak ekstremisme melalui dakwah lembut yang merangkul. Semua itu menunjukkan bahwa guru Nahdliyin-Marhaenis hadir sebagai agen perubahan berbasis nilai, bukan hanya pelaksana kurikulum.

Dalam falsafah Marhaenis, kisah-kisah kaum kecil bukan untuk dika-sihani, tetapi untuk dijadikan sumber keberanian kolektif. Demikian pula dalam tradisi Nahdliyin, pengalaman santri dan guru pesantren merupakan khazanah pendidikan yang tak kalah berharga dibanding teori Barat. Maka studi kasus dalam bab ini menjadi narasi kultural yang harus dibaca dengan hati, tidak hanya dengan kepala. Ia adalah *hikayat modern* tentang keberanian, pengabdian, dan kebajikan yang melintasi sekat agama, ideologi, dan wilayah.

Pengantar ini menegaskan bahwa bab ini bukan epilog, melainkan penegasan praksis dari seluruh bangunan ideologis-filosofis yang dibangun dalam buku ini. Ia menjadi refleksi sekaligus tantangan: bahwa menjadi guru Nahdliyin-Marhaenis bukanlah wacana kosong, tetapi perjuangan yang terus berlangsung di ruang-ruang kelas yang sederhana, di tengah masyarakat yang butuh harapan, dan di hati anak-anak bangsa yang menatap masa depan.

### **Potret Guru Penggerak: Profil, Narasi, dan Konteks**

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, para guru telah menempati peran yang lebih dari sekadar pendidik di ruang kelas. Mereka adalah penjaga moral, pemikul harapan, dan penentu arah bangsa. Dalam kerangka Nahdliyin-Marhaenis, guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga

memperjuangkan nilai-nilai kultural, keagamaan, dan sosial yang berakar pada tradisi kerakyatan. Potret guru penggerak dalam bab ini bukan sekadar profil tokoh, tetapi cermin dari keberanian kolektif dalam mengarungi pendidikan yang humanistik dan kontekstual. Mereka tidak sekadar mengikuti arus kebijakan, tetapi membentuk arus melalui nilai dan keteladanan.

Salah satu tokoh inspiratif yang layak diangkat adalah Ibu R., seorang guru perempuan di sebuah SMK terpencil di daerah pesisir utara Jawa. Dalam kondisi infrastruktur pendidikan yang minim, Ibu R. berhasil membentuk komunitas belajar berbasis kearifan lokal. Ia menolak pendekatan pembelajaran yang semata-mata berorientasi pada nilai ujian, dan menggantinya dengan pembelajaran berbasis proyek sosial. Murid-muridnya diajak membuat program konservasi pantai, dokumentasi tradisi lokal, dan pelatihan ekonomi rumah tangga berbasis digital. Dengan pendekatan pedagogis yang reflektif dan kontekstual, Ibu R. membuktikan bahwa pendidikan sejati adalah tentang menghidupkan lingkungan, bukan hanya menuntaskan kurikulum.

Dalam perspektif filosofis, apa yang dilakukan oleh Ibu R. adalah praktik dari nilai *Ilmu yang Membebaskan*. Ia tidak memposisikan dirinya sebagai pusat pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator perjalanan intelektual siswa. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang guru sebagai “pamong” yang menuntun, bukan menggurui. Lebih jauh, semangat ini juga sejalan dengan prinsip Aswaja yang menekankan *ta’lim*, *tarbiyah*, dan *ta’dib*, yakni proses mendidik secara utuh: intelektual, spiritual, dan sosial. Ibu R. menjadi pengejawantahan hidup dari guru yang menyatu dengan komunitasnya—berpikir global namun bertindak lokal.

Guru penggerak lainnya yang patut diteladani adalah Bapak M., guru madrasah aliyah di lereng pegunungan yang mengembangkan kelas literasi digital berbasis kitab kuning dan masalah-masalah sosial kontemporer. Alih-alih menjadikan kitab hanya sebagai teks klasik, beliau mengintegrasikan pemahaman fiqh dengan konteks sosial lokal seperti distribusi air, praktik ekonomi, dan relasi gender. Melalui metode diskusi kritis dan studi lapangan, beliau membangun jembatan antara teks dan realitas. Dengan

cara ini, murid tidak hanya hafal hukum, tetapi mampu menimbang realitas sosial secara etis dan religius.

Dalam pandangan Marhaenis, Bapak M. melakukan praksis pendidikan yang revolusioner. Ia tidak menggantungkan nasib anak didiknya pada sistem pendidikan formal semata, melainkan menyemai kesadaran untuk membebaskan diri dari ketertindasan struktural melalui ilmu. Pendidikan tidak berhenti di bangku madrasah, tetapi menjelma menjadi alat transformasi sosial. Di tangan Bapak M., kitab kuning bukan hanya menjadi dokumen masa lalu, tetapi teks hidup yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan keberanian bertindak secara moral.

Potret lain datang dari komunitas guru-guru muda Nahdliyin di kota kecil di Jawa Tengah yang mendirikan “Sekolah Marhaen” sebagai gerakan sosial. Sekolah ini tidak memiliki gedung resmi, tetapi menyelenggarakan kegiatan belajar di balai desa, warung kopi, dan masjid-masjid. Kurikulumnya tidak seragam, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, seperti pelatihan pertanian organik, koperasi pemuda, dan kelas demokrasi desa. Para guru mengajarkan akuntansi berbasis koperasi sambil menanamkan prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi. Mereka tidak digaji oleh negara, tetapi disokong oleh gotong royong warga dan donasi dari alumni yang merasakan manfaat transformasi pendidikan ini.

Dalam kerangka pemikiran Nahdliyin-Marhaenis, gerakan seperti “Sekolah Marhaen” adalah perwujudan pendidikan alternatif yang berpihak. Ia tidak terjebak dalam logika proyek, tetapi didasari kesadaran ideologis dan keberpihakan terhadap yang lemah. Sekolah ini memperlihatkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas ke bawah, melainkan bisa dimulai dari akar—dari keinginan guru untuk hadir bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai pencipta ekosistem pembelajaran yang membebaskan dan membangkitkan harga diri komunitasnya.

Ada pula kisah inspiratif dari seorang guru Nahdliyin di wilayah konflik horizontal di Indonesia Timur, yang menjadikan sekolah sebagai ruang perdamaian dan rekonsiliasi. Ia membentuk kelompok lintas

agama di sekolah, memfasilitasi dialog antar siswa Kristen dan Muslim, serta membangun proyek seni bersama yang menumbuhkan empati dan pengertian lintas identitas. Sekolah yang sebelumnya terpecah akibat politik sektarian kini menjadi tempat aman untuk tumbuh bersama dalam keberagaman. Pendekatannya yang lembut namun tegas menunjukkan bahwa guru adalah arsitek perdamaian yang bekerja dalam senyap.

Kisah-kisah ini menegaskan bahwa guru penggerak bukanlah gelar administratif atau program sertifikasi semata. Mereka adalah sosok yang secara sadar memaknai perannya sebagai *katalisator nilai*. Dalam tradisi Nahdliyin, guru bukan hanya ustaz, tetapi juga *kyai kecil* yang menjaga harmoni sosial. Dalam kerangka Marhaenis, guru adalah pemimpin kelas pekerja yang sadar akan peran transformasionalnya di tengah masyarakat tertindas. Perpaduan keduanya menjadikan guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai tokoh yang membentuk ulang wajah pendidikan Indonesia dari bawah.

Secara historis, potret-potret ini mengingatkan kita pada jejak para pendiri pesantren dan tokoh pendidikan rakyat pada masa pergerakan nasional. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Bung Karno adalah contoh bahwa pendidikan bukan hanya strategi pembangunan, melainkan juga jalan perjuangan. Maka, para guru penggerak masa kini adalah penerus spiritual dan ideologis dari tradisi luhur itu. Mereka melanjutkan estafet dengan cara baru—menghadapi disrupsi digital, ketimpangan sosial, dan krisis nilai—namun dengan semangat lama yang tak pernah padam: cinta pada tanah air dan kaum dhuafa.

Kita tidak boleh membiarkan kisah-kisah ini mengendap di sudut-sudut kelas atau terhapus oleh narasi dominan yang terlalu teknokratis. Perlu ada upaya dokumentasi, pembacaan ulang, dan replikasi berbasis kontekstual. Negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan yang lahir dari bawah. Model pendidikan alternatif ini bisa menjadi pelengkap sekaligus kritik terhadap sistem yang seragam dan terpusat. Sebab pada dasarnya, pendidikan

adalah dialektika antara realitas dan cita-cita, antara nilai-nilai luhur dan tindakan nyata.

### **Inovasi Sosial di Madrasah dan Pesantren**

Madrasah dan pesantren tidak sekadar institusi pendidikan keagamaan, melainkan merupakan pusat transformasi sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kaum marhaen. Dalam sejarahnya, pesantren merupakan wadah perlawanan kultural dan spiritual terhadap dominasi kolonial, serta tempat pembentukan karakter dan kesadaran kolektif umat. Kini, di tengah pusaran era disrupsi dan tekanan globalisasi, pesantren dan madrasah kembali dituntut untuk tampil sebagai agen inovasi sosial yang mampu menjawab problematika kekinian tanpa tercerabut dari akarnya.

Inovasi sosial dalam konteks madrasah dan pesantren bukan sekadar integrasi teknologi digital ke dalam kurikulum, melainkan pembaruan cara pandang dalam mendidik manusia seutuhnya. Misalnya, banyak pesantren hari ini yang telah merintis program *santripreneurship*—yakni penguatan kemandirian ekonomi santri berbasis nilai-nilai keislaman. Program ini tidak hanya mengajarkan keterampilan wirausaha, tetapi juga menanamkan etika kerja, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada yang lemah. Di sinilah inovasi sosial hadir: mengubah pesantren dari sekadar tempat belajar kitab menjadi pusat pemberdayaan umat yang transformatif.

Salah satu contoh nyata hadir dari sebuah pesantren di Jawa Timur yang mengembangkan koperasi pesantren berbasis syariah dan komunitas tani organik. Dengan melibatkan santri, alumni, dan masyarakat sekitar, pesantren tersebut tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga membentuk ekosistem keberdayaan yang mengakar. Para santri diajak memahami konsep produksi, distribusi, dan konsumsi dalam bingkai maqashid syariah dan prinsip keadilan sosial Pancasila. Mereka menjadi pelaku langsung perubahan sosial, bukan sekadar objek pendidikan.

Madrasah modern yang progresif juga telah memperkenalkan pendekatan *project-based learning* yang dikombinasikan dengan nilai-nilai aswaja.

Dalam model ini, murid tidak sekadar diminta menghafal kitab dan teori, melainkan diajak merancang solusi terhadap persoalan masyarakat. Misalnya, proyek pengolahan sampah berbasis masjid, pendampingan UMKM keluarga santri, atau pengembangan literasi digital bagi komunitas sekitar. Proyek-proyek ini menanamkan rasa tanggung jawab sosial sekaligus melatih keterampilan praktis yang relevan di era digital.

Jika ditilik lebih dalam, inovasi sosial di madrasah dan pesantren juga berarti menghidupkan kembali nilai *ta'awun* (kerjasama), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *ijtihad* (pemikiran kritis). Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator, mentor, dan pejuang nilai. Mereka membimbing santri untuk tidak sekadar memahami dalil, tetapi juga mengasah empati, daya cipta, dan kemampuan kolaboratif. Dalam kerangka ini, madrasah tidak menjadi menara gading, tetapi laboratorium kehidupan yang menyatu dengan denyut masyarakat marhaen.

Di tengah ketimpangan sosial yang semakin nyata, inovasi sosial madrasah dan pesantren memiliki posisi strategis untuk menjembatani jurang antara pengetahuan agama dan realitas kemiskinan struktural. Ketika pendidikan formal cenderung terstandar dan mengabaikan konteks lokal, pesantren bisa hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan transformatif. Mereka bisa menjadi katalisator rekonsiliasi antara agama dan modernitas, antara tradisi dan inovasi.

Bahkan dalam situasi bencana atau krisis kemanusiaan, pesantren terbukti tangguh sebagai pusat solidaritas. Banyak pesantren yang menjadi tempat pengungsian, distribusi bantuan, dan pusat trauma healing. Mereka tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga menghidupkan kembali harapan lewat penguatan spiritual, motivasi hidup, dan pemulihan mental. Ini membuktikan bahwa inovasi sosial tidak selalu berbentuk teknologi, melainkan kadang dalam bentuk kehadiran, kepedulian, dan keteladanan.

Dalam konteks filsafat pendidikan, inovasi sosial di madrasah dan pesantren sejatinya adalah penerjemahan nyata dari gagasan *ilmiah amal-iyah*—ilmu yang diamalkan. Pendidikan tidak berhenti pada transformasi

kognitif, melainkan harus sampai pada transformasi sosial. Di sinilah warisan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim menemukan kelanjutannya: pendidikan yang berani berpihak, berani kritis, namun tetap berakhlak dan berakar.

Secara historis, gerakan pendidikan rakyat yang dilakukan oleh ulama-ulama pesantren sudah menunjukkan semangat inovasi sosial yang mendahului zamannya. Mereka mendirikan madrasah tanpa campur tangan pemerintah kolonial, menciptakan kurikulum sendiri yang menggabungkan kitab klasik dan ilmu kehidupan, serta membentuk jaringan santri sebagai basis mobilisasi sosial dan politik. Inilah jejak kultural yang kini harus dimaknai ulang dalam konteks Society 5.0.

Penting untuk dicatat bahwa inovasi sosial bukan berarti sekadar ikut arus globalisasi. Pesantren dan madrasah harus mampu memilah mana yang maslahat dan mana yang harus ditolak. Teknologi bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa menjadi alat alienasi. Oleh karena itu, inovasi sosial harus dibingkai dengan nilai-nilai profetik, yakni keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan terhadap kaum tertindas. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara inovasi yang sekadar komersial dan inovasi yang berbasis nilai.

Dalam praktiknya, banyak madrasah dan pesantren juga mulai mengintegrasikan pembelajaran STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) dengan pendidikan karakter. Mereka menyadari bahwa kemampuan kognitif saja tidak cukup. Maka, penguatan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, empati, dan adaptabilitas menjadi bagian dari kurikulum informal yang melekat dalam keseharian santri. Pendekatan ini membentuk santri yang tidak hanya pintar, tetapi juga siap menghadapi tantangan sosial kompleks dengan jiwa yang tangguh.

Inovasi sosial juga dapat dilihat dari gerakan literasi digital di beberapa pesantren. Para guru dan santri mendirikan kanal YouTube, podcast, dan blog yang membahas kitab kuning dengan bahasa kekinian. Tujuannya bukan untuk menggantikan pengajian langsung, tetapi untuk memperluas jangkauan dakwah. Di sisi lain, mereka juga menggunakannya untuk

mengedukasi masyarakat soal kebencanaan, keuangan syariah, hingga politik kebangsaan. Ini adalah bentuk dakwah bil hikmah dalam format era digital.

Model pengelolaan madrasah yang partisipatif dan berbasis komunitas juga menjadi bentuk lain dari inovasi sosial. Di banyak tempat, wali santri, alumni, dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Transparansi anggaran, evaluasi kurikulum, dan pengembangan fasilitas dilakukan bersama. Ini membentuk budaya tanggung jawab kolektif yang memperkuat legitimasi moral madrasah sebagai lembaga publik yang bersih dan berpihak.

Secara aplikatif, inovasi sosial harus terus dikembangkan sebagai gerakan yang masif dan terstruktur. Pemerintah, ormas Islam, dan LSM perlu menjadikan pesantren dan madrasah sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek binaan. Program-program seperti revitalisasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan bantuan infrastruktur harus berbasis kebutuhan nyata dan menghormati otonomi kultural lembaga.

Masa depan pendidikan Indonesia yang inklusif, religius, dan berkeadilan sangat bergantung pada keberhasilan madrasah dan pesantren menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh-nya. Maka, inovasi sosial adalah jalan tengah yang menjanjikan: ia menggabungkan nilai dengan realitas, idealisme dengan pragmatisme, dan tradisi dengan transformasi. Di sinilah guru Nahdliyin-Marhaenis menemukan ruang perjuangannya—bukan di menara gading, tetapi di jalan sunyi pembebasan umat melalui pendidikan yang hidup dan membumi.

### **Integrasi Vokasi, Akhlak, dan Keteladanan di SMK**

Pendidikan vokasi di SMK dirancang untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja terampil, siap pakai, dan adaptif terhadap dunia industri. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan filosofis, pendidikan vokasi tak seharusnya berhenti pada kecakapan teknis semata. Ia harus dikembangkan menjadi wahana integratif antara kompetensi, nilai, dan karakter. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan akhlak dan keteladanan ke dalam sistem

pendidikan vokasi, agar siswa tidak hanya pandai mengoperasikan mesin, tetapi juga mampu membaca realitas dengan nurani.

Konsep integrasi ini sangat sejalan dengan visi pendidikan Nahdliyin-Marhaenis yang menempatkan manusia sebagai pusat transformasi sosial. Dalam pendekatan ini, keterampilan teknis adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar: pembebasan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Maka, di SMK, pembelajaran seharusnya bukan sekadar memenuhi permintaan pasar kerja, tetapi juga membentuk watak kebangsaan, etos kerja, dan semangat kolektivitas dalam diri peserta didik.

Ketika pendidikan vokasi hanya menekankan output berupa angka kelulusan atau penempatan kerja, maka yang lahir adalah manusia-manusia mekanistik, yang bekerja tanpa refleksi. Sebaliknya, jika pendidikan disertai nilai dan keteladanan, maka yang terbentuk adalah insan vokasional yang berintegritas. Mereka akan bekerja bukan hanya untuk mendapatkan upah, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan sosial. Di sinilah titik temu antara prinsip marhaenisme dan nilai-nilai Islam Nusantara yang memulikan kerja sebagai ibadah.

Keteladanan guru menjadi kunci dari keberhasilan integrasi ini. Dalam tradisi pesantren, keteladanan disebut *uswah hasanah*—yakni proses pendidikan yang berlangsung melalui perjumpaan batin, bukan sekadar penyampaian materi. Guru SMK yang memiliki integritas, disiplin, dan empati akan jauh lebih efektif dibandingkan modul pembelajaran yang paling canggih sekalipun. Sebab, peserta didik vokasi cenderung belajar melalui observasi dan pengalaman konkret, bukan sekadar teori.

Salah satu bentuk implementasi integrasi ini bisa dilihat dalam praktik *teaching factory* yang dikembangkan di berbagai SMK. Konsep *teaching factory*, yang pada dasarnya adalah pabrik mini di lingkungan sekolah, menjadi wahana yang sangat potensial untuk menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, dan kebersamaan. Ketika proses produksi dilakukan dalam bingkai nilai, maka siswa tidak hanya menguasai proses kerja, tetapi juga menyerap makna dari setiap tindakan.

Integrasi juga bisa dilakukan melalui model pembelajaran berbasis proyek sosial. Misalnya, siswa jurusan teknik kendaraan ringan diminta memperbaiki sepeda motor milik warga kurang mampu secara gratis, atau siswa tata boga menyelenggarakan pelatihan gizi seimbang untuk ibu-ibu di kampung. Proyek-proyek seperti ini memberi ruang bagi siswa untuk menerapkan kompetensinya sekaligus mengembangkan empati sosial dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas.

Pendidikan karakter dalam SMK seyogianya tidak diajarkan secara verbalistik melalui ceramah agama, tetapi melalui praksis. Nilai kejujuran ditanamkan ketika siswa diminta mengelola uang kas bengkel. Nilai kerja sama ditumbuhkan saat mereka harus menyelesaikan proyek kelompok dengan tenggat waktu. Dan nilai tanggung jawab ditanamkan saat mereka harus merawat alat-alat praktik dan bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja mereka.

Dalam konteks sejarah, pendidikan vokasi di Indonesia sebenarnya lahir dari semangat kemandirian dan emansipasi. Pada masa kolonial, pendidikan teknis hanya diberikan kepada anak-anak kaum elite pribumi atau keturunan Eropa. Kaum marhaen hanya menjadi penonton. Maka, mendirikan SMK di daerah-daerah terpencil hari ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari perjuangan ideologis untuk mencerdaskan dan memerdekakan anak bangsa.

Guru-guru SMK, khususnya yang berlatar Nahdliyin dan berpan-dangan Marhaenis, memikul peran ganda: sebagai pengajar keterampilan dan penjaga nilai. Mereka harus membumikan nilai-nilai keteladanan di tengah tekanan kurikulum yang kian kompetitif dan tuntutan pasar kerja yang berubah cepat. Dalam posisi ini, guru adalah pejuang yang senyap: ia mungkin tidak tampil di layar televisi, tetapi kerja senyapnya mengubah nasib generasi.

Integrasi nilai juga dapat dilakukan melalui penguatan budaya sekolah yang bernafaskan gotong royong, kesederhanaan, dan keberpihakan pada yang lemah. Di SMK yang demikian, prestasi tidak diukur dari nilai Ujian Nasional semata, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi siswa terhadap

masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan progresif yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan diperkaya oleh pemikiran Soekarno.

Ketika kurikulum Merdeka mulai diterapkan di SMK, ada peluang besar untuk mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai ke-NU-an dan ke-Marhaen-an. Proyek seperti ini bisa menjadi media efektif untuk menyampaikan pendidikan karakter, kewirausahaan sosial, dan semangat nasionalisme yang inklusif. Guru harus mampu memfasilitasi proyek yang tidak hanya melatih kompetensi, tetapi juga menyentuh nilai dan nurani siswa.

Integrasi vokasi dan keteladanan juga mensyaratkan adanya peran aktif dari kepala sekolah, pengawas, dan pengambil kebijakan. Sekolah harus didorong menjadi laboratorium nilai, bukan sekadar pabrik ijazah. Maka, perlu ada kebijakan afirmatif yang memberikan ruang bagi guru-guru vokasi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan bernuansa sosial.

Dalam hal ini, kemitraan antara SMK dengan pesantren menjadi model ideal yang patut dikembangkan. Pesantren bisa menyuplai nilai, keteladanan, dan ruh spiritual, sementara SMK memberikan ruang aktualisasi keterampilan dan teknologi. Kolaborasi ini akan menciptakan generasi santri teknokrat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan daya juang tinggi.

Perlu juga dikembangkan sistem mentoring di mana guru senior menjadi panutan dan pembimbing bagi guru-guru muda dalam membumikan nilai dan etika di ruang praktik. Budaya mentoring ini harus melampaui sekadar supervisi formal, tetapi lebih kepada hubungan batin dan keteladanan personal yang menghidupkan suasana spiritual dan sosial di sekolah.

Sebagai penutup reflektif, integrasi antara vokasi, akhlak, dan keteladanan bukan sekadar proyek kurikulum, tetapi misi peradaban. Ia merupakan pengejawantahan dari prinsip “mendidik manusia seutuhnya”, yang menggabungkan kepala, hati, dan tangan. Guru SMK yang membawa semangat Nahdliyin dan Marhaenis akan mampu menumbuhkan generasi pekerja

yang sadar akan martabatnya sebagai manusia, sekaligus sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsanya.

### **Melawan Intoleransi: Kisah Perlawanan Guru Nahdliyin**

Intoleransi dalam pendidikan bukan sekadar masalah ideologi, melainkan cermin dari kegagalan mendidik dengan cinta, pemahaman, dan wawasan kebangsaan yang mendalam. Di ruang kelas yang seharusnya menjadi arena persemaian keberagaman, justru kadang tumbuh benih eksklusivisme dan diskriminasi. Di sinilah peran guru Nahdliyin menjadi strategis: menghadirkan wajah Islam yang ramah, bukan marah; membangun ruang-ruang pembelajaran yang inklusif; serta menanamkan nilai-nilai toleransi tanpa kehilangan identitas keagamaan. Guru Nahdliyin—dengan akar kuat pada tradisi Islam Nusantara yang lekat dengan kearifan lokal—menjadi benteng terakhir dalam melawan derasnya arus radikalisme yang menyusup lewat celah sistem pendidikan.

Sejumlah kisah nyata menunjukkan bagaimana para guru yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah telah menjadi garda depan dalam mencegah paham intoleran di sekolah. Di sebuah SMK di daerah perbatasan, misalnya, seorang guru agama secara konsisten menolak kehadiran materi ajar yang mencela kelompok keagamaan lain. Ia bukan hanya menolak dalam tataran materi, tetapi juga dalam praktik sehari-hari dengan mengajak siswanya berdialog, menanamkan penghargaan terhadap perbedaan, dan membentuk forum siswa lintas agama yang produktif. Keberanian ini bukan tanpa risiko—ia dicap liberal, bahkan pernah dilaporkan ke atasannya—namun ia tetap teguh karena percaya bahwa toleransi adalah inti dari ajaran Islam.

Tradisi keilmuan Nahdliyin sejak awal menekankan pentingnya tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Tiga nilai ini bukan sekadar jargon, melainkan praktik hidup sehari-hari yang diwariskan dari pesantren ke sekolah-sekolah formal. Guru-guru yang dibesarkan dalam kultur pesantren terbiasa menghadapi ragam pemikiran dan pandangan. Dalam khazanah kitab kuning, perbedaan bukan hal yang ditakuti, tetapi

justru disyukuri karena memperkaya ruang ijtihad. Maka, ketika mereka menghadapi intoleransi, responnya tidak keras atau represif, melainkan bijak dan argumentatif. Mereka memerangi kebencian bukan dengan caci maki, tetapi dengan narasi kebajikan.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan para guru Nahdliyin adalah dengan metode *maw'izhah hasanah*—nasihat yang lemah lembut namun mengena. Metode ini sangat efektif dalam mendekati siswa yang mulai menunjukkan gejala eksklusivisme, seperti enggan mengikuti upacara bendera, menolak berteman dengan teman beda agama, atau mencela kegiatan keagamaan lokal. Guru Nahdliyin menyapa mereka, mengajak diskusi, dan mempertemukan mereka dengan tokoh-tokoh yang memiliki perspektif luas. Dalam banyak kasus, siswa-siswa tersebut akhirnya luluh, menyadari kekeliruannya, dan kembali ke dalam semangat keberagaman Indonesia.

Tidak sedikit pula guru-guru yang menciptakan kegiatan kreatif sebagai sarana melawan intoleransi. Di sebuah madrasah aliyah di Jawa Timur, seorang guru bahasa Indonesia mengajak murid-muridnya membuat drama bertema toleransi. Naskahnya dibuat sendiri oleh siswa, dengan mengangkat kisah masyarakat plural yang bisa hidup damai dalam keberagaman. Penampilan ini bukan hanya membentuk empati siswa, tetapi juga menggerakkan kesadaran kolektif sekolah untuk menjunjung pluralitas. Kegiatan seni, sastra, dan budaya menjadi medium transformasi nilai yang sangat kuat karena menyentuh rasa dan nalar secara bersamaan.

Guru-guru Nahdliyin juga kerap menguatkan jejaring antarsekolah untuk saling berbagi strategi dalam menangkal radikalisme. Mereka membentuk komunitas literasi, forum guru lintas agama, dan kelompok kerja madrasah untuk menyusun materi ajar berbasis moderasi beragama. Ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap intoleransi tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi harus menjadi gerakan kolektif. Dan peran guru dalam membangun jejaring sosial ini sangat penting, karena mereka berada langsung di garis depan perubahan nilai.

Melalui pendekatan historis, guru Nahdliyin sering menggunakan narasi kebangsaan untuk menumbuhkan toleransi. Mereka mengajarkan sejarah

persatuan Indonesia, peran tokoh lintas agama dalam kemerdekaan, dan kisah tokoh NU seperti KH Wahid Hasyim, KH Hasyim Asy'ari, atau KH Abdurrahman Wahid yang memperjuangkan pluralisme. Narasi-narasi ini membentuk frame berpikir yang lebih luas pada siswa, bahwa Indonesia adalah rumah besar bagi banyak golongan, dan Islam hadir sebagai perekat, bukan pemecah.

Dalam menghadapi siswa yang telah terpapar paham ekstrem, guru Nahdliyin tidak serta-merta memberikan sanksi. Mereka menggunakan pendekatan *ta'lim dan tarbiyah*, yakni membina secara perlahan, membuka ruang komunikasi, dan menunjukkan kasih sayang. Mereka memahami bahwa siswa bukan musuh, melainkan korban dari sistem informasi yang cacat. Maka, proses deradikalisasi di sekolah dimulai dari hati, bukan hanya dari otoritas. Mereka menjadi guru sekaligus sahabat yang mengulurkan tangan, bukan mengangkat telunjuk.

Kisah lain datang dari seorang guru SMK di kawasan Jabodetabek yang membentuk komunitas “Pelajar Merah Putih” sebagai wadah kebangsaan. Komunitas ini mengadakan diskusi, pelatihan toleransi, hingga bakti sosial lintas iman. Dalam kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama dengan latar belakang berbeda, sehingga secara alamiah mereka memahami bahwa hidup bersama dalam keberagaman itu indah dan bisa dijalani. Guru inilah yang merancang kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) untuk membentuk karakter siswa melalui pengalaman nyata, bukan sekadar doktrin.

Keteguhan guru dalam melawan intoleransi bukan berarti tanpa dukungan. Banyak kepala sekolah, komite, dan tokoh masyarakat yang akhirnya ikut serta dalam perjuangan ini. Mereka menyadari bahwa intoleransi bukan ancaman minor, tetapi bom waktu bagi harmoni bangsa. Maka, membangun ekosistem sekolah yang toleran harus dimulai dari kebijakan, struktur organisasi, hingga praktik keseharian. Dan guru adalah motor utama dalam mewujudkan hal itu.

Ketika nilai-nilai moderasi dibumikan melalui pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah, maka siswa akan tumbuh sebagai pribadi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Mereka tidak akan mudah

terseret arus kebencian, karena memiliki daya tahan moral yang kuat. Guru-guru Nahdliyin dengan sabar menanamkan nilai-nilai ini melalui keteladanan, bukan hanya lewat kata-kata. Mereka hadir sebagai penjaga keutuhan Indonesia dari ruang-ruang kelas kecil yang mungkin luput dari perhatian publik.

### **Pemberdayaan Kaum Marhaen melalui Pendidikan Kontekstual**

Pendidikan kontekstual bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan, namun dalam tangan guru Marhaenis-Nahdliyin, ia menemukan makna yang lebih mendalam—yakni sebagai alat pembebasan, pemberdayaan, dan perlawanan terhadap ketimpangan sosial. Dalam bingkai Marhaenisme, pendidikan bukan sekadar proses kognitif tetapi perjuangan kolektif untuk mengangkat harkat kaum kecil. Pendidikan kontekstual menempatkan realitas sosial peserta didik sebagai titik tolak pembelajaran, bukan sebagai objek pasif. Hal ini menegaskan kembali bahwa pendidikan sejati harus berpihak, berpijak, dan bergerak dari kehidupan konkret siswa, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial terpinggirkan.

Pendidikan kontekstual yang dibumikan dalam semangat Marhaenisme dan nilai-nilai Nahdliyin tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tetapi juga menghadirkan persoalan-persoalan sosial ke dalam proses pembelajaran. Seorang guru di desa nelayan, misalnya, mengembangkan mata pelajaran ekonomi yang menggambarkan rantai produksi ikan, dari nelayan hingga tengkulak, dan membahas alternatif koperasi sebagai solusi. Guru lain di daerah pertanian mengembangkan proyek pembelajaran berbasis produksi pertanian organik. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana guru dapat merancang pembelajaran yang membangun kesadaran kelas dan sekaligus keterampilan praktis.

Dalam konteks Nahdliyin, pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keberkahan, keikhlasan, dan niat yang lurus. Maka, pemberdayaan kaum Marhaen tidak berhenti pada peningkatan ekonomi semata, melainkan juga pada penguatan spiritualitas dan keadaban. Di banyak pesantren, para guru mengajarkan keterampilan sambil menanamkan nilai-nilai kemandirian

dan etika kerja. Konsep “ngabdi” menjadi pengikat antara ilmu dan pengabdian. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi sebuah proses integral yang menyatukan aspek duniawi dan ukhrawi dalam bingkai pendidikan.

Guru Marhaenis-Nahdliyin memahami bahwa membangun kesadaran kritis peserta didik adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Maka, mereka berusaha mengajak siswa menganalisis struktur sosial sekitarnya, mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan, dan mendorong munculnya gagasan serta tindakan perubahan. Konsep pendidikan Paulo Freire tentang *conscientization* menemukan resonansinya di sini. Guru bukan sekadar “pengisi gelas kosong,” tetapi fasilitator dialog transformatif. Siswa diajak melihat bahwa kemiskinan bukan takdir, melainkan persoalan struktural yang bisa diubah melalui ilmu dan keberanian bertindak.

Di berbagai daerah, guru-guru Nahdliyin-Marhaenis telah membuktikan bahwa pemberdayaan bukan slogan. Di Jawa Tengah, misalnya, sekelompok guru mengembangkan program “Sekolah untuk Petani Muda” di SMK pertanian berbasis pesantren. Siswa belajar bukan hanya soal pupuk dan irigasi, tetapi juga soal ketahanan pangan, koperasi tani, dan distribusi hasil pertanian. Di wilayah pesisir Sulawesi, ada guru yang membina anak-anak nelayan untuk membuat produk olahan ikan dan menjualnya melalui media sosial. Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan kontekstual mampu mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi dan sosial.

Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Namun, tidak semua guru mampu memanfaatkannya dengan perspektif pemberdayaan. Guru Nahdliyin-Marhaenis, dengan kesadaran ideologis dan historisnya, lebih siap mengisi ruang kurikulum ini dengan semangat emansipasi. Mereka tidak hanya memenuhi “profil pelajar Pancasila,” tetapi lebih dari itu: mereka membentuk pelajar yang punya keberanian untuk hidup merdeka secara ekonomi, sosial, dan spiritual.

Strategi pemberdayaan melalui pendidikan kontekstual juga menuntut guru menjadi kreator sumber belajar berbasis lokal. Di sebuah SMK

kehutanan, guru mengembangkan modul pembelajaran berbasis hutan adat, lengkap dengan kearifan lokal suku setempat. Siswa belajar tidak hanya soal ekosistem, tapi juga tentang hak masyarakat adat, konflik agraria, dan strategi advokasi. Pendekatan ini tidak hanya menghidupkan materi pelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial. Guru menjadi perancang masa depan dengan bahan baku dari kenyataan.

Salah satu kekuatan guru Marhaenis-Nahdliyin dalam pemberdayaan adalah kemampuan mereka membangun hubungan emosional yang kuat dengan siswa. Mereka tidak mengajar dari menara gading, tetapi hidup di tengah masyarakat yang sama dengan siswa. Mereka tahu betul sulitnya biaya sekolah, risiko putus sekolah, dan keterbatasan gizi yang dihadapi siswa. Dengan empati yang dalam, mereka tidak mengajar dari teks, tetapi dari pengalaman hidup. Empati ini menjelma menjadi motivasi internal siswa untuk terus belajar dan mengubah nasib.

Pemberdayaan juga berarti membuka akses. Banyak guru membentuk komunitas belajar, rumah baca, hingga kursus gratis di luar jam sekolah. Di daerah urban maupun rural, rumah guru sering kali menjadi tempat alternatif belajar bagi siswa yang kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan proyek institusi, tapi gerakan sosial. Ketika guru bergerak melampaui batasan formal sekolah, mereka menjadi pejuang pendidikan dalam arti sesungguhnya. Mereka tidak menunggu sistem berubah, mereka membuat perubahan dari bawah.

Dalam perspektif historis, tradisi pemberdayaan telah menjadi bagian dari perjuangan Nahdliyin dan Marhaenis sejak awal. KH Hasyim Asy'ari membangun pesantren sebagai pusat penguatan kapasitas umat, sedangkan Soekarno menjadikan pendidikan alat revolusi rakyat. Maka, guru hari ini yang meneruskan perjuangan itu berada dalam garis sejarah yang panjang. Mereka bukan sekadar pendidik, tapi pewaris ideologi pembebasan. Dan pembebasan itu dimulai dari mengenal siapa siswa kita, dari mana mereka datang, dan ke mana mereka ingin menuju.

■ Urgensi

*Menjadi* **Guru**  
**Nahdliyin**  
**Marhaenis**

*di* **VUCA dan Society 5.0**

Ideologi, Kebangsaan, Transformasi,  
dan Inovasi Pendidikan



# Bagian 5

REFLEKSI, REKOMENDASI,  
DAN VISI MASA DEPAN





## Jalan Sunyi Guru di Tengah Kekacauan Zaman

Di tengah deru kemajuan teknologi, kompleksitas sosial, dan pergulatan ideologi, guru menghadapi kenyataan sebagai profesi yang penuh paradoks. Ia disebut sebagai pilar utama pendidikan, namun seringkali dibiarkan berjalan sendiri di tengah keterbatasan sistemik. Guru dijunjung dalam retorika nasional, tetapi tak jarang dibiarkan berjibaku dengan gaji yang tidak layak, beban administratif yang berlebihan, dan tekanan sosial yang menuntut tanpa memberi ruang tumbuh. Dalam pusaran zaman yang oleh banyak ahli disebut sebagai era VUCA—volatile, uncertain, complex, dan ambiguous—guru seolah menempuh jalan sunyi: bekerja dalam kehe-ningan, namun menentukan arah masa depan bangsa.

Bab ini merupakan refleksi mendalam tentang jalan sunyi itu. Dalam tradisi Nahdliyin dan Marhaenis, guru adalah sosok pejuang yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menuntun, tidak hanya mendidik, tetapi juga menyalakan harapan. Jalan sunyi guru bukanlah tanda kelemahan, tetapi ekspresi dari keteguhan batin dan spiritualitas yang dalam. Sebagaimana santri yang berjuang dalam keheningan pesantren, atau kaum Marhaen yang bekerja tanpa suara di sawah dan pabrik, guru menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan dengan cara yang halus, namun revolusioner.

Dalam sejarahnya, banyak perubahan besar lahir dari ruang-ruang pendidikan yang sunyi. Revolusi sosial, kebangkitan intelektual, dan transformasi moral seringkali dirintis dari papan tulis dan buku catatan, bukan dari panggung politik. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak membutuhkan spotlight untuk bekerja. Ia berdiri di antara nilai Aswaja yang teduh dan semangat Marhaenisme yang membara—dua kekuatan ideologis yang menyatu dalam satu panggilan jiwa: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar dengan angka dan rapor, tetapi dengan kesadaran kritis, integritas moral, dan semangat gotong royong yang hidup dalam keseharian.

Bab ini juga menjadi ruang untuk menyadari realitas kehidupan guru secara utuh: bagaimana mereka bertahan dengan kondisi finansial yang sering tidak memadai, menghadapi degradasi moral yang menyelimuti

lingkungan sosial, dan sekaligus menantang era digital yang serba cepat dan tidak kenal kompromi. Namun di balik itu semua, guru tetap setia berdiri di garda depan, menyampaikan ilmu dengan cinta, mendampingi siswa dengan kesabaran, dan menabur nilai-nilai dengan konsistensi. Mereka bukan sekadar “tenaga pendidik,” tetapi menjadi “santri pejuang” yang menjahit ulang peradaban dari ruang-ruang kelas yang sederhana.

### **Tantangan Finansial, Moral, dan Intelektual Guru**

Dalam konteks pendidikan Indonesia, tantangan yang dihadapi guru tidak lagi semata-mata terletak pada proses mengajar dan mendidik. Ada realitas sistemik yang melingkupi mereka: keterbatasan finansial, degradasi moral lingkungan, serta krisis intelektual yang makin nyata. Ketiganya berkelindan dan menciptakan tekanan yang luar biasa bagi guru, terutama yang berada di daerah terpencil, pinggiran, atau yang mengabdikan diri di sekolah swasta kecil dengan dana terbatas. Guru yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa sering kali justru menjadi pihak yang paling tersisih dari perhatian kebijakan yang substansial.

Tantangan finansial merupakan luka lama yang belum juga tersembuhkan. Banyak guru masih menerima penghasilan yang jauh dari layak. Meskipun ada tunjangan sertifikasi, realisasinya tidak merata dan sering kali tidak tepat sasaran. Di satu sisi, guru diminta untuk menjadi profesional yang mampu berinovasi, sementara di sisi lain, kebutuhan hidup dasarnya belum terpenuhi. Ketimpangan ini melahirkan dilema moral: antara panggilan pengabdian dan kebutuhan pragmatis hidup sehari-hari. Guru Nahdliyin-Marhaenis, yang hidup dalam nilai-nilai keikhlasan dan perjuangan rakyat kecil, sering kali memendam beban ini dalam kesunyian dan doa.

Di banyak tempat, seorang guru merangkap sebagai tukang ojek, penjual pulsa, atau petani demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini bukan aib, tetapi potret getir dari sistem pendidikan yang belum berpihak. Perjuangan para guru di pelosok yang menyeberangi sungai, berjalan kaki berjam-jam, atau mengajar tanpa sarana layak bukan cerita romantis,

melainkan alarm keras bahwa struktur pendidikan kita masih penuh lubang. Bahkan di kota besar, banyak guru honorer harus mengajar puluhan jam demi menutupi kebutuhan dasar, sambil tetap menjalankan tugas administratif yang membebani.

Tantangan moral pun mengemuka dalam bentuk lain. Guru kini berada di tengah masyarakat yang rentan pada polarisasi, penyebaran hoaks, hedonisme digital, dan kekerasan simbolik yang merayakan ketenaran instan. Di lingkungan seperti ini, menjaga integritas dan nilai luhur menjadi pekerjaan berat. Guru tidak hanya harus mengajarkan kebenaran, tetapi juga mempertahankan keberanian untuk berkata benar. Ia menjadi titik pusat moralitas di tengah dunia yang nyaris kehilangan arah, menjadi lilin yang menerangi ruang gelap sekaligus mengorbankan dirinya perlahan.

Krisis moral juga menyentuh internal profesi guru. Ketika tekanan hidup meningkat dan penghargaan profesi menurun, tidak sedikit yang tergoda untuk melanggar nilai etik. Praktik jual beli nilai, manipulasi administrasi, atau ketidakjujuran akademik bukan hanya disebabkan oleh niat buruk, tetapi lahir dari sistem yang menjerat dan tidak manusiawi. Di sinilah pentingnya revitalisasi spiritualitas Nahdliyin dan komitmen emansipatoris Marhaenisme: sebagai sumber energi moral yang membebaskan dan menegakkan kembali martabat guru sebagai pengemban amanah pendidikan.

Secara intelektual, guru pun menghadapi tantangan besar. Revolusi teknologi informasi dan transformasi digital menuntut mereka untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Namun ironi muncul ketika pelatihan yang disediakan sering kali tidak kontekstual, berorientasi administratif, atau bahkan tidak sesuai kebutuhan. Guru seolah dikondisikan untuk mengikuti pelatihan demi pelatihan tanpa ruang refleksi kritis dan pembaruan pengetahuan yang esensial. Akibatnya, banyak guru terjebak dalam rutinitas teknis tanpa sempat menggali substansi ilmu dan makna pendidikan secara mendalam.

Guru Nahdliyin-Marhaenis memerlukan ruang intelektual yang membebaskan. Dalam tradisi pesantren dan gagasan kerakyatan, ilmu tidak semata transfer kognitif, melainkan cahaya yang menuntun jiwa dan membebaskan manusia dari belenggu kebodohan struktural. Sayangnya, dunia pendidikan modern sering kali meminggirkan proses pemaknaan dan lebih menekankan pada pengukuran angka. Di sinilah guru mengalami keterasingan epistemologis: ia diminta untuk mencerdaskan, tetapi dijauhkan dari kebebasan berpikir dan berdialog secara kritis dalam komunitas akademik yang sehat.

Lebih jauh, tantangan intelektual juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang mutakhir. Di banyak sekolah, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, atau fasilitas digital masih menjadi barang mewah. Sementara itu, guru dituntut untuk menguasai kurikulum baru, menerapkan model pembelajaran abad 21, dan memahami karakter siswa Gen Z yang memiliki pola pikir sangat berbeda. Dalam kekosongan ekosistem belajar seperti ini, guru sering kali harus menjadi pembelajar mandiri, mengakses internet di warung kopi, dan membeli buku dengan dana pribadi.

Kompleksitas tantangan finansial, moral, dan intelektual tersebut menjadi latar dari jalan sunyi yang ditempuh oleh guru. Mereka tidak hanya menghadapi dunia luar yang terus berubah, tetapi juga berjuang dalam dirinya sendiri—melawan kelelahan, kejenuhan, dan rasa ketidakberdayaan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan spiritual dan ideologis menjadi modal utama. Guru Nahdliyin-Marhaenis memiliki warisan nilai yang kaya: dari keikhlasan santri yang terus belajar walau dalam keterbatasan, hingga semangat perlawanan kaum Marhaen yang membangun kekuatan dari bawah.

Panggilan spiritual seorang guru bukan sekadar tugas profesional, tetapi bagian dari jihad kebudayaan. Di dalam ruang kelas, ia sedang menanamkan harapan pada generasi muda, bahkan ketika dirinya sendiri didera ketidakpastian. Dalam proses ini, guru bukan hanya pengajar, tetapi pemikul harapan. Ia membangun dunia dengan kata-kata, keteladanan,

dan doa yang tak pernah disebutkan dalam laporan kinerja. Dalam sunyi, ia membangun peradaban. Dalam gelap, ia menyalakan lentera nilai.

Guru yang kuat secara spiritual dan ideologis akan mampu menghadapi tantangan zaman dengan kepala tegak. Ia memahami bahwa panggilanannya lebih besar dari sekadar pekerjaan. Menjadi guru adalah menanggung sejarah, memikul nasib bangsa, dan merancang masa depan. Dengan semangat Aswaja, ia menjaga keseimbangan dan keteduhan. Dengan semangat Marhaenisme, ia menolak ketidakadilan dan menanamkan keberanian berpikir kritis pada murid-muridnya.

### **Menjaga Idealitas di Tengah Realitas Sekolah**

Di tengah arus pragmatisme dan tekanan administratif yang menggerus idealisme pendidikan, guru Nahdliyin-Marhaenis ditantang untuk menjaga nyala api idealitasnya. Dunia sekolah saat ini bukan lagi sekadar tempat belajar, tetapi telah menjadi ruang pertarungan antara nilai dan kepentingan, antara panggilan jiwa dan tuntutan sistem. Dalam realitas seperti ini, mempertahankan idealisme tidak mudah. Ia seringkali dianggap utopis, tidak realistis, bahkan disubversi oleh sistem birokrasi yang lebih memenangkan laporan, indikator numerik, dan citra lembaga.

Guru yang idealis sering dianggap “rebel” dalam sistem yang terlalu terstandarisasi. Mereka yang memperjuangkan pembelajaran bermakna, pendidikan karakter, dan dialog etik sering kali justru mendapat tekanan karena dianggap lambat, tidak memenuhi target, atau terlalu filosofis. Padahal justru di tangan guru-guru seperti inilah pendidikan menemukan maknanya yang terdalam: mendidik manusia sebagai manusia. Idealitas dalam konteks ini bukan sekadar mimpi, melainkan prinsip yang membentuk jati diri pendidik sejati.

Dalam tradisi Nahdliyin, idealitas bukanlah wacana kosong, melainkan bagian dari spiritualitas. Konsep keikhlasan, barokah ilmu, dan adab dalam menuntut ilmu adalah refleksi dari idealisme pendidikan yang berbasis nilai. Guru dalam tradisi ini bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga mentransmisikan akhlak, kesabaran, dan kasih sayang. Mereka

bukan hanya penutur kurikulum, tetapi penjaga nilai-nilai luhur yang tak tergantikan oleh teknologi atau robotisasi.

Demikian pula dalam semangat Marhaenisme, idealitas pendidikan merupakan bagian dari perjuangan kelas bawah untuk meraih pencerahan. Pendidikan harus membebaskan kaum tertindas dari kebodohan dan keterpinggiran. Guru adalah pejuang ideologis yang bertugas membangkitkan kesadaran kritis siswa, bukan sekadar menyampaikan pengetahuan pasif. Dalam konteks ini, guru Marhaenis tidak boleh tunduk pada tekanan pragmatisme pasar atau ketakutan terhadap kekuasaan. Ia harus berdiri tegak sebagai pendidik rakyat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Banyak guru dihadapkan pada beban kerja yang melelahkan, sistem penilaian yang tidak adil, serta keterbatasan sumber daya yang kronis. Idealitas mereka digerogeti oleh realitas yang tak bersahabat. Kurikulum sering berubah tanpa konsultasi bermakna, program pelatihan guru justru memberatkan, dan manajemen sekolah lebih sibuk dengan pelaporan administratif daripada proses pembelajaran yang bermutu.

Di tengah kondisi tersebut, mempertahankan idealitas berarti melawan ketidakpedulian. Guru harus tetap meyakini bahwa perubahan besar selalu dimulai dari ruang kelas. Mereka perlu terus menyuarakan pentingnya pendidikan humanistik, relasi dialogis antara guru dan murid, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap mata pelajaran. Idealitas bukan sesuatu yang harus dikorbankan atas nama efisiensi, melainkan harus dijaga sebagai inti dari pendidikan sejati.

Penting pula menyadari bahwa idealitas tidak berarti anti-perubahan. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah mereka yang mampu merangkul inovasi tanpa kehilangan arah, memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan nilai, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa tercerabut dari akar budaya dan spiritualitasnya. Idealitas yang kokoh justru menjadi jangkar agar guru tidak terombang-ambing oleh arus globalisasi yang sering kali menihilkan lokalitas dan jati diri bangsa.

Dalam menghadapi realitas sekolah yang kompleks, guru memerlukan komunitas yang mendukung. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan individu. Diperlukan kolaborasi antar guru, jejaring antar sekolah, serta dukungan dari masyarakat dan tokoh lokal. Komunitas guru yang memiliki kesamaan visi dan semangat ideologis dapat menjadi benteng pertahanan idealitas di tengah realitas yang keras. Di sinilah pentingnya menghidupkan forum-forum guru Nahdliyin dan Marhaenis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif dan strategis.

Ketika idealitas tetap dipertahankan dalam tindakan, maka pendidikan tidak kehilangan maknanya. Guru akan tetap menjadi sosok yang menginspirasi, bukan sekadar operator kurikulum. Murid akan melihat keteladanan, bukan hanya mendengar teori. Sekolah akan menjadi ruang transformasi, bukan sekadar institusi formal. Dan bangsa ini akan memiliki masa depan yang dibangun dari nilai, bukan sekadar data.

### **Guru sebagai “Santri Pejuang” di Abad Digital**

Di tengah gempuran era digital yang serba cepat, guru dituntut menjadi lebih dari sekadar pengajar. Ia mesti menjadi penjaga nilai, pemandu moral, sekaligus penggerak transformasi sosial. Dalam tradisi Nahdliyin, guru tidak hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang *santri pejuang*—yakni pribadi yang menapaki jalan ilmu dengan rendah hati, berjuang dalam keikhlasan, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan umat. Di abad digital ini, semangat itu semakin relevan untuk diaktualisasikan dengan wajah baru, yaitu sebagai *santri pejuang digital* yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar kultural dan spiritualnya.

Sebagai *santri*, seorang guru dibentuk oleh tradisi keilmuan yang bersumber dari nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menghargai proses belajar sebagai ibadah, menjunjung tinggi adab terhadap ilmu, dan mengintegrasikan kecerdasan spiritual dalam setiap aktivitas mengajar. Sedangkan sebagai *pejuang*, ia tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga memaknai pendidikan sebagai perjuangan untuk kemerdekaan berpikir, pembebasan dari belenggu kebodohan, dan pencerahan moral.

Ketika dua identitas ini berpadu dalam sosok guru, maka terbentuklah pribadi pendidik yang tahan banting, adaptif, dan berjiwa kepemimpinan.

Namun tantangan menjadi santri pejuang di abad digital tidak ringan. Di satu sisi, guru dihadapkan pada ketertinggalan infrastruktur, kesenjangan digital (digital divide), dan keterbatasan literasi teknologi. Di sisi lain, guru juga harus menghadapi penetrasi budaya luar yang kerap tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan agama. Media sosial menyajikan informasi yang tidak terseleksi, algoritma membentuk polarisasi ideologis, dan siswa sering terperangkap dalam konten yang bersifat manipulatif. Dalam situasi seperti ini, peran guru menjadi krusial untuk membimbing, menyaring, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi ke arah yang membangun.

Santri pejuang digital bukanlah sosok yang anti-teknologi. Sebaliknya, ia harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi sebagai instrumen dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan. Ia menjadikan internet sebagai ladang amal, menjadikan media sosial sebagai sarana literasi, dan menjadikan aplikasi pembelajaran sebagai medium transformasi sosial. Namun ia tetap menjaga nilai-nilai akhlak, tidak kehilangan orientasi, dan tidak terjebak pada euforia digitalisasi yang dangkal. Ia tahu kapan harus “online”, tetapi juga paham makna “hening” dan kontemplasi dalam membangun karakter peserta didik.

Dalam sejarah Indonesia, banyak ulama yang menjadi pelopor pendidikan dan perlawanan di tengah keterbatasan. KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, dan Bung Karno adalah contoh figur yang menyeimbangkan spiritualitas, nasionalisme, dan pemikiran progresif. Mereka adalah “santri pejuang” dalam konteks zamannya. Di era Society 5.0, peran itu kini beralih ke pundak guru. Ia adalah tokoh perubahan yang menyalakan obor kesadaran di tengah kegelapan disinformasi dan fragmentasi nilai.

Keterlibatan guru dalam membangun narasi pendidikan yang membebaskan sangat bergantung pada kesadarannya akan misi keilmuan dan kemanusiaannya. Ia tidak cukup hanya paham tentang teknologi, tetapi harus mampu mendidik hati dan akal. Ia harus membangun sinergi antara kecerdasan intelektual, kecakapan digital, dan ketulusan spiritual. Ia harus

menjadi contoh bagaimana manusia modern tetap bisa bersikap arif, bersahaja, dan bersikap kritis tanpa menjadi sinis atau kehilangan arah.

Dalam praktiknya, santri pejuang di sekolah bukan berarti harus berserban atau berbicara retorik tentang agama. Ia cukup hadir dengan keikhlasan, mengajar dengan semangat, menyapa siswa dengan empati, dan menggunakan teknologi untuk menjangkau yang jauh. Ketika ia membuat konten edukatif, membimbing diskusi daring, atau menulis refleksi pendidikan di media sosial, maka di situlah perjuangannya berlangsung. Perjuangan yang tidak tampak seperti di medan tempur, tetapi berdampak dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Guru juga perlu menanamkan jiwa *keulamaan* dalam menghadapi dunia digital. Ia harus bersikap hati-hati terhadap hoaks, tidak ikut dalam provokasi politik yang memecah belah, dan membimbing siswa untuk menjadi warga digital yang beretika. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* (tujuan-tujuan luhur Islam) dapat dijadikan sebagai bingkai untuk menyaring penggunaan teknologi: menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Transformasi peran guru ke dalam paradigma *santri pejuang digital* juga harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang berpihak. Negara tidak boleh membiarkan guru berjuang sendiri. Dibutuhkan pelatihan teknologi berbasis nilai, insentif untuk guru-guru di daerah tertinggal, dan platform digital yang sesuai dengan kearifan lokal. Sekolah perlu menyediakan ekosistem yang mendukung kreativitas guru dalam menghasilkan konten yang mencerahkan dan membebaskan.

Akhirnya, santri pejuang adalah sosok yang berjalan dengan cahaya ilmu dan keteguhan iman. Di tengah kekacauan zaman, ia tetap menyampaikan kebenaran, menyalakan semangat belajar, dan merawat kemanusiaan. Ia tidak populer di panggung politik, tidak viral di media sosial, tetapi kehadirannya membekas dalam sejarah hidup peserta didik. Di tangan santri pejuang inilah masa depan Indonesia dibentuk—bukan dengan kekerasan atau kemewahan, tetapi dengan kasih sayang, keteguhan, dan ilmu yang berkeadaban.

## Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah dan LPTK

Pada titik ini, setelah menjelajahi dinamika historis, filosofis, dan praksis tentang guru Nahdliyin-Marhaenis dalam menghadapi zaman disrupsi, kita sampai pada satu simpulan penting: bahwa perubahan sistemik tidak dapat disandarkan semata pada individu guru. Dibutuhkan ekosistem yang suportif, sistem pendidikan guru yang relevan, dan dukungan kebijakan negara yang sungguh-sungguh berpihak pada pendidikan transformatif berbasis nilai. Oleh sebab itu, bab ini dihadirkan sebagai ruang untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan aktor-aktor kultural yang memiliki peran dalam menentukan arah pendidikan nasional.

Dalam sejarah Indonesia, peran negara dalam pendidikan bukan sekadar fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penentu orientasi ideologis dan moralitas publik. Namun ironisnya, banyak kebijakan pendidikan hari ini cenderung elitis, terlalu teknokratis, dan kurang menyentuh akar persoalan yang dialami guru di lapangan—terutama guru yang berada di pinggiran, di madrasah kecil, sekolah vokasi yang terpencil, atau komunitas pesantren yang mandiri. Maka, semangat Marhaenisme dan Islam Nusantara harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang memuliakan guru bukan hanya dari gelar, tetapi dari perjuangan sunyi mereka.

Perlu disadari bahwa LPTK hari ini masih banyak yang memproduksi lulusan dengan kurikulum seragam, minim pemihakan lokal, dan cenderung kering nilai. Reorientasi LPTK harus dilakukan secara radikal tetapi bijak, dengan menjadikan pengalaman-pengalaman guru akar rumput sebagai sumber pengetahuan praksis, bukan hanya bahan pelengkap praktik lapangan. Buku ini mengusulkan agar LPTK tidak lagi hanya menjadi tempat pengajaran teori pendidikan Barat, tetapi juga menjadi laboratorium sosial untuk mendalami pedagogi pesantren, praksis emansipatoris ala Soekarno, dan nilai gotong royong khas Nahdlatul Ulama.

Dalam konteks VUCA dan Society 5.0, negara dan LPTK perlu mengembangkan sistem rekognisi dan apresiasi terhadap guru-guru yang telah menjalankan pendidikan secara profetik dan bermakna, meskipun

tanpa publikasi ilmiah atau capaian administratif yang impresif. Rekognisi berbasis nilai ini lebih menghargai kerja kemanusiaan, ketulusan dalam mendidik, dan dampak sosial dari proses pembelajaran. Dengan demikian, sistem karier guru tidak semata bertumpu pada angka kredit, tetapi juga pada nilai-nilai kehidupan dan perubahan yang mereka hasilkan di komunitas.

Rekomendasi strategis lainnya menyangkut pentingnya pendekatan pendidikan guru yang multidimensi. Guru masa kini harus disiapkan sebagai insan beriman, berilmu, dan beraksi sosial. Pendekatan ini tidak dapat dilakukan hanya melalui pelatihan teknis, tetapi melalui formasi nilai sejak masa pendidikan guru. Pendidikan nilai tidak sekadar pengajaran etika, tetapi pengasahan kesadaran historis, spiritualitas inklusif, dan keberanian moral. Dalam hal ini, pengalaman santri dan aktivisme Marhaenis bisa menjadi model pembelajaran.

Dalam relasi antara negara dan ormas Islam, NU memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas pendidikan akar rumput. Tradisi intelektual NU, jejaring pesantren, dan kedekatannya dengan realitas kultural masyarakat menjadikan organisasi ini aktor kunci dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan yang relevan, berkeadilan, dan transformatif. Oleh sebab itu, kemitraan negara dan NU harus dibangun tidak semata dalam bentuk program-program formal, tetapi dalam bentuk dialog ideologis dan penataan arah pendidikan berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga perlu digandeng bukan hanya sebagai tempat praktik kerja siswa, tetapi sebagai mitra ideologis dalam mendidik generasi muda. Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga dituntut berpartisipasi dalam pendidikan karakter, penguatan nilai keadilan sosial, dan penyediaan akses terhadap teknologi pendidikan yang ramah marhaen. Konsep corporate social responsibility (CSR) perlu didesain ulang menjadi *educational social justice responsibility*.

Peran LPTK dan pemerintah juga harus dipadukan dengan inisiatif komunitas dan jaringan alumni pesantren, madrasah, serta SMK yang progresif. Jaringan ini bisa menjadi motor perubahan dari bawah, mengadvokasi kebijakan berbasis bukti, dan menyalurkan suara guru yang selama ini tidak terdengar dalam forum-forum pengambilan keputusan. Buku ini mengusulkan mekanisme forum partisipatif berbasis digital yang menghubungkan guru-guru Nahdliyin-Marhaenis untuk saling berbagi praktik baik, kritik kebijakan, dan inovasi pendidikan lokal.

Akhir kata, Bab 13 ini bukan sekadar penutup dari rangkaian narasi panjang tentang guru Nahdliyin-Marhaenis. Ia adalah ikhtiar untuk menjembatani antara ide dan kebijakan, antara cita-cita dan strategi. Rekomendasi yang disampaikan tidak dimaksudkan sebagai solusi tunggal, tetapi sebagai pemantik diskusi yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih memberdayakan. Pendidikan adalah kerja kolektif. Dan untuk itu, negara, kampus, ormas, dan komunitas harus saling bahu membahu.

### **Dukungan Kebijakan untuk Guru Akar Rumput**

Guru-guru akar rumput adalah ujung tombak pendidikan bangsa, mereka yang bekerja di sekolah-sekolah pelosok, di madrasah kecil, di lembaga keagamaan berbasis komunitas, dan di SMK yang melayani kaum marjinal. Mereka hadir bukan semata karena tugas struktural, tetapi karena panggilan nilai. Dalam diri mereka menyatu keikhlasan santri dan semangat Marhaen—berjuang dalam keterbatasan, membangun peradaban dari titik paling bawah. Sayangnya, kebijakan pendidikan nasional sering kali belum menyentuh kebutuhan esensial guru jenis ini. Dukungan terhadap mereka harus ditransformasikan menjadi kebijakan yang partisipatif, afirmatif, dan transformatif.

Kebijakan pendidikan selama ini cenderung menekankan indikator kinerja yang bersifat administratif dan teknokratis. Guru dinilai dari angka kredit, publikasi, jumlah pelatihan, atau sertifikasi. Padahal, guru akar rumput lebih sering menghadapi tantangan kontekstual: kurangnya akses teknologi, minimnya fasilitas, tekanan sosial-budaya lokal, dan beban kerja

yang tidak tercatat dalam dokumen formal. Karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan yang berpihak kepada realitas, bukan sekadar pada target institusional.

Dukungan kebijakan yang paling mendesak adalah kebijakan afirmatif berbasis wilayah dan situasi sosial. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen pemetaan yang mendetail untuk mengidentifikasi guru-guru yang berada di zona tertinggal, terdepan, dan termarginalkan. Bukan hanya berdasarkan letak geografis, tetapi juga berdasarkan kesenjangan sumber daya, penghasilan, dan akses terhadap peningkatan kompetensi. Guru yang mengajar di desa terisolasi seharusnya mendapat perlakuan berbeda dibanding guru di pusat kota.

Kebijakan afirmatif tersebut tidak hanya soal insentif finansial. Yang lebih penting adalah menciptakan iklim kerja yang adil, sehat, dan bermartabat. Misalnya, pengurangan beban administratif bagi guru yang mengajar multi-level kelas, kemudahan akses pelatihan daring dengan dukungan kuota internet dari pemerintah, serta kesempatan mendapatkan rekognisi atas inovasi yang bersifat lokal dan kontekstual. Pemerintah harus mengembangkan platform digital untuk menampung inovasi lokal guru akar rumput dan memfasilitasi publikasinya.

Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, dukungan kebijakan harus pula mengakui keberadaan pendidikan nonformal dan pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren, madrasah diniyah, serta lembaga pendidikan keagamaan rakyat. Banyak guru di institusi ini tidak berstatus ASN, bahkan tidak bersertifikat. Namun, dedikasi dan pengaruh mereka terhadap karakter generasi muda luar biasa besar. Maka, bentuk dukungan bagi mereka tidak bisa disamakan dengan guru di sekolah negeri, melainkan melalui skema pembiayaan dan pelatihan yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan komunitas.

Guru akar rumput juga sering kali terjebak dalam mekanisme rekrutmen dan distribusi guru yang tidak adil. Banyak lulusan LPTK enggan ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sementara guru-guru lokal yang setia di komunitas justru tak mendapat pengakuan formal.

Diperlukan reformasi dalam pola distribusi guru berbasis prinsip *community-based allocation*, di mana prioritas diberikan kepada mereka yang telah lama mengabdikan di wilayah tersebut, dengan pemberdayaan melalui pendidikan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu merombak paradigma pembinaan guru. Selama ini pembinaan cenderung satu arah: dari pusat ke daerah. Padahal, banyak kearifan lokal dan praktik baik yang justru lahir dari pinggiran. Melalui model *reverse mentoring*, guru-guru akar rumput dapat menjadi narasumber untuk guru kota, memperkaya pemahaman tentang keberagaman, keteguhan moral, dan kreativitas dalam keterbatasan. Sistem pelatihan pun perlu dirombak agar memberi ruang bagi praktik-praktik kontekstual dan narasi pengalaman nyata.

Dukungan lain yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan komunitas belajar berbasis lokal. Banyak guru akar rumput merasa terisolasi secara intelektual dan emosional. Pemerintah dan LPTK perlu memfasilitasi terbentuknya jejaring belajar, komunitas reflektif, dan platform kolaboratif antar-guru. Ini bukan hanya soal peningkatan kompetensi, tetapi juga soal memperkuat solidaritas profesi dan rasa percaya diri sebagai agen perubahan.

Secara filosofis, guru akar rumput adalah penjaga peradaban. Mereka menjaga nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan keberanian dalam menghadapi kemiskinan struktural. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak kepada mereka bukanlah kebijakan belas kasihan, melainkan bentuk keadilan struktural dan penghargaan atas kontribusi tak ternilai dalam pembangunan manusia.

Pemerintah yang sungguh berpihak pada pendidikan harus mengawal keberlanjutan profesi ini dengan pendekatan yang humanistik dan kontekstual.

Diperlukan pula keterlibatan aktif ormas Islam, lembaga zakat, dan dunia usaha dalam mendukung guru akar rumput. Bantuan beasiswa, program mentoring, penyediaan laptop, atau dukungan operasional lembaga pendidikan rakyat bisa menjadi bentuk konkret kepedulian.

Namun, semuanya harus dilakukan dalam kerangka membangun kemandirian dan martabat, bukan sekadar amal jariyah yang bersifat sesaat.

Akhirnya, dukungan kebijakan terhadap guru akar rumput tidak boleh bersifat jangka pendek atau proyek tahunan. Harus ada grand design kebijakan berkelanjutan yang berpihak pada mereka. Ini mencakup aspek rekrutmen, distribusi, peningkatan mutu, dan kesejahteraan. Semua itu dijalankan dengan prinsip inklusi, keadilan, dan keberpihakan pada kaum marjinal. Negara harus hadir sebagai fasilitator nilai, bukan sekadar penyedia regulasi.

### **Reorientasi Kurikulum LPTK agar Kontekstual**

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sejatinya merupakan jantung peradaban pendidikan bangsa, tempat lahirnya calon guru yang kelak menjadi pembentuk karakter generasi masa depan. Namun, dalam realitasnya, banyak kurikulum LPTK yang tertinggal dari dinamika zaman, terlalu teoretik, dan kurang kontekstual terhadap realitas sosial tempat guru kelak mengabdikan. Kurikulum yang masih terpaku pada dikotomi antara teori dan praktik, antara pedagogi normatif dan tantangan empiris, menyebabkan banyak lulusan LPTK tidak siap menjawab persoalan riil di lapangan.

Dalam semangat Nahdliyyin-Marhaenis, pendidikan guru seharusnya bukan hanya membentuk kompetensi kognitif, tetapi juga menanamkan kesadaran historis, kepekaan sosial, dan komitmen ideologis pada keadilan. Calon guru harus dibekali bukan hanya dengan metode mengajar, tetapi juga dengan pemahaman tentang relasi kuasa, struktur ketimpangan, serta nilai-nilai spiritualitas dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks inilah, kurikulum LPTK perlu direorientasi menjadi kurikulum yang berwajah kerakyatan dan keberagaman.

Kurikulum LPTK terlalu lama mendewakan pendekatan pedagogi Barat yang seragam dan generalis. Padahal, realitas pendidikan di Indonesia sangatlah plural dan sarat dengan warna lokalitas. Guru yang ditempatkan di sekolah terpencil akan menghadapi tantangan yang berbeda dengan guru di perkotaan. Demikian pula, guru di lingkungan pesantren, madrasah

diniyah, atau komunitas adat tentu menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan dialogis. Maka, LPTK harus membangun diferensiasi kurikulum berbasis wilayah dan karakter komunitas pendidikan.

Salah satu problem laten adalah minimnya integrasi antara mata kuliah kependidikan dengan isu-isu sosial kontemporer. Sebagai contoh, hanya sedikit LPTK yang mengintegrasikan isu literasi digital kritis, kesetaraan gender, pluralisme agama, ketahanan pangan, dan keadilan ekologis dalam kurikulum mereka. Padahal, guru hari ini harus menjadi fasilitator yang sadar konteks, mampu membaca dinamika lokal dan global, serta membangun pembelajaran yang relevan dan membebaskan.

Kurikulum LPTK juga perlu memperbanyak konten berbasis nilai dan etika. Ini bukan hanya soal pendidikan karakter sebagai slogan normatif, melainkan pendidikan nilai dalam makna filosofis. Guru harus dibekali dengan fondasi pemikiran Al-Ghazali, Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, hingga pemikiran sosial-politik Soekarno. Dengan demikian, calon guru dapat memahami profesi mereka sebagai bagian dari perjuangan peradaban, bukan sekadar pekerjaan mencari nafkah.

Dalam perspektif aplikatif, kurikulum LPTK perlu mereposisi praktik lapangan sebagai elemen utama, bukan pelengkap. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kampus Mengajar harus diarahkan untuk menjadi medan reflektif yang mempertemukan mahasiswa dengan realitas pendidikan marjinal, bukan hanya simulasi mengajar di sekolah negeri favorit. Ini sekaligus menanamkan semangat pengabdian dan kesetaraan sosial sejak dini.

LPTK juga harus menjadi pelopor pembelajaran kolaboratif lintas disiplin. Mahasiswa calon guru tidak cukup hanya belajar pedagogi; mereka juga harus dibekali dengan wawasan antropologi, filsafat, komunikasi sosial, ekonomi kerakyatan, dan bahkan politik pendidikan. Interdisiplinaritas ini penting agar guru mampu menganalisis secara holistik permasalahan pendidikan dan tidak terjebak pada simplifikasi teknis.

Aspek lain yang sering dilupakan adalah kemampuan adaptif terhadap teknologi dan dunia digital. Kurikulum LPTK harus melampaui batas

keterampilan TIK dasar, dan bergerak ke arah digital humanism. Guru harus mampu memahami bagaimana teknologi memengaruhi psikologi siswa, bagaimana algoritma memengaruhi perilaku belajar, dan bagaimana membangun ruang kelas virtual yang tetap bernuansa nilai dan etika.

Selain konten, metode pengajaran di LPTK juga harus dirombak. Dosen-dosen LPTK perlu didorong untuk mengembangkan pedagogi kritis—mengajak mahasiswa berdiskusi, menganalisis kasus, membuat aksi sosial, menulis refleksi, dan memecahkan masalah riil pendidikan. Paradigma dosen sebagai penceramah tunggal sudah usang, digantikan oleh peran sebagai fasilitator kesadaran dan pembentuk karakter intelektual yang tangguh.

Dalam konteks Nahdliyin-Marhaenis, penting bagi LPTK untuk menjalin kemitraan dengan pesantren, organisasi Islam, komunitas adat, dan masyarakat sipil lainnya. Mahasiswa harus diberi ruang untuk mengalami dinamika pembelajaran berbasis masyarakat, agar sejak awal mereka memiliki akar ideologis dan sensitivitas kultural yang kuat. LPTK tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus menjadi rumah ide dan aksi sosial.

Transformasi kurikulum LPTK juga mensyaratkan reformasi kelembagaan. Pimpinan LPTK harus memiliki visi keberpihakan terhadap pendidikan marjinal dan memiliki komitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Dana riset dan pengabdian harus dialokasikan untuk eksplorasi model pendidikan berbasis lokalitas, bukan hanya untuk mengejar publikasi jurnal yang seringkali tidak relevan dengan konteks Indonesia.

Secara struktural, pemerintah melalui Kemendikbudristek perlu merumuskan Standar Nasional Pendidikan Guru yang berbasis kontekstualitas dan keadilan sosial. Dokumen ini harus melampaui pendekatan kompetensi minimalis, dan mulai menekankan pada keberdayaan guru sebagai agen perubahan sosial, penjaga nilai-nilai kebangsaan, dan pelayan masyarakat akar rumput.

Reorientasi kurikulum LPTK bukan pekerjaan satu malam, melainkan proyek jangka panjang yang melibatkan banyak pihak. Dibutuhkan

sinergi antara LPTK, pemerintah daerah, komunitas pendidikan, ormas keagamaan, dan dunia usaha. Bersama-sama mereka harus membangun peta jalan pembaruan pendidikan guru yang relevan, progresif, dan transformatif.

Dalam banyak pengalaman negara maju, pembaruan pendidikan guru menjadi tonggak utama transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan. Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan membuktikan bahwa investasi besar pada pendidikan guru akan menghasilkan perubahan jangka panjang yang kokoh. Indonesia tidak boleh tertinggal. LPTK harus menjadi titik tolak kebangkitan pendidikan nasional.

LPTK juga perlu mulai mengembangkan program sertifikasi alternatif berbasis komunitas dan praktik sosial. Sertifikasi yang tidak hanya mengukur kemampuan mengajar, tetapi juga komitmen terhadap pengabdian sosial, keberpihakan terhadap siswa marginal, serta kemampuan membangun jaringan kolaboratif di tingkat lokal.

Reformasi ini harus didukung oleh regulasi yang jelas, dana yang memadai, dan political will yang kuat. Pemerintah tidak boleh membiarkan LPTK bekerja sendiri. Dukungan program revitalisasi kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, dan kemitraan internasional harus menjadi bagian dari strategi nasional reformasi pendidikan.

Akhirnya, reorientasi kurikulum LPTK adalah keniscayaan jika kita ingin menciptakan guru yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijak; tidak hanya kompeten, tetapi juga berpihak; tidak hanya profesional, tetapi juga visioner. Inilah saatnya LPTK membangun “guru baru”—guru Nahdliyin-Marhaenis yang mampu menjembatani nilai tradisi dan inovasi, spiritualitas dan sains, iman dan teknologi.

### **Sistem Rekognisi untuk Guru yang Berbasis Nilai**

Sistem rekognisi bagi guru di Indonesia selama ini masih cenderung terfokus pada aspek administratif dan kuantitatif. Indikator-indikator seperti angka kredit, sertifikasi, dan kelengkapan berkas menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja guru. Pendekatan ini, meskipun penting,

gagal menangkap dimensi terdalam dari pengabdian seorang guru, terutama guru yang bekerja di wilayah tertinggal, komunitas marjinal, atau di lingkungan pesantren. Mereka yang mengajar dengan nilai, dedikasi, dan kesetiaan ideologis kerap terabaikan dari sistem penghargaan yang ada.

Padahal, dalam tradisi Nahdliyin dan pemikiran Marhaenis, pengakuan terhadap perjuangan seseorang tidak semata-mata dilihat dari ukuran formal, melainkan dari nilai-nilai yang melekat dalam pengabdianannya. Guru yang menjadi pelita di tengah kemiskinan, yang menyemai toleransi di tengah radikalisme, dan yang menanamkan karakter di tengah kekosongan moral adalah pahlawan sejati yang membutuhkan sistem rekognisi berbasis nilai. Inilah panggilan moral untuk membangun sistem rekognisi yang lebih adil dan manusiawi.

Sistem rekognisi berbasis nilai harus mampu mengenali kerja-kerja pendidikan yang sunyi, tersembunyi, tetapi berdampak besar. Sebagai contoh, guru yang secara konsisten mencegah kekerasan simbolik di sekolah, yang menjadi jembatan budaya di daerah konflik, atau yang merawat semangat belajar anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapat penghargaan formal. Ini bukan hanya soal insentif, tetapi tentang membangun iklim pendidikan yang menghormati kerja-kerja bermakna.

Untuk itu, pemerintah dan institusi pendidikan harus merumuskan indikator baru dalam sistem penilaian guru. Indikator ini tidak lagi hanya berdasarkan volume karya tulis atau jam mengajar, melainkan mencakup dimensi etika, spiritualitas, keterlibatan sosial, serta inovasi dalam membentuk karakter murid. Rekognisi berbasis nilai ini akan membangun motivasi intrinsik, bukan hanya kompetensi administratif yang kering makna.

Sistem ini juga harus melibatkan masyarakat. Komite sekolah, wali murid, tokoh agama, dan komunitas lokal bisa memberikan penilaian terhadap guru berdasarkan interaksi mereka di luar kelas. Guru bukan hanya agen pembelajaran, tetapi juga agen sosial yang mewarnai relasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, rekognisi berbasis nilai harus bersifat holistik dan multisumber.

Salah satu inspirasi sistem rekognisi berbasis nilai dapat diambil dari tradisi pesantren, di mana keberkahan ilmu tidak selalu diukur dari ijazah atau sertifikat, tetapi dari keistiqamahan guru dalam menanamkan adab, kejujuran, dan kesungguhan. Dalam konteks ini, rekognisi juga berarti memperkuat penghargaan non-material yang memberi makna spiritual dan simbolik bagi guru.

Di sisi lain, gagasan Marhaenisme mengajarkan bahwa pengakuan harus berpihak pada mereka yang tertindas dan tak terdengar. Guru-guru honorer yang tetap mengabdikan dengan gaji minim, guru di pelosok yang tak pernah diliput media, dan guru yang bertugas di wilayah konflik adalah kaum Marhaen dalam dunia pendidikan. Rekognisi berbasis nilai adalah bentuk keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta LPTK, dapat mengembangkan *Teacher Impact Index*, yaitu indeks rekognisi yang menilai dampak sosial dan transformatif guru. Indeks ini dapat mencakup kontribusi pada pembentukan karakter, keberhasilan dalam membangun budaya toleransi, peningkatan partisipasi siswa miskin, dan inovasi pedagogis yang membebaskan. Dengan indeks ini, guru tidak hanya dilihat sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai pemimpin perubahan sosial.

Rekognisi berbasis nilai juga menuntut perubahan budaya organisasi sekolah. Kepala sekolah harus mampu membangun sistem penghargaan internal yang mendorong nilai-nilai pengabdian, solidaritas, dan empati. Guru yang bekerja secara kolektif, yang mendampingi siswa di luar jam pelajaran, dan yang menjadi teladan moral, harus diberi panggung dan ruang untuk diakui.

Di samping itu, media massa dan institusi penghargaan pendidikan juga perlu direorientasi. Banyak penghargaan pendidikan yang terlalu teknokratis dan berbasis popularitas, padahal banyak guru sejati yang tidak tampil ke publik tetapi berdampak dalam. Media pendidikan dan platform digital bisa diarahkan untuk mengangkat narasi guru yang membumi, yang setia pada nilai, dan yang menjadi penggerak perubahan.

Rekognisi berbasis nilai juga harus memperhatikan dimensi spiritual. Guru yang istiqamah dalam menjalankan tugas sebagai ibadah, yang menjadikan ruang kelas sebagai medan dakwah kebajikan, dan yang memandang murid sebagai amanah Tuhan, perlu mendapat apresiasi secara institusional. Dalam Islam, guru adalah “pewaris para nabi”—penghargaan kepada mereka adalah penghargaan kepada ilmu itu sendiri.

Dalam konteks implementasi, perlu dibentuk *Komite Rekognisi Guru* di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur pemerintah, guru senior, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Komite ini bertugas menyeleksi dan memberikan penghargaan berbasis nilai setiap tahun, dengan indikator-indikator yang disusun secara partisipatif dan kontekstual.

Sistem rekognisi ini juga harus memastikan tidak ada diskriminasi terhadap guru di luar kota besar. Guru di perbatasan, di pulau-pulau kecil, di wilayah adat, dan di daerah minoritas harus mendapat porsi pengakuan yang setara. Prinsipnya adalah keadilan spasial dan kultural, bukan hanya keadilan administratif.

Lebih jauh, rekognisi berbasis nilai dapat menjadi landasan bagi promosi jabatan, beasiswa pendidikan lanjut, dan kesempatan riset atau pelatihan ke luar negeri. Dengan demikian, guru yang mengabdikan di medan sulit tetap memiliki jalan karier yang terbuka luas. Ini sejalan dengan prinsip Islam dan Marhaenisme yang menjunjung kerja keras, ketulusan, dan perjuangan membela kaum tertindas.

Dalam sistem seperti ini, guru tidak lagi harus memburu angka kredit yang kaku, melainkan bisa berfokus pada proses membentuk manusia. Ini akan membangun iklim pendidikan yang lebih sehat, kolaboratif, dan bermakna. Guru kembali menjadi pusat nilai dalam sistem pendidikan nasional.

Rekognisi juga harus bersifat lintas generasi. Guru senior yang telah purna tugas tetapi memiliki pengaruh besar di masyarakat, serta guru muda yang melakukan terobosan di sekolah, sama-sama layak diangkat kisah dan kontribusinya. Kita memerlukan narasi pendidikan yang menginspirasi, bukan sekadar angka statistik.

Akhirnya, sistem rekognisi berbasis nilai adalah bentuk penghormatan terhadap kerja intelektual dan spiritual guru. Ia mengembalikan makna sejati profesi guru sebagai pengabdikan kemanusiaan, penjaga nilai-nilai luhur, dan pelita dalam zaman yang makin gelap oleh komersialisasi dan mekanisme.

Transformasi sistem rekognisi ini adalah bagian dari revolusi pendidikan yang lebih besar. Bila negara sungguh-sungguh ingin membangun peradaban berbasis ilmu dan keadilan, maka mengapresiasi guru secara adil, bernilai, dan manusiawi adalah langkah yang tak bisa ditunda.

### **Pendidikan Guru Multidimensi: Iman, Ilmu, dan Aksi**

Pendidikan guru yang hanya menekankan pada aspek kognitif dan metodologi pengajaran semata tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas zaman. Dalam kerangka Nahdliyin-Marhaenis, pendidikan guru haruslah bersifat multidimensi, menyentuh sisi iman yang transenden, ilmu yang mencerahkan, serta aksi nyata yang membebaskan. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membentuk guru sebagai agen perubahan yang utuh dan berintegritas.

Iman dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kesalehan personal, tetapi juga kesadaran spiritual yang menjadi pondasi moral dan etika profesi. Guru dengan landasan iman yang kuat akan menjadikan pengajaran sebagai bentuk ibadah, bukan sekadar rutinitas administratif. Ia sadar bahwa mendidik adalah perintah ilahiah, dan murid adalah amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan dimuliakan. Aspek ini sangat kuat dalam tradisi pesantren dan nilai-nilai Aswaja, di mana ilmu selalu dibarengi dengan adab dan hati yang bersih.

Ilmu menjadi dimensi kedua yang penting. Dalam perspektif Marhaenis, ilmu bukan hanya pengetahuan akademis, tetapi alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Guru yang berilmu tidak hanya paham teori dan kurikulum, tetapi mampu membaca realitas sosial, menganalisis ketimpangan, dan mengembangkan gagasan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan

masyarakat. Ilmu yang dikuasainya harus mengakar dan membumi, bukan elitis dan menjauh dari kenyataan.

Namun iman dan ilmu saja tidak cukup. Aksi adalah dimensi ketiga yang menyempurnakan pendidikan guru. Aksi berarti komitmen untuk bergerak, mengimplementasikan nilai-nilai yang diyakini dalam praktik kehidupan. Guru yang mengajarkan kejujuran, harus menjadi pribadi yang jujur. Guru yang membela kaum lemah, harus hadir dalam komunitas yang tertindas. Pendidikan guru yang tanpa aksi hanya akan melahirkan “ceramah kosong” yang gagal menyentuh kehidupan nyata murid dan masyarakat.

Ketiga dimensi ini sejalan dengan prinsip trilogi pendidikan Islam: iman, ilmu, dan amal. Iman meneguhkan niat dan kompas moral, ilmu memperluas cakrawala pemahaman, dan amal atau aksi mengekspresikan nilai-nilai dalam bentuk konkret. Dalam konteks VUCA dan Society 5.0, ketiganya sangat relevan untuk membekali guru agar tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan menavigasi perubahan.

Model pendidikan guru yang multidimensi ini juga menantang pendekatan LPTK yang masih terlalu menekankan aspek formal. Banyak program pendidikan guru yang miskin nilai-nilai keberpihakan sosial dan spiritualitas. Akibatnya, guru lulusan LPTK cenderung teknokratis dan tidak memiliki komitmen kebangsaan atau kepekaan terhadap ketimpangan sosial di sekitarnya. Perlu ada reorientasi mendalam terhadap kurikulum dan metode pelatihan guru.

Pendidikan multidimensi mengharuskan integrasi antara teori dan praksis. Mahasiswa calon guru harus diperkenalkan pada realitas lapangan sejak awal, termasuk di daerah tertinggal, komunitas adat, atau lingkungan minoritas. Mereka perlu mengalami sendiri bagaimana pendidikan menjadi jalan membebaskan manusia, bukan sekadar ruang reproduksi pengetahuan. Pengalaman ini akan membentuk kesadaran sosial dan spiritual yang mendalam.

Di samping itu, LPTK harus menghadirkan figur-figur teladan. Dosen-dosen yang tidak hanya hebat di ruang kelas, tetapi juga hidup bersama masyarakat, aktif dalam gerakan sosial, dan teguh memegang prinsip nilai. Keteladanan ini jauh lebih efektif dalam membentuk karakter calon guru dibanding sekadar kuliah teori. Inilah pentingnya LPTK merekrut dan mengembangkan dosen dengan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi.

Aspek iman dalam pendidikan guru juga bisa diformulasikan dalam kurikulum yang menekankan etika profesi, spiritualitas, dan tanggung jawab moral. Di banyak negara maju, pelatihan guru menyertakan pendidikan tentang mindfulness, character formation, dan civic morality. Indonesia bisa lebih maju dengan menambahkan dimensi ketauhidan dan nilai-nilai lokal seperti Aswaja, gotong royong, serta kearifan komunitas adat.

Dimensi ilmu harus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner dan berbasis realitas lokal. Guru tidak cukup hanya belajar pedagogi dan psikologi pendidikan, tetapi juga harus memahami sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu komunikasi. Pengetahuan ini akan membantu guru membaca realitas sosial muridnya, membangun pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Sementara itu, dimensi aksi perlu didorong melalui program-program pengabdian masyarakat, magang sosial, dan proyek berbasis komunitas. Calon guru harus dilatih untuk terlibat dalam proyek pemetaan potensi lokal, pendampingan siswa marjinal, atau program literasi di wilayah terpencil. Ini bukan hanya memperkaya pengalaman, tetapi membentuk kepekaan dan komitmen nyata.

Pendidikan guru multidimensi juga membutuhkan ruang reflektif. Mahasiswa harus dibiasakan untuk menulis jurnal reflektif, berdiskusi tentang makna profesi, serta mengevaluasi posisi dirinya sebagai calon pendidik. Ruang ini penting untuk memperkuat kesadaran diri dan memperkaya proses transformasi batin yang tidak bisa didekati dengan metode evaluasi konvensional.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan melahirkan guru-guru yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga bijak, empatik, dan berpihak. Guru-guru yang memahami bahwa mendidik bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi membangun manusia seutuhnya. Guru yang menjadi jembatan antara iman dan ilmu, antara nilai dan tindakan.

Ketika pendidikan guru hanya menekankan kompetensi teknis, maka kita kehilangan dimensi spiritualitas dan keberpihakan. Sebaliknya, ketika kita mengembangkan model pendidikan multidimensi, maka kita tengah menyiapkan guru sebagai pelaku perubahan yang utuh, yang siap menyemaikan nilai-nilai kebaikan di tengah kekacauan zaman.

Dengan demikian, reformasi LPTK tidak cukup hanya administratif, tetapi harus filosofis dan substansial. Kurikulum, metode, dan sistem evaluasi harus dikaji ulang secara radikal agar sejalan dengan prinsip iman, ilmu, dan aksi. Ini menjadi tugas negara dan ormas keagamaan seperti NU untuk bersama-sama membangun kerangka pendidikan guru yang bermakna dan membebaskan.

Pendidikan guru multidimensi juga sejalan dengan ajaran Islam tentang insan kamil: manusia yang sempurna dalam akal, hati, dan tindakan. Guru adalah cermin dari insan kamil ini—mereka menjadi refleksi dari nilai-nilai ketuhanan yang menjelma dalam dunia pendidikan yang nyata. Akhirnya, pendidikan guru yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan aksi akan membentuk ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi, inklusif, dan transformatif. Ini adalah jawaban terhadap tantangan VUCA, sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban Indonesia yang berkeadilan dan beradab.

### **Strategi Advokasi Kebijakan: NU sebagai Mitra Strategis Negara**

Ketika negara menghadapi disrupsi global, polarisasi sosial, serta kemerosotan nilai di dunia pendidikan, maka diperlukan aktor-aktor strategis yang mampu menjembatani negara dan rakyat dengan cara yang humanis, inklusif, dan kontekstual. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis

untuk menjadi mitra negara dalam merumuskan serta mengadvokasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Peran ini bukan baru, melainkan bagian dari khitah historis NU dalam membela kepentingan umat dan keutuhan bangsa.

Sejak era kemerdekaan, NU sudah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai kekuatan moral-spiritual, melainkan sebagai kekuatan kultural-politik yang turut menentukan arah bangsa. Dalam Konferensi Besar 1937 dan Mukhtamar-mukhtamar awal, NU menegaskan posisi tawarnya dalam merumuskan pendidikan nasional berbasis nilai-nilai Islam Nusantara. Saat negara masih rapuh, NU justru hadir sebagai kekuatan sosial yang merajut ketahanan akar rumput, termasuk melalui jaringan pesantren dan madrasah. Dari sinilah legitimasi NU untuk mengadvokasi kebijakan pendidikan hari ini memiliki dasar historis yang kokoh.

Dalam konteks pendidikan, advokasi kebijakan bukan semata-mata melobi pemerintah, melainkan sebuah proses pengarusutamaan nilai-nilai luhur ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. NU bisa dan harus mendorong kebijakan yang meletakkan guru sebagai subjek perubahan, bukan objek birokrasi. NU juga dapat menjadi penyambung aspirasi guru-guru daerah, pesantren terpencil, hingga komunitas adat, yang kerap tak terjangkau oleh wacana kebijakan pusat. Inilah bentuk advokasi kebijakan yang bersifat partisipatoris dan berbasis komunitas.

Strategi advokasi ini perlu dilandasi oleh kekuatan intelektual dan data yang valid. NU harus memiliki pusat kajian kebijakan pendidikan yang aktif memetakan masalah, menyusun rekomendasi, dan menjalin relasi strategis dengan para pengambil kebijakan. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU perlu diperkuat secara institusional dan akademik agar mampu menjadi rujukan kebijakan yang kredibel. Tanpa basis keilmuan dan data, advokasi akan kehilangan daya tawar dalam proses legislasi dan eksekusi.

Selanjutnya, NU perlu membangun koalisi luas dengan organisasi profesi guru, akademisi, tokoh masyarakat, dan ormas lain yang memiliki kesamaan visi. Dalam dunia kebijakan publik, kekuatan jaringan menjadi

elemen penting dalam membentuk opini dan pengaruh. NU memiliki modal sosial yang besar, tinggal bagaimana modal ini dikapitalisasi secara terstruktur dalam mekanisme advokasi kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten.

Penting pula bagi NU untuk membina kader-kadernya agar memahami bahasa kebijakan publik, politik pendidikan, serta teknik-teknik advokasi modern. Diperlukan pelatihan reguler tentang legislative drafting, analisis kebijakan, teknik diplomasi, dan komunikasi strategis. Dengan demikian, NU tidak hanya mengandalkan charisma tokoh-tokoh sepuh, tetapi juga menyiapkan generasi muda NU yang mampu beradu argumen-tasi di ruang-ruang pengambilan keputusan negara.

Di tingkat teknis, NU dapat mengusulkan regulasi baru atau revisi kebijakan lama yang tidak berpihak pada keadilan pendidikan. Misalnya, mendorong afirmasi anggaran untuk sekolah berbasis pesantren, atau skema sertifikasi dan pengangkatan guru di daerah terluar yang selama ini terkendala administratif. Advokasi juga bisa diarahkan pada penguatan literasi digital dan kurikulum kontekstual berbasis lokalitas, agar pendidikan tidak hanya bersifat universal tetapi juga membumi.

Namun, keberhasilan advokasi kebijakan juga sangat bergantung pada relasi konstruktif NU dengan pemerintah. NU harus menjadi mitra kritis, bukan oposan destruktif maupun pendukung membabi buta. Dalam kerangka ini, NU dituntut untuk menjaga keseimbangan antara idealisme nilai dan realisme politik, agar tidak terjebak dalam pragmatisme jangka pendek yang merugikan misi pendidikan jangka panjang.

Sebagai mitra strategis negara, NU juga perlu terlibat dalam forum-forum resmi penyusunan kebijakan, seperti dewan pendidikan, tim perumus kurikulum, dan panel penilai guru. Kehadiran tokoh-tokoh NU di forum tersebut bukan sekadar representasi simbolik, tetapi harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, kebangsaan, dan keadilan sosial secara substantif dalam regulasi-regulasi konkret.

Advokasi kebijakan juga harus menyentuh tataran lokal. Pengurus cabang dan wilayah NU perlu didorong untuk aktif berdialog dengan

dinas pendidikan, DPRD, serta lembaga-lembaga lokal untuk menyuarakan kebutuhan dan potensi pendidikan berbasis komunitas. Strategi ini memungkinkan NU melakukan advokasi dari bawah, membangun kekuatan pendidikan yang otonom dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ke depan, NU dapat membangun think-tank pendidikan yang fokus pada isu-isu strategis seperti digitalisasi, vokasi, literasi ideologis, dan moderasi beragama. Think-tank ini akan menjadi gudang ide, policy brief, dan data lapangan yang memperkuat suara NU dalam ranah advokasi. Dengan basis ini, NU akan lebih siap menghadapi tantangan seperti globalisasi kurikulum, tekanan pasar, serta ideologi asing yang merongrong nilai-nilai keindonesiaan.

NU juga perlu menempatkan guru sebagai pilar utama dalam strategi advokasinya. Guru bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi sumber informasi dan pengalaman kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, advokasi kebijakan harus dimulai dari mendengar suara guru, mengangkat kisah mereka, dan menjadikannya sebagai dasar bagi reformasi regulasi. Ini sesuai dengan semangat Aswaja yang menghargai tradisi, pengalaman, dan keilmuan ulama akar rumput.

Strategi komunikasi dalam advokasi kebijakan harus diubah dari reaktif menjadi proaktif. NU tidak cukup hanya merespons kebijakan yang sudah jadi, tetapi harus mampu menawarkan alternatif kebijakan sejak dari tahap desain. Di sinilah pentingnya tim-tim advokasi yang paham proses legislasi dan memiliki akses ke kementerian, parlemen, dan media.

Dalam tradisi Marhaenis, advokasi juga berarti membela yang lemah dan tertindas. Maka advokasi kebijakan pendidikan oleh NU harus berpihak pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), anak-anak yatim, keluarga miskin, serta minoritas yang rentan tersingkir dari sistem pendidikan formal. Inilah substansi advokasi yang berkeadilan.

Advokasi yang sukses bukan hanya diukur dari perubahan undang-undang, tetapi dari perubahan nyata di lapangan. Apakah guru-guru lebih dihargai? Apakah murid-murid di kampung lebih mudah mengakses

pendidikan berkualitas? Apakah sekolah-sekolah berbasis pesantren mendapat dukungan negara yang layak? Inilah indikator keberhasilan advokasi yang sesungguhnya.

Strategi advokasi juga harus menjaga independensi NU. Keterlibatan dalam kebijakan tidak boleh mengaburkan jarak kritis terhadap negara. NU harus tetap menjadi penyeimbang kekuasaan dan pelindung nilai-nilai kerakyatan. Dalam posisi ini, NU tidak hanya bermitra dengan negara, tetapi sekaligus menjaga agar negara tetap berada dalam koridor konstitusional dan moral.

Akhirnya, advokasi kebijakan oleh NU bukanlah tujuan, tetapi instrumen untuk mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan membebaskan. NU harus terus mengokohkan perannya sebagai jembatan antara nilai-nilai langit dan kebijakan bumi, antara suara rakyat dan telinga negara, antara guru-guru akar rumput dan kekuasaan yang kerap lupa daratan.

### **Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Pendidikan Bernilai**

Kehadiran dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam ranah pendidikan bukan sekadar sebagai pemberi peluang kerja, melainkan juga sebagai mitra transformasional dalam membentuk ekosistem pendidikan yang relevan, adaptif, dan bernilai. Dalam konteks guru Nahdliyin dan Marhaenis, keterlibatan DUDI tidak dapat dilepaskan dari semangat membebaskan kaum marhaen dari keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, pesantren, dan industri merupakan jembatan konkret dari teori pendidikan yang berkeadilan menuju praktik pemberdayaan yang nyata.

Di tengah arus deras Society 5.0, pendidikan tidak boleh terputus dari realitas sosial dan kebutuhan pasar. Namun demikian, keterhubungan itu tidak boleh melucuti nilai, nurani, dan karakter kemanusiaan dalam pendidikan. Di sinilah pentingnya pendidikan bernilai—yakni pendidikan yang menjadikan kerja dan usaha bukan sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana pembebasan manusia dari ketergantungan, keterbelakangan, dan

ketidakberdayaan struktural. Keterlibatan DUDI dalam pendidikan harus dituntun oleh paradigma etis dan spiritual ini.

DUDI memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi, khususnya di SMK, dengan cara memberikan fasilitas pelatihan, teknologi terkini, standar mutu industri, hingga peluang magang. Namun, potensi ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal oleh banyak sekolah, karena belum adanya jembatan nilai antara pendidikan dan industri. Di sinilah peran strategis guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai penghubung antara semangat kebangsaan dan kebutuhan kerja global. Guru harus mampu membangun dialog dengan DUDI tanpa kehilangan orientasi pendidikan sebagai misi kemanusiaan.

Dalam sejarah gerakan Marhaenisme, kerja bukanlah sekadar aktivitas ekonomi, tetapi wujud eksistensi manusia yang utuh. Soekarno mengajarkan bahwa kaum marhaen harus menguasai alat-alat produksi, bukan menjadi budak dari sistem industri kapitalistik. Maka pendidikan yang melibatkan DUDI harus tetap menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan komoditas atau buruh murahan. Pendidikan bernilai akan menanamkan kesadaran bahwa keterampilan dan teknologi hanyalah alat, bukan tujuan, serta bahwa martabat manusia lebih utama dari sekadar produktivitas.

Pesantren-pesantren modern yang tergabung dalam jaringan NU telah mulai menjajaki kolaborasi dengan industri halal, ekonomi syariah, hingga start-up digital. Ini merupakan langkah konkret dari visi Islam Nusantara yang fleksibel dan dinamis dalam menghadapi zaman. Namun, agar kolaborasi ini tidak sekadar menjadi proyek sesaat, diperlukan desain kurikulum bersama, sistem penjaminan mutu, serta skema insentif yang adil dan berkelanjutan. DUDI tidak boleh sekadar menjadi sponsor, tetapi mitra aktif dalam pembangunan manusia.

Pemerintah perlu menyediakan kebijakan afirmatif yang mendukung kemitraan antara sekolah berbasis pesantren dan dunia usaha yang memiliki kesamaan nilai, seperti etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam

pendidikan harus menjalani audit etis, agar kolaborasi tidak menciptakan ketimpangan atau eksploitasi terselubung. Dalam hal ini, NU dapat berperan sebagai juru nilai dan penjaga moralitas kolaborasi pendidikan-industri.

Dalam praktiknya, keterlibatan DUDI bisa dimulai dari skala lokal. Banyak pesantren dan SMK di pelosok telah bekerja sama dengan UKM, koperasi, dan bengkel masyarakat untuk pelatihan kerja. Ini harus diperkuat dan dijadikan model kolaborasi mikro yang mampu memotong ketergantungan pada sistem kerja urban. Pendidikan berbasis industri lokal akan menghidupkan ekonomi desa, menciptakan ekosistem belajar-produktif yang berakar pada potensi wilayah.

Selain itu, DUDI dapat diajak berkolaborasi dalam menyusun materi pembelajaran, membekali guru dengan pelatihan teknologi terkini, serta mendukung pengembangan laboratorium dan teaching factory di sekolah. Namun semua ini harus disertai dengan penguatan nilai dan kesadaran kritis pada peserta didik agar tidak menjadi “mesin industri” tanpa hati. Pendidikan bernilai menempatkan industri sebagai sahabat, bukan tuan.

Model pelibatan DUDI yang ideal adalah ketika terjadi simbiosis mutualistik antara kebutuhan kerja dan misi pendidikan. Artinya, peserta didik tidak hanya memperoleh keahlian kerja, tetapi juga belajar nilai, etika kerja, solidaritas, dan kesadaran sosial. DUDI pun diuntungkan dengan hadirnya lulusan yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki integritas dan daya adaptasi tinggi. Guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi penggerak dalam membangun jembatan ini.

Salah satu tantangan utama dalam kerja sama pendidikan dengan DUDI adalah perbedaan orientasi. Industri berorientasi pada efisiensi dan laba, sementara pendidikan berorientasi pada proses dan nilai. Oleh karena itu, dibutuhkan ruang negosiasi nilai antara sekolah dan DUDI, agar tidak terjadi dominasi satu pihak. NU sebagai kekuatan sosial-budaya dapat berperan sebagai mediator agar kerja sama ini tetap menjunjung etika dan keadilan.

DUDI juga perlu disadarkan bahwa keterlibatannya dalam pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab sosial. CSR (Corporate Social

Responsibility) yang selama ini bersifat karitatif perlu diubah menjadi CER (Corporate Educational Responsibility), yaitu keterlibatan aktif dalam transformasi pendidikan masyarakat. Dengan demikian, hubungan DUDI dan sekolah menjadi lebih bermakna dan berdampak jangka panjang.

Dalam rangka memperluas partisipasi DUDI, perlu disusun regulasi yang memudahkan dunia usaha untuk mengakses dunia pendidikan tanpa merusak independensi sekolah. Misalnya, dalam bentuk insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan beasiswa, alat praktik, atau program magang yang humanistik. Guru menjadi aktor kunci dalam menjaga agar kolaborasi ini tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada murid.

Keterlibatan DUDI juga harus memperhatikan konteks lokalitas. Di wilayah-wilayah minoritas atau terpinggirkan, industri yang hadir harus diseleksi agar tidak membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya lokal. Guru dan komunitas pendidikan menjadi penjaga agar tidak terjadi invasi nilai asing yang merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

Pendidikan bernilai dalam kolaborasi dengan DUDI juga berarti melatih peserta didik untuk menjadi pelaku usaha mandiri. Sekolah harus mulai mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan sosial berbasis nilai, agar siswa tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang etis, berbasis komunitas, dan berdampak luas. Guru adalah fasilitator dalam menanamkan etos ini sejak dini.

Dalam skala nasional, pemerintah dapat bekerja sama dengan PBNU untuk merancang peta jalan kolaborasi pendidikan-industri bernilai, khususnya di SMK Ma'arif, pesantren vokasi, dan sekolah berbasis komunitas. Kolaborasi ini harus dilandasi dengan riset, pendampingan, dan pelibatan lintas sektor. Guru menjadi pelaku utama dalam mewujudkan kolaborasi ini di tingkat lapangan.

Semangat kolaboratif ini juga sejalan dengan prinsip gotong royong dalam Marhaenisme. Pendidikan tidak bisa dibiarkan hanya menjadi urusan pemerintah atau guru semata. Semua komponen bangsa, termasuk dunia usaha, harus terlibat secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan

semangat ini, guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi katalisator dalam membentuk ekosistem pendidikan yang inklusif dan berdaya.

Pendidikan yang dibangun atas dasar nilai, kolaborasi, dan pembebasan akan menghasilkan generasi yang utuh: terampil bekerja, kuat secara spiritual, kritis dalam berpikir, serta memiliki komitmen sosial. Keterlibatan DUDI harus diarahkan untuk mendukung visi ini, bukan mengaburkan atau mereduksinya menjadi kepentingan pasar semata.

Akhirnya, keterlibatan DUDI dalam pendidikan bernilai adalah bagian dari perjuangan panjang membebaskan kaum marhaen dari kemiskinan struktural. Guru menjadi penjaga nurani dalam setiap prosesnya. Dan NU sebagai kekuatan moral dan kultural bangsa harus terus mengawal agar dunia industri ikut bertanggung jawab membangun peradaban, bukan sekadar mencetak buruh yang patuh.

### **Ormas Islam sebagai Pilar Kultural Pendidikan Transformatif**

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar kultural yang menopang sistem pendidikan nasional secara informal dan formal. Peran mereka tidak semata mengajarkan agama dalam ruang sempit, melainkan membangun peradaban melalui pendidikan, budaya, dan keteladanan sosial. Dalam konteks ini, ormas Islam bukan sekadar pelengkap negara, tetapi mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih di tengah tantangan global dan gejolak ideologi transnasional.

NU, misalnya, melalui jaringan pesantren, madrasah diniyah, hingga lembaga formal seperti LP Ma'arif, telah menjadi aktor utama dalam memproduksi generasi muslim yang moderat, nasionalis, dan kontekstual. Pendidikan transformatif yang diusung ormas Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Inilah yang membedakan antara pendidikan sebagai transmisi pengetahuan dengan pendidikan sebagai proses pembebasan dan pembentukan karakter.

Dalam sudut pandang Marhaenisme, pendidikan harus membebaskan manusia dari keterkungkungan struktural—baik karena kemiskinan, kebodohan, maupun ketidakadilan sistemik. Ormas Islam telah memainkan peran serupa dalam konteks sosial keislaman, di mana mereka menjadi ruang alternatif bagi rakyat kecil untuk belajar, tumbuh, dan berdaya. Maka, pertemuan antara Marhaenisme dan Islam kultural yang diusung ormas Islam merupakan pertemuan dialektis antara spirit keadilan sosial dan nilai-nilai transendental.

Peran ini semakin relevan ketika pendidikan nasional menghadapi krisis nilai, komersialisasi pendidikan, serta penetrasi ideologi radikal dan liberalisme ekstrem. Ormas Islam tampil sebagai benteng sekaligus pengarah. Dengan basis kultural yang kuat, jaringan massa yang luas, serta legitimasi moral yang tinggi, mereka mampu melakukan intervensi yang bersifat ideologis maupun praktis dalam dunia pendidikan. Tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa ormas Islam adalah kekuatan sipil yang menjaga kewarasan pendidikan nasional.

Dalam praktiknya, pendidikan transformatif oleh ormas Islam mengambil banyak bentuk: dari kurikulum pesantren berbasis kitab kuning yang kaya akan nilai-nilai etika, hingga pengembangan sekolah inklusif yang merangkul kelompok marginal. Bahkan banyak Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang mulai mengadopsi pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) namun tetap dengan basis nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah. Artinya, inovasi dan tradisi bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan bisa bersinergi secara kontekstual.

Ormas Islam juga memiliki keunggulan dalam membentuk ekosistem pendidikan yang partisipatif. Pengambilan keputusan dalam penyusunan kurikulum, pemilihan guru, hingga program pembinaan siswa sering melibatkan tokoh masyarakat, kyai, wali murid, dan komunitas lokal. Model ini mendorong pendidikan yang berakar pada nilai lokal dan menumbuhkan rasa memiliki yang kuat. Pendidikan bukan sekadar tugas guru, tetapi gerakan bersama seluruh elemen umat.

Dalam aspek penguatan moderasi beragama dan pengendalian radikalisme, ormas Islam memainkan peran vital. Melalui majelis ta'lim, forum diskusi, pelatihan guru, hingga kampanye media sosial, mereka menanamkan pentingnya keberagaman, toleransi, dan cinta tanah air. Pesan-pesan keagamaan tidak lagi disampaikan dalam ruang eksklusif, tetapi dikaitkan dengan isu-isu kebangsaan, ekologi, gender, dan digitalisasi. Ini sejalan dengan visi pendidikan Marhaenistik yang membumikan ideologi dalam realitas konkret.

Salah satu kekuatan pendidikan ormas Islam adalah kemampuannya untuk menggabungkan teks dan konteks, wahyu dan realitas. Pendidikan transformatif yang lahir dari rahim NU misalnya, tidak sekadar mengajarkan dalil, tetapi juga hikmah kehidupan. Guru tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga menjadi teladan etika sosial dan spiritual. Dalam hal ini, model pendidik ala ormas Islam sangat kontekstual untuk menjawab tantangan Society 5.0 yang menekankan peran manusia sepenuhnya dalam mengelola teknologi dan informasi.

Dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan nasional, ormas Islam tidak bisa lagi dipandang sebagai pelaksana kebijakan semata, melainkan harus dilibatkan sebagai perumus utama. Kurikulum nasional harus membuka ruang bagi praktik baik dari lembaga pendidikan ormas, baik dalam penguatan pendidikan karakter, manajemen berbasis komunitas, maupun model pengasuhan berbasis spiritualitas. Ini akan memperkaya kebijakan negara dan menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa.

Peran guru Nahdliyin-Marhaenis di dalam ormas Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang dijalankan tidak terjebak pada rutinitas administratif atau romantisme masa lalu. Guru harus menjadi agen reflektif yang mampu mendorong ormasnya untuk terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati diri. Mereka harus membawa semangat Marhaenisme yang membebaskan dan Islam Nusantara yang menyejukkan ke dalam ranah operasional pendidikan.

Sinergi antarormas juga menjadi keharusan dalam menghadapi tantangan global. NU dan Muhammadiyah, meskipun memiliki basis

ideologis yang berbeda, sesungguhnya memiliki misi yang sama dalam pendidikan: memanusiakan manusia. Kolaborasi keduanya dalam pendidikan vokasi, pengembangan guru, serta advokasi kebijakan akan menjadi kekuatan besar dalam melawan fragmentasi bangsa. Guru sebagai pelak-sana akar rumput dari kerja sama ini perlu diberdayakan melalui forum-forum lintas ormas yang transformatif.

Ormas Islam juga dapat menjadi pusat inovasi pendidikan berbasis riset. Mereka perlu membentuk pusat kajian pendidikan Islam progresif yang mampu menghasilkan gagasan baru, modul pembelajaran kontekstual, serta evaluasi berbasis nilai. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang produksi pengetahuan yang membebaskan dan mencerahkan.

Dalam skala global, ormas Islam Indonesia dapat menjadi model pendidikan Islam moderat yang inklusif dan membumi. Nilai-nilai pesantren yang menekankan akhlak, dialog, dan ketekunan belajar dapat menjadi alternatif atas sistem pendidikan yang hanya mengejar ranking atau keterampilan teknis. Inilah kontribusi besar yang bisa diberikan oleh ormas Islam kepada dunia—bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas dan proporsional bagi ormas Islam untuk berkontribusi dalam penyusunan undang-undang pendidikan, akreditasi lembaga, hingga sertifikasi guru. Kebijakan yang lahir dari proses inklusif akan lebih diterima oleh masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ormas tidak boleh lagi hanya sebagai pelengkap dalam forum musyawarah, tetapi bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.

Ormas juga dapat menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Mereka dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelatihan guru berbasis nilai-nilai moderasi, mengembangkan bahan ajar kontekstual, serta menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis, toleran, dan berpikir kritis. Peran

ini akan lebih optimal jika guru sebagai penggerak memiliki pemahaman ideologis dan kapasitas profesional yang kuat.

Akhirnya, pendidikan yang dilandasi oleh ormas Islam akan menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Di tengah krisis identitas, degradasi moral, dan banjir informasi digital, ormas Islam harus berdiri sebagai mercusuar nilai yang memberi arah bagi pendidikan bangsa. Guru menjadi perpanjangan tangan nilai-nilai ini di kelas, pesantren, dan komunitas.

Ormas Islam bukan sekadar warisan sejarah, melainkan laboratorium masa depan. Di tangan mereka, pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan kurikulum, tetapi juga tentang arah dan watak bangsa. Maka, penguatan kapasitas ormas dalam bidang pendidikan harus menjadi agenda prioritas. Negara, masyarakat, dan dunia usaha perlu melihat ormas Islam sebagai pilar kultural pendidikan transformatif yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai.

## Roadmap Guru Nahdliyin-Marhaenis 2045

Menyongsong tahun 2045 sebagai tonggak satu abad kemerdekaan Indonesia, pertanyaan besar yang harus kita ajukan adalah: “Siapa yang akan membentuk karakter bangsa ini dalam 20 tahun ke depan?” Di tengah pertarungan ideologi global, kemajuan teknologi yang disruptif, dan keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi, pendidikan kembali menjadi panggung utama pembentukan peradaban. Dan di jantung pendidikan, berdiri guru—lebih dari sekadar pengajar mata pelajaran, mereka adalah penentu arah moral, kebangsaan, dan keberpihakan sosial. Dalam konteks ini, konsep *Guru Nahdliyin-Marhaenis* menjadi sangat relevan dan mendasak untuk dijadikan kerangka dasar dalam menyusun roadmap pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Guru Nahdliyin-Marhaenis bukan sekadar identitas ideologis, tetapi sebuah praksis: guru yang membumikan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah dengan semangat keindonesiaan yang berpihak pada kaum kecil,

terpinggirkan, dan terjajah secara struktural maupun kultural. Mereka adalah pengemban dua warisan besar: dari Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari yang menekankan adab dan kemuliaan ilmu, serta dari Bung Karno yang mengusung keadilan sosial sebagai mandat sejarah bangsa. Ketika keduanya bersatu dalam diri seorang guru, lahirlah model pendidik yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga tajam secara sosial dan tulus secara spiritual.

Bab ini mencoba menyusun peta jalan jangka panjang yang menjawab kebutuhan akan guru yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga kokoh memegang nilai. Roadmap ini bukan sekadar susunan teknokratis dari program-program pemerintah, tetapi visi kultural, spiritual, dan pedagogis yang lahir dari perenungan panjang atas sejarah perjuangan kaum Nahdliyin dan Marhaen dalam membela kemanusiaan. Dalam roadmap ini, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen mobilitas sosial, tetapi juga medan perjuangan ideologis untuk menciptakan bangsa yang berdaulat, adil, dan tercerahkan.

Tahun 2045 bukanlah titik akhir, tetapi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa di tengah ancaman globalisasi tanpa batas. Oleh karena itu, roadmap ini ditawarkan sebagai narasi besar yang harus dibumikan melalui kerja-kerja nyata di ruang kelas, madrasah, pesantren, SMK, hingga universitas. Guru tidak lagi bisa bersikap netral dalam situasi krisis moral dan ideologis; mereka harus memilih: menjadi obor yang menerangi jalan atau hanya menjadi bayang-bayang di tengah gelapnya zaman. Maka, Guru Nahdliyin-Marhaenis 2045 harus hadir sebagai cahaya yang konsisten, progresif, dan memerdekakan.

Roadmap ini dibangun di atas lima fondasi utama: keberpihakan terhadap rakyat kecil, penguasaan teknologi secara kritis, penguatan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum, kolaborasi lintas lembaga, dan keteladanan moral yang melekat dalam diri guru. Dalam setiap fondasi tersebut, kita akan membahas arah kebijakan, praktik pembelajaran, serta ekosistem pendidikan yang dibutuhkan agar model guru ini tidak hanya menjadi idealisme di atas kertas, tetapi realitas di tengah kehidupan bangsa. Melalui

pendekatan filosofis-historis-aplikatif, bab ini menjadi ruang artikulasi masa depan yang tetap berpijak pada akar budaya bangsa dan langit spiritualitas Islam Nusantara.

Guru masa depan bukan hanya harus mampu menguasai Artificial Intelligence atau Big Data, tetapi juga mampu menanamkan nilai *ta'zim*, *ikhwan*, dan *ijtihad* kepada generasi muda. Roadmap ini melihat bahwa pembaruan teknologi harus bersanding dengan pemurnian nilai. Tidak ada gunanya kecanggihan digital jika anak-anak bangsa kehilangan rasa hormat terhadap guru, terhadap orang tua, atau terhadap tanah airnya. Maka, digitalisasi pendidikan harus ditopang dengan penguatan nilai-nilai Aswaja yang kontekstual—bukan Aswaja yang dogmatis, melainkan Aswaja yang dinamis, dialogis, dan membebaskan.

Dalam peta jalan ini, kita juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang menyatu antara sekolah, pesantren, masyarakat, dan negara. Tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan formal dan informal, antara teknologi dan tradisi, antara spiritualitas dan rasionalitas. Semua harus menyatu dalam satu gerak bersama: menciptakan bangsa yang merdeka secara nalar, berdaulat dalam budaya, dan adil dalam struktur sosial. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah poros utama yang akan menggerakkan ekosistem ini.

Visi besar ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan negara, lembaga pendidikan guru (LPTK), organisasi keagamaan, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks itu, NU sebagai ormas terbesar memiliki tanggung jawab historis dan spiritual untuk menyiapkan kader-kader guru yang tidak hanya religius, tetapi juga revolusioner. Kerja sama antara NU, pemerintah, dan rakyat menjadi pilar kunci dalam memastikan roadmap ini tidak kandas dalam birokrasi atau disalip oleh kepentingan kapitalisme pendidikan. Kita butuh kerja ideologis yang sistematis dan kerja praksis yang militan.

Akhirnya, Bab 14 ini bukan hanya menawarkan langkah-langkah strategis, tetapi juga menyusun sebuah *panggilan jiwa* bagi para guru di seluruh pelosok negeri. Kita sedang menapaki jalan menuju Indonesia

Emas 2045, dan di persimpangan sejarah ini, hanya guru-guru yang sadar identitas, kuat nilai, dan progresif dalam inovasi yang mampu menjadi pembentuk masa depan bangsa. Maka dari itu, mari kita bangun roadmap ini bersama—dengan cinta pada ilmu, keberanian dalam perjuangan, dan kesetiaan pada bangsa.

### **Arah Masa Depan Pendidikan Berbasis Keberpihakan**

Dalam menapaki arah masa depan pendidikan Indonesia menuju 2045, salah satu hal yang harus ditekankan adalah pentingnya keberpihakan. Pendidikan yang netral secara ideologis, sosial, dan kultural sejatinya hanya akan menjadi reproduksi struktur ketidakadilan yang telah lama bercokol. Dalam sejarah bangsa, pendidikan bukanlah proses yang bebas nilai, tetapi merupakan arena pertarungan ideologis—antara mereka yang ingin mempertahankan status quo dan mereka yang ingin melakukan pembebasan. Maka, masa depan pendidikan harus berbasis keberpihakan: berpihak kepada yang lemah, yang terpinggirkan, dan yang tertindas.

Keberpihakan dalam pendidikan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai sentimen sosial belaka, melainkan sebagai kerangka epistemologis dan praksis pedagogis yang menyatu dalam seluruh sistem sekolah. Guru, kurikulum, metode, bahkan evaluasi belajar harus dirancang untuk membongkar ketimpangan dan membuka jalan menuju kesetaraan. Pendidikan yang berpihak berarti melibatkan siswa dalam proses belajar yang memberdayakan, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membangun solidaritas sosial.

Tradisi Nahdliyin dan Marhaenisme telah memberikan fondasi kuat untuk keberpihakan ini. Dalam tradisi pesantren, kita mengenal konsep *ri'ayah* (perlindungan), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *ta'dib* (penanaman nilai). Sementara dalam pemikiran Marhaenisme, kita menemukan gagasan tentang *kemerdekaan politik*, *kemandirian ekonomi*, dan *kesetaraan sosial*. Dua fondasi ini, bila digabungkan dalam praksis pendidikan, akan menghasilkan model pendidikan yang membela mereka yang selama ini tersingkir dari akses dan kualitas pendidikan.

Arah masa depan pendidikan berbasis keberpihakan berarti menempatkan guru sebagai subjek sejarah, bukan sekadar obyek kebijakan. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah mereka yang menyadari perannya sebagai aktor perubahan sosial. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, mengadvokasi, dan memperjuangkan murid-muridnya untuk bisa hidup lebih manusiawi. Dalam kondisi seperti inilah, guru bertransformasi menjadi pemimpin kultural yang menyalakan harapan di tengah keterbatasan.

Salah satu agenda besar yang harus dihadirkan dalam pendidikan yang berpihak adalah rekonstruksi kurikulum. Kurikulum tidak boleh semata menjadi representasi kebutuhan pasar atau standar internasional, tetapi harus merespons realitas lokal, budaya masyarakat, dan kebutuhan rakyat. Kurikulum yang berpihak akan mengangkat cerita petani, kisah nelayan, perjuangan buruh, serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai materi pembelajaran yang bermakna. Dengan begitu, pendidikan akan kembali membumi dan menyentuh kehidupan sehari-hari peserta didik.

Di sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), pendidikan berbasis keberpihakan menjadi semakin penting. Guru yang bekerja di wilayah-wilayah tersebut harus mendapatkan penguatan kapasitas, dukungan moral, serta jaminan kesejahteraan agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai pejuang peradaban. Keberpihakan negara terhadap guru di wilayah ini harus menjadi bagian integral dari arah pembangunan pendidikan nasional.

Keadilan dalam pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga soal kualitas. Oleh karena itu, pendekatan pedagogis yang kontekstual, kolaboratif, dan relevan dengan realitas sosial siswa harus menjadi prioritas. Pendidikan berbasis keberpihakan menolak pemaksaan model pembelajaran yang tidak cocok dengan lingkungan budaya siswa. Ia menuntut fleksibilitas dan kreativitas guru untuk menyesuaikan metode dengan konteks kehidupan murid.

Keberpihakan juga berarti mendobrak sekat-sekat diskriminatif yang selama ini membayangi dunia pendidikan: antara sekolah negeri dan

swasta, antara sekolah unggulan dan sekolah marjinal, antara siswa dari keluarga kaya dan miskin. Semua siswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, bermartabat, dan memerdekakan. Maka, perlu keberanian politik dan moral dari para pemangku kebijakan untuk mere-alokasi sumber daya pendidikan secara lebih adil.

Di sisi lain, keberpihakan juga menyangkut dimensi spiritualitas dan nilai. Pendidikan tidak hanya mendidik otak, tetapi juga hati. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus mampu menanamkan nilai empati, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air dalam diri siswa. Nilai-nilai ini tidak dapat diajarkan melalui ceramah semata, tetapi harus ditransformasikan melalui keteladanan dan pengalaman langsung dalam kehidupan sekolah.

Pendidikan berbasis keberpihakan menolak narasi tunggal tentang keberhasilan. Ia mengakui keberagaman potensi dan menghargai proses sebagai bagian penting dari pencapaian. Dalam model ini, siswa tidak dipaksa menjadi seragam, tetapi didorong untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Guru pun tidak sekadar menjadi penilai, tetapi menjadi pembimbing dan sahabat dalam perjalanan belajar murid.

Selain itu, keberpihakan harus diterjemahkan ke dalam regulasi. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan pendidikan, mulai dari anggaran, rekrutmen guru, hingga evaluasi kinerja sekolah, berpihak kepada kebutuhan nyata di lapangan. Tidak ada lagi anggaran yang tersentralisasi atau kebijakan yang tidak sesuai konteks. Prinsip *affirmative action* harus menjadi roh dalam setiap program pendidikan.

Ke depan, keberpihakan harus diperluas ke dalam wilayah digital. Ketimpangan akses teknologi antara kota dan desa, antara guru senior dan guru milenial, antara siswa kaya dan miskin, harus dijembatani dengan strategi yang tepat. Negara harus menjamin bahwa digitalisasi pendidikan tidak menciptakan jurang baru, tetapi menjadi alat pembebasan bagi semua kalangan.

Peran organisasi masyarakat sipil seperti NU sangat vital dalam memperjuangkan pendidikan berbasis keberpihakan. NU sebagai kekuatan kultural memiliki jangkauan sosial yang luas, jaringan pendidikan

yang solid, serta kapasitas untuk mendorong perubahan. Melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif dan institusi pesantren, NU dapat menjadi pionir dalam mengembangkan model pendidikan yang berpihak kepada akar rumput.

Keberpihakan dalam pendidikan juga menyentuh aspek gender. Banyak guru perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam posisi kepemimpinan, padahal mereka memainkan peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan masa depan harus membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan guru yang berbasis nilai-nilai keadilan dan empati.

Tak kalah penting, keberpihakan dalam pendidikan harus menyentuh isu-isu disabilitas, multikulturalisme, dan perbedaan agama. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua identitas dan kelompok. Guru harus dilatih untuk menjadi fasilitator keberagaman dan penolak diskriminasi. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi ruang perjumpaan, bukan perpecahan.

Arah pendidikan yang berpihak juga menuntut reformasi dalam pelatihan guru. LPTK dan program PPG harus merombak pendekatan teknokratis dan menggantinya dengan pendekatan kontekstual-humanistik. Guru tidak hanya dilatih menjadi pengampu materi, tetapi harus dibentuk sebagai agen perubahan sosial dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Roadmap pendidikan berbasis keberpihakan akan gagal jika tidak didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif. Evaluasi keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari skor ujian nasional, tetapi harus mencakup keterlibatan siswa dalam komunitas, perkembangan karakter, dan kontribusi sosial. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang menciptakan manusia merdeka dan berdaya.

Pendidikan berbasis keberpihakan adalah wujud nyata dari amanat konstitusi dan semangat revolusi kemerdekaan. Ia bukan hanya sebuah konsep, tetapi misi historis yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks ini, Guru Nahdliyyin-Marhaenis adalah pengemban amanat tersebut—mereka adalah pembela marhaen, penjaga nilai, dan pembentuk masa depan.

Jika pendidikan terus berorientasi pada pasar, kompetisi, dan pengukuran angka semata, maka bangsa ini akan kehilangan jiwanya. Pendidikan harus kembali kepada cita-cita mulia: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Inilah arah yang hendak diperjuangkan dalam subbab ini: arah pendidikan berbasis keberpihakan.

### **Ekosistem Inklusif: Digital, Tradisional, Spiritual**

Masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi dan inovasi, melainkan oleh kemampuan sistem pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif—sebuah ruang belajar yang mampu mengintegrasikan elemen digital, tradisional, dan spiritual secara harmonis. Pendidikan tidak boleh tercerabut dari akar budaya dan nilai, tapi juga tidak boleh menolak perkembangan zaman. Inilah tantangan dan sekaligus peluang besar bagi guru Nahdliyin-Marhaenis: membangun ekosistem pendidikan yang utuh dan manusiawi.

Dalam konteks digital, pendidikan menghadapi percepatan luar biasa yang menyentuh semua aspek: pembelajaran daring, kecerdasan buatan, metaverse, dan data-driven education. Namun, tanpa kerangka etik dan spiritual yang kuat, digitalisasi dapat berubah menjadi dehumanisasi. Guru bukan sekadar operator teknologi, tetapi penjaga nurani yang memastikan bahwa teknologi tetap melayani manusia, bukan sebaliknya. Ekosistem digital hanya akan bermakna bila didampingi oleh kecerdasan spiritual dan sosial yang kuat.

Sementara itu, elemen tradisional dalam pendidikan sering kali dianggap kuno dan usang. Padahal, justru dari tradisi itulah pendidikan Indonesia mendapat akar nilai dan kearifan lokal yang tahan banting menghadapi perubahan. Tradisi pesantren, gotong royong, kearifan kampung, dan praktik pendidikan berbasis komunitas adalah kekayaan yang tak ternilai. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah mereka yang menghargai masa lalu sebagai fondasi untuk melompat ke masa depan.

Spiritualitas menjadi jantung dari ekosistem pendidikan yang utuh. Spiritualitas bukan semata doktrin agama, tetapi kesadaran transendental

yang membimbing tindakan, membentuk karakter, dan memberikan makna hidup. Dalam ekosistem yang spiritual, pendidikan tidak hanya mengejar capaian kognitif tetapi menumbuhkan akhlak, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Di sinilah Aswaja dan Marhaenisme bertemu: pada semangat untuk membela yang lemah dengan kekuatan iman dan akal sehat.

Ekosistem inklusif menuntut keterbukaan terhadap semua bentuk pengetahuan. Pendidikan tidak bisa hanya bersandar pada sains Barat atau metodologi global, tetapi juga membuka diri terhadap epistemologi lokal: nilai-nilai Islam Nusantara, tradisi lisan, kisah-kisah rakyat, hingga praktik hidup petani dan nelayan. Dengan pendekatan ini, siswa belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan, dari lingkungan, dan dari masyarakat.

Guru berperan sentral dalam merajut ketiga unsur ini. Ia harus mampu menjadi fasilitator yang menghubungkan dunia digital dengan warisan lokal, serta menjaga agar spiritualitas tetap menjadi cahaya dalam proses pembelajaran. Guru yang hanya melek teknologi tapi buta budaya akan kehilangan makna. Sebaliknya, guru yang hanya memegang tradisi tanpa memahami konteks zaman akan tertinggal. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah penyeimbang yang menjembatani semua dunia ini.

Di tingkat kebijakan, ekosistem inklusif harus dijadikan dasar pengambilan keputusan pendidikan. Pembangunan infrastruktur digital harus dibarengi dengan investasi dalam literasi budaya dan spiritual. Perumusan kurikulum harus melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas lokal, bukan hanya pakar akademik. Evaluasi pendidikan harus mengukur dimensi karakter dan keterlibatan sosial, bukan hanya nilai akademik.

Ekosistem yang inklusif juga mensyaratkan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan merangkul keberagaman. Tidak ada tempat bagi diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi dalam pendidikan yang memanusiakan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang menyatukan semua latar belakang: agama, etnis, gender, dan status sosial. Guru menjadi pemimpin moral dalam menciptakan budaya sekolah yang saling menghargai.

Pembelajaran dalam ekosistem ini bersifat partisipatif, dialogis, dan berbasis komunitas. Siswa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek aktif dalam belajar. Mereka diajak berdialog, berpikir kritis, mengeksplorasi gagasan, dan terlibat dalam proyek sosial nyata. Pendidikan menjadi arena praksis, bukan sekadar transfer pengetahuan. Dalam konteks ini, konsep *merdeka belajar* menemukan makna sejatinya.

Spiritualitas dalam ekosistem inklusif juga harus dibumikan, tidak hanya dalam bentuk ibadah ritual, tetapi dalam laku kehidupan sehari-hari. Siswa diajak merenung, berdzikir, bersyukur, dan berbagi. Nilai-nilai Aswaja seperti *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* diajarkan melalui pengalaman, bukan sekadar ceramah. Spiritualitas menjadi kekuatan batin yang menuntun siswa menghadapi tantangan hidup.

Dalam dimensi tradisional, ekosistem pendidikan harus menampilkan kearifan lokal sebagai bagian integral dari pembelajaran. Kisah-kisah Walisongo, ajaran Hadratussyekh, petuah tokoh adat, dan praktik budaya seperti *selamatan*, *pengajian*, dan *berkat* menjadi sumber pembelajaran yang membentuk karakter dan identitas bangsa. Inilah bentuk pendidikan yang tidak tercerabut dari tanah airnya.

Digitalisasi dalam ekosistem ini tidak boleh bersifat eksklusif. Guru harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berasal dari daerah tertinggal dan keluarga miskin, dapat mengakses teknologi secara adil. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur, menyediakan perangkat, dan memberikan pelatihan literasi digital yang bermakna.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus menjadi pelopor dalam memfilter konten digital. Mereka harus mampu membimbing siswa untuk memilah informasi, melawan hoaks, dan menghindari konten destruktif. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi kemampuan etik dan moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Ekosistem inklusif juga menekankan pada penguatan hubungan antara sekolah dan komunitas. Sekolah tidak boleh menjadi menara gading yang terputus dari masyarakat. Orang tua, tokoh agama, pemuda, dan

pemerintah desa harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi bagian dari gerakan sosial, bukan sekadar institusi formal.

Di tengah dunia yang terus berubah, ekosistem pendidikan harus lentur namun berakar. Lentur dalam menyerap perubahan zaman, namun tetap berakar dalam nilai dan tradisi. Itulah filosofi utama yang harus dipegang dalam membangun sistem pendidikan yang mampu bertahan dan bertransformasi di era VUCA dan Society 5.0.

Membangun ekosistem ini membutuhkan kerja kolektif dan visi jangka panjang. Tidak cukup hanya mengandalkan guru, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor: dunia usaha, media, ormas, akademisi, dan negara. Setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk menyelamatkan masa depan bangsa melalui pendidikan.

Akhirnya, ekosistem inklusif adalah manifestasi dari cita-cita besar kemerdekaan: membentuk manusia Indonesia yang utuh, merdeka lahir batin, cerdas, berakhlak, dan berdaya. Pendidikan bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi proyek kemanusiaan yang berkelanjutan. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah pilar utama dalam membangun ekosistem ini, sebagai penjaga nilai, agen perubahan, dan lentera peradaban.

### **Kolaborasi NU, Pemerintah, dan Rakyat**

Dalam konteks pendidikan nasional yang kompleks dan terus berubah, kolaborasi antara Nahdlatul Ulama (NU), pemerintah, dan rakyat bukan hanya ideal, melainkan keniscayaan. Masing-masing entitas ini memiliki kekuatan strategis yang, bila disinergikan, mampu mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. NU sebagai kekuatan kultural dan moral, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, serta rakyat sebagai pemilik sah agenda pendidikan bangsa. Kolaborasi ini tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus ditopang oleh spirit gotong royong dan visi kebangsaan yang menyatu.

Secara historis, NU telah memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang pendidikan. Sejak masa pendudukan

kolonial, para ulama NU aktif mendirikan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan rakyat yang mengajarkan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Dalam konteks ini, NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi kekuatan pendidikan rakyat. Potensi ini harus terus diberdayakan dalam sistem pendidikan nasional secara struktural dan substantif.

Pemerintah, dalam posisinya sebagai pemegang otoritas negara, memiliki instrumen kebijakan yang luas untuk mendorong kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, kebijakan yang tidak menyerap aspirasi kultural dan lokal kerap gagal menyentuh akar persoalan. Di sinilah pentingnya kemitraan dengan NU sebagai mitra strategis. Melalui dialog yang setara, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih membumi, menghargai kearifan lokal, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Rakyat, sebagai penerima dan sekaligus pelaku utama pendidikan, tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan harus ditingkatkan dalam bentuk partisipasi aktif di sekolah, forum madrasah, komite pendidikan, hingga musyawarah pembangunan desa. Kolaborasi sejati mengandaikan bahwa pendidikan adalah urusan bersama, bukan hanya tanggung jawab kementerian atau dinas pendidikan semata.

Dalam kerangka ini, peran guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi sangat strategis. Mereka adalah aktor penghubung antara ketiganya. Di satu sisi, mereka memiliki afiliasi dan nilai-nilai Nahdliyin yang kuat. Di sisi lain, mereka beroperasi dalam sistem formal negara dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa menjadi mediator dialog, jembatan aspirasi, sekaligus motor penggerak transformasi pendidikan yang berakar dan berdampak.

Kolaborasi NU dan pemerintah harus dimulai dari pemetaan potensi dan kebutuhan. Pemerintah perlu menyadari bahwa banyak sekolah swasta berbasis NU berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat pinggiran yang belum terlayani sekolah negeri. Perlu ada afirmasi kebijakan seperti

bantuan BOS khusus, pelatihan guru, penguatan manajemen sekolah, hingga insentif untuk sekolah kecil dan menengah di pelosok yang dikelola warga NU.

Di sisi lain, NU sebagai organisasi harus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitasnya dalam bermitra dengan pemerintah. Lembaga pendidikan NU perlu dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis data agar mampu menunjukkan hasil nyata dan dapat dipercaya sebagai mitra pembangunan. Modernisasi kelembagaan tidak berarti meninggalkan akar tradisi, tetapi justru memperkuatnya dengan tata kelola yang lebih adaptif dan akuntabel.

Kolaborasi juga harus menghidupkan ruang partisipasi rakyat melalui model pendidikan komunitas. Misalnya, program pendidikan berbasis masjid, balai desa, atau pesantren dapat menjadi titik temu antara nilai-nilai keislaman, lokalitas, dan kebijakan negara. Dalam konteks ini, guru menjadi penggerak literasi, fasilitator dialog antar generasi, dan penjaga warisan budaya lokal dalam nuansa kebangsaan yang inklusif.

Secara strategis, NU juga dapat menjadi mitra dalam merancang kurikulum pendidikan kebangsaan, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat. Banyak tokoh NU yang memiliki kredibilitas akademik dan pengaruh moral yang kuat di akar rumput. Keterlibatan mereka dalam tim penyusun kurikulum atau konsultan kebijakan akan menjamin bahwa isi pendidikan tidak sekadar normatif tetapi juga kontekstual dan menyentuh realitas sosial.

NU juga bisa menjembatani aspirasi rakyat kecil yang seringkali tidak terdengar oleh pemerintah pusat. Melalui struktur NU yang berjenjang dari tingkat ranting hingga PBNU, dapat dibangun mekanisme komunikasi dua arah antara masyarakat dan negara dalam isu-isu pendidikan. Inilah bentuk demokrasi partisipatif dalam pendidikan yang harus terus diperjuangkan.

Dari perspektif filosofi Marhaenisme, kolaborasi ini sejatinya adalah perwujudan dari politik kerakyatan. Pendidikan tidak boleh menjadi alat reproduksi ketimpangan, tetapi harus menjadi sarana pembebasan dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, kolaborasi harus menjamin akses dan

kualitas pendidikan bagi kaum marhaen di desa, pesisir, dan daerah tertinggal. Setiap kebijakan harus berpihak pada yang kecil, lemah, dan tertinggal.

Selain itu, kolaborasi ini harus menghasilkan inovasi bersama. Misalnya, menciptakan platform digital untuk madrasah dan sekolah NU, program beasiswa khusus guru pesantren, revitalisasi balai latihan kerja berbasis pesantren, hingga kampanye literasi Aswaja-Pancasila untuk generasi Z. Kolaborasi yang bersifat programatik dan berdampak nyata lebih bermakna daripada seremoni atau retorika belaka.

Kemitraan NU dan pemerintah juga dapat ditingkatkan dalam bidang riset dan data. Misalnya, mapping sekolah-sekolah NU berbasis data spasial, pemetaan kompetensi guru NU, atau studi dampak sosial pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil riset ini akan menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Sebagai bagian dari rakyat, masyarakat umum juga harus diberdayakan sebagai mitra aktif dalam pendidikan. Misalnya, orang tua dilibatkan dalam pembelajaran melalui forum parenting Islami-Marhaenis. Komunitas lokal diajak terlibat dalam pendidikan berbasis proyek. Bahkan, pemuda NU dan mahasiswa dapat dilibatkan dalam gerakan pengabdian pendidikan yang berkesinambungan.

Dalam sistem kolaboratif ini, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. Pemerintah tidak boleh mempolitisasi NU, dan NU tidak boleh memperjualbelikan kedekatannya dengan kekuasaan. Kolaborasi ini harus dilandasi oleh niat tulus membangun peradaban bangsa melalui pendidikan. Ketika masing-masing pihak menjaga integritasnya, maka sinergi akan berjalan dengan sehat dan produktif.

Terakhir, kolaborasi ini harus berorientasi jangka panjang. Kita tidak bisa membangun pendidikan hanya berdasarkan RPJM lima tahunan. Harus ada visi besar bersama: membangun bangsa Indonesia yang berdaya saing global, tetapi tetap berpijak pada jati diri kebangsaan dan spiritualitas luhur. NU, pemerintah, dan rakyat harus menjadi satu tarikan nafas dalam agenda besar ini.

Guru Nahdliyin-Marhaenis berada di garis depan dari visi ini. Mereka bukan hanya pendidik, tetapi agen kolaborasi dan penjaga kesatuan. Lewat teladan, gagasan, dan pengabdian mereka, kolaborasi antara NU, pemerintah, dan rakyat akan menemukan bentuk konkret dalam setiap ruang kelas, majelis ilmu, dan interaksi sosial. Mereka adalah fondasi peradaban baru Indonesia.

### **Menjadi Cahaya: Guru yang Menginspirasi dan Membebaskan**

Menjadi guru di zaman yang diliputi ketidakpastian bukanlah perkara mudah. Namun, dalam kegelapan zaman yang diwarnai dekadensi moral, materialisme, polarisasi politik, dan krisis identitas, guru tetap dapat menjadi cahaya—penyuluh jalan, penenang kegelisahan, dan pembimbing arah. Istilah “menjadi cahaya” tidak dimaknai sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai pribadi yang mampu menyinari sekelilingnya melalui kejujuran, keteladanan, dan semangat keberpihakan pada kaum lemah. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah sosok yang menghadirkan harapan dalam kekeringan nilai dan kekacauan zaman.

Dalam pandangan Islam, cahaya (an-nur) merupakan simbol petunjuk Ilahi. Guru yang menghadirkan cahaya sejatinya sedang menyambungkan dirinya dengan sifat Ilahi, yaitu memberi tanpa pamrih, mendidik tanpa menindas, dan membebaskan tanpa menjajah. Ketika guru mengajar dengan cinta dan hikmah, ia sedang menyalakan lilin-lilin kecil di dalam hati muridnya. Cahaya itu mungkin redup, tapi terus menyala dan berpin-dah, membentuk mata rantai perubahan peradaban yang tak pernah padam. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar kerap lahir dari ruang-ruang pendidikan sederhana yang diterangi cahaya ketulusan guru.

Dalam kacamata Marhaenisme, cahaya guru adalah keberpihakan. Seorang guru Marhaenis tidak netral ketika melihat ketimpangan. Ia harus memihak kepada yang tertindas, kepada kaum kecil yang tertinggal dari akses pendidikan, kepada siswa-siswa yang dimiskinkan secara sistemik oleh struktur sosial yang tidak adil. Cahaya dalam Marhaenisme adalah pencerahan sosial yang membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan

ketidakadilan. Guru adalah jembatan antara cita-cita sosialisme religius dan realitas pendidikan yang penuh sekat.

Menjadi cahaya juga berarti menginspirasi, bukan sekadar mengajar. Guru yang menginspirasi tidak hanya menyampaikan isi buku teks, tetapi membentuk watak, membangkitkan keberanian, dan menanamkan kesadaran. Ia bukan hanya menjelaskan rumus atau teori, tetapi juga menyalurkan energi hidup, memberikan arah, dan menyalakan mimpi. Dalam hal ini, guru Marhaenis-Nahdliyin mengemban tugas ganda: menjadi pelita nilai dan penyalur ilmu. Ia hadir bukan sekadar sebagai pekerja pendidikan, melainkan sebagai pembentuk masa depan.

Inspirasi terbesar seorang guru sering kali tidak berasal dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia lakukan dan perjuangkan. Guru yang datang ke sekolah meski gajinya belum dibayar, yang mengajar dengan penuh semangat meskipun fasilitas minim, atau yang mendampingi siswa hingga larut malam untuk persiapan lomba—itulah sosok inspiratif sejati. Keberanian, konsistensi, dan pengorbanan adalah cahaya yang paling kuat untuk menerangi hati murid dan masyarakat.

Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak bisa bekerja secara teknokratis semata. Mereka harus menjadi aktor ideologis yang sadar akan posisi dan perannya dalam struktur sosial-politik bangsa. Ia bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi pembentuk nilai kebangsaan, penjaga akhlak, dan penggerak sosial. Dalam sistem yang cenderung menyeragamkan, guru seperti inilah yang tetap mempertahankan keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Ia membela pluralitas dan membimbing siswa untuk menerima perbedaan sebagai rahmat.

Menjadi cahaya juga berarti menjadi pembebas. Inspirasi tanpa pembebasan akan berakhir sebagai retorika. Pendidikan harus menjadi medan pembebasan dari ketidaktahuan, dari rasa rendah diri, dari hegemoni budaya global yang melucuti identitas bangsa. Guru pembebas bukan berarti guru yang memusuhi sistem, tetapi yang mampu menyadarkan murid tentang sistem itu, dan memberinya bekal untuk mengubahnya dengan cara yang konstruktif dan damai.

Dalam konteks ke-NU-an, guru sebagai cahaya membawa nilai Aswaja—tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal—dalam setiap praktik pendidikan. Ia tidak hanya mengajarkan fiqh atau akidah, tetapi juga menyampaikan kebijaksanaan hidup, seperti bagaimana bersikap adil, bersyukur, tidak sombong, serta saling menolong dalam kebaikan. Guru seperti ini menanamkan nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam bentuk tindakan sehari-hari, bukan sekadar wacana atau hafalan.

Menjadi guru yang membebaskan membutuhkan keberanian intelektual dan spiritual. Keberanian untuk menyampaikan yang benar walau berisiko, keberanian untuk mengubah cara lama yang tidak efektif, dan keberanian untuk berdiri bersama murid dan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas pendidikan yang adil dan bermakna. Cahaya tidak pernah ragu untuk menerangi walau harus bersinar di tengah kegelapan. Guru seperti inilah yang akan terus dibutuhkan bangsa.

Guru sebagai cahaya juga harus mampu membebaskan dirinya sendiri dari kungkungan sistem yang tidak berpihak. Ia harus belajar, mengembangkan diri, dan terus menggali nilai-nilai luhur dari agama, budaya, dan filsafat kebangsaan. Dalam dirinya, spiritualitas dan keilmuan menyatu. Ia tidak puas hanya menjadi pengulang materi, tetapi pembaru pikiran dan pembangkit semangat. Ia menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya pengajar.

Kisah-kisah para guru pejuang, seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, dan bahkan Soekarno muda yang pernah menjadi guru, menunjukkan bahwa pendidikan sejati dimulai dari keberpihakan pada rakyat dan keberanian untuk berpikir mandiri. Mereka bukan hanya guru secara formal, tetapi pemantik kesadaran kolektif. Ketika hari ini kita berbicara tentang guru inspiratif, maka teladan-teladan sejarah ini seharusnya menjadi cermin dan peta jalan kita.

Guru sebagai cahaya juga menghadirkan harapan dalam dunia digital yang penuh noise dan ilusi. Di tengah TikTok, konten sensasional, dan krisis fokus generasi muda, guru hadir membawa nilai: kesabaran, kedalaman, dan konsistensi. Ia menjadi kurator nilai dan pengarah konten.

Ia menyinari jagat digital bukan dengan kemarahan atau hukuman, tapi dengan penguatan karakter, literasi kritis, dan pendampingan spiritual yang manusiawi.

Tugas guru sebagai inspirator dan pembebas juga harus dibarengi dengan penciptaan ekosistem yang mendukung. Guru tidak bisa menjadi cahaya jika berada dalam sistem yang korup, represif, dan tidak berpihak. Maka, perjuangan guru harus dilengkapi dengan advokasi kebijakan, pembangunan solidaritas antar guru, serta keterlibatan aktif dalam organisasi profesi dan jaringan keilmuan. Kolaborasi menjadi sarana memperkuat sinar kecil menjadi cahaya kolektif.

Guru juga perlu mengembangkan strategi pedagogi yang inspiratif dan membebaskan. Bukan pedagogi yang otoriter dan mekanistik, melainkan dialogis, kritis, dan penuh empati. Dalam ruang kelasnya, guru menghidupkan diskusi, bukan dogma. Ia membuka ruang refleksi, bukan hanya penghafalan. Ia merangsang pertanyaan, bukan hanya memberi jawaban. Ia membangun karakter, bukan hanya mengejar angka.

Dalam membangun budaya inspiratif, guru juga harus memberi ruang pada murid untuk berkembang sesuai potensi mereka. Setiap anak memiliki cahayanya masing-masing. Tugas guru bukan membuat semua anak sama terang, tapi membantu mereka menemukan cahaya unik yang mereka miliki. Pendidikan adalah seni membebaskan dan menyalakan potensi.

Guru juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Kehadiran guru di masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan: jujur, adil, ramah, dan bersahaja. Guru yang hanya berperilaku baik di sekolah tetapi jauh dari nilai-nilai moral di luar akan kehilangan kekuatan inspirasinya. Cahaya guru harus konsisten, bukan sesaat atau bersifat panggung.

Cahaya guru juga menjadi penting dalam membangun peradaban. Peradaban tidak hanya dibangun oleh ilmuwan dan pemimpin besar, tetapi oleh jutaan guru kecil yang menerangi ruang kelas di desa-desa, di pesantren-pesantren terpencil, dan di sudut kota. Mereka adalah fondasi peradaban yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya menyentuh generasi demi generasi.

Akhirnya, menjadi cahaya adalah panggilan jiwa. Bukan karena gaji, bukan karena pujian, tapi karena keyakinan bahwa mendidik adalah bagian dari ibadah, bagian dari perjuangan, dan bagian dari cinta kepada bangsa dan umat manusia. Guru Nahdliyin-Marhaenis, dalam semangat itu, bukan hanya pengajar—mereka adalah pelita kehidupan.

### **Pendidikan Politik Kebangsaan untuk Generasi Z oleh Guru**

Dalam gelombang transformasi sosial-politik dan digital, pendidikan politik kebangsaan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak lagi bisa ditunda. Generasi Z—anak-anak muda yang lahir di era teknologi tinggi, globalisasi masif, dan pergeseran nilai—menghadapi tantangan identitas dan orientasi yang sangat kompleks. Dalam konteks inilah, guru tidak cukup hanya menjadi pengajar akademik, tetapi juga harus tampil sebagai fasilitator kesadaran politik yang kritis, inklusif, dan berlandaskan Pancasila. Pendidikan politik di sekolah bukanlah soal partai atau kekuasaan, melainkan tentang bagaimana mengembangkan daya nalar kebangsaan dan tanggung jawab publik sejak dini.

Guru Nahdliyin-Marhaenis membawa bekal filosofis dan ideologis yang kokoh untuk mengemban peran ini. Tradisi Nahdliyin mengakar pada nilai kebangsaan dan keindonesiaan melalui paham *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman), sementara Marhaenisme mengajarkan keberpihakan kepada rakyat kecil dan kesadaran akan struktur sosial yang menindas. Kolaborasi nilai-nilai ini menempatkan guru sebagai agen pendidikan politik yang membebaskan, bukan mengindoktrinasi. Mereka mendidik untuk membangkitkan kesadaran, bukan mengendalikan pikiran.

Generasi Z hidup dalam arus informasi yang deras, namun ironisnya justru kerap kehilangan orientasi nilai. Mereka memiliki akses informasi politik dari media sosial, tetapi sering kali tanpa konteks, refleksi, dan kesadaran sejarah. Inilah celah yang harus diisi oleh guru. Pendidikan politik oleh guru harus dimulai dengan membangun *historical consciousness*, yakni kesadaran sejarah tentang bangsa, perjuangan kemerdekaan, nilai-nilai

luhur konstitusi, dan kiprah para tokoh bangsa. Guru harus menyampaikan bahwa kebebasan hari ini lahir dari perjuangan yang berdarah-darah, bukan hadiah instan dari sistem.

Dalam praktiknya, pendidikan politik di sekolah dapat dikembangkan melalui integrasi lintas kurikulum, pendekatan proyek, dan forum dialogis. Guru tidak perlu mengampu mata pelajaran khusus politik, tetapi nilai-nilai politik kebangsaan dapat disisipkan dalam pelajaran sejarah, PPKn, bahasa Indonesia, bahkan dalam diskusi karya sastra. Yang utama adalah bagaimana guru membangun nalar kritis, etika kebangsaan, serta kepekaan terhadap ketidakadilan. Generasi Z perlu diajak membedakan antara kritik dengan kebencian, antara oposisi dengan pengkhianatan, dan antara partisipasi dengan manipulasi.

Pendidikan politik kebangsaan untuk Generasi Z juga menuntut guru untuk memanfaatkan pendekatan digital yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Video dokumenter, infografis interaktif, podcast tokoh-tokoh bangsa, hingga simulasi pemilu siswa bisa digunakan sebagai media penguatan kesadaran politik. Guru Marhaenis-Nahdliyin tidak alergi terhadap teknologi, justru menjadikannya sebagai sarana penyebaran nilai luhur dan pembelajaran kritis yang membumi. Inovasi dalam penyampaian menjadi kunci agar pesan politik tidak terasa kaku dan usang di mata generasi muda.

Peran guru dalam pendidikan politik kebangsaan juga menuntut keteladanan dalam kehidupan sosial. Guru yang apatis terhadap isu-isu sosial, cuek terhadap problem keadilan, dan pasif dalam kehidupan demokrasi, akan sulit dipercaya muridnya sebagai agen pembelajaran politik. Maka, guru harus tampil sebagai warga negara yang aktif, kritis, namun tetap santun dan berpijak pada etika publik. Guru harus menjadi contoh bagaimana berbeda pendapat tanpa bermusuhan, serta bagaimana menyalurkan aspirasi dengan cara yang bermartabat.

Guru juga harus menjadi pelatih demokrasi di tingkat mikro: sekolah. Mereka harus menghidupkan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan kelas, mengembangkan organisasi siswa yang demokratis, serta memberi ruang bagi perdebatan sehat dan argumentasi dalam diskusi kelas.

Di sinilah latihan politik yang sebenarnya dimulai—bukan dari teori, tetapi dari praktik hidup sehari-hari yang mengasah kepemimpinan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Sekolah menjadi miniatur negara, dan guru adalah pemimpinnya.

Dalam sejarah Indonesia, pendidikan politik yang membebaskan pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar bangsa melalui sekolah rakyat, diskusi warung kopi, hingga madrasah dan pesantren. Soekarno, Tan Malaka, KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, dan tokoh NU lainnya tidak hanya mengajarkan agama atau ilmu, tapi juga menyadarkan rakyat akan martabat dan hak-haknya sebagai warga negara. Jejak ini yang seharusnya dilanjutkan oleh guru masa kini, terutama dari kalangan Nahdliyin dan Marhaenis.

Dalam konteks kebijakan, pendidikan politik kebangsaan masih belum mendapat porsi yang kuat dan sistematis di kurikulum nasional. Oleh karena itu, inisiatif guru menjadi penentu. Guru harus mampu merancang inisiatif sendiri dalam mengintegrasikan kesadaran politik dalam setiap aktivitas pendidikan, termasuk kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, literasi sekolah, hingga pembelajaran proyek. Kesadaran tidak tumbuh karena doktrin, melainkan dari pengalaman belajar yang reflektif, terbuka, dan relevan.

Krisis politik yang diwarnai oleh polarisasi, hoaks, dan politik identitas bisa menjadi ancaman besar bagi masa depan Indonesia jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang sehat. Generasi Z adalah generasi yang akan memegang kendali bangsa dalam 20 tahun ke depan. Jika mereka tumbuh dalam ruang digital yang penuh kebencian tanpa pendampingan, maka masa depan demokrasi Indonesia akan rapuh. Peran guru menjadi sangat vital untuk mengarahkan arah sejarah ini ke jalur yang benar.

Guru Nahdliyin-Marhaenis harus tampil sebagai arsitek kesadaran politik yang bermartabat. Mereka tidak berpolitik praktis, tetapi menyemaikan nilai-nilai politik luhur: keadilan sosial, persatuan, penghormatan pada konstitusi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Guru membangun mental “warga negara pembelajar”, bukan hanya “pemilih pasif”. Dalam

kelasnya, guru menanamkan makna memilih bukan karena uang, tetapi karena nilai. Menolak korupsi bukan karena takut, tetapi karena integritas.

Perlu ditegaskan pula bahwa pendidikan politik tidak boleh bersifat satu arah atau dogmatis. Guru harus menciptakan ruang dialektika, tempat siswa bebas bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan sudut pandangnya secara bertanggung jawab. Di sinilah prinsip pedagogi kritis Paulo Freire menjadi relevan—pendidikan sebagai praksis pembebasan, bukan sebagai alat dominasi ideologi tertentu. Guru membimbing bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab kebangsaan.

Dalam nuansa multikultural Indonesia, pendidikan politik juga harus menanamkan nilai toleransi dan keberagaman. Guru harus mengajak murid memahami bahwa Indonesia dibangun oleh berbagai etnis, agama, dan budaya. Nasionalisme yang sehat tidak memusuhi yang berbeda, melainkan merangkul dan melindungi keberagaman. Inilah esensi dari politik kebangsaan ala Pancasila. Guru menjadi penjaga nilai-nilai tersebut melalui pendekatan kontekstual yang berakar pada realitas lokal siswa.

Untuk membumikan nilai-nilai tersebut, guru dapat menggunakan metode narasi dan kisah nyata. Cerita tentang pahlawan daerah, perjuangan tokoh NU dan Marhaen dalam menjaga bangsa, serta kisah-kisah inspiratif guru di pelosok menjadi bahan ajar yang kuat. Murid belajar bahwa politik bukan sekadar kampanye dan kekuasaan, tapi soal tanggung jawab sosial dan moral. Guru menjadi penutur sejarah dan pembawa nyala nilai.

Guru juga harus mendorong generasi Z untuk aktif dalam aksi-aksi sosial yang konstruktif: gerakan lingkungan, kampanye literasi, kegiatan sukarela, dan advokasi lokal. Pendidikan politik bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga di jalanan, di media sosial, dan dalam tindakan nyata. Guru menjadi pendamping dalam setiap proses ini, memastikan bahwa aktivisme siswa tetap dalam koridor etika dan hukum.

Sebagai bagian dari roadmap 2045, pendidikan politik kebangsaan harus menjadi pilar penting dalam perencanaan pendidikan jangka panjang. Pemerintah, LPTK, dan ormas keagamaan seperti NU harus

menyusun panduan implementatif yang memungkinkan guru menjalankan peran ini secara sistematis dan konsisten. Sertifikasi kompetensi guru juga sebaiknya mencakup aspek pendidikan politik yang kontekstual.

Akhirnya, guru Nahdliyin-Marhaenis adalah suluh di tengah zaman yang semakin kompleks. Ia tidak hanya menerangi kelas, tetapi juga jalan sejarah bangsa. Pendidikan politik kebangsaan bukanlah pilihan, tetapi amanah sejarah. Guru harus mengambil peran ini dengan keberanian dan kebijaksanaan—untuk melahirkan generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga sadar, bijak, dan cinta tanah air dengan sepenuh hati.

### **Roadmap Integrasi Teknologi dengan Aswaja dan Pancasila**

Integrasi teknologi dalam pendidikan bukanlah sekadar peralihan dari papan tulis ke layar sentuh, melainkan transformasi paradigma dan nilai. Dalam konteks bangsa Indonesia, yang berdiri kokoh di atas fondasi Pancasila dan mengakar kuat dalam tradisi Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah), transformasi teknologi mesti dijalankan dengan kesadaran nilai. Teknologi tidak boleh membutakan nurani, dan kecanggihan digital tidak boleh menggantikan kebijaksanaan tradisional. Roadmap integrasi teknologi dengan Aswaja dan Pancasila adalah upaya merancang arah masa depan pendidikan digital Indonesia yang tetap berpijak pada nilai keimanan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Guru Nahdliyin-Marhaenis berada di garda terdepan dalam misi besar ini. Mereka memiliki warisan tradisi intelektual Islam Nusantara yang lentur terhadap perubahan namun kokoh dalam prinsip. Aswaja sebagai kerangka epistemologis memiliki kemampuan adaptif luar biasa: ia merangkul kemajuan sambil mempertahankan maqasid syariah dan akhlakul karimah. Ketika dunia berubah cepat karena kecerdasan buatan, big data, dan metaverse, guru-guru ini harus mampu memetakan integrasi teknologi dengan nilai asasi: tauhid, tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Nilai-nilai tersebut menjadi etika dasar pemanfaatan teknologi pendidikan.

Pancasila, dengan lima silanya yang saling bertaut dan menyusun bangunan nilai bangsa, juga menjadi rujukan strategis dalam roadmap digitalisasi pendidikan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus menjelma dalam desain sistem informasi sekolah, media pembelajaran digital, maupun dalam kurikulum berbasis teknologi. Ini berarti bahwa digitalisasi tidak cukup hanya soal aplikasi dan platform, tetapi juga tentang bagaimana membuat teknologi menjadi sarana penanaman nilai Pancasila secara sistemik, kontinyu, dan bermakna.

Langkah awal dalam roadmap ini adalah membangun kesadaran nilai di kalangan pengambil kebijakan dan pengembang teknologi pendidikan. Sistem digital yang kita bangun harus bebas dari bias ideologi ekstrem, tidak permisif terhadap konten kekerasan, hoaks, dan pornografi, serta mampu mempromosikan narasi keindonesiaan yang inklusif. Perlu audit nilai terhadap setiap konten dan aplikasi pendidikan. Di sinilah peran guru Nahdliyin-Marhaenis sebagai pengawas etika digital menjadi penting: mereka bukan hanya pengguna, tapi juga penjaga nilai.

Integrasi nilai Aswaja dalam pembelajaran digital juga bisa dilakukan melalui produksi konten pembelajaran berbasis pesantren. Kitab-kitab kuning, syair-syair hikmah, dan narasi-narasi perjuangan ulama bisa dikemas dalam bentuk podcast, video animasi, e-book interaktif, hingga game edukatif. Generasi Z dan Alpha tidak akan terhubung dengan teks klasik yang kaku, tetapi bisa tersentuh melalui desain grafis yang kreatif dan bahasa yang komunikatif. Ini bukan sekadar digitalisasi konten, tapi kontekstualisasi nilai melalui media baru.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila juga harus hadir dalam ruang-ruang digital yang sehari-hari diakses siswa. Platform pembelajaran harus mengandung unsur pemupukan budi pekerti, gotong royong digital, etika bersosial media, hingga nilai bela negara. Kecakapan digital tidak boleh dilepaskan dari kecakapan moral. Oleh karena itu, roadmap ini menuntut lahirnya platform yang tidak netral secara nilai, tetapi aktif mempromosikan etika kebangsaan yang konstruktif dan visioner.

Lembaga pendidikan perlu dilengkapi dengan kurikulum yang tidak hanya membahas *digital skills*, tetapi juga *digital ethics*. Dalam semangat Aswaja dan Pancasila, siswa diajarkan bukan hanya bagaimana menggunakan internet, tetapi bagaimana bermuamalah secara baik di dalamnya. Ini mencakup literasi data, kecermatan informasi, etika berkomunikasi di ruang publik, dan kesadaran akan jejak digital. Guru menjadi model dalam hal ini: mereka harus membangun kepercayaan digital (*digital trust*) melalui praktik, bukan sekadar teori.

Roadmap ini juga mencakup pelatihan guru secara menyeluruh. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus dibekali dengan keterampilan teknologi pendidikan yang mutakhir tanpa mengorbankan identitasnya. Mereka perlu didukung oleh pelatihan yang mengintegrasikan konten keislaman, kearifan lokal, serta semangat pembebasan Marhaenisme ke dalam desain e-learning. Pelatihan ini harus bersifat transformatif, bukan hanya transfer pengetahuan teknis, tetapi juga rekonstruksi paradigma pengajaran.

Kementerian Pendidikan dan lembaga penyelenggara LPTK perlu memasukkan aspek nilai ke dalam semua rencana transformasi digital. Modul-modul pendidikan Aswaja dan Pancasila berbasis digital bisa menjadi materi wajib dalam Program Guru Penggerak maupun sertifikasi guru. Bahkan dalam pengembangan Learning Management System (LMS), perlu ada fitur-fitur refleksi nilai, diskusi spiritual, dan literasi ideologis yang mendalam. Integrasi ini adalah bentuk penyadaran bahwa teknologi tidak pernah netral.

Selain itu, perlu dibangun komunitas pembelajaran guru yang fokus pada inovasi digital berbasis nilai. Komunitas ini akan menjadi ruang berbagi praktik baik, diskusi tantangan etika digital, dan pengembangan konten edukatif yang membebaskan dan mendidik. Komunitas ini bisa difasilitasi oleh NU, LPTK, maupun Kemendikbudristek, dengan prinsip kolaboratif, terbuka, dan lintas sektor.

Roadmap juga harus menysasar daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan strategi afirmatif. Guru-guru di wilayah tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, pelatihan, serta insentif agar

mampu menjalankan pendidikan digital yang tidak melupakan nilai-nilai luhur. Ketimpangan digital tidak boleh menghasilkan ketimpangan ideologi. Justru dari pinggiranlah, semangat Aswaja dan Pancasila bisa tumbuh dengan lebih murni dan kuat.

Dalam membangun roadmap ini, perlu pula keterlibatan DUDI (dunia usaha dan industri) yang berkomitmen terhadap pembangunan SDM berkarakter. Dunia usaha tidak boleh hanya melihat teknologi sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen kebudayaan. Perlu dikembangkan kemitraan antara pesantren digital dan industri kreatif untuk membangun ekosistem konten pembelajaran yang berkualitas, bermuatan nilai, dan inklusif secara sosial.

Kolaborasi antarormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, juga sangat strategis untuk memperkuat basis etika dan kebangsaan dalam era digital. Roadmap ini bukan proyek eksklusif satu kelompok, tetapi jalan bersama menuju bangsa digital yang religius, inklusif, dan humanistik. Dalam titik ini, integrasi Aswaja dan Pancasila menjadi fondasi etika bersama yang menuntun arah transformasi digital nasional.

Guru Nahdliyin-Marhaenis harus menyadari bahwa tantangan integrasi ini bukan hanya teknis, tetapi juga ideologis dan epistemologis. Dunia digital menciptakan budaya baru: kecepatan, disrupsi, distraksi, dan simplifikasi. Tugas guru adalah membawa kedalaman, ketenangan, dan hikmah dalam budaya tersebut. Mereka tidak menolak teknologi, tetapi mengarahkannya untuk maslahat dan keberadaban umat.

Dengan komitmen nilai, roadmap ini juga membuka peluang lahirnya inovasi lokal yang mampu bersaing di tingkat global. Produk digital berbasis Aswaja dan Pancasila bukan sekadar konsumsi dalam negeri, tetapi juga kontribusi peradaban Indonesia ke dunia. Kita tidak sekadar mengimpor teknologi, tapi juga mengekspor nilai dan narasi kebangsaan.

Pada akhirnya, roadmap integrasi teknologi dengan Aswaja dan Pancasila adalah jalan panjang dan strategis untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadi dehumanisasi. Sebaliknya, teknologi menjadi jembatan menuju pendidikan yang membebaskan, menumbuhkan,

dan menghidupkan. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah garda depan dari proyek agung ini—sebagai penjaga nilai di tengah pusaran inovasi.

Mereka adalah pemikul obor tradisi dan pemandu arah masa depan. Melalui mereka, Indonesia tidak hanya menjadi negara digital, tetapi juga bangsa yang bijak, religius, adil, dan beradab. Di tangan merekalah, teknologi menjadi alat emansipasi, bukan alat dominasi; menjadi sarana menyatukan, bukan memecah belah. Inilah cita-cita pendidikan masa depan: *berbasis nilai, berwawasan global, dan berpijak pada bumi nusantara*.

## Penutup: Kembali ke Akar, Melompat ke Masa Depan

Di tengah gelombang perubahan global, ketika dunia bergeser dari satu zaman ke zaman lain dengan kecepatan tak terduga, pendidikan tetap menjadi jangkar yang mengikat masa lalu, mengarahkan masa kini, dan menyiapkan masa depan. Bab penutup ini tidak sekadar berfungsi sebagai simpulan dari seluruh bab yang telah diuraikan, tetapi menjadi simpul narasi, pemaknaan ulang, dan perenungan mendalam terhadap perjalanan intelektual dan praksis para guru Nahdliyin-Marhaenis di tanah air. Melalui pendekatan historis dan filosofis, bab ini berupaya mengembalikan pendidikan pada akar terdalamnya—nilai—sekaligus memberinya sayap untuk melompat menjangkau masa depan.

Kembali ke akar tidak berarti mundur. Sebaliknya, itu adalah upaya sadar untuk menyadari fondasi keberadaan kita sebagai bangsa dan umat beragama. Akar itu bisa ditemukan dalam semangat keilmuan para ulama pesantren, dalam perjuangan kaum Marhaen yang terpinggirkan namun bangkit melawan ketidakadilan, dan dalam semangat gotong royong serta kasih sayang yang membentuk jalinan kehidupan masyarakat Indonesia. Guru, dalam konteks ini, bukan hanya penyampai kurikulum, tetapi penyambung sejarah, pembawa obor nilai, dan penafsir masa depan bangsa.

Melompat ke masa depan artinya tidak hanya berani menghadapi tantangan zaman—seperti VUCA, Society 5.0, atau revolusi digital—tetapi juga mampu menciptakan arah dan desain baru bagi pendidikan Indonesia.

Guru Nahdliyin-Marhaenis yang mampu berpijak pada akar kultural, religius, dan ideologis bangsa akan menjadi penggerak utama perubahan yang tidak terjebak dalam pragmatisme teknologi semata, melainkan membentuk paradigma pendidikan yang inklusif, bermartabat, dan kontekstual.

Bab ini juga akan memunculkan kembali makna “guru” sebagai profesi profetik. Dalam sejarah bangsa ini, guru adalah tokoh yang mendidik sambil membebaskan, membangun sambil mendoakan, menanamkan logika sambil menumbuhkan cinta. Dari Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari hingga Ki Hajar Dewantara, dari Soekarno hingga para guru di pelosok desa, semua menyadari bahwa pendidikan tidak sekadar alat mobilitas sosial, tetapi cara membangun martabat manusia.

Ketika gagasan dan praksis pendidikan disatukan dalam diri seorang guru, maka lahirlah figur transformatif. Bukan sekadar pengajar mata pelajaran, tapi pengasuh jiwa dan pemimpin nilai. Guru-guru seperti inilah yang dimaksud dalam istilah “Guru Nahdliyin-Marhaenis”: mereka tidak terjebak dalam politik identitas sempit, tetapi menapaki jalan ideologis yang berpihak pada keadilan, keberagaman, dan keberlanjutan.

Pengantar ini juga menekankan bahwa transformasi pendidikan bukan tugas elit intelektual semata, melainkan kerja kolektif yang dimulai dari ruang kelas. Kelas tidak lagi hanya tempat duduk dan papan tulis, tetapi ruang dialektika antara kearifan lokal dan tantangan global. Guru adalah arsitek narasi baru: bagaimana merancang pembelajaran yang kontekstual dan spiritual, bagaimana menyambungkan antara nilai Aswaja dan dunia digital, serta bagaimana menjadikan Pancasila sebagai napas dari sistem pendidikan yang hidup.

Dalam bab penutup ini, kita akan menyusun simpul narasi dari setiap dimensi yang telah diurai—dari literasi digital hingga spiritualitas, dari kritik sosial hingga strategi implementatif. Simpul ini membentuk semacam “peta nilai” yang bisa menjadi panduan praktis maupun reflektif bagi para guru, pembuat kebijakan, dan pendidik bangsa ke depan.

Manifesto Guru Nahdliyin-Marhaenis yang akan disajikan menjadi kristalisasi dari pengalaman historis dan gagasan filosofis sepanjang buku

ini. Ia bukan sekadar dokumen normatif, melainkan suara hati dari ruang kelas, dari pesantren, dari kampung, dari perbatasan, yang menyuarakan harapan dan tuntutan masa depan pendidikan Indonesia.

Tidak hanya itu, bab ini juga akan menghadirkan doa-doa. Karena dalam tradisi keilmuan Islam dan dalam semangat perjuangan Marhaen, doa bukanlah sekadar ritual personal. Doa adalah bentuk perjuangan simbolik dan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, sekaligus mengokohkan harapan kolektif untuk bangsa dan generasi penerus. Doa dari para ulama dan proklamator akan mengisi ruang ini dengan energi yang tak bisa ditemukan dalam teori-teori modern.

Di antara narasi dan doa itu, akan muncul juga “mantra nilai”—sebuah ekspresi puitik-filosofis: *berpijak pada tanah, menatap langit*. Inilah semangat yang dibutuhkan oleh setiap guru yang ingin menyeimbangkan antara realitas kehidupan dan idealitas perjuangan. Antara keseharian dan impian. Antara akal dan rasa. Antara digitalisasi dan spiritualisasi.

Epilog dari bab ini akan menutup dengan satu kesadaran penting: jalan guru adalah jalan panjang yang tak pernah usai. Di balik keheningan kelas, di balik papan tulis dan laptop, ada perjuangan sunyi yang terus berlangsung—membentuk karakter, menyemai kesadaran, dan membangun peradaban. Pendidikan tidak pernah selesai. Ia selalu bergerak, sebagaimana hidup yang terus mengalir dan nilai yang terus diperjuangkan.

Dengan demikian, bab ini adalah undangan untuk kembali merenung dan bergerak. Kembali pada akar yang telah menghidupi bangsa ini—Aswaja, Marhaenisme, dan Pancasila—dan melompat ke masa depan yang lebih cerah, adil, dan bermartabat. Dalam tangan guru-guru yang tercerahkan dan berdaya, harapan itu menjadi nyata.

### **Simpul narasi: nilai, strategi, dan harapan transformative**

Setelah membentangkan pemikiran dari berbagai perspektif—Aswaja, Marhaenisme, Pancasila, hingga Society 5.0—maka tibalah saatnya untuk merangkai simpul-simpul narasi besar itu ke dalam pemahaman yang menyeluruh, strategis, dan penuh harapan. Subbab ini menjadi jembatan

yang menyatukan antara nilai-nilai yang dijadikan fondasi, strategi yang dirancang untuk praksis, dan harapan yang mengarah ke transformasi pendidikan yang berkeadilan. Guru Nahdliyin-Marhaenis menjadi pusat dalam poros narasi ini, sebagai pribadi yang menautkan dimensi spiritual, kultural, sosial, dan digital.

Nilai adalah napas utama dalam seluruh praktik pendidikan. Tanpa nilai, pembelajaran hanya menjadi proses mekanis yang hampa. Dalam konteks Guru Nahdliyin-Marhaenis, nilai-nilai yang dihidupkan bukan hanya moral individual, tetapi juga etika kolektif: kasih sayang, keberpihakan pada yang lemah (*mustadh'afin*), cinta tanah air, toleransi, dan kejujuran. Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan ideologi Marhaenisme yang membumi dalam kehidupan rakyat kecil.

Strategi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi zaman yang dihadapi. Guru di era VUCA dan Society 5.0 harus mampu membangun strategi yang fleksibel, kontekstual, dan memberdayakan. Tidak cukup hanya dengan pendekatan pedagogi klasik, guru juga harus memiliki strategi digital, manajerial, sosial, dan spiritual. Strategi ini harus merespons kebutuhan komunitas, memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta membangun jejaring yang kuat di antara stakeholders pendidikan.

Salah satu strategi transformasional yang perlu ditegaskan adalah memperkuat kesadaran guru sebagai pemimpin komunitas. Guru bukan hanya pekerja birokrasi, tetapi pembentuk kesadaran dan arah masa depan masyarakat. Dalam posisi ini, guru berperan sebagai katalis perubahan, baik dalam cara berpikir, cara hidup, maupun cara mendidik generasi muda. Kepemimpinan guru adalah kepemimpinan moral dan profetik.

Harapan menjadi elemen pengikat antara nilai dan strategi. Tanpa harapan, pendidikan menjadi kerja sia-sia. Namun, harapan dalam konteks ini bukanlah impian kosong. Ia dibangun dari pemahaman mendalam akan sejarah, kesadaran akan realitas, dan kemampuan membayangkan masa depan. Harapan itu diwujudkan dalam tindakan kecil: menghadiri rapat orang tua, memberi motivasi kepada murid, membuat media ajar yang relevan, atau sekadar menyapa siswa dengan penuh cinta.

Simpul narasi ini menegaskan bahwa menjadi guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan historis. Guru adalah saksi zaman, penyambung nilai antar generasi, dan penafsir konteks kekinian yang tak pernah habis. Sebagaimana ulama terdahulu mengajarkan ilmu dalam keterbatasan, guru hari ini harus mengajarkan makna hidup di tengah derasnya arus digital dan disrupsi.

Dalam simpul ini juga ditemukan urgensi penguatan literasi kritis. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus membekali siswa dengan kemampuan membaca dunia, bukan sekadar membaca teks. Literasi kritis memungkinkan siswa memahami realitas sosial, melihat ketimpangan, serta menumbuhkan kepekaan terhadap masalah bangsa. Pendidikan bukan meninabobokan, tetapi membangkitkan kesadaran.

Ketika strategi dijalankan dalam kerangka nilai, maka hasilnya bukan hanya output kognitif, tetapi transformasi karakter dan peradaban. Murid bukan hanya menjadi lulusan yang siap kerja, tetapi menjadi manusia yang bermartabat, berempati, dan cinta tanah air. Di sinilah peran guru menjadi vital dan tak tergantikan oleh teknologi.

Nilai, strategi, dan harapan ini harus dikontekstualisasikan ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi sosial di sekolah. Guru tidak boleh lelah dalam menyisipkan semangat kebangsaan, jiwa religius yang toleran, dan kebijaksanaan lokal ke dalam proses pendidikan. Pendidikan harus menjadi ruang kontestasi yang sehat antara warisan dan modernitas.

Simpul narasi ini juga menantang kebijakan pendidikan agar berpihak kepada guru akar rumput. Terlalu banyak kebijakan dibuat tanpa mendengar suara mereka yang langsung bersentuhan dengan murid. Maka, pemerintah dan lembaga pendidikan guru harus belajar dari praktik nyata, dari pesantren, dari sekolah desa, dari guru yang menyulut semangat meski minim fasilitas.

Harapan transformatif juga berarti keberanian untuk bermimpi besar. Membayangkan SMK di pelosok menjadi pusat inovasi, madrasah menjadi simpul pemberdayaan ekonomi lokal, dan pesantren menjadi mercusuar

toleransi. Mimpi ini hanya akan hidup jika guru menjadi pusat dari semua gerakan itu. Simpul nilai dan strategi ini tidak berhenti di tangan guru saja. Masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pendidikan. Orang tua, tokoh agama, pemimpin lokal, semuanya harus dilibatkan dalam ekosistem pendidikan yang sehat. Pendidikan bukan proyek sekolah semata, tetapi proyek kemanusiaan bersama.

Refleksi sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini lahir dari ruang pendidikan. Tokoh seperti Soekarno, Hasyim Asy'ari, Tan Malaka, dan Ki Hajar Dewantara tumbuh dari tradisi belajar yang membebaskan. Kini, giliran para guru yang meneruskan estafet sejarah itu, dalam versi yang baru namun tetap setia pada nilai-nilai aslinya. Simpul narasi ini juga menjadi kritik terhadap sistem pendidikan yang terlalu teknokratis. Pendidikan adalah seni dan perjuangan, bukan sekadar pengisian form dan laporan angka. Guru butuh ruang refleksi, ruang pertumbuhan, dan pengakuan atas integritasnya.

Transformasi pendidikan bukan utopia. Ia nyata jika kita memulainya dari kesadaran kecil. Dari cara kita memperlakukan murid, dari cara kita bicara di kelas, dari cara kita memilih bahan ajar, bahkan dari cara kita memaknai hidup sebagai guru. Simpul narasi ini hendak mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar jalan menuju pekerjaan, tapi jalan menuju kemerdekaan batin, pembebasan sosial, dan penyelamatan masa depan bangsa. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah penjaga jalan ini.

Jika pendidikan adalah pohon, maka nilai adalah akarnya, strategi adalah batangnya, dan harapan adalah buahnya. Semua bagian itu saling terhubung dan saling menguatkan. Tanpa satu, pohon akan tumbang atau mandul. Dengan simpul ini, buku ini ingin membentuk kesadaran baru: bahwa guru adalah agen sejarah yang tak boleh terputus dari akar nilai dan tak boleh kehilangan arah masa depan. Bahwa pendidikan adalah medan perjuangan paling suci, karena ia menyangkut martabat manusia.

Akhirnya, simpul narasi ini adalah undangan untuk tidak menyerah pada keadaan. Untuk terus percaya bahwa satu guru bisa mengubah satu

murid, satu kelas, satu desa, bahkan satu bangsa. Dan bahwa perubahan besar dimulai dari ruang-ruang kecil yang dikelola dengan cinta dan nilai.

### **Manifesto Guru Nahdliyin-Marhaenis**

Manifesto ini lahir dari refleksi panjang tentang krisis, harapan, dan arah transformasi pendidikan Indonesia. Ia tidak lahir dari ruang seminar atau ruang-ruang steril akademik, tetapi dari denyut kehidupan nyata guru-guru yang mengajar dalam keterbatasan, mendidik dengan cinta, dan berdiri tegak menjaga peradaban. Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah pribadi yang berakar pada nilai spiritual, berani menyuarakan keadilan sosial, dan memiliki integritas dalam menghadapi zaman yang berguncang.

Menjadi guru Nahdliyin-Marhaenis berarti menghidupkan tradisi Aswaja yang ramah, toleran, dan membumi dalam setiap dimensi pendidikan. Guru bukan sekadar menghafal fiqh, tetapi menjadi pelaku etika, pelaku kasih sayang, dan penjaga rahmah. Ia tidak mengajarkan ajaran Islam yang sempit, tetapi Islam yang menyapa perbedaan dan memeluk keragaman.

Dalam saat bersamaan, ia juga merawat semangat Marhaenisme yang berpihak pada wong cilik, pada mereka yang tersingkirkan oleh sistem. Manifesto ini menolak segala bentuk ketimpangan pendidikan, kapitalisme akademik, dan komersialisasi pengetahuan yang menjadikan murid sebagai komoditas. Bagi guru Marhaenis, pendidikan adalah pembebasan: dari kebodohan, kemiskinan, dan penindasan budaya.

Guru Nahdliyin-Marhaenis sadar bahwa dunia sedang berubah cepat. Teknologi melesat, informasi membanjir, dan sistem nilai menjadi cair. Dalam situasi ini, guru tidak boleh gagap atau apatis. Ia harus hadir dengan kecakapan digital, tetapi tidak kehilangan nurani. Ia harus mampu menggunakan teknologi sebagai alat dakwah, pemberdayaan, dan pemerdekaan murid.

Manifesto ini menyatakan bahwa guru harus menjadi teladan etika. Bukan hanya lisan yang baik, tetapi juga keteladanan dalam hidup. Ia harus jujur, adil, sederhana, dan berani mengatakan benar adalah benar. Ia bukan

pegawai pasif birokrasi, tetapi pemikir dan penggerak moral masyarakat. Dalam hidupnya terpantul nilai Pancasila yang menyatu dengan akhlak Islam dan keberpihakan sosial.

Manifesto ini menegaskan bahwa guru tidak berdiri sendiri. Ia harus berjejaring—dengan pesantren, dengan komunitas lokal, dengan tokoh adat, bahkan dengan dunia usaha yang memiliki visi humanistik. Pendidikan harus dijalankan secara gotong royong, lintas batas, dan penuh kepercayaan sosial.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus menjadi narator alternatif di tengah dominasi narasi global. Ia harus menceritakan sejarah bangsanya sendiri, mewariskan nilai lokal, dan menumbuhkan kebanggaan pada jati diri anak-anak Indonesia. Pendidikan tidak boleh terputus dari akar budaya dan sejarah perjuangan bangsanya.

Dalam manifesto ini juga ditegaskan pentingnya keberanian. Guru harus berani berkata tidak pada kebijakan yang mencederai nilai kemanusiaan. Ia harus kritis terhadap sistem yang melahirkan ketimpangan struktural, dan aktif menyuarakan perubahan. Guru adalah intelektual organik yang berjuang dari kelas-kelas kecil menuju wacana besar nasional.

Manifesto ini menolak gaya hidup konsumtif yang sering menjebak guru dalam siklus pasif. Guru Nahdliyin-Marhaenis memilih hidup sederhana, produktif, dan berdampak. Ia tidak sibuk memburu status, tetapi sibuk memperbaiki nasib murid-muridnya. Ia hadir dalam diam, tetapi meninggalkan jejak perubahan yang dalam.

Manifesto ini juga mengafirmasi spiritualitas sebagai pusat kekuatan guru. Bukan spiritualitas ritualistik semata, tetapi spiritualitas praksis: keikhlasan, kesabaran, dan ketekunan sebagai bentuk ibadah. Mengajar bukan semata profesi, tetapi jalan jihad dan amal jariyah. Kelas bukan ruang kerja, tetapi ruang sakral untuk menanamkan nilai.

Guru dalam manifesto ini mengintegrasikan iman dan ilmu. Ia tidak mengajarkan sains tanpa akhlak, atau agama tanpa akal. Ia menanamkan keseimbangan antara hati, pikir, dan tindakan. Murid diajak berpikir kritis tanpa kehilangan keimanan, dan beriman tanpa kehilangan daya analisis.

Manifesto ini menantang LPTK dan pemerintah untuk merevolusi sistem pendidikan guru. Pendidikan calon guru harus menekankan nilai keberpihakan, kreativitas, refleksi, dan kearifan lokal. LPTK harus menghasilkan guru-guru yang tidak hanya cerdas secara teori, tetapi tangguh dalam praksis sosial. Guru Nahdliyin-Marhaenis dalam manifesto ini juga berkomitmen membangun sekolah sebagai ruang demokratis, bukan otoriter. Ia memberi ruang dialog, partisipasi, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Ia tidak mencetak murid patuh, tetapi murid sadar dan peduli.

Manifesto ini menyatakan bahwa guru adalah agen pembentukan nalar publik. Ia harus hadir dalam ruang-ruang diskusi sosial, menulis, berbicara, dan menyampaikan pandangan dengan jernih dan bertanggung jawab. Guru tidak boleh diam dalam kekacauan sosial; ia harus menjadi suara akal sehat. Pendidikan menurut manifesto ini adalah perjuangan lintas generasi. Guru harus berpikir jangka panjang, menanam benih untuk masa depan yang mungkin tidak ia tuai sendiri. Ia tidak terburu-buru mengejar hasil instan, tetapi bersabar dalam membangun manusia yang utuh.

Manifesto ini juga merangkul pluralitas. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak memaksakan seragam pikiran, tetapi mengajak berpikir dalam keberagaman. Ia merayakan perbedaan, menjembatani paham, dan membangun dialog lintas iman, suku, dan ideologi dalam suasana damai dan saling menghormati. Guru dalam manifesto ini adalah penjaga bumi. Ia menanamkan kesadaran ekologi, cinta lingkungan, dan gaya hidup berkelanjutan. Ia mengajarkan bahwa mencintai tanah air bukan hanya simbolik, tetapi nyata dalam aksi menjaga alam dan kearifan lokal.

Akhirnya, manifesto ini adalah seruan untuk hidup bermakna. Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak ingin dikenang karena jabatan atau titel, tetapi karena kehadirannya yang tulus dan mendalam dalam kehidupan murid dan masyarakat. Ia adalah penabur cahaya dalam gelap, pembuka jalan di tengah keruwetan, dan penuntun di tengah kehilangan arah.

Dalam dunia yang kacau, manifesto ini menjadi pelita. Menjadi guru tidak hanya butuh kompetensi, tetapi juga komitmen dan keberanian

moral. Dan Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah teladan paling utuh dari perjuangan itu—berakar dalam nilai, berdiri di tengah rakyat, dan menatap masa depan dengan optimisme yang berpijar.

## **Doa dan Renungan untuk Pendidikan Indonesia**

Dalam sunyi yang panjang, doa menjadi bahasa terdalam dari harapan dan perjuangan. Seorang guru bukan sekadar pengajar, tetapi juga pendoa yang setia. Doa yang tak pernah terdengar di media massa, tetapi menggema di langit karena keikhlasan dan tangisan hati. Dalam ranah pendidikan Indonesia yang penuh dinamika, doa bukan pelarian, melainkan kekuatan laten yang meneguhkan langkah perubahan.

Di tengah tantangan kurikulum yang berubah-ubah, infrastruktur yang timpang, dan tekanan administratif yang menghimpit, guru tetap datang ke sekolah. Ia mengajar bukan karena upah, melainkan karena panggilan jiwa. Doa yang ia panjatkan bukan hanya agar dirinya kuat, tetapi agar anak-anak muridnya menjadi manusia utuh: berpikir jernih, berhati bersih, dan bertindak arif.

Doa seorang guru Nahdliyin-Marhaenis bukan hanya berisi permintaan pribadi, melainkan cita-cita kebangsaan. Ia berdoa agar negeri ini tidak kehilangan akarnya. Ia berdoa agar pendidikan tidak menjadi mesin pencetak pekerja semata, tetapi kawah candradimuka untuk para pemimpin masa depan yang berjiwa merdeka, berpihak pada wong cilik, dan setia kepada Pancasila serta nilai-nilai Aswaja.

Renungan guru tentang pendidikan Indonesia selalu berpaut dengan rasa tanggung jawab sejarah. Ia sadar bahwa ia bukan hanya mendidik anak-anak individu, tetapi sedang merajut masa depan bangsa. Dalam ruang kelas sederhana, di sekolah desa, atau di madrasah kecil, ia menanam benih peradaban yang mungkin baru tumbuh dalam dua dekade mendatang. Namun ia tetap menanam, dengan penuh sabar dan cinta.

Pendidikan tidak akan pernah menjadi benar jika guru tidak diberi ruang untuk tumbuh. Guru harus terus belajar, dibekali dengan pelatihan yang membumi dan bermakna. Renungan ini menjadi alarm moral bagi

pemerintah dan para pemangku kebijakan: Jangan biarkan guru berjalan sendiri. Jangan reduksi peran guru menjadi sekadar pelaksana kurikulum. Mereka adalah arsitek nilai.

Doa juga terucap agar bangsa ini tidak silau oleh teknologi dan investasi asing, tetapi tetap memiliki arah dan nilai sendiri. Dalam Society 5.0, ketika manusia nyaris menjadi mesin algoritma, guru harus menjadi penjaga jiwa. Mereka harus mengajarkan makna hidup, bukan hanya keterampilan kerja. Mereka harus menjaga nilai, bukan hanya menyampaikan data.

Dalam setiap renungannya, guru memimpikan sekolah yang bebas dari kekerasan, baik fisik maupun simbolik. Sekolah yang ramah, adil gender, inklusif, dan menjadi tempat tumbuh bagi semua, tanpa diskriminasi agama, ras, status sosial, atau orientasi politik. Doa ini adalah harapan universal yang lahir dari nilai-nilai Aswaja dan Marhaenisme yang mendalam.

Renungan pendidikan juga menyuarakan pentingnya menghidupkan kembali ruh pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Bukan hanya metode sorogan atau bandongan, tetapi etos keikhlasan, kemandirian, dan kesederhanaan. Pendidikan yang membebaskan tidak hanya datang dari barat, tapi juga dari tradisi luhur bangsa ini yang terpinggirkan oleh kebijakan teknokratis.

Guru Nahdliyin-Marhaenis berdoa agar generasi muda tidak kehilangan arah. Di era media sosial dan viralitas yang dangkal, guru harus menjadi jangkar. Ia harus hadir sebagai pembimbing spiritual dan moral, bukan hanya pengawas ujian. Pendidikan adalah jalan panjang memanusiakan manusia, dan hanya guru yang menyadari kedalaman misi ini yang sanggup menjalaninya dengan tekun.

Dalam doa-doanya, guru sering menyebut nama-nama muridnya. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka memiliki potensi yang luar biasa. Ia mendoakan agar anak-anak itu tidak hanya pintar, tetapi juga berani, jujur, dan peduli. Agar mereka tidak hanya lulus ujian, tetapi juga lulus sebagai manusia yang bermartabat.

Renungan ini juga menyentuh aspek kebijakan. Bahwa pendidikan sejati tidak dapat dikelola dengan logika pasar semata. Pendidikan bukan bisnis, bukan proyek, dan bukan instrumen pencitraan. Ia adalah kebutuhan dasar bangsa. Doa guru adalah bentuk kritik paling dalam terhadap sistem yang kehilangan rohnya.

Guru Nahdliyin-Marhaenis berdoa agar nilai-nilai spiritual dan nasionalisme tidak bertabrakan, tetapi saling menguatkan. Bahwa menjadi santri dan nasionalis bukan kontradiksi, tetapi sintesis luhur. Dalam diri guru seperti inilah pendidikan Indonesia menemukan wajah sejatinya: religius, kebangsaan, dan emansipatoris.

Dalam renungan malamnya, guru juga meminta agar diberikan ketabahan. Ketabahan untuk terus mendidik meski gajinya kecil. Ketabahan untuk tetap tersenyum meski dihina karena hidup sederhana. Ketabahan untuk tidak menyerah, bahkan ketika institusi tempatnya bekerja tak memberi penghargaan.

Doa-doa ini bukan keluhan, tapi bentuk spiritualitas profetik. Guru mengadukan masalah kepada Tuhan, bukan untuk menghindari tanggung jawab, tapi untuk mendapatkan energi moral agar tetap bisa menjalankan tanggung jawab itu. Ia sadar bahwa menjadi guru adalah jalan hidup, bukan sekadar profesi.

Renungan guru juga berisi pertanyaan reflektif: “Sudahkah aku menjadi jembatan, bukan tembok?” Guru Nahdliyin-Marhaenis selalu ingin menjadi penghubung—antara anak dan ilmu, antara tradisi dan inovasi, antara bumi dan langit. Ia ingin agar kehadirannya membukakan jalan, bukan menutupnya.

Di akhir hari, guru hanya ingin satu hal: agar pendidikan tidak kehilangan arah. Agar semua upaya yang dilakukannya—mengajar, membimbing, mendoakan, menasihati—tidak menjadi sia-sia. Ia ingin murid-muridnya menjadi lebih baik darinya. Itulah doa tertinggi seorang guru: agar generasi berikutnya melampaui dirinya.

Doa dan renungan ini adalah napas panjang dari perjuangan sunyi. Ia tidak terdengar dalam debat-debat publik, tetapi justru menjadi penopang

yang tak kasat mata. Pendidikan Indonesia berdiri di atas doa-doa para guru yang terjaga di malam hari, merancang RPP dengan tangan gemetar, tetapi hati yang penuh cinta.

Doa guru bukan doa eksklusif. Ia adalah doa kolektif seluruh bangsa. Karena pendidikan bukan hanya urusan guru, tapi urusan kita semua. Dalam doa guru, kita menemukan refleksi tentang siapa diri kita sebagai bangsa, dan ke mana kita hendak menuju.

Dan dalam setiap akhir doa, selalu ada harapan: bahwa suatu hari nanti, pendidikan akan benar-benar menjadi ladang subur untuk tumbuhnya generasi pembebas, pemelihara bumi, penjaga nilai, dan pewaris peradaban. Sebagaimana para guru Nahdliyin-Marhaenis telah menapaki jalan sunyi ini, dalam hening yang penuh makna.

### **Mantra Nilai: “Berpijak pada Tanah, Menatap Langit”**

“Berpijak pada tanah, menatap langit” bukan sekadar metafora, melainkan sebuah mantra nilai yang mencerminkan posisi etik dan spiritual seorang guru Nahdliyin-Marhaenis. Ia bukan guru yang terlepas dari realitas rakyat, tetapi juga bukan yang kehilangan visi langit—visi moral, transendensi, dan keadilan. Tanah dan langit menjadi representasi antara dunia nyata dan dunia ideal, antara realitas sosial dan nilai-nilai luhur yang menjadi kompas kehidupan seorang pendidik.

Berpijak pada tanah berarti menyadari kompleksitas dunia nyata: kesenjangan pendidikan, disparitas wilayah, birokrasi yang lamban, ketidakadilan struktural, dan tantangan zaman digital. Guru yang berpijak di tanah tahu bahwa ia tidak sedang mengajar di ruang hampa. Ia mengenal nama-nama muridnya, memahami latar belakang keluarga mereka, bahkan turut merasakan kesulitan yang dihadapi masyarakatnya. Guru seperti ini hadir, bukan hanya mengajar, tetapi menghidupkan harapan.

Menatap langit berarti menjunjung tinggi cita-cita dan nilai. Guru tidak boleh puas hanya dengan rutinitas administratif dan capaian kognitif siswa. Ia harus tetap memiliki pandangan jernih tentang apa itu keadilan, kebermaknaan, dan kemerdekaan dalam pendidikan. Guru yang menatap

langit membawa spirit profetik: bahwa pendidikan adalah alat pembebasan, bukan sekadar transmisi informasi. Ia menjaga nilai ketika sistem sedang kehilangan arah.

Mantra ini lahir dari perjumpaan antara nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah dan semangat Marhaenisme. Aswaja mengajarkan tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal—keempatnya adalah laku keseimbangan. Marhaenisme memperkuat akar sosial dan keberpihakan kepada kaum lemah. Maka, guru yang menghayati keduanya akan menjadi sosok yang seimbang: tidak elitis, tidak ekstrimis, tetapi visioner dan membumi sekaligus.

Guru Nahdliyin-Marhaenis adalah cermin dari kesadaran bahwa pendidikan bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi laku kultural dan spiritual. Dalam setiap pertemuan dengan murid, ia tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga menyalurkan nilai: tentang kejujuran, empati, kerja keras, dan ketulusan. Ia bukan mesin pengajar, tapi penjaga ruh pendidikan.

Mantra nilai ini juga menyiratkan bahwa guru harus mengakar di lokalitasnya. Ia tidak bisa menjadi copy-paste dari sistem luar yang belum tentu sesuai. Ia harus menjadi pembaca konteks: memahami budaya lokal, bahasa ibu, dan pola komunikasi masyarakat. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang kontekstual. Maka berpijak pada tanah adalah keharusan epistemologis sekaligus aksiologis.

Namun, guru juga tidak boleh hanya terjebak pada tanah. Ia harus tetap menatap langit: membaca ilmu dari berbagai belahan dunia, memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan, dan mengembangkan pedagogi yang progresif. Guru harus memiliki orientasi masa depan, bukan nostalgia masa lalu. Ia harus menjadi jembatan antara kearifan lokal dan kecanggihan global.

Dalam konteks era VUCA dan Society 5.0, mantra ini semakin relevan. Ketika dunia berubah dengan cepat dan tidak pasti, guru harus menjadi penyeimbang. Ia tidak boleh terombang-ambing oleh tren, tetapi juga tidak anti-perubahan. Ia bersikap adaptif, namun tetap teguh pada nilai. Ia inovatif, tetapi tidak kehilangan arah moral.

Mantra ini juga mengandung pesan tentang integritas. Seorang guru yang berpijak pada tanah dan menatap langit tidak akan mudah tergoda oleh korupsi akademik, manipulasi nilai, atau politik identitas di sekolah. Ia tahu bahwa posisinya adalah sebagai penjaga moral publik. Tanggung jawab ini tidak ringan, tetapi mulia.

Dalam praksisnya, guru bisa menerjemahkan mantra ini melalui sikap konkret: membuat modul pembelajaran yang kontekstual, membimbing siswa secara utuh (bukan hanya nilai akademik), menanamkan nilai-nilai Pancasila secara hidup, bukan hanya lewat hafalan. Ia juga membangun komunikasi yang hangat dengan wali murid dan komunitas sekolah.

Menanamkan “pijak tanah – tatap langit” kepada murid adalah pendidikan karakter yang hakiki. Siswa diajak untuk mengenal dirinya, menghargai budaya dan keluarganya, namun juga diajak bermimpi, mencipta, dan memberi kontribusi pada dunia. Guru menjadi fasilitator spiritual dan intelektual yang menjembatani dua dunia ini.

Mantra ini juga dapat menjadi dasar evaluasi diri guru: apakah aku sudah cukup membumi? Apakah aku masih menatap langit? Apakah kelasku mencerminkan keadilan dan kemerdekaan? Refleksi ini penting agar guru tidak terjebak dalam zona nyaman atau kekakuan birokrasi.

Guru yang menjalankan mantra ini akan menjadi magnet moral di sekolahnya. Ia tidak memerlukan kekuasaan struktural untuk dihormati, karena nilai yang ia bawa menjadi sumber kewibawaan. Sekolah yang dipenuhi guru semacam ini akan menjadi ruang pembebasan: tempat di mana anak-anak tumbuh tanpa rasa takut, penuh semangat, dan penuh harapan.

Mantra ini juga menjadi pondasi dalam membangun komunitas guru Nahdliyin-Marhaenis. Komunitas yang tidak hanya berjejaring untuk pelatihan atau sertifikasi, tetapi juga untuk refleksi nilai, diskusi praksis, dan saling menguatkan dalam menghadapi tekanan struktural yang sering tidak manusiawi.

“Berpijak pada tanah, menatap langit” adalah manhaj. Sebuah metode hidup dan bekerja sebagai guru. Ia tidak datang dari diktat kementerian atau modul pelatihan, tapi dari pengalaman historis, kebijaksanaan kultural,

dan kesadaran spiritual yang dalam. Guru yang hidup dengan mantra ini akan tetap tegar meski dihipit zaman.

Dalam jangka panjang, pendidikan Indonesia akan sangat bergantung pada kesetiaan guru terhadap nilai-nilai seperti ini. Karena sistem bisa berganti, kebijakan bisa berubah, tetapi guru yang memiliki integritas dan visi akan tetap menjadi penentu utama wajah pendidikan bangsa.

Maka mantra ini harus diajarkan di LPTK, dikuatkan di komunitas, dan diwujudkan dalam kebijakan. Pendidikan Indonesia bukan hanya butuh kurikulum baru, tetapi butuh nilai lama yang dihidupkan kembali: keikhlasan, keberpihakan, dan kemerdekaan berpikir. Itulah langit dan tanah pendidikan kita.

Guru Nahdliyin-Marhaenis membawa harapan itu. Mereka tidak menunggu keadaan ideal, tapi menciptakan ruang ideal di tempat yang sempit. Mereka bukan guru yang sempurna, tetapi guru yang istiqomah. Dan dalam setiap langkahnya, mereka membisikkan mantra itu: berpijak pada tanah, menatap langit.

### **Doa-doa Pendidikan dari Para Ulama dan Proklamator**

Doa bukan hanya ritual, melainkan juga afirmasi nilai dan orientasi jiwa. Dalam dunia pendidikan, doa adalah jembatan antara harapan manusia dan kehendak Ilahi. Para ulama dan proklamator bangsa telah mengajarkan bahwa pendidikan sejati tidak cukup dengan kurikulum dan perencanaan, melainkan harus dibasahi dengan nilai, niat suci, dan doa-doa yang menyuburkan keikhlasan. Di sinilah pentingnya merefleksikan kembali doa-doa pendidikan dari tokoh-tokoh besar bangsa sebagai inspirasi bagi para guru Nahdliyin-Marhaenis.

KH. Hasyim Asy'ari dalam *adab al-'alim wa al-muta'allim* menekankan bahwa ilmu tanpa adab hanyalah ibarat cahaya yang membakar. Doa beliau yang sederhana namun dalam adalah: "Ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat dan diberkahi, bukan ilmu yang menyombongkan." Dalam doa ini tersirat nilai keikhlasan, antiarogansi, dan tujuan pendidikan sebagai

alat penghambaan, bukan sarana dominasi. Guru yang mengamalkan doa ini akan mengajar dengan hati, bukan sekadar dengan mulut.

Soekarno, sang proklamator, bukan hanya orator dan negarawan, tetapi juga seorang pembelajar spiritual. Dalam berbagai pidatonya, ia sering menyelipkan doa dan harapan bagi pendidikan Indonesia. Salah satu doanya yang terkenal adalah: “Semoga Tuhan selalu menyertai langkah kaum Marhaen untuk bangkit melalui ilmu.” Ini adalah doa ideologis, yang menjadikan pendidikan sebagai jalan perjuangan kelas tertindas menuju kemerdekaan batin dan sosial.

KH. Wahid Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama yang turut menyusun dasar negara, memiliki doa yang sangat relevan untuk konteks pendidikan hari ini: “Ya Allah, tanamkan dalam hati anak-anak kami cinta akan ilmu, adab, dan kebangsaan.” Doa ini menyatukan tiga dimensi penting: intelektual, moral, dan nasionalisme. Guru Nahdliyin-Marhaenis seyogianya mewarisi semangat ini—mengintegrasikan ilmu dengan cinta tanah air dan keluhuran akhlak.

Ki Hajar Dewantara menyatakan, “Setiap anak adalah cahaya, dan tugas pendidikan adalah menjaga cahayanya tetap menyala.” Meskipun ini bukan doa formal, kalimat ini adalah doa dalam bentuk prinsip. Ia menyiratkan bahwa guru harus mendampingi, bukan memadamkan; membimbing, bukan menindas. Maka, setiap kali guru melangkah ke kelas, sesungguhnya ia sedang berdoa agar mampu menjadi penjaga cahaya.

Gus Dur, dengan caranya yang jenaka dan bijak, pernah mengatakan, “Mendidik itu ya ngopeni, bukan nyuruh-nyuruh.” Ini pun sebuah doa. Doa yang lahir dari empati terhadap realitas pendidikan yang terlalu birokratis dan kehilangan ruh kemanusiaannya. Dalam konteks ini, guru diajak kembali menjadi pengasuh ruhani, bukan hanya pelaksana kurikulum.

Doa-doa ulama seperti KH. Ahmad Dahlan dan KH. Syamsul Arifin juga mewarnai pendidikan Indonesia. KH. Ahmad Dahlan sering memanjatkan doa agar guru-guru Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi juga ilmu untuk hidup setelah mati. Di sini, pendidikan

menjadi laku ibadah. Guru bukan hanya profesi, tetapi jalan menuju ridha Allah.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, banyak doa pendidikan disampaikan dalam bentuk syair dan puisi. Chairil Anwar, dengan puisinya “Doa”, menyuarakan kegelisahan anak bangsa: “Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut nama-Mu.” Ini adalah renungan eksistensial seorang anak muda dalam dunia yang kacau. Maka guru yang peka harus menyadari bahwa doa murid hari ini kadang terucap dalam diam, tangis, dan kebingungan.

Doa juga bisa ditemukan dalam tradisi pesantren yang penuh adab. Ketika santri membaca *Riyadush Shalihin*, *Ta’lim Muta’allim*, atau *Hikam Ibnu Athaillah*, di sana terselip ribuan doa pendidikan yang menguatkan niat, menghaluskan hati, dan menajamkan akal. Guru Nahdliyin-Marhaenis harus mewarisi kekayaan ini—bukan hanya dalam hafalan, tapi dalam penghayatan.

Doa bukan hanya disampaikan oleh tokoh besar. Petani di lereng gunung pun, ketika menyekolahkan anaknya, sering memanjatkan doa yang sederhana tapi dahsyat: “Semoga anakku pinter lan bener.” Kalimat ini mencakup keseluruhan misi pendidikan: menjadi cerdas dan bermoral. Guru harus sadar bahwa ia sedang menjawab doa-doa para orang tua yang mewakafkan hidup demi masa depan anaknya.

Dalam konteks pendidikan yang semakin digital dan mekanistik, doa menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh terputus dari Yang Mahatinggi. Dalam setiap klik, slide, dan evaluasi daring, guru tetap harus memelihara nilai spiritual. Itulah yang membedakan pendidikan manusiawi dari sekadar proses manajemen data.

Guru Nahdliyin-Marhaenis bisa mengembangkan praktik doa dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, memulai kelas dengan pembacaan syair hikmah, menyisipkan refleksi rohani dalam penilaian akhir, atau mengajak siswa menulis “doa masa depan” mereka. Ini bukan indoktrinasi, melainkan bentuk literasi spiritual yang membebaskan.

Doa juga bisa menjadi alat perlawanan. Dalam masa represi, para guru dan ulama memanjatkan doa sebagai pernyataan keteguhan hati. Seperti yang dilakukan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari ketika melawan kolonialisme. Maka, di era dominasi kapitalisme global, doa adalah bentuk perlawanan batin terhadap dehumanisasi pendidikan.

Setiap nilai luhur pendidikan lahir dari doa—doa orang tua, doa guru, dan doa siswa. Ketiganya harus disatukan dalam satu ruh kebangsaan. Maka, pendidikan Indonesia tidak akan tercerabut dari akar budaya dan iman, tetapi juga tidak tertinggal dari kemajuan zaman.

Praktik-praktik kontemplatif seperti *muhasabah*, *dzikir*, dan *tadarus* bisa dipadukan dalam pedagogi profetik. Guru tidak hanya mengisi kepala siswa, tetapi juga menyirami jiwanya. Inilah misi utama pendidikan Nahdliyin-Marhaenis: menghidupkan manusia seutuhnya.

Doa-doa dari para tokoh ini juga bisa menjadi materi ajar. Buku-buku teks bisa menyisipkan kutipan-kutipan reflektif yang memperkaya batin siswa. Pendidikan yang baik bukan hanya mentransfer konsep, tetapi juga menghidupkan jiwa bangsa melalui narasi dan doa.

Guru perlu membiasakan diri untuk tidak hanya membaca buku, tetapi juga merenungkannya dengan laku spiritual. Membaca doa bukan hanya ritual, tetapi latihan menjadi manusia utuh—yang sadar akan ketakterbatasan dirinya dan keagungan Tuhannya.

Dalam setiap rencana pelajaran, doa bisa menjadi pembuka dan penutup yang bukan basa-basi. Doa adalah “ruh kurikulum” yang membuat setiap pelajaran tidak kering dan tidak kehilangan arah. Ia menjadi penyejuk di tengah badai target dan administrasi.

Akhirnya, mari kita warisi doa-doa para pendahulu dengan kesadaran bahwa guru bukan hanya pewaris pengetahuan, tetapi juga penjaga nilai dan penyampai harapan. Dalam doa-doa itulah terletak kekuatan paling sejati dari profesi guru: sabar, istiqamah, dan penuh cinta.

### **Epilog: “Jalan Panjang Guru yang Tak Pernah Usai”**

Menjadi guru adalah jalan panjang, bukan sekadar profesi atau posisi fungsional dalam sistem pendidikan. Ia adalah pengabdian yang tak pernah selesai, karena ilmu tidak berhenti berkembang, dan manusia tidak berhenti belajar. Dalam tradisi Nahdliyin-Marhaenis, guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga penjaga nilai, pembentuk karakter, dan penuntun arah moral bangsa. Jalan ini sunyi, menanjak, sering tak terlihat hasilnya secara instan, namun tetap mulia karena keberlangungannya menyatu dengan sejarah.

Guru Nahdliyin-Marhaenis tidak berjalan di jalan yang datar dan mulus. Mereka harus melintasi zaman yang berubah cepat, menghadapi tekanan sosial, dan menavigasi realitas pendidikan yang sering timpang. Namun, mereka tetap teguh dengan nilai-nilai Aswaja—*tawazun*, *tasamuh*, *tawasuth*, dan *i’tidal*—serta semangat Marhaenis yang berpihak pada kaum kecil. Kombinasi ini bukan retorika, melainkan orientasi praksis yang membentuk arah pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

Jalan panjang guru adalah kisah perjuangan yang tidak hanya dicatat di rapor siswa, tetapi juga di hati masyarakat. Mereka hadir dalam sunyi—mengajar di pedalaman, membina di pesantren, menghidupkan komunitas. Mereka tidak selalu mendapat apresiasi materi, namun tetap istiqamah karena menyadari bahwa mendidik adalah bagian dari ibadah dan perjuangan. Sebagaimana para ulama dan proklamator, mereka sadar bahwa jalan ini adalah jalan pengorbanan.

Dalam sejarah bangsa, peran guru tak pernah absen. Ketika negara ini masih dijajah, guru-guru di pesantren dan madrasah menjadi penggerak kesadaran nasional. Mereka menyelipkan nilai kebangsaan dalam pelajaran tafsir dan fiqh. Ketika republik ini lahir, guru menjadi pilar utama dalam membentuk identitas bangsa melalui kurikulum dan keteladanan. Kini, di era disrupsi digital, guru tetap dituntut menjadi kompas moral dan intelektual yang bisa menjaga arah pendidikan agar tidak kehilangan jiwa.

Guru yang berjalan dalam semangat Nahdliyin dan Marhaenis adalah mereka yang tidak hanya mengejar kompetensi teknis, tetapi juga membangun sensitivitas sosial. Mereka memahami bahwa anak-anak dari keluarga petani, buruh, atau nelayan memiliki beban struktural yang berbeda. Maka, pendidikan harus menjadi jembatan pembebasan, bukan arena seleksi sosial. Mereka hadir dengan empati dan keberpihakan, bukan dengan standar mekanistik.

Jalan panjang ini juga menuntut kesetiaan terhadap nilai, bukan popularitas. Dalam dunia yang mulai mengukur kualitas guru dari konten TikTok atau ranking sertifikasi, guru Nahdliyin-Marhaenis tetap berdiri kokoh pada nilai-nilai luhur. Mereka boleh adaptif dengan zaman, namun tidak pernah menjual idealisme. Inilah keteguhan yang diwariskan dari tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, Soekarno, dan Ki Hajar Dewantara—bahwa pendidikan adalah perjuangan nilai, bukan sekadar jasa profesional.

Di tengah realitas dunia yang penuh distraksi, guru tetap menjadi pelita. Pelita yang mungkin kecil, namun cukup untuk menerangi ruang gelap ketidaktahuan dan kemiskinan makna. Ia tidak memaksa terang, namun menawarkan cahaya yang mengundang orang untuk melihat. Guru tidak menggurui, tetapi menghidupkan potensi; tidak memerintah, tetapi menumbuhkan martabat manusia.

Subbab ini menjadi refleksi bahwa setiap langkah guru adalah bagian dari sejarah peradaban. Ketika ia menulis di papan tulis, ia sedang menulis ulang nasib anak-anak bangsa. Ketika ia memotivasi siswa yang hampir putus sekolah, ia sedang menyalakan kembali mimpi-mimpi yang hampir padam. Ketika ia menyampaikan nilai toleransi, ia sedang menanam benih persatuan di tengah kebisingan intoleransi.

Epilog ini bukanlah akhir, tetapi undangan untuk melanjutkan perjalanan. Guru yang berjalan di jalan panjang ini tidak sendirian. Ada komunitas, ada jaringan, ada ruh perjuangan yang diwariskan. Semangat gotong royong dan kolaborasi harus menjadi kekuatan bersama untuk menghadapi tantangan pendidikan masa kini. NU, pesantren, dan komunitas pendidikan rakyat harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

Guru Nahdliyin-Marhaenis juga harus menjadi pembelajar abadi. Mereka harus terus membaca, menulis, berdiskusi, dan merenung. Pendidikan bukan produk jadi, melainkan proses terus-menerus. Maka, refleksi menjadi kunci agar langkah tidak hanya sibuk, tetapi juga terarah. Guru yang merenung adalah guru yang menyadari bahwa ia sedang membentuk masa depan bangsa.

Dalam konteks ini, penting kiranya menegaskan bahwa pendidikan harus kembali ke akar—yakni nilai spiritual, sosial, dan keadaban publik—namun tidak boleh menolak masa depan. Pendidikan harus melompat ke masa depan dengan pondasi yang kuat. Digitalisasi, AI, dan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari jati dirinya, justru harus menjadi alat untuk memperkuat nilai.

Kita berharap bahwa pada tahun 2045, ketika Indonesia genap 100 tahun, guru-guru Nahdliyin-Marhaenis tetap berdiri di garis depan perubahan. Mereka adalah pelaku utama dari kemajuan yang berbasis keadaban, bukan hanya kemajuan berbasis angka. Mereka adalah penjaga hati bangsa, penggerak budaya gotong royong, dan pengawal nilai-nilai luhur dalam sistem yang semakin rasional namun sering kehilangan ruh.

Perjalanan ini tidaklah mudah. Banyak guru yang lelah, kecewa, bahkan menyerah. Namun bagi mereka yang bertahan, ada kebahagiaan yang tidak tergantikan: melihat satu siswa miskin akhirnya menjadi sarjana, melihat satu anak pemalu akhirnya bisa berbicara di depan umum, atau melihat satu komunitas sekolah berubah menjadi lebih humanis dan berdaya.

Maka, biarlah sejarah mencatat bahwa di tengah kekacauan zaman, masih ada guru-guru yang setia menyalakan pelita. Mereka adalah guru Nahdliyin-Marhaenis. Mereka tidak sempurna, tapi mereka tidak berhenti berjuang. Mereka bukan pahlawan dengan lencana, tetapi pahlawan dengan ketekunan dan keikhlasan.

Semoga buku ini menjadi napas panjang dari perjuangan para guru yang terus berjalan di jalan yang sunyi namun mulia ini. Jalan yang

mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya mengubah hidup individu, tetapi juga membentuk karakter bangsa.

Sebagai epilog, mari kita tutup perjalanan ini dengan keyakinan bahwa perubahan sejati lahir dari pendidikan yang bernilai. Dan pendidikan yang bernilai hanya mungkin jika ada guru-guru yang bersedia menapaki jalan panjang yang tak pernah usai—jalan yang dituntun oleh cinta, iman, dan dedikasi.

Karena guru sejati tidak pernah selesai mengajar, meskipun kelas telah kosong. Ia tetap hadir dalam doa-doa murid, dalam nilai-nilai yang tertanam, dan dalam wajah-wajah masa depan yang lebih manusiawi.



# Glosarium

## Adaptif

Kemampuan individu atau sistem untuk menyesuaikan diri secara fleksibel dengan perubahan lingkungan atau tantangan baru.

## Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah)

Paham keislaman moderat yang berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijthihad ulama, dengan pendekatan tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil).

## Digital Divide

Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat, wilayah geografis, atau kelas sosial.

## Disrupsi

Kondisi terganggunya sistem atau tatanan yang mapan karena munculnya inovasi baru, terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi.

## Emansipatoris

Bersifat membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan, baik secara struktural maupun kultural.



## **Falsafah**

Dasar pemikiran yang menjadi pijakan konseptual dalam memahami dan menjelaskan fenomena kehidupan atau kebudayaan.

## **Guru Nahdliyin**

Guru yang beridentitas atau berlatar belakang nilai-nilai Nahdlatul Ulama (NU), terutama dalam hal religiusitas, sosialitas, dan kebangsaan.

## **Inklusif**

Sikap terbuka dan menerima keberagaman, serta memastikan semua kelompok mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

## **Islam Nusantara**

Pendekatan keislaman yang ramah budaya lokal, berakar pada sejarah, tradisi pesantren, dan moderasi khas Indonesia.

## **Kebangsaan**

Kesadaran kolektif sebagai bagian dari bangsa, mencakup cinta tanah air, toleransi, dan komitmen terhadap keutuhan NKRI.

## **Keadilan Sosial**

Prinsip utama dalam Pancasila yang menekankan pemerataan kesempatan, perlakuan yang adil, dan pembelaan terhadap kaum lemah.

## **Keteladanan**

Sikap dan perilaku yang dapat menjadi contoh positif dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial.

## **Literasi Digital**

Kemampuan memahami, menggunakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital secara etis dan produktif.

## **Marhaenisme**

Ideologi yang digagas Soekarno, berakar pada pembelaan terhadap rakyat kecil (kaum marhaen), dengan nilai keadilan, kemandirian, dan keberpihakan sosial.

## **Moderasi Beragama**

Pendekatan dalam menjalankan ajaran agama secara adil dan seimbang, menjauh dari ekstremisme, serta menghormati keberagaman.

## **Multikulturalisme**

Pandangan hidup yang mengakui, menerima, dan mengapresiasi keragaman budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

## **Pendidikan Profetik**

Model pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai kenabian seperti humanisasi, liberasi, dan transendensi untuk membentuk manusia berkarakter.

## **Pesantren**

Lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia yang berperan penting dalam dakwah, pendidikan moral, dan pemberdayaan masyarakat.

## **Santri Pejuang**

Istilah untuk menggambarkan guru atau pelajar yang menjalankan fungsi keilmuan sekaligus perjuangan sosial dan kebangsaan.

## **Social Justice (Keadilan Sosial)**

Konsep distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara adil dalam masyarakat, seringkali menjadi landasan dalam kebijakan dan pendidikan kritis.

## **Society 5.0**

Konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia, mengintegrasikan teknologi canggih dengan solusi sosial dan etika.

## **Transformasional**

Bersifat mengubah secara mendasar, baik dalam cara berpikir, sistem nilai, maupun struktur sosial.

## **Toleransi**

Sikap menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada pihak lain.

## **VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)**

Istilah yang menggambarkan dunia yang cepat berubah (volatile), penuh ketidakpastian (uncertain), kompleksitas (complex), dan ambiguitas (ambiguous), menjadi tantangan besar dalam pendidikan dan kepemimpinan.

# Daftar Pustaka

- [1] A. Abdullah, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- [2] A. Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.
- [3] A. Giddens, *Sociology*, 7th ed. Cambridge: Polity Press, 2013.
- [4] B. Hargreaves and A. Fullan, *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press, 2012.
- [5] D. A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
- [6] D. K. Emmott, "Society 5.0 and Education," *J. Future Educ.*, vol. 11, no. 1, pp. 20–33, 2022.
- [7] E. D. Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- [8] F. Ihsan, "Marhaenisme dalam Pemikiran Politik Soekarno," *J. Sos. Politik*, vol. 5, no. 1, pp. 22–31, 2021.
- [9] F. Zakiyuddin, "Aswaja sebagai Modal Sosial dalam Pendidikan Multikultural," *J. Multikultur Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 44–57, 2020.
- [10] H. A. Mukti, "Literasi Digital sebagai Strategi Pendidikan Emansipatoris," *J. Literasi & Teknologi Pendidikan*, vol. 10, no. 1, pp. 10–25, 2023.
- [11] H. Nashir, *Nahdlatul Ulama dan Wacana Kebangsaan*. Jakarta: LKiS, 2007.



- [12] H. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- [13] I. Wibowo, "Kebijakan Pendidikan Indonesia dalam Konteks VUCA," *J. Manajemen Pendidikan*, vol. 14, no. 2, pp. 100–114, 2022.
- [14] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- [15] J. Dewey, *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916.
- [16] K. Fata, "Relevansi Marhaenisme dan Islam Kultural," *J. Pemikiran Islam dan Kebudayaan*, vol. 4, no. 2, pp. 30–42, 2019.
- [17] K. Rahmat, "Pesantren dan Transformasi Sosial," *J. Pendidikan Islam Nusantara*, vol. 6, no. 1, pp. 55–70, 2021.
- [18] M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika dalam Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- [19] M. Latif, "Literasi Kritis dan Emansipasi Sosial," *J. Pendidikan Progresif*, vol. 12, no. 3, pp. 190–203, 2023.
- [20] M. Millah, *Pendidikan Transformatif Berbasis Spiritualitas dan Nilai Lokal*. Malang: UIN Press, 2020.
- [21] M. Syafi'i, "Aswaja dalam Perspektif Pendidikan Islam," *J. Pemikiran Keislaman*, vol. 11, no. 1, pp. 12–25, 2022.
- [22] M. Suyanto, *Literasi Digital untuk Pendidikan Abad 21*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- [23] N. Mulyadi, "Digitalisasi Sekolah: Tantangan dan Strategi Guru," *J. Teknologi dan Pembelajaran*, vol. 8, no. 2, pp. 45–58, 2022.
- [24] P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 2005.
- [25] Q. Musthofa, "Menjadi Guru Ideologis di Tengah Krisis Moral," *J.*

*Pendidikan Karakter*, vol. 13, no. 1, pp. 77–90, 2023.

- [26] R. S. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2001.
- [27] S. Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- [28] S. Haris, “Pendidikan Politik bagi Generasi Milenial,” *J. Sos. Politik UGM*, vol. 7, no. 2, pp. 33–46, 2023.
- [29] U. Latifah, “Islam, Digitalisasi, dan Transformasi Pendidikan,” *J. Edukasi Islam Digital*, vol. 4, no. 1, pp. 50–65, 2022.
- [30] Y. Heryanto, *Pendidikan Profetik: Membangun Guru dan Sekolah yang Membebaskan*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.



# Biografi Penulis



Dr. Andi Hermawan, M.Pd, Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 April 1977. Beliau adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan tanggung jawab. Sejak kecil, dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan matematika.

Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang, yang diselesaikannya pada tahun 1995. Minat yang kuat dalam bidang ekonomi dan akuntansi membawanya untuk melanjutkan studi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang, dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E., Ak.) pada tahun 1999. Pada tahun 2014, ia berhasil menyelesaikan Program Sarjana Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Timbul Nusantara – IBK Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mengantarkannya untuk mengambil jalur kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Ia menyelesaikan Program Magister Administrasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2019 dan meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.). Konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas akademik dan profesional dibuktikan dengan pencapaian tertinggi berupa gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Manajemen Pendidikan dari institusi yang sama pada tahun 2022.



Dalam karier profesional telah mengabdikan sebagai Guru pada SMK PGRI 2 Cibinong, Kabupaten Bogor sejak tahun 1999 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Selain itu, beliau juga aktif di dunia akademik sebagai Dosen NIDK pada Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, tempat beliau berbagi pengalaman dan keilmuan kepada para mahasiswa pascasarjana.

Dalam kehidupan pribadi, beliau menikah dengan Amalia Feryanti Salasa dan dikaruniai seorang putri yang bernama Azizah Luckyana Mawadda. Keluarga kecil ini menjadi sumber inspirasi dan dukungan utama dalam perjalanan hidup dan kariernya. Selain aktif mengajar, juga dikenal sebagai penulis buku, peneliti, dan pembicara dalam berbagai forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Fokus keilmuannya meliputi manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, pendidikan vokasi, dan literasi digital guru. Publikasinya telah banyak tersebar di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus), dengan lebih dari 1.000 sitasi Google Scholar dan h-index 15 per 17 April 2025.

Komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Indonesia, terutama dalam memperkuat mutu SMK dan mendorong kepemimpinan digital di sekolah, menjadi semangat utama dalam perjalanan akademik dan pengabdianya hingga kini..

■ Urgensi

# Menjadi Guru Nahdliyin Marhaenis di VUCA dan Society 5.0



“Menjadi Guru Nahdliyin-Marhaenis” bukan sekadar istilah ganda yang romantis atau simbolik. Ia adalah identitas ganda yang saling menguatkan. Seorang *guru Nahdliyin* adalah penjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara, penanam nilai Aswaja yang penuh rahmah, tawassuth, tawazun, dan tasamuh. Sedangkan *guru Marhaenis* adalah pendidik yang berpihak pada kaum kecil, pembela keadilan sosial, dan pelaku pendidikan pembebasan sebagaimana diamanatkan oleh Bung Karno. Keduanya, jika berpadu dalam satu jiwa pendidik, akan membentuk sosok transformasional yang tidak hanya mengajar, tetapi juga **mencerahkan, membebaskan, dan membangun bangsa dari akar rumput.**

Buku ini disusun sebagai respons terhadap tiga krisis mendasar dalam pendidikan kita hari ini: krisis ideologis, krisis kebangsaan, dan krisis transformasi guru dalam menghadapi era digital yang sarat artificial intelligence namun kerap kehilangan arah moral. Guru—yang seharusnya menjadi *benteng peradaban*—justru sering kali terjebak dalam rutinitas administratif, tuntutan kurikulum, dan tekanan performa, hingga kehilangan kedalaman makna dan arah perjuangannya.



**INSIGHT  
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025  
● [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)  
☎ 0851-5086-7290

Pendidikan

+17

ISBN 978-634-96264-3-9



9 786349 626439